

SOSI OLOGI KEHI DUPAN

FRAGMEN-FRAGMEN TEORETIK

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SOSI OLOGI KEHI DUPAN

FRAGMEN-FRAGMEN TEORETIK

APRINUS SALAM


gampang
bukubudaya

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Salam, Aprinus/Sosiologi Kehidupan
Yogyakarta: Gombang Buku Budaya

SOSIOLOGI KEHIDUPAN
© Aprinus Salam

Kurator: Innezdhe Ayang Marhaeni
Desain Isi: Afaf El Kurniawan
Desain Sampul: Karina Larasati
Lukisan Sampul: Mutiara Arum KS

Diterbitkan oleh **Gombang Buku Budaya**
Perum Mutiara Palagan B5 Sleman-Yogyakarta 55581
Website: www.penerbitgombang.com
Email: gombangbukubudaya@gmail.com
Kontak: 0856-4303-9249

Cetakan Pertama, September 2020
xxiv + 304 hlm. 14 x 21 cm

ISBN : 978-623-7761-03-7

Jika Anda mendapati buku ini dalam keadaan rusak, halaman terbalik, atau kosong, silakan kirim kembali ke alamat kami di atas.

BAIT-BAIT PERSEMBAHAN

MEMBUAT MAKALAH (1)

Mengambil ranting dan daun
Pada halaman yang tak berpagar
Aku tahu, itu rumahmu
Demikianlah, aku termangu di depan pintu
Berharap ada tamu yang datang

Maka tikar pun digelar
Kurapikan pakaianku
Duduk berbasah desah

Jangan lupa menyan dan dupa
Secangkir kopi panas dan asap yang menyengat
Menyambung kata-kata
Yang hampir lepas
Dari pohonnya

Dari mana aku harus memulai

MEMBUAT JUDUL (2)

Enggak tahulah, entah mana yang asin
Entah mana yang asam
Entahlah
Kucomot saja kata-kata itu
Dari dapur di samping rumahmu

Kuambil, kutata di rak lemari
Kusandingkan dengan selempang kayu
Sambil kubaca kembali
Dengan keraguan
Perasaan gaduh itu terus saja bersemai
Gerimis pun tertahan

Jadilah, maka jadilah
Entah apapun
Berharap engkau tertarik
Entah pahit
Entah pedas
Engkau yang tahu

Dan hujan itu pun turun

MEMBUAT PENGANTAR (3)

Terbayang jalan-jalan tak bertapak
Hutan itu seperti milik kita
Pintu keluar yang manakah akan dituju

Kulalui nama-namamu, sambil memilah daun-daun
Kutancapkan ranting di bilikmu

Aku basahi tanah dengan air mata
Agar huruf-huruf bertumbuhan
Bercabang hingga angkasa

Kembali kuingat nama-nama
Tersembunyi di antara rimbun pohon

Dengan mata terpejam dan aroma asap
Pencarian telah dimulai, untuk sebuah tanda tanya

MERUMUSKAN MASALAH (4)

Sudah kususun ranting-ranting
Berlapis daun dan sebilah pisau

Aku tak tahu apakah pisauku tajam

TINJAUAN PUSTAKA (5)

Buku-buku masih tertata rapi, tak ada yang bisa aku ingat
Aku buka sebuah Quran, seorang ulama menyuruhku untuk mengutip

Aku buka Injil, seorang tua berhidung mancung memintaku untuk mengutip

Aku buka Taurat, Weda, Tripitaka, aku buka semua buku,
semua orang memintaku untuk mengutip

Aku ambil daun dan ranting kering
Aku makan catatanku

LANDASAN TEORI (6)

Ranting itu telah tumbuh
Daunnya membasah

Terpaksa hanya kubuat catatan kaki:

Bagaimana berterimakasih kepada huruf
Juga simbol-simbol dan sejumlah pengertian
Kepada mereka yang telah mematahkan ranting
dan merangkai daun-daun
Bagaimana berterimakasih kepada dirimu
Ketika kata-kata tak pernah lengkap menyampaikan pesan
Telah kulantunkan ayat-ayat ke dalam diriku
Telah kukutip hadis-hadis yang bersaksi

METODE (7)

Kembali kuasah pisau itu
Ranting-ranting menjadi runcing
Melubangi daun-daun
Serta potongan-potongan yang tak rapi

PEMBAHASAN (8)

Apa yang bergerak di kepala, atau menari
ingatan yang samar,
matahari hilang dan muncul
daun daun kembali melepuh
bersama percikan air dan masa lalu yang tidak diketahui
di mana jejaknya

Kisah-kisah pun berhamburan,
Sriwijaya tenggelam, Singasari terbakar
Majapahit sirna. Ribuan rumah, jutaan nyawa

Siapakah kamu yang duduk bersila
dalam terik dan hujan yang luruh
tikar pun semakin lusuh

Kini, aku duduk dalam sebuah impian, rumah berjejal
dinding lapuk dan lukisan yang tergantung
meja makan telah bergeser ke teras belakang
kakinya tanggal sebelah, tergeletak sepi

Kubuat catatan kaki itu;
Di pinggir jalan dekat toko bunga
seorang anak yang tak pandai mengeluh.
mengusap dahinya, mengumpulkan sobekan kertas
koin-koin berjatuhan dari mobil yang lalu lalang
debu-debu berubah warna menghitam

KESIMPULAN (9)

Aku tahu, apa pun yang aku katakan tentang kamu
Bukan itu maksudmu
Tak pernah ada yang sampai

Tapi di rumah mana aku akan tidur
Jika ranting dan daunnya telah lapuk

DAFTAR PUSTAKA (10)

Kembali aku rapikan ranting dan daun
Bersama heran, kuurutkan nama-nama
Entah ke mana, namamu tak ada dalam daftar

CATATAN PENGANTAR

Teori sosiologi awalnya adalah ilmu yang mencoba mempersoalkan, menganalisis, memaknai, atau bahkan mengeksplorasi berbagai masalah kemasyarakatan, dengan menempatkan dialektika individu dan masyarakat sebagai poros kajian. Namun, dalam perkembangannya, teori atau ilmu sosiologi berkembang dalam varian-varian yang lebih spesifik, misalnya sosiologi ekonomi, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi budaya, sosiologi sastra, sosiologi bahasa, dan sebagainya.

Bahkan kemudian, ilmu ini mengerucut lagi seperti sosiologi keluarga, sosiologi pakaian, sosiologi perumahan, sosiologi pemuda, sosiologi makanan, sosiologi pariwisata, dan seterusnya. Pengerucutan itu memperlihatkan bahwa daya eksplorasi terhadap jawaban dan masalah semakin dalam dan semakin khusus. Hal itu disebabkan oleh berbedanya titik konsentrasi objek materialnya.

Salah satu benang merah yang mempertemukan titik sosiologisnya adalah adanya manusia (individu/ subjek) yang menjadi pusat relasi dengan berbagai hal di luar dirinya. Dengan demikian, jika dibayangkan dalam

peta makro sosiologi, dengan menghubungkan ulang berbagai ilmu yang semakin spesifik adalah berbagai upaya yang mencoba dan memaknai manusia dan kemanusiaan, baik secara sinkronis maupun diakronis, di dalam konteks kemasyarakatannya.

Saya mencoba menyambung titik-titik benang merah tersebut dengan menyebutnya sebagai “mengkaji dan menganalisis perjalanan hidup subjek/individu/manusia”. Subjek diproyeksi dari awal kehadirannya, memasuki balita dan remaja, dewasa, hingga pada masa-masa lebih lanjut. Tidak ada objek material khusus yang secara langsung saya analisis, selain saya membayangkan perjalanan hidup sendiri, para sahabat dan kenalan, juga berbagai masyarakat yang pernah saya perhatikan, atau saya berdomisili di dalamnya.

Kehidupan adalah suatu perjalanan. Ketika subjek hadir di muka bumi, di dalam lingkungan masyarakatnya, ia telah disergap oleh sekian banyak tuntutan, peraturan, dalam kuasa struktur dan tatanan kehidupan. Karena subjek belum berpengalaman dan memiliki hasrat, subjek dipasok dalam berbagai hal sebagai bekal untuk kehidupan lebih lanjut. Namun, hal signifikan yang kelak harus dihadapi subjek adalah permainan dan politik kehidupan itu sendiri. Subjek tersandera dalam berbagai kontestasi ideologi dan berbagai tujuan kehidupan lainnya.

Dalam prosesnya, saya sangat terbantu dengan cerita-cerita dalam karya sastra ataupun film. Beberapa adegan dan fragmen saya jadikan semacam data tak langsung, walaupun dalam praktiknya, berbagai kejadian

tersebut juga dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ruang kultural yang saya bayangkan dan menjadi bagian dari pengalaman hidup saya adalah masyarakat dan budaya Jawa, khususnya Yogyakarta.

Sebagai buku yang memakai judul sosiologi, harus saya akui bahwa di banyak tulisan dalam buku ini ada pengaruh dalam paradigma marxisme dan pascamarxisme, walaupun hal itu tidak secara ketat saya pegang. Karena banyak hal dari pemikiran atau teori marxisme dan pascamarxisme tidak sepenuhnya mampu memuaskan terutama tentang pencariannya terhadap subjek autentik/radikal. Memang, pada titik tersebut, khususnya pascamarxisme, berhasil mengembalikan substansi kemanusiaan hingga titik paling radikal. Akan tetapi, temuan itu seolah memposisikan subjek dalam posisi terlepas dari konteks kehadirannya sebagai manusia. Pascamarxisme memang tidak berpretensi menjawab atau bertanya *The Real* yang menyebabkan manusia hadir di dunia.

Jika pemikiran pascamarxisme seperti sebuah ruang yang ada kanan kirinya, ada atas bawahnya, saya mengandaikan ruang atas bawah adalah ruang-ruang “dalam” yang tidak cukup banyak mendapat perhatian dalam tradisi marxisme, seperti nafsu, hasrat, cinta, benci, sayang, yang dikembangkan oleh pemikir lain, dalam ruang yang sama.

Ini terkait dengan pilihan kata kehidupan dalam frasa sosiologi kehidupan. Saya tidak menempatkan subjek sebagai objek tanpa jiwa, tanpa Ruh, tanpa hati nurani. Subjek yang saya bicarakan adalah subjek yang

memiliki energi hidup, subjek yang berpikir, subjek yang memiliki rasa sayang, benci, dan cinta. Pemikir marxisme dan pascamarxisme terlalu bersemangat melawan ideologi dominan yang menyebabkan manusia dan kemanusiaannya hilang dalam cengkeraman ideologi dominan tersebut.

Mungkin karena saya sendiri tercengkeram dalam satu “keyakinan tertentu”, saya sering bertanya; lantas mau apa dan ke mana itu subjek radikalnya Zizek? Jika subjek radikal diposisikan untuk berhadapan dengan kekuasaan dominan dan hegemonik, kehidupan seperti apa yang akan dibangun dan dijalankan. Seberapa banyak subjek autentik yang hadir sehingga dapat dianggap mampu memberikan resistensi. Apalagi, tidak ada negara yang dengan suka rela membiarkan subjek-subjek autentik berkembang hingga ke tataran yang bisa dianggap sebagai musuh negara.

Kalau cuma sekadar tindakan-tindakan heroik untuk meramaikan panggung sosial dan politik, tentu tidak ada masalah. Akan tetapi, itu tidak membawa kita pada persoalan lain yang dihadapi semua manusia, yakni ke mana kita melangkah setelah kehidupan. Pada taraf ini, banyak ilmu sosial tidak mengeksplorasi lebih lanjut kehidupan setelah kehidupan (realitas kematian). Padahal, kematian, runtuhnya negara, bubarnya masyarakat, cepat atau lambat adalah kenyataan itu sendiri.

Pemilihan frasa sosiologi kehidupan, frasa itu mengandaikan sosiologi sebagai sudut pandang formal dan kehidupan subjek tertentu sebagai sasaran atau

objek materialnya. Kehidupan mengasumsikan suatu kumpulan organisme yang hidup, tumbuh-berkembang, dan bergerak. Jika itu dibayangkan sebagai manusia, dapat diketahui karena hal itu menjadi pengalaman hidup bersama. Organisme kehidupan itu bukan saja sekadar tumbuh-berkembang, tetapi juga melakukan tindakan perasaan, tindakan pikiran, dan tindakan aktivitas sebagai praktik hidup.

Dalam konteks tersebut, ada beberapa tulisan yang mempermasalahkan berbagai kriteria dan indikator subjek yang dicari dan dibutuhkan. Kita juga perlu punya bandingan bagaimana ideologi, keyakinan, pemikiran, atau bahkan sekadar wacana mencoba membangun dan mengkriteriakan subjek. Sebagai misal, di dalam budaya Jawa ada yang disebut sebagai kesatria. Apakah kesatria merupakan subjek yang dianggap memenuhi idealitas masyarakat Jawa? Bagaimana keberadaan kesatria dimungkinkan dan didapatkan? Apakah kesatria itu bisa disamakan atau disetarakan dengan subjek etik?

Dalam Agama Islam, dalam mazhab dan silsilah yang berbeda, terdapat apa yang disebut sebagai subjek sufi. Dalam situasi yang berbeda, tetapi dalam makna yang setara, sebenarnya subjek sufi hampir sama dengan subjek radikalnya pascamarxisme. Itulah sebabnya, subjek sufi memilih untuk “mengisolasi” dirinya sebagai jawaban dan resistensi terhadap berbagai masalah kehidupan yang dihadapi. Subjek sufi memposisikan sebagai subjek yang asing di jalan sunyi. Pada abad ke-7 hingga ke-9, di Andalusia, sufisme sempat menjadi gerakan kultural, politik, dan sosial sebagai perlawanan

terhadap rezim otoriter yang berkuasa. Subjek-subjek berkelompok dan hidup sederhana/miskin di pinggir-pinggir halaman masjid.

Kalau mau berkiblat pada kesubjekan nabi-nabi, maka kemudian disebut sebagai subjek profetik. Apakah subjek profetik bisa dijadikan jawaban terhadap berbagai masalah sosial yang sedang dan akan kita hadapi. Mengikuti Kuntowijoyo, subjek profetik adalah subjek yang berusaha menegakkan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Bagaimana hal-hal tersebut bisa dikelola sebagai satu sistem kehidupan. Masyarakat seperti apa yang kita bayangkan sebagai implikasi dari gerakan profetik tersebut.

Kadang-kadang, mungkin sekali dua, dalam keseharian kita pernah berdiskusi. Manusia seperti apa yang bisa dianggap paling ideal? Jawaban pun bertebaran sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan masing-masing. Tentu kita tahu tidak ada jawaban yang orisinal. Setiap jawaban terbingkai dalam satu konstruksi pengetahuan. Padahal, pengetahuan dan kekuasaan merupakan partner terselubung yang berkerja secara sistematis. Jadilah apa yang kita katakan tentang manusia ideal tersebut sesuai dengan pemenuhan kekuasaan tertentu yang disokong atas nama ilmu dan pengetahuan.

Salah satu contoh yang sering didengungkan, manusia ideal adalah manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, orang tua, dan masyarakat semua. Pertanyaannya, apa batas-batas sesuatu disebut manfaat, manfaat dalam pengertian apa? Apa itu nusa

dan bangsa? Manfaat apa yang diperlukan oleh nusa dan bangsa? Manfaat seperti apa yang dibutuhkan agama? Bagaimana cara kemanfaatan itu? Situasi seperti apa yang disebut sebagai manfaat? Apakah setiap situasi itu sama sehingga ada jenis kemanfaatan yang bisa disepakati bersama? Bagaimana hal itu dimungkinkan?

Begitu banyak pertanyaan, begitu sedikit jawaban. Akan tetapi, akan lebih fatal jadinya kalau kita tidak bertanya. Biarlah kita bertanya terus, walau belum ada jawaban yang cukup.

Dalam buku ini terdapat 51 tulisan. Setiap tulisan merupakan fragmen-fragmen teoretik yang berdiri sendiri, tetapi setiap tulisan merupakan rangkaian dari keseluruhan gagasan tentang sosiologi subjek dalam posisinya sebagai individu, atau sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara. Terdapat 5 tulisan dalam buku saya *Biokultural, Dari Fantasi Kerakyatan hingga Menolak Identitas* (2020), yang setelah sedikit saya revisi, saya pakai kembali untuk melengkapi alur diskusi.

DAFTAR ISI

BAIT-BAIT PERSEMBAHAN__	V
CATATAN PENGANTAR__	XIII
DAFTAR ISI__	XXI

STRUKTUR YANG MENUBUH

KUASA STRUKTUR__	3
TATANAN SIMBOLIK__	8
KUASA BENDAWI__	13
KEWAJIBAN DAN HAK__	17
KESEPAKATAN ARBITRER__	22
TATANAN KEKUASAAN__	26
TUBUH YANG TERBELAH__	31

JALUR HIDUP DAN KEMATIAN

JALUR HIDUP DAN NASIB__	37
DIALEKTIKA MODAL-MODAL__	41
JUAL BELI SIMBOL__	49
GAYA HIDUP DAN <i>NGGAYA</i> __	54
KELAS, STATUS, DAN HARGA DIRI__	58
NAFSU DAN KEJAHATAN__	63
MIGRASI SOSIAL__	68
MAGISME KEHIDUPAN__	72
KUASA KEMATIAN__	76

DOMINASI DAN NEGOSIASI

MENGUJI IDEOLOGI__	85
DOKSA APA ATAU SIAPA?__	91
INTELEKTUAL PROGRESIF__	96
PENGELOMPOKAN SEJARAH__	101
PENJARA IDEOLOGI__	106
ESTETISASI IDEOLOGI__	110
KONFIGURASI SELERA__	114
NEGOSIASI DAN INTERSEKSI__	119
SUBJEK POPULER__	123

POLITIK KEHIDUPAN

POLITIK KEHIDUPAN__	131
POLITIK PERASAAN__	135
POLITIK PIKIRAN__	139
POLITIK TINDAKAN__	143
TINDAKAN RADIKAL__	147
MOMEN KEKOSONGAN__	151
EKSPRESI TINDAKAN__	155

WARGA DAN MASYARAKAT

BATAS KEWARGAAN__	161
KEKUATAN WARGA__	169
MENGUMPAT, MEMAKI__	173
MENCANDUI KRITIK__	177
ORANG ANEH__	181
MASYARAKAT DISTOPIA__	186

MASYARAKAT POSGENDER__190
MASYARAKAT POSHEGEMONI__194
KERJA SAMA__198
KEPEKAAN DAN AKAL SEHAT__202

WARGA DAN NEGARA

POLITIK KEDAULATAN__209
DEMOKRASI DAN DISENSUS__213
TUGAS DAN KERJA__218
TINDAKAN POLITIK__222
KELUAR MASUK IDENTITAS__227
POLITIK KOMUNITAS__232
PASUKAN CADANGAN__236
SETELAH MERDEKA__240
MEMBELOKKAN SEJARAH__244

MENEMUKAN SUBJEK

DIRI DAN PRIBADI__251
CINTA DAN BENCI__257
RUANG TOLERANSI__263
PERIHAL SPONTANITAS__267
SUBJEK YAKIN__271
SUBJEK ETIK__277
KE ARAH SUBJEK PROFETIK__281
SUBJEK TULUS__287
PEKERJA ROHANI__291

DAFTAR PUSTAKA__	295
BIODATA PENULIS__	304

STRUKTUR DAN TATANAN

KUASA STRUKTUR

Pemahaman bahwa kehidupan adalah suatu struktur sudah banyak direvisi, bahkan ditolak. Namun, tetap saja hingga hari kita hidup dalam suatu struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan berbagai kondisi struktural lainnya. Bahkan hingga ke ruang terkecil pun, dalam skala dan dimensi yang berbeda terkondisikan oleh struktur. Dalam sebuah rumah, misalnya, ada Simbah, Orang Tua, dan Anak, yang berkedudukan secara berbeda. Dalam organisasi dan kelembagaan pun terdapat kedudukan yang berbeda. Bahkan identitas kita sebagian besar ditentukan oleh apa yang disebut sebagai struktur sosial (lihat Lin, 2001:34).

Kita tidak dapat memilih di mana kita hadir (lahir), dengan orang tua yang mana, suku apa, dan kapan. Setelah mendapat berbagai cerita, belakangan kita mengetahui bahwa kita lahir di suatu desa miskin, berorang tua guru yang kebetulan beragama Islam, suku Jawa, dengan catatan waktu; hari, tanggal, bulan, dan tahun. Bahkan, pengetahuan dan budaya tertentu masih menambahkan dengan identifikasi hari dan saat baik atau tidak, bagaimana situasi semesta pada waktu itu.

Identifikasi kompleksitas kelahiran dan keberadaan kita tersebut adalah identifikasi posisi dan relasi, dalam rentang ruang dan waktu. Identifikasi adalah kriteria pembedaan dan penyamaan tentang sesuatu (benda

dan non-benda), sedangkan penamaan adalah hasil dari identifikasi. Sekumpulan konsep, pengertian dan penamaan itu melahirkan pengetahuan dan ilmu. Dengan demikian, pengetahuan dan ilmu terbangun dalam satuan struktur. Ilmu dan pengetahuan itulah yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Mau tidak mau, untuk waktu-waktu selanjutnya, kita disituasikan oleh kondisi ilmu pengetahuan yang struktural tersebut. Kita hidup dalam relasi-relasi antar-elemen yang membangun struktur. Elemen-elemen tersebut antara lain sifat dan bentuk lingkungan terdekat, pengetahuan tentang asal muasal terkait suku dan ras, agama dan kepercayaan, keadaan geografi, dan berbagai norma, adat-istiadat yang dipraktikkan.

Pada gilirannya, inilah yang disebut sebagai kuasa struktur. Struktur yang menentukan apa dan siapa. Struktur yang abstrak tersebut, diwariskan dalam ilmu, pengetahuan, memori masyarakat. Konon dahulu kala, keberadaan struktur tersebut sangat sederhana. Ketika jumlah manusia bertambah, dan perlu hidup bersama, terbinalah kerja sama, terbinalah fungsi dan peran, untuk mencapai tujuan hidup bersama tersebut. Agar hidup tidak semrawut, beberapa orang ditunjuk untuk mendapatkan mandat mengatur kerja sama.

Namun, manusia juga secara kodrati bukan saja dititipi Ruh, tetapi juga hasrat, atau dalam bahasa lain nafsu/syahwat. Mengadopsi secara bebas teori yang dibangun Freud (2015), Ruh itu ada di/atau bersama *super ego*, sedangkan hasrat ada di *id*. Manusia hidup dalam dialektika *super ego* dan *id*, yang kemudian muncul dalam *ego*. Yang terjadi adalah kontestasi antara kekuatan

Ruh (berupa cinta dan sayang), berhadapan dengan kekuatan *id*, berupa segala hasrat tubuh, terutama hal-hal kebencian.

Susun-bangun struktur itu sudah lama dipikirkan dan ditulis oleh para pemikir dan para ilmuwan. Telah ditulis sejak Aristoteles hingga para pakar kontemporer (abad ke-21). Mengikuti Ranciere (1999:28), kuasa struktur itu disebut *police* yang tersimpan dalam ilmu dan pengetahuan manusia, dan yang kemudian diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Pemilahan itu awalnya terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan “kualitas sosial” yang dilakukan individu-individu atau subjek yang lama kelamaan dianggap normal. Ketika dianggap normal, para penulis mengingatkan kembali sebenarnya tidak ada perbedaan pada fungsi dan peran keberadaan manusia di muka bumi ini.

Hal yang banyak ditolak oleh para ahli kemanusiaan itu justru kuasa struktur itu sendiri. Seolah strukturlah yang berkuasa menentukan jalan, fungsi, peran, dan tujuan hidup seseorang. Identitas dan identifikasi keberadaan seseorang, seperti disinggung di atas, seolah telah menentukan “posisi takdir” seseorang untuk menerima posisi sosialnya berdasarkan kuasa struktur itu.

Hal lain yang ditolak, yakni ketika keberadaan kuasa struktur itu dilegitimasi dan dipertahankan oleh pihak-pihak yang, dalam perjalanan sejarahnya, mendapat kemenangan posisi kekuasaan. Kemenangan baik secara ekonomi maupun politik, sehingga kelompok yang kemudian mejadi elit dan berkuasa itu dalam berbagai cara akan mempertahankan dan

memapankan kekuasaannya (lihat Donham, 1999:59). Ilmu dan pengetahuan pun dielaborasi oleh penguasa tersebut. Kita menjadi percaya bahwa kuasa struktural itu adalah apa yang kita sebut dengan nasib atau takdir.

Akan tetapi, posisi-posisi struktural itu memiliki potensi bocoran-bocoran relasional yang membuka peluang untuk berdialog dan bernegosiasi. Bocoran relasional itu bisa beratasnamakan cinta dan nafsu, kemanusiaan, agama, hingga keterpelajaran. Hal ini berarti akan muncul dinamika internal, baik yang bersifat individual (yang dikenal sebagai intelektual atau ulama), maupun kelompok-kelompok historis (*historical bloc*) (lihat Adamson, 1983) yang mencoba merevisi keamanan kuasa struktural.

Saya menyebutnya sebagai “merevisi keamanan struktural”. Artinya, mungkin dalam negosiasi tersebut (baik negosiasi halus atau dengan kekerasan), akan terjadi revisi-revisi posisi dan peran struktural. Akan tetapi, revisi itu kelak akan kembali menjadi mapan (menjadi ilmu dan pengetahuan) dan akan menjadi kuasa struktural berikutnya. Sejauh yang diketahui, belum terdapat perubahan penting pada kuasa struktural tersebut.

Hal ini menyebabkan kemampuan seseorang (sekelompok orang) untuk menerobos keamanan kuasa struktural tersebut. Setelah berhasil menerobos keamanan struktural tersebut, orang tersebut akan kembali ikut memapankan kuasa struktural. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana cara-cara seseorang (sekelompok orang) dalam menerobos struktur yang

telah memposisikannya. Cara-cara tersebut bisa terjadi dalam prosedur demokrasi dan koridor HAM. Akan tetapi, cara-cara seperti itu biasanya akan dengan mudah dikendalikan. Dalam konteks inilah kehadiran apa yang disebut sebagai revolusi sosial atau revolusi politik dapat dipahami.

Terlepas dari itu, hal pentingnya adalah bagaimana berbagai bentuk tindakan dalam merevisi struktur tersebut diekspresikan. Kajian-kajian sosial humaniora memiliki banyak lahan dalam mengkaji ekspresi-ekspresi tersebut. Misalnya, ketika seseorang meneriakkan perlawanannya, dapat ditelaah bagaimana situasi dan kondisi waktu itu, bagaimana isi dan diksi pernyataannya, bagaimana raut dan bahasa tubuhnya, hingga bagaimana situasi itu dimungkinkan. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab.

Suatu jawaban kajian, tidak perlu kemudian seperti dianggap menyelesaikan masalah. Kajian-kajian akademik, pada umumnya, hanya memiliki jangkauan dan kemampuan memberikan tafsir-tafsir dan analisis, dan sama-sama berusaha mencari jalan keluar yang relevan, berkeadilan, dan semaksimal mungkin yang paling mendekati kebenaran.

TATANAN SIMBOLIK

Ketika seseorang hadir di muka bumi, dia akan disergap oleh tatanan simbolik. Dalam hal ini, tatanan simbolik adalah suatu organisasi nilai-nilai, aturan, norma, bahasa dan sistem komunikasi, baik secara langsung maupun tidak, mengatur hidup seseorang dan/atau masyarakat (Lacan, 2013). Awalnya, tatanan simbolik adalah kesepakatan arbitrer masyarakat bersangkutan. Namun, dalam sejarah yang panjang, tatanan simbolik tersebut seolah menjadi perintah sejarah yang harus diikuti (Zizek, 2001:191).

Tatanan simbolik seseorang atau masyarakat akan ada perbedaan dan kesamaan antara satu dengan yang lain. Hal kesamaan dan perbedaan tersebut, seperti telah disinggung, karena bahasa yang kemudian menjadi berbeda-beda, nilai-nilai dan adat-istiadat lokal yang tidak sama, pengalaman individu dan masyarakat yang sangat beragam, dan segala hal menyangkut bagaimana masyarakat harus menjalani hidupnya.

Bahasa menjadi satuan objek material yang penting, karena hampir semua kode, pralambang, dan lambang, atau yang secara umum semiotika komunikasi simbolik dimediasi oleh bahasa (lihat Burke, 1966:15). Namun, pengertian bahasa pun diperluas tidak hanya bahasa dalam pengertian verbal, tetapi bahasa dalam bentuk

visual, dan gerak tubuh (kinetik) menjadi objek material bagaimana suatu struktur simbolik menempatkan posisi-posisinya sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang memiliki tatanan simbolik tersebut.

Masalah bagaimana tatanan atau struktur simbolik tersebut tertata sebagai proses kontestasi dan negosiasi terjadi karena kehidupan yang bersifat dinamis sehingga selalu muncul penyesuaian dan perubahan sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam masyarakat, negara, atau dalam kehidupan global.

Kembali ke internal tatanan simbolik, hal tersebut menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan-perbedaan syariah dalam beragama. Mengapa syariah agama menjadi penting, sebab secara simbolik syariahlah yang dengan tegas memisahkan atau memasukkan apakah seseorang merupakan bagian dari agama tersebut atau tidak. Artinya, ketika agama sebagai satuan simbolik itu disyariahkan, dan kemudian dilembagakan sebagai keyakinan, maka berdasarkan keyakinan tersebut membedakan dirinya dengan keyakinan yang lain.

Kita sering mengatakan untuk masa-masa balita, dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut dianggap masih “suci”, masih “murni”, atau dalam bahasa agama dianggap “belum punya dosa”. Dalam perspektif ilmu sosial, hal tersebut merupakan masa ketika sang anak masih hidup berdasarkan naluri dan perasaannya sehingga ia belum mampu berpikir logis dan rasional. Akan tetapi, dalam masa itu pula si anak ditanamkan dan diinternalisasikan ke dalam atau oleh tatanan simbolik yang kelak menentukan karakter dan identitasnya.

Akan tetapi, dari berbagai perbedaan tatanan simbolik lokal-lokal tersebut, terdapat proses ideologisasi yang berjalan beriringan. Untuk kasus Indonesia, misalnya, apakah itu agama, pancasilaisme, modernisme, nasionalisme, kapitalisme, humanisme, sosialisme, dan sebagainya yang bersaing mencari perhatian dan merebut subjek. Subjek akan melakukan seleksi terhadap eksterioritas tersebut, dan akan mengambil hal yang relevan untuk menjadi dirinya.

Proses subjek menyeleksi dan mengambil hal yang relevan dari eksterioritas simbolik tersebut merupakan dialektika antara kondisi subjek, konteks situasi masyarakat tempat subjek hidup, keberadaan negara, maupun berbagai kecenderungan global yang terjadi. Jika kemudian terdapat subjek yang seperti “ke-barat-baratan”, atau “ke-arab-arab-an”, maka keberadaan subjek seperti itu tidak terlalu sulit menjelaskannya.

Memang, mungkin ada ideologi yang bertentangan, katakanlah antara syariah agama (Islam, misal) dengan kapitalisme, terutama terkait peran dan keberadaan Tuhan. Akan tetapi, semurni-murninya agama Islam juga memiliki kandungan nilai kapitalisme di dalamnya, demikian pula sebaliknya. Itulah sebabnya, jika terdapat relasi kontradiktif antarideologi, selalu ada titik benang merah yang mempertemukan keduanya. Sama halnya dengan ideologi-ideologi yang tidak bertentangan.

Dengan demikian, semangat yang tersimpan dalam titik temu pada tatanan simbolik tersebut akan menjadi tatanan simbolik masyarakat/bangsa. Namun, perbedaan-perbedaan komposisi yang diinternalisasi

subjek menjadi tatanan simbolik yang bersifat individual. Komposisi individual tersebut bisa sama dan bisa pula berbeda. Itulah sebabnya, jangan hanya kesadaran sinis (lihat Sharpe, 2017) orang yang membeli barang mahal saja yang disindir, tetapi orang yang tidak bersedia membeli barang mahal, walau dia punya uang banyak, juga perlu dihargai.

Masalahnya, dalam pembentukan tatanan simbolik tersebut, dalam proses dan persaingannya, terdapat beberapa kekuatan yang terlihat dan tampil dominan. Terdapat berbagai sinergi, antara ilmu dan pengetahuan, teknologi, kemampuan mengubah infrastruktur dengan cepat dan terlihat lebih baik, percepatan dan perluasan (proses) produksi yang mengubah pola-pola ekonomi dan kehidupan, yang merupakan janji kapitalisme dan didukung sepenuhnya oleh modernisme. Sementara itu, berbagai ideologi yang ikut melengkapi tatanan tersebut berposisi sebagai hal-hal yang bersifat korelatif dan subordinatif.

Agama sebagai kekuatan yang absah lalu berdiri sebagai tandingan. Itulah sebabnya, terdapat berbagai kelompok agama (sejauh ini bersifat sporadis) yang mencoba memberi budaya tandingan baik terhadap modernisme maupun kapitalisme. Dalam skala besar, perang antarnegara, baik atas nama agama, Tuhan, HAM, dan demokrasi, masih terjadi di beberapa tempat. Di internal negara Indonesia, ketidakcocokan antara berbagai kekuatan politik dan agama masih merupakan sesuatu yang dinamis dan masih akan terus terjadi.

Namun, di dalam praktiknya, banyak subjek (atau kelompok tertentu) yang dapat “dibeli” oleh nilai, modal, dan fasilitas kapitalisme. Berbagai pengajian yang berbiaya mahal, ulama-ulama selebritas yang menjual dakwahnya dengan tinggi, gaya hidup religius yang dikomersialisasi dan dikomoditaskan, merupakan hal-hal yang dengan mudah dapat ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dan kontradiktif dengan gaya hidup dan simbol-simbol modern juga dengan mudah dapat kita lihat di mana-mana, bahkan sebagian di antaranya menjadi gaya hidup. Kita perlu melihat beberapa kejadian yang lebih rinci, persaingan pembentukan tatanan simbolik ini sedang berjalan ke arah mana, dan di mana posisi kita.

KUASA BENDAWI

Jika mengikuti kisah Adam sewaktu masih di surga, kasus pertama manusia tergoda disebabkan oleh adanya hasrat (syahwat) dalam diri manusia. Hasrat (syahwat) ini dapat juga disebut dengan ‘nafsu’. Dalam hal ini, nafsu yang tidak bisa dikendalikan membuat Adam dan Hawa memakan buah apel. Meski dipahami bahwa seharusnya tidak ada yang dilarang di surga, tetapi keberadaan apel itu sendiri merupakan ujian kesetiaan dan kepatuhan Adam.

Kemudian setelahnya kita tahu bahwa Adam diturunkan ke dunia. Dunia tidak serba menyediakan secara langsung kebutuhan hidup. Dunia harus diolah untuk bertahan hidup, paling tidak untuk menjauhkan diri dari kelaparan. Sebagai keturunan anak Adam, kita pun harus terus-menerus mengolah benda-benda (material) duniawi untuk keperluan hidup. Walaupun ada beberapa bendawi yang bisa dimanfaatkan langsung, tetapi sebagian besar harus diolah dan ditransformasikan.

Pesan yang dapat diambil adalah bahwa kita tergantung pada benda-benda. Kita tergantung pada bagaimana manusia mentransformasikan benda-benda. Benda-benda, di sisi lain, tidak tergantung pada manusia. Dengan demikian, kebudayaan kita adalah

kebudayaan bagaimana kita mengolah benda-benda tersebut. Kemudian kita pun tahu, berkat ilmu (pikiran) yang terejawantahkan dalam teknologi, benda-benda bertransformasi ke dalam berbagai bentuk penggunaan yang sangat spesifik dan khusus.

Benda atau material baru, yang pada awalnya memiliki fungsi kodrati, ditransformasikan ke dalam fungsi (dan peran) yang berbeda. Artinya, ia bukan saja digunakan untuk bertahan hidup dalam pengertian untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan dasar ini pun dipercanggih ke dalam berbagai bentuk, jenis, dan model yang berbeda, sesuai dengan kreativitas keturunan Adam yang bersangkutan.

Namun, masih dalam status kebendaan, terdapat beberapa transformasi fungsi bendawi ke dalam kehidupan sosial, yakni transformasi fungsi sosial, ekonomi, politik, dan berbagai kategori lain yang lebih khusus. Berbagai bentuk transformasi inilah, yang pada awalnya merupakan kuasa bendawi, berubah menjadi kuasa simbolik. Dalam transformasi fungsi tersebut, benda-benda mengalami dan memiliki kuasa simbolik.

Sesuai dengan keadaannya, benda mengalami pengertian dan pemahaman yang sangat berbeda, bahkan justru semakin kuat. Tingkat kesulitan dan kelangkaan mendapatkan benda, menjadi ukuran harga benda. Contoh yang paling populer seperti emas, intan, berlian, dan benda-benda lain yang langka, menjadi semakin mahal secara ekonomi, sosial, dan politik.

Semua bahan yang pada mulanya benda, diolah menjadi sesuatu yang kemudian disebut uang (dalam

berbagai bentuknya). Sebagai misal uang kertas. Benda itu ditranformasikan ke dalam harga simbolik sebagai benda simbolik pertukaran benda-benda. Kita tahu, benda uang simbolik tersebut akhirnya demikian berkuasa untuk mendapatkan benda-benda lain, bukan hanya untuk kebutuhan dasar manusiawi, tetapi lebih dari itu kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik.

Kita hidup dalam kuasa bendawi yang disimbolikkan tersebut. Mungkin masih terdapat sejumlah masyarakat yang hidup dalam transaksi barter bendawi, seperti beberapa masyarakat yang masih hidup pada masa lalu. Akan tetapi, jumlah masyarakat seperti itu semakin sedikit dan terus berkurang akibat tergerus dan masuk ke dunia kuasa benda simbolik.

Ketika kehidupan dikuasai oleh tatanan benda simbolik, nilai dasar benda dimasukkan ke dalam tatanan struktur simbolik masyarakat. Pada awalnya, masyarakat juga bukan struktur simbolik, tetapi lebih sebagai struktur benda-benda yang disimbolikkan yang kepadanya kita bergantung. Dalam struktur kuasa benda simbolik tersebut, terbentuklah struktur simbolik dalam masyarakat. Dialektika itu semakin tidak disadari karena, saat ini, kita cuma menerima sejarah dan warisan dalam suatu struktur sosial dan simbolik masyarakat.

Hal ini menyebabkan adanya kuasa simbolik itu sendiri. Terdapat berbagai kesepakatan arbitrer dalam masyarakat yang berbeda tentang apa yang disepakati berharga dan mana yang kurang berharga. Harga dasar bendawi tetap menentukan tolok ukur penghargaan simbolik tersebut, termasuk kepemilikan “benda-

benda” hidup (hewan) yang nilai dasarnya menjadi berbeda dan sangat menentukan.

Singkat kata, dengan akumulasi ilmu dan pengetahuan, situasi itulah yang dikelola dan disistemkan oleh sekelompok orang yang kemudian berkembang menjadi kapitalisme dan modernisme. Kini, kita hidup di dunia dalam dua kekuatan kuasa simbolik modernisme dan kapitalisme (lihat Breckman, 2016:78). Bagaimana kuasa kebendaan itu demikian berkuasa, kita bicarakan dalam kesempatan lain.

KEWAJIBAN DAN HAK

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hadir dalam ruang keluarga, ruang kemasyarakatan, ruang bernegara, ruang berbangsa, atau bahkan sebagai warga dunia, kita memasuki ruang dalam kuasa struktur yang berlapis-lapis. Kita menerima warisan, suka atau tidak, yang disebut sebagai hak dan kewajiban. Kuasa struktur telah mendikte hidup kita, untuk menentukan hal yang boleh dan dilarang untuk dilakukan, dengan sejumlah kompensasi hak.

Kuasa struktur di setiap ruang berbeda-beda aturan mainnya. Hal itu ditentukan oleh relasi dan posisi karena akan menentukan jenis wewenang dan hak serta segala ritual kewajiban kita sebagai subjek tertentu. Di keluarga, orang tua dan anak berbeda kewajiban dan haknya. Di kampung, ada warga, Pak RT, dan Pak RW, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam ruang bernegara, posisi dan relasi antarsubjek membedakan tuntutan dan pemberlakuan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak secara umum tertulis di dalam undang-undang, kitab suci, atau peraturan-peraturan yang mengikat kelompok tertentu. Akan tetapi, ada juga yang tidak tertulis.

Tidak jarang ditemui permasalahan berkenaan dengan batas antara kewajiban dan hak. Hal ini disebabkan oleh kewajiban dan hak sebagai sesuatu yang

kualitatif sehingga mengandung derajat yang berbeda-beda, misalnya kewajiban memiliki variasi derajat dari ‘wajib kuat’, ‘wajib’, ‘wajib lemah’, demikian halnya dengan hak. Kalau dalam agama, ada yang setelah mengerjakan suatu kewajiban pahalanya lebih besar daripada mengerjakan kewajiban yang lain.

Hal tersebut juga terkait dengan jenis pelarangan: wajib tidak boleh memperkosa A atau membunuh B, wajib tidak boleh korupsi, wajib tidak boleh mencuri ayam, wajib tidak boleh mencuri makanan di warung, dan lain sebagainya. Semua hal itu memiliki konsekuensi hukuman tertentu atau memiliki tingkatan dosa yang berbeda.

Persoalannya terletak pada apa itu kewajiban dan hak. Kewajiban lebih dekat sebagai bahasa agama. Kalau kita tidak melaksanakan atau melakukan seperti yang diharuskan syariah, kita akan mendapat dosa dan dikenai sanksi. Sebaliknya, jika kita melaksanakan kewajiban akan mendapatkan pahala. Dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban adalah keharusan-keharusan yang kita praktikkan, agar tetap menjadi seseorang, warga, atau manusia.

Di dalam kewajiban tersimpan hak. Atau sebaliknya, di dalam hak tersimpan kewajiban. Atau mana yang lebih utama mengerjakan kewajiban atau mengambil hak. Atau kapan hak menjadi kewajiban dan kewajiban menjadi hak. Akan kita runut kemudian.

Dari hal itu kita menjadi tahu bahwa kewajiban dan hak memiliki banyak ragam. Wajib dan hak dalam pengertian agama, wajib dan hak dalam pengertian

sebagai warga, hingga wajib dan hak dalam keluarga. Wajib dan hak dalam agama, setelah melakukan kewajiban, kita mendapatkan hak kita, mungkin berupa pahala, atau ganjaran lainnya. Kalau dalam keluarga, anak berhak dipelihara hingga batas tertentu oleh ada orang tua yang wajib memeliharanya. Hal-hal itu merupakan konsekuensi posisi-posisi dan relasi-relasi dalam kehidupan.

Agama yang diberlakukan (di Indonesia) cukup banyak maka urusan kewajiban dan hak menjadi urusan pemeluknya; menjadi urusan kelompok jamaahnya. Masalah kewajiban dan hak dalam agama tertentu bisa saja menjadi urusan negara jika pemeluk atau kelompok pemeluk melakukan intervensi kepercayaan atau keyakinan lain di luar urusan keyakinan agamanya. Misalnya, ada kejadian sekelompok orang merusak atau menghancurkan makam yang ada simbol-simbol tertentu yang berbeda dengan keyakinannya.

Kita hidup sebagai warga negara daripada warga agama. Di KTP memang masih ada identitas agama selain identitas kewargaan, tetapi fungsi KTP lebih sebagai identitas kewargaan daripada keagamaan. Orang naik kereta api atau pesawat dilihat KTP-nya sebagai identitas warga, bukan agama. Sirkulasi hidup kita sehari-hari secara administrasi juga sebagai warga negara, bukan sebagai warga agama.

Secara sosial, hak adalah sesuatu yang seharusnya milik kita, sesuatu yang secara inheren menjadi bagian yang integral dalam diri manusia. Mendapatkan sandang/pakaian adalah hak, tetapi memakai sandang

bisa merupakan hak atau kewajiban. Batasnya ditentukan oleh negara atau agama? Kalau negara yang menentukan, maka memakai sandang atau tidak diletakkan dalam konteks sejauh sandang bisa melindungi tubuh dari cuaca ekstrem, atau dalam batas kesopanan normatif yang ditentukan bersama.

Akan tetapi, dalam agama Islam, misalnya, mengenakan sandang menjadi wajib hukumnya untuk menutupi aurat. Lebih bermasalah lagi, setelah bersandang menutup aurat, bagaimana dengan memakai pakaian bermodel sedikit terbuka, itu hak atau menjadi wajib larangan. Tentu hal ini perlu kita kembalikan bahwa kita hidup bernegara, bukan dalam ruang hidup beragama.

Kebutuhan manusia terhadap makan, itu natural. Akan tetapi, apa yang bisa dan tidak bisa dimakan, bagaimana mendapatkannya, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memakan, di mana makannya, adalah suatu konstruksi yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Orang punya hak makan di kamar mandi dekat WC, tetapi sebagai hak hal itu akan jarang diambil seseorang.

Masalah lain dalam kehidupan bernegara: berbicara dan berpendapat dilindungi undang-undang. Artinya, ketika berbicara dan berpendapat itu dilindungi undang-undang, maka segala aktivitas berbicara dan berpendapat ada aturannya. Bagaimana menentukan aturan main tersebut? Siapa dan apa yang menentukan hak dan kewajiban orang berbicara? Akhirnya, kita tahu, bahwa urusan kewajiban dan hak adalah suatu

konstruksi tatanan kekuasaan sehingga sebenarnya konsep HAM pun adalah sesuatu yang tidak berjalan secara natural.

Problem itu hanya ingin memperlihatkan bahwa batas hak dan kewajiban masih perlu dipastikan, sehingga hak dan kewajiban manusia tidak dipolitisasi oleh kekuasaan. Artinya, bukan hanya keberadaan KAM (Kewajiban Asasi Manusia) yang problematik, tetapi keberadaan HAM pun perlu jelas ujungnya sehingga tidak harus terjebak menjadi KAM. Hal yang perlu diatasi mana batas wajib dan hak dalam agama, mana batas wajib dan hak dalam kehidupan bernegara, mana batas wajib dan hak dalam kehidupan sosial.

Hal ini diperlukan sebab ketumpangtindihan batas-batas tersebut justru menjadi ajang atau arena yang dengan sengaja diperebutkan, bahkan dengan kekerasan, yang justru membunuh proses-proses demokrasi, yang membunuh batas hak dan kewajiban. Masih saja terdapat berbagai kelompok, lebih atas nama agama (artinya bukan sebagai warga negara), yang melakukan berbagai intervensi ke ruang sosial, yang mana batas dalam ruang sosial tersebut bukan batas wajib dan hak dalam beragama (lihat Junadi, 2012:54).

Negara diberi mandat memiliki kekuasaan untuk mengontrol masyarakat sehingga kekacauan batas hak dan kewajiban ini harus dibersihkan, diperjelas, dan dijaga dengan ketat.

KESEPAKATAN ARBITRER

Sebuah demonstrasi yang melibatkan sekitar 200-an orang, di suatu kota, terlihat membakar bendera merah putih dan semacam kors (jaket sebuah kampus) berwarna hijau. Tidak lama kemudian, seorang aparat negara bertanya kepada saya, apakah tindakan membakar itu bisa dikategorikan sebagai makar atau tidak? Terinspirasi dengan kasus tersebut, saya mencoba menulis apa dan bagaimana simbol itu.

Simbol adalah kesepakatan arbitrer (mana suka) antara dua orang atau lebih tentang sesuatu yang ditandai dalam bentuk penandaan tertentu (lihat Rasmussen, 2012). Ada dua hal yang penting, yakni kesepakatan dua orang atau lebih, dan kesepakatan hubungan penanda dan yang ditandai. Penandaan itu bisa dalam sesuatu yang verbal, visual, audio, atau bahkan gerakan-gerakan tertentu.

Dalam beberapa hal, simbol di sini bisa jadi bertumpang tindih dengan pengertian kode. Kode dapat dipahami sebagai sesuatu yang disepakati atau tidak tentang hubungan penanda dan petanda (Balakian, 2008:695). Artinya, perbedaannya terletak pada disepakati atau tidak. Ada seseorang yang mencoba menyimpan informasi dengan kode-kode tertentu yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Namun, bisa saja

kode tersebut kelak akan disepakati orang banyak. Ketika kode disepakati bersama, kode menjadi simbol.

Sebagai misal, suatu organisasi sindikat (gerombolan maling, mafia, dsb) cukup sering memanfaatkan simbol-simbol yang secara internal hanya mereka yang mengetahui. Simbol itu bisa dalam bentuk ungkapan tertentu, bisa dalam bentuk bunyi-bunyian, atau gambar-gambar tertentu (atau bisa juga disebut sebagai kode). Suatu lembaga, organisasi, atau apapun yang sifatnya lebih dari dua orang yang terorganisir, biasanya memiliki simbol-simbol tertentu berupa bendera, stempel, emblem, pin, dan sebagainya.

Simbol-simbol tersebut hanya mengikat bagi mereka yang menyepakatinya, atau bagi mereka yang, baik sukarela maupun wajib, menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jika ada orang yang mempermainkan dan menghina atau merendahkan simbol tersebut, mereka yang merasa memiliki simbol tersebut berhak mempersoalkannya. Dengan demikian, kasus pembakaran korsia (jaket), tidak bisa disejajarkan dengan pembakaran bendera merah putih.

Fanatisme kelompok, misalnya kelompok yang bersifat ideologis, menempatkan simbol-simbol milik kelompoknya juga bersifat ideologis. Proses historis terbentuknya sebuah kelompok sangat menentukan bagaimana kelompok tersebut menempatkan simbol-simbol yang mereka miliki. Jaket organisasi atau lembaga pendidikan (terutama diidentifikasi dengan warna), tidak sama dengan bendera dan jaket partai politik, organisasi persatuan sepak bola, organisasi silat, organisasi agama, karena tingkat fanatismenya berbeda-beda.

Misal di Yogyakarta, jangan main-main dengan Bendera Perserikatan Sepakbola Sleman (Slemania), karena jika Anda ketahuan memainkannya, para Slemania akan mengejar Anda. Namun, saya yang bukan Slemania dan kebetulan melihatnya, paling cuma berkata, “*wah, kok berani ya?*”. Saya yakin di tempat lain juga begitu.

Membakar bendera merah putih menjadi sesuatu yang sangat serius, bahkan dapat disebut sebagai makar simbolik. Benda tersebut pada mulanya hanya berupa kain, yang satu berwarna merah yang satu berwarna putih, ketika disatukan/dijahit dan dibentuk sebuah kain segi empat, maka ia menjadi bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses sejarah untuk menjadikan itu sebagai bendera negara merupakan proses yang panjang, berdarah, perlu pemikiran, dan kompleksitas biaya yang besar. Dengan proses yang historis dan berdarah tersebut, ia menjadi sesuatu yang sakral.

Dengan demikian, bendera NKRI yang pada mulanya cuma benda biasa, menjadi kesepakatan historis dan sakral bagi negara dan bangsa Indonesia. Mereka yang terikat dan menjadi warga negara Indonesia, suka tidak suka, mau tidak mau, wajib menghormati simbol negara tersebut. Dalam prosesnya, bendera merah putih menjadi ideologis sehingga kita pun semua warga merasa memiliki dan wajib melindungi kehormatannya.

Jadi, dapat dibayangkan jika ada pihak-pihak yang berani membakar bendera merah putih. Bukan saja negara wajib mengamankan kesepakatan simbolik tersebut, tetapi saya sebagai warga biasa tidak akan

pernah menerima bendera merah putih dibakar, kapan pun dan di mana pun. Bagi saya, pihak yang membakar bendera merah putih secara terbuka melanggar dan menghina kesepakatan simbolik. Dalam posisi kewargaan, pihak tersebut telah menghadapkan dirinya dengan warga lain. Dalam posisi sebagai warga negara, pihak tersebut telah melakukan makar secara simbolik.

Kasus-kasus serupa bisa menjadi urusan negara, bisa jadi tidak. Hal tersebut terkait apakah ada pengaduan/pelaporan. Dengan kata lain, adakah pihak yang menggugat. Misalnya saja, saya melihat ada orang membakar atau menginjak-injak kitab suci. Kitab suci bukan kesepakatan simbolik bernegara, tetapi kesepakatan simbolik kelompok agama tertentu. Akan tetapi, karena praktik beragama resmi dilindungi negara, maka jika ada pelaporan/pengaduan, negara berhak memasukkannya ke ranah hukum.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kedudukan simbol itu berbeda-beda, tergantung karakter kelompok yang menyepakatinya, dan dalam posisi itu, bagaimana relasinya dengan negara. Hanya negara yang berdaulat menengahi dan mengatasi masalah-masalah hukum.

TATATAN KEKUASAAN

Jika pada pembicaraan sebelumnya kita menjelaskan kuasa struktur, maka dalam kesempatan ini kita mempersoalkan struktur kekuasaan. Ada dua pertanyaan yang akan dijawab, yakni bagaimana kekuasaan dimungkinkan dan bagaimana kekuasaan bisa berlaku dalam setiap relasi dan posisi, sehingga membangun satu struktur kekuasaan.

Kalau mengingat cerita Habil dan Qabil, konflik pertama manusia, maka pada awalnya nafsu memuaskan diri muncul karena manusia memiliki hasrat. Terlepas dari tindakan manusia dalam mendapatkan hasratnya itu telah melalui negosiasi dengan perasaan dan pikiran, tetapi kemudian terjadi bentuk konflik kepentingan dan/atau kekerasan untuk memuaskan hasrat tersebut. Setelah ada kalah menang, muncul pihak yang menguasai dan dikuasai.

Proses pengambilan kekuasaan itu berkembang kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah manusia: apakah itu berkaitan dengan pemuasaan hasrat itu sendiri—yang kemudian berkembang pada pemuasaan kepemilikan sumber-sumber—baik dalam pengertian secara langsung untuk mendapatkan kepuasan, maupun secara tidak langsung. Dalam arti, penguasaan terhadap sumber itu menjadi media untuk mendapatkan kepuasan yang utama.

Kemudian manusia, atau sekelompok manusia, berlomba-lomba untuk mengamankan kepuasannya atau berbagai hasrat lain yang bukan sekedar biologis, tetapi lebih-lebih bersifat ideologis. Kita tahu, sepanjang sejarah manusia, konflik, perdamaian, dan pengaturan kepentingan kekuasaan, dalam skala ruang dan waktu yang berbeda, telah terjadi sepanjang masa.

Penguasaan bersifat dua hal, dalam dimensi dan lapis-lapis yang berbeda, yakni penguasaan dominan dan penguasaan hegemonik. Bentuk-bentuk kekuasaan yang didapatkan dalam sifat-sifat kekerasan biasanya disebut sebagai suatu yang bersifat dominatif. Kasus kecil, misalnya, penentuan kepala geng kampung yang sangat mungkin harus memperlihatkan kekuatan dalam bentuk kekerasan. Kekuasaan seorang manajer terhadap anak buah. Kekuasaan pemilik rumah terhadap pembantunya.

Dalam skala yang lebih besar tentu saja kekuasaan satu negara terhadap negara lain. Inggris, Prancis, dan beberapa negara di Eropa merupakan negara adikuasa. Negara Amerika, misalnya, dianggap sebagai negara yang memiliki kekuasaan yang besar. Selain usaha-usaha internal membangun kekuatan yang bersifat fisik, kebijakan budaya dan politik luar negeri Amerika sangat menentukan bagaimana kemudian Amerika menjadi negara *super power*.

Namun, beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi contoh penting bagaimana membangun kekuatan, dan itu artinya, membangun kekuasaannya. Kenapa hal itu

perlu disinggung, karena ia akan menentukan struktur kekuasaan global yang ikut mengatur struktur kekuasaan di bawahnya (yang lebih kecil).

Kekuasaan yang lebih stabil adalah kekuasaan yang bersifat hegemonik. Agama yang dikelola oleh seseorang atau satu satuan fungsi sosial tertentu, dapat menjadi kekuasaan yang bersifat hegemonik. Kini, kita tahu, modernisme dan kapitalisme merupakan satuan kekuasaan yang bukan saja dominan, tetapi juga hegemonik. Kita tidak lagi menjadi cukup sadar bahwa kita seorang modern dan sekaligus kapitalis.

Kekuasaan secara umum bersifat material (lihat Bennett dan Joyce, 2013). Harga material kekuasaan ditentukan oleh besaran ruang dan waktu yang ditembus oleh satuan kekuasaan tersebut. Jika kita berandai-andai bahwa kekuasaan yang kuat sekarang ini adalah modernisme dan kapitalisme, maka material apa yang diandalkan oleh dua kekuasaan tersebut. Mungkin salah satu yang bisa disebut adalah janji kebahagiaan di dunia. Agama tentu sebagai suatu material kuasa juga sangat layak diperhitungkan. Materialisasi agama, jika dibedakan, yakni janji kebahagiaan di akhirat, terutama bagi yang percaya.

Dari pemetaan kekuasaan di atas, kini kita dapat mengetahui struktur kekuasaan, baik dari skala besar hingga ke skala yang lebih kecil. Dalam menggambarkan struktur kekuasaan tersebut, saya mengadopsi pemikiran Gramsci (dalam Howarth, 2015:201), yakni dengan model relasional. Di samping itu, agar lebih empiris, saya membicarakan kasus struktur kekuasaan di Indonesia.

Dalam struktur dominatif, tentu negara memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan yang lain di bawah koordinasi negara. Apalagi negara secara legal memiliki aparatus politik seperti tentara, militer, jaksa, dan lain-lain sehingga negara secara hukum memiliki wewenang untuk mengontrol pendidikan, berbagai lembaga dan organisasi dalam masyarakat, bahkan hingga berbagai kegiatan yang lebih kecil. Kekuasaan itu, dapat dikonversi hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kampung-kampung, dalam fungsi-fungsi yang sama atas nama negara.

Hal yang lebih rumit, dan perlu berspekulasi, adalah relasi-relasi yang membangun struktur kekuasaan hegemonik. Relasi yang membangun struktur kekuasaan hegemonik tidak semata-mata relasi koordinatif seperti diperlihatkan dalam relasi kuasa negara, tetapi dapat bersifat kontradiktif dan korelatif. Pada situasi inilah, riset yang mendalam perlu dilakukan terus-menerus. Misalnya, bagi masyarakat Indonesia, atau bagi warga negara Indonesia, mana yang lebih hegemonik untuk menjadi manusia religius, manusia modern, manusia Jawa, manusia sosialis, manusia humanis, kapitalis, *manusia abangan*, manusia sekuler, manusia nasionalis, atau manusia pancasilais. (Pembicaraan tentang ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam “Penjara Ideologi”).

Kajian yang rinci tentang hal tersebut diperlukan untuk membantu menjelaskan, kaitannya dengan hegemoni mayor, tentang sosok karakter dominan masyarakat Indonesia. Saya ingat, dalam tulisan lama, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu lebih cocok

disebut sekuler daripada religius, lebih pas dikatakan bermental kapitalis daripada sosialis, apalagi humanis. Akan tetapi, saya percaya struktur hegemonik ini bisa berubah. Akan ada perubahan dan temuan ilmu dan teknologi yang akan banyak mengubah struktur kekuasaan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi, politik, dan kebijakan budaya yang jitu akan selalu menentukan nasib negara dan bangsa Indonesia ke depan.

TUBUH YANG TERBELAH

Salah satu perjalanan penting kehidupan manusia adalah upaya dirinya dalam menguasai dan merebut tubuhnya sendiri. Pada awalnya, menurut salah satu asumsi yang berpengaruh, karena pengetahuan dibangun berdasarkan struktur dan batas-batas yang empiris dan. Ruang yang berbeda tersebut membentuk pemahaman oposisi biner, yakni dengan mengedepankan sesuatu yang lebih utama.

Banyak kekuatan yang mempengaruhi kehidupan, tetapi tidak tampak, seperti Dewa-Dewa, atau mungkin Tuhan. Ada sesuatu dalam tubuh manusia yang tidak tampak, yang mengendalikan dirinya. Sebagai akibatnya, kita pun masih sering menggunakan frasa oposisif: jiwa-raga. Jika raga adalah tubuh, jiwa tidak sama dengan nyawa. Nyawa merupakan gejala tubuh.

Jiwa juga menjadi rebutan, tetapi dalam posisi tulisan ini, jiwa dikelompokkan dalam satu kategori seperti pikiran atau akal, hal-hal yang dilawankan dengan raga, tubuh, atau badan (dalam tulisan ini, saya memakai konsep jiwa untuk menyebutkan sesuatu yang meliputi pikiran dan akal). Jiwa adalah sesuatu yang nonempiris diposisikan untuk menaklukkan tubuh. Jiwa merupakan sesuatu non-tubuh, tetapi terintegrasi dalam tubuh. Konsekuensinya, apa dan siapa jiwa yang lebih diutamakan dan diandaikan mengendalikan tubuh.

Peradaban manusia membuktikan bahwa justru karena manusia secara kodrat memiliki jiwa-pikiran yang berkoordinasi secara inheren dengan hasrat, maka manusia tak pernah puas memahami dan menaklukkan dirinya (tubuhnya). Implementasi dari upaya penaklukan itu terutama dilakukan dengan berbagai sistem kuasa yang dapat mengontrol tubuh. Sistem kuasa itu adalah nilai atau norma yang pada awalnya bersumber pada kepercayaan lokal dengan mitos tentang dewa-dewa.

Dalam perkembangannya, mitos dewa-dewa tersebut menjadi agama-agama. Nilai dan norma dilembagakan sebagai kesepakatan antarrelasi dan posisi-posisi yang terbentuk. Relasi terbentuk mungkin karena negosiasi, mungkin karena penaklukan itu sendiri. Posisi-posisi relasional terbentuk karena kekuatan jiwa-pikiran subjek-subjek (baik perorangan atau berkelompok), sehingga menciptakan suatu struktur kehidupan, dalam bentuk kemasyarakatan atau kenegaraan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, apapun dan siapapun berhak merebut tubuh manusia agar menjadi sesuatu yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang merebut tubuh itu. Bahkan, banyak peperangan terjadi sebenarnya dalam rangka merebut atau melindungi tubuh manusia.

Jiwa-pikiran tidak memiliki kekuatan langsung dalam menguasai dan mengontrol tubuh. Kekuasaannya dilimpahkan ke masyarakat atau ke negara. Memang, dalam sejarah kemudian, negara yang memiliki wewenang lebih besar untuk mengontrol masyarakat,

dan sebagai kelanjutannya, masyarakat mengontrol individu/subjek. Artinya, masyarakat adalah lingkungan terdekat yang paling awal dalam merebut tubuh, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh orang tua (Deleuze dan Guattari, 2004:59). Orang tua pun bermasalah. Orang tua itu, sebagai subjek, yang lebih sebagai subjek negara atau subjek agama/santri, atau subjek sekular, atau subjek (dalam budaya Jawa).

Anggaplah kemudian, mayoritas subjek orang tua adalah subjek negara. Foucault (1977) mengemukakan bagaimana negara mengendalikan, mengontrol, dan mendisiplinkan tubuh agar tubuh dapat berguna bagi negara. Warga yang berguna adalah warga yang produktif (bisa kerja, dan untuk itu warga sebaiknya sehat/tidak sakit. Namun, selain itu sebenarnya negara juga membutuhkan warga yang patuh dan etik, sesuai dengan standar sosial kenegaraan. Jika warga banyak yang patuh dan etis, maka kekuasaan akan berjalan langgeng.

Namun, kekuasaan negara tidak bersifat tunggal. Dengan kata lain, wajah negara bisa beragam tergantung relasi-relasi antarsubjek kuasa dan subjek tubuh. Artinya, untuk menjaga stabilitas keberlangsungan kekuasaan, negara juga membutuhkan tubuh-tubuh lain, yang kemudian dikenal sebagai masyarakat politik, meliputi aparat represif, meliputi militer, politik, jaksa, dan sebagainya, yang bekerja sama dengan tubuh sosial seperti pendidikan, media massa, dan sebagainya (lihat Althusser, 2014:xxiv). Namun, tetap saja yang utama adalah subjek yang patuh dan produktif.

Penjelasan tubuh di atas terutama dalam konteks tubuh sebagai sosok yang bisa diatur dan diperintah, bisa bekerja, bisa diberi kemampuan keterampilan, dan tubuh yang menjadi instrumentasi kekuasaan.

Sesuai dengan lokalitas ruang-ruang tubuh diberdayakan, terjadi juga perebutan tubuh hingga hal-hal bagian tubuh. Dalam berbagai kepentingan, tangan, kaki, wajah, rambut, kelamin, ukuran tubuh, bentuk pantat, ukuran payudara, warna kulit, warna mata, menjadi ruang kontestasi. Bahkan jantung, paru-paru, ginjal, gigi, semua diperebutkan dan bahkan dibisniskan. Diperebutkan dalam pengertian harfiah, ataupun dalam pengertian selera dan simbolik.

Contohnya rokok yang dapat mengganggu atau merusak paru-paru. Dunia medis akan sibuk mempublikasikan temuannya untuk mengobati dan mengantisipasi rokok. Negara tidak mau ketinggalan, memberikan kampanye mengenai bagaimana rokok dapat membunuh. Namun demikian, bisnis kesehatan dan olahraga tetap berjalan dengan iklan rokok. Agama *canve-canve*, ada yang aliran haram ada yang aliran makruh. Semua soal tubuh.

Alhasil, tubuh manusia terbelah-belah. Sebagian besar memang tubuh negara (dalam varian sebagai tubuh produktif (ekonomi), tubuh sosial, tubuh politik, tubuh hukum), tetapi sebagian yang lain adalah tubuh agama, tubuh syahwat, dan tubuh narsis. Masih banyak *kok* belahan tubuh-tubuh yang lain. Kita salah satunya.

JALUR HIDUP DAN KEMATIAN

JALUR HIDUP DAN NASIB

Setiap manusia hidup dengan jalur pintasan (trajektori) hidupnya masing-masing. Titik kelahiran hingga mati adalah jalur yang tidak dilewati orang lain, kecuali kelak apa yang disebut sebagai persentuhan dan perkawanan sosial. Pada titik persentuhan sosial itu, setiap orang mengalami titik pintasan yang sama, tetapi dalam posisi yang berbeda-beda. Seseorang akan mencatat dalam hidupnya berkawan dan berelasi apa dan dengan siapa, tetap dalam sudut pandang yang berbeda.

Setiap orang akan menjalani hidupnya masing-masing yang berbeda dengan orang lain, bahkan kembar sekalipun. Jalur hidup adalah suatu rangkaian kehidupan seseorang dari awal sampai akhir hidupnya. Dalam jalur atau lajur hidup tersebut, seseorang secara sosial terikat dalam satuan himpunan kehidupan, yang setiap gerakan atau fasenya dapat diuji sebagai bagian dari akumulasi modal atau tidak. Akumulasi modal tersebut tidak berhubungan dengan apa yang disebut sebagai nasib (kelak menjadi takdir hidup).

Ilmu sosial yang kita pelajari tidak bermaksud mempersoalkan nasib. Satuan-satuan modal yang diakumulasi bukan berarti ikut memastikan nasib. Nasib

di sini, misalnya, apakah seseorang tersebut sukses atau tidak, bisa menjadi pejabat atau tidak, bisa menjadi pengusaha atau tidak, bisa menjadi dokter atau tidak, bisa menjadi orang kaya atau tidak, bisa menjadi orang terkenal atau tidak, dan sebagainya.

Misalnya, secara sosial banyak orang yang menjadi dokter memiliki kedudukan ekonomi dan sosial yang baik di masyarakat sehingga hampir sebagian besar dokter dapat dikatakan sebagai orang sukses. Kita berpendapat bahwa hal itu semua berkat kerja kerasnya, karena kita bisa membuktikan bagaimana orang tersebut belajar dan prihatin dengan keras supaya ia bisa masuk ke fakultas kedokteran. Secara matematis, kita bisa menjelaskan bahwa karena rajin dan pandai, orang tersebut bisa mengerjakan ujian masuk ke fakultas kedokteran.

Pertanyaannya, siapa yang memberi kesempatan itu dalam hidupnya? Paling tidak kesempatan untuk memiliki tubuh yang sehat dan kesempatan untuk tidak memiliki halangan dalam mengikuti ujian. Itu saja, kita menariknya ketika orang tersebut mulai ikut tes dan masuk ke fakultas kedokteran. Bagaimana masa dan waktu-waktu sebelumnya sehingga ia mendapat kesempatan semua itu? Apa dan siapa yang memberi kesempatan itu? Siapa yang memberi kemampuan pikiran sehingga orang tersebut tidak bodoh? Siapa yang menentukan arah hidupnya untuk masuk fakultas kedokteran atau tidak?

Sebaliknya, cukup banyak masyarakat hidup dalam keadaan miskin. Tidak ada yang pernah berharap

hidup miskin. Secara teori, kita bisa menjelaskan bahwa terdapat kekuasaan besar (kuasa struktural) yang membuat sebagian besar orang hidup dalam keadaan miskin. Memang hidup adalah perjuangan dan untuk mengatasi masalah. Banyak yang telah berusaha dan kerja keras, tetapi hidupnya tetap saja miskin. Bagaimana situasi itu selalu dimungkinkan? Apakah ada yang salah dalam cara seseorang mengakumulasi modal dalam hidupnya, sehingga modal-modal itu tidak pernah terakumulasi?

Begitu banyak persoalan yang sebenarnya ilmu sosial sekuler tidak cukup mampu menjawab pertanyaan itu. Itulah sebabnya, ilmu sosial perlu berendah hati untuk meminta bantuan pada ilmu-ilmu lainnya, yang dalam hal ini terutama ilmu yang memberikan penjelasan bahwa bukan hanya kekuatan besar struktural yang mengatur hidup orang, tetapi terdapat kekuasaan dan kehendak lain yang mengatur hidup manusia.

Dengan demikian, jalur hidup yang tahap-tahapnya bisa dideteksi dan diperhitungkan tidak berhubungan langsung dengan apa yang disebut dengan nasib. Dalam situasi tersebut, yang bisa dilakukan ilmu sosial terutama menguji keberhasilan nasib itu sendiri, bukan menentukan nasib. Cara menguji yang bisa dilakukan ilmu sosial, salah satunya adalah dengan melihat prosedur-prosedur dari lintasan hidup yang dilakukan seseorang. Badiou (2019:29–31) menyebutnya dengan “subjektivasi”.

Subjektivasi adalah proses-proses sosial yang dihadapi seseorang berkenaan dengan apakah ia akan

bertahan dalam pilihan mengikuti prosedur kebenaran atau tidak. Jika salah dalam menempatkan fungsi-fungsi relasi dalam prosedur kebenaran, dengan mengikuti hukum logis dan hukum alam, maka akan lahir subjek yang tidak teguh dalam keyakinannya; bukan subjek yakin, tetapi subjek kabur atau subjek reaktif. Posisi itu akan menentukan dan dapat menilai bagaimana kemudian nasib ikut ditentukan. Paling tidak, ada semacam permakluman mengapa hal nasib yang bervariasi itu bisa terjadi.

Memang, tetap saja sebenarnya banyak hal yang misterius dalam kehidupan ini. Tugas kita untuk terus menerus memahami dan menelisiknya satu persatu hal misterius tersebut hingga dapat diketahui secara lebih rasional dan empiris, sesuai dengan prosedur keilmuan itu sendiri.

DILEKTIKA MODAL-MODAL

Ternyata ada juga seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi sastrawan. Anak itu tinggal di pinggir kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Hidup dalam suatu lingkungan masyarakat urban. Sebagai kabupaten di Yogyakarta, mayoritas masyarakat kebanyakan berasal dari Yogyakarta, sebagian dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan dalam jumlah yang lebih kecil dari beberapa kota di Indonesia lainnya. Tidak terlihat bahwa masyarakat tersebut menyukai sastra, tetapi kampung tersebut punya kelompok *jathilan*. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, baik santri maupun *abangan*. Pekerjaan masyarakat cukup beragam, seperti PNS (ASN), petani, pedagang kecil, dan pekerjaan swasta lainnya.

Tidak ada teori apapun yang dikenalnya sebagai bekal untuk menjalani hidup dan kelak menjadi sastrawan. Beberapa sastrawan klasik terkenal dari Rusia, tidak belajar sastra waktu kecil hingga remaja, selain hidup dalam cengkeraman ketakutan. Mereka menulis karya sastra lebih sebagai peristiwa kebutuhan dan desakan untuk menyampaikan kecemasan dan ketakutan itu sendiri. Mungkin suatu hari ia membaca karya sastra, bahkan bukan dalam rangka ingin jadi sastrawan.

Namun, tak ada salahnya si anak perlu punya gambaran ruang sosial atau arena seperti apa yang kelak

akan dimasukinya. Kelihatannya, masyarakat memang hidup bersama-sama, tetapi suatu profesi sosial memiliki ruangnya sendiri-sendiri. Hanya hubungan secara tak langsung dalam apa yang disebut sebagai struktur sosial (dalam pengertian suatu struktur yang meliputi struktur lain seperti struktur politik atau struktur ekonomi). Secara teori, kuasa struktur ini menentukan karakter eksternal dan internal suatu profesi sosial tertentu.

Arena suatu profesi sosial memiliki aturannya sendiri-sendiri. Aturan itu tidak tertulis, tetapi mereka yang terlibat di dalamnya perlu tahu sekadarnya, agar si anak kelak tidak terlalu kecewa dengan harapan-harapannya. Untuk memasuki ruang sosial tersebut perlu suatu proses perjalanan yang disebut minat yang didukung keseriusan (konsekrasi). Akan tetapi, itu pun bukan sesuatu yang sifatnya kewajiban. Si anak tetap saja bisa menjadi sastrawan. Syaratnya cuma satu, dia harus menulis karya sastra ketika ia mulai merasa bisa menulis.

Tidak masalah jika si anak, di habitus¹ awalnya, tidak cukup mendapat dukungan lingkungan yang kondusif. Di Yogyakarta cukup banyak seniman, penyair, dan sastrawan. Akan tetapi, juga tidak ada keharusan si anak bergaul dengan para sastrawan tersebut karena hal itu hanya membuat anak menjadi korban doksa. Dunia sastra bukan dunia anak harus belajar menulis sastra kepada sastrawan, tetapi dunia

¹Sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan; "*structured structures predisposed to function as structuring structures*", yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan dan mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-representasi yang bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya tanpa mengandaikan suatu upaya sadar dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu (Bourdieu, 1977:72).

sastra adalah profesi jalan khusus dan sendiri. Kuncinya hanya satu, dia harus menulis secara mandiri, bebas, dan tidak harus menjadi pengekor.

Si anak mungkin perlu sedikit membaca karya sastra untuk mengetahui konvensi penulisan sastra sesuai dengan genrenya. Akan tetapi, kreativitas dan kemandirian jauh lebih penting daripada konvensi dan genre. Dalam tahap ini, jika si anak tidak mengetahui aturan main arena kesastraan, dia tidak tahu kelak apa yang disebut sebagai legitimasi kesastraan (atau martabat) kesastraan. Hal ini seperti tampak pada karya-karya sastra populer. Dalam hal ini, karya tersebut mungkin cepat laku di pasaran, tetapi nasib si anak sudah mulai ditentukan bahwa dia tidak lebih hanya menjadi sastrawan populer, yang harganya lebih rendah daripada sastrawan *legitimate*.

Begitulah arena sastra ikut mengatur harga sosial kesastrawanan. Apalagi arena sosial sastra tersebut telah ditempati oleh para sastrawan yang masih terus bersaing dan bertahan untuk tetap disebut sebagai sastrawan, dalam segala level harga sosial kesastrawanan. Yang sudah mendapat predikat sastrawan legitimatif (bermartabat), akan menggunakan posisi kekuasaannya untuk terus bertahan dengan tetap berkarya, jika perlu mereka akan mengerahkan seluruh modal yang mereka miliki. Mereka yang terlanjur hanya menjadi sastrawan populer diam-diam terus bekerja keras untuk mendapat posisi yang lebih bergengsi.

Itu pula sebabnya, mungkin kelak si anak perlu memahami apa yang disebut Bourdieu (1977) sebagai

modal. Perlahan tapi pasti, si anak perlu punya kemampuan berstrategi mengelola modal yang dia miliki. Mengikuti Bourdieu, ada 4 modal yang perlu dikelola, yakni *modal sosial*, *budaya*, *ekonomi*, dan *simbolik*. Saya ingin meringkas saja apa yang dimaksud dengan modal-modal itu.

Modal sosial adalah modal jaringan, pertemanan, dan berbagai koneksi hidup lain yang dibutuhkan. Memang jaringan cukup penting, tetapi tetap saja menulis karya sastra yang bagus jauh lebih penting. Walaupun si anak tidak memiliki jaringan pertemanan yang kondusif, tetap saja dia kelak dapat saja menerbitkan karyanya, karena menerbitkan karya sastra bukan sesuatu yang mahal. Dia bisa saja mengikuti seleksi penerbitan, tetapi bisa juga diterbitkan secara *indie* atau mandiri.

Masalahnya, jika dia tidak memiliki jaringan dan pertemanan yang banyak, apalagi orang-orang yang diharapkan bisa mengapresiasi karya-karyanya, maka mungkin dia akan mengalami rasa sepi karena karya-karyanya tidak mendapat apresiasi yang cukup. Namun, itu pun tidak masalah. Jika karya si anak bagus, maka sejarah akan mencatatnya, dan itu jauh lebih penting daripada dukungan tidak ikhlas orang-orang yang terlibat dalam arena sastra tersebut.

Modal budaya tentu saja penting. Modal budaya meliputi bekal ketika menjalani habitus, karena itu juga menentukan trajektori, dan secara keseluruhan adalah cara-cara yang memungkinkan seseorang untuk mengakumulasi pengetahuannya. Menulis karya sastra, jika minim pengetahuan, tentu saja sulit membayangkan

si anak akan bisa menulis karya sastra yang bermutu dalam konteks ilmu dan pengetahuan kesastraan. Pengetahuan di sini, bukan berarti si anak harus belajar ilmu sastra *an sich*², tetapi lebih penting dari itu adalah pengetahuan-pengetahuan lain yang dapat disinergikan ketika menulis karya sastra.

Pengalaman empiris yang banyak akan menjadi pengetahuan yang mendukung penulisan karya sastra. Kepahitan, kesusahan traumatik, kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan, rasa duka, penghayatan yang mendalam terhadap kehidupan, merupakan pengalaman berharga dalam menulis karya sastra sehingga karya sastra menjadi ruang refleksi bersama atas kehidupan. Ernest Hemingway ketika menulis *Laki-laki Tua dan Laut* (*The Old Man and The Sea*, 1952) perlu waktu bertahun-tahun menikmati kehidupan seorang nelayan tua yang melakukan kerjaan rutin yang sama setiap hari. Refleksi novel tersebut dalam mengisahkan bagaimana sang nelayan tua berdialog dengan alam yang gelap dan sunyi di malam hari, merupakan dialog yang sangat spiritual.

Dalam sejarah sastra, ilmu pengetahuan ini menjadi sangat penting. Banyak novel penting yang dicatat sejarah tidak ditulis oleh mereka yang memang dari awal berniat menjadi sastrawan. Beberapa pengarang penting

²Semua objek yang kita kenal berada di luar tubuh kita. Objek-objek tersebut hadir ke dalam kesadaran kita melalui pancaindra. Dengan demikian, objek-objek tersebut selalu hadir *untuk* diri kita. Jika objek tersebut hadir juga untuk orang lain, maka orang lain juga hadir sebagai objek *untuk* diri kita. *An sich* adalah sebuah hipotesis yang menyebutkan bahwa objek tersebut ada tanpa tergantung pada kesadaran kita. Dengan demikian, jika kita tidak ada, tidak memiliki kesadaran, maka objek tersebut tetap ada (Kant, 1987:23).

bahkan berprofesi sebagai dokter, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana filsafat, sarjana politik, dan sarjana lain yang tidak ada hubungannya dengan dunia kesusastraan. Memang, ketika kemudian dia menulis dan terlihat dalam dunia kesusastraan, orang tersebut perlu punya pengetahuan umum tentang kesusastraan.

Memahami posisi dan kedudukan modal ekonomi merupakan kondisi relatif untuk setiap arena sastra yang berbeda. Memang, secara prinsip dapat dikatakan modal ekonomi dapat mengkonversi modal-modal lain, tetapi tetap saja bukan sesuatu yang pasti. Mungkin Bourdieu merumuskan itu ketika dia melihat banyak kenyataan bahwa kekuatan modal ekonomi menentukan banyak hal dari masyarakat yang dia saksikan atau dia hidup di dalamnya.

Akan tetapi, dalam masyarakat Jawa Yogyakarta, misalnya, banyak hal yang tidak dengan mudah dikonversi oleh modal ekonomi. Arena sastra Yogyakarta tampaknya lebih memprioritaskan modal sosial, *sesrawungan*, daripada sekadar kekuatan-kekuatan ekonomi. Walaupun sebenarnya itu juga bukan suatu kelebihan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu kesusastraan. Secara kultural, rasa sungkan yang berlebihan, rasa *ora kepenak*, takut dimusuhi penulisnya, sungguh mematikan dinamika kritik sastra. Tentu untuk arena sastra di lokus kultural yang lain akan berbeda pula karakternya.

Sementara itu, yang tidak kalah pentingnya adalah modal simbolik. Modal simbolik adalah predikat-predikat yang dikenai dan/atau untuk seseorang, baik sebagai hasil perjuangannya sendiri atau karena faktor warisan.

Sebagai hasil perjuangan, misal terkait dengan faktor pendidikan, faktor karya, atau faktor-faktor lain terkait dengan keberhasilan seseorang secara sosial. Ada orang yang kemudian dikenal sebagai sarjana, pelopor lingkungan hidup, ustad/alim ulama, pendekar, dan lain-lain. Sebagai faktor warisan, misalnya terkait dengan warisan simbolik dari orang tuanya yang bangsawan, ulama terkenal, anak pejabat tinggi yang terkenal, atau hal-hal seperti itu.

Lebih afdol tentu saja mendapatkan modal simbolik secara mandiri sebagai hasil perjuangan sendiri. Sebagai warisan, jika tidak diimbangi dengan kerja keras sendiri, semakin tidak berharga. Kelebihannya, mereka yang memiliki modal simbolik warisan sering mendapatkan banyak kemudahan dalam kehidupan sosial. Sebagai anak ulama terkenal, maka dalam lingkungannya di Jawa misalnya, orang tersebut telah mendapat predikat *Gus*, yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan cukup banyak fasilitas sosial dan keagamaan.

Kalau ditimbang-timbang di antara empat modal tersebut mana yang lebih memiliki kekuatan? Memang modal ekonomi memiliki kemampuan mengkonversi modal yang lain, termasuk modal simbolik. Modal ekonomi seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, dapat mengakumulasi modal sosial dan budaya. Akan tetapi, akan terjadi cara-cara pragmatis yang sangat mungkin tidak sesuai dengan karakter *the rule of art* arena sastra atau kesenian pada umumnya.

Arena sastra dan seni adalah arena kontestasi karya, pertarungan utamanya tetap saja mutu karya. Modal-modal memang sangat diperlukan, tetapi bukan berarti kelengkapan modal dapat menjadikan seseorang *legitimate* dalam arenanya. Beberapa sastrawan dan penyair yang berwibawa di Yogyakarta, yang saya kenal, justru secara relatif tidak memiliki modal yang kita bicarakan. Akan tetapi, karena karyanya memang bermutu tinggi, maka modal-modal hanya menjadi pelengkap yang koheren dengan situasi tersebut.

Namun, terdapat kisah lain. Ada penyair yang dari segi kesusastaan sebenarnya tidak lebih hanya membuat puisi-puisi dengan nuansa religius, yang secara teknis tidak memperlihatkan kebaruan estetis, yang juga tidak terlalu jauh berbeda dengan puisi-puisi yang lain. Akan tetapi, penyair tersebut sangat disegani, bahkan nyaris dipuja banyak kalangan. Dalam kasus ini, teori Bourdieu tidak mampu menjelaskan. Teori Bourdieu tidak masuk ke wilayah bagaimana seorang penyair atau sastrawan menjadi demikian kharismatik.

Jika membicarakan hal tersebut, maka kita memasuki wilayah spiritual dan supranatural. Kita tidak memiliki ketangkasan sosial dalam menjelaskan bagaimana nasib seseorang membawanya menjadi penyair yang kharismatik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ternyata terdapat kekuatan dan kehendak lain yang lebih berkuasa dalam mengatur dan menentukan jalan hidup seseorang. Mungkin kita perlu mempelajari bagaimana dunia spiritual dan supranatural bekerja. Mungkin kita juga perlu mempelajari bagaimana doa-doa bekerja dan dapat mengubah nasib seseorang.

JUAL BELI SIMBOL

Hidup manusia, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia tersituasikan oleh suatu hal yang disebut sebagai tatanan simbolik. Terdapat tatanan simbolik yang secara umum berperan sebagai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut bisa mengikat secara hukum, bisa tidak. Pemberlakuan kesepakatan tersebut juga berbeda-beda ruang lingkupnya, mulai dari kesempatan lebih dari dua orang hingga kesempatan antarmanusia sedunia.

Permainan jari, bunyian-bunyian tertentu, frasa verbal yang tidak lazim, bisa jadi merupakan “permainan” yang mengarah pada simbol-simbol yang hanya disepakati sejumlah orang atau hanya kolektif tertentu. Akan tetapi, bisa jadi hal itu mengikat kesepakatan yang lebih luas, misalnya mengacungkan jempol. Terdapat beberapa simbol yang mengikat antarnegara. Bendera sebuah negara akan mengikat secara moral dan hukum untuk dihormati tiap negara. Kita suci, bukan sekadar isinya, tetapi secara fisik pun kitab suci menjadi sesuatu yang simbolik sehingga harus dihormati pemeluk dan bukan pemeluk kitab suci bersangkutan.

Ada juga kesepakatan yang bersifat historis, politis, dan sosial, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Kesepakatan simbolik terhadap gelar, apakah gelar bangsawan atau pendidikan, dapat dibedakan apakah

itu termasuk kesepakatan historis dan politis, atau kesepakatan sosial. Berbagai kesepakatan tersebut bertebaran di lingkungan hidup kita. Tebaran itu menjadikannya semacam pasar simbolik.

Artinya, bukan sekadar ruang lingkup kesepakatan, tetapi simbol-simbol pun ada yang berperan sebagai kode-kode tertentu yang disepakati kelompok-kelompok kecil, sebagai sesuatu yang bisa bersifat hukum, bersifat ekonomis, hingga sebagai sesuatu yang bersifat sakral/suci. Pelanggaran terhadap kesepakatan simbolik mengikat dalam batasan-batasan ruang lingkup, terutama subjek-subjek yang terlibat dalam kesempatan simbolik tersebut. Di samping itu, simbol-simbol mengikat secara subjektif terkait dengan derajat profan atau sakralnya.

Penghargaan kemanusiaan terhadap subjek tertentu bergantung bagaimana subjek mendapatkan dan mengelola simbol-simbol. Ada simbol yang diturunkan sebagai warisan, seperti gelar kebangsawanan. Bisa juga karena berstatus sebagai pewaris seseorang yang memiliki kekayaan simbolik tertentu. Namun, kenyataannya, banyak simbol warisan yang semakin turun harganya karena terjadinya pergeseran tata simbolik itu sendiri. Dulu seorang bangsawan dihargai karena ia memiliki modal ekonomi yang besar. Sekarang, gelar bangsawan jika tidak didukung modal ekonomi yang besar akan kurang berharga.

Mendapatkan atau bahkan membeli gelar-gelar keserjanaan, atau berbagai gelar lainnya, termasuk usaha untuk mendapatkan modal simbolik. Banyak

orang, dalam berbagai cara, berusaha mendapatkan modal simbolik tersebut, baik dengan bekerja/belajar keras hingga dengan prosedur-prosedur di luar aturan³. Perlu digarisbawahi bahwa aktivitas manusia sebenarnya dimaksudkan untuk mengakumulasi simbol-simbol tersebut agar terus membesar dan dapat dijadikan modal hidup.

Dalam perjalanannya, modal simbolik itu mungkin didapatkan secara warisan, membeli, atau karena kerja keras, sehingga sedikit banyak terakumulasi. Namun, modal simbolik itu kelak juga dimanfaatkan untuk dijual lagi, dalam transaksi yang berbeda. Ada transaksi yang bersifat ekonomi, tetapi tidak tertutup kemungkinan transaksi bersifat politik, atau transaksi bersifat simbolik itu sendiri.

Memang, sifat, bentuk, dan katakter simbol menentukan bagaimana simbol-simbol diperjualbelikan. Hal itu disebabkan bagaimana menghargai simbol, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penghargaan terhadap gelar pendidikan, sebagai misal gelar kesarjanaan tertinggi, biasanya berjalan beriringan antara yang kualitatif dan kuantitatif. Namun, gelar kebangsawanan, tidak mesti berjalan beriringan antara yang kualitatif dan kuantitatif. Gelar Kiai berjalan beriringan dengan popularitasnya.

Dalam kekuasaan yang semakin dikuasai teknologi media sosial, jual beli simbol-simbol dalam bentuk jumlah *followers* atau pun jumlah *subscribes*, berhubungan

³Prosedur di luar aturan ini mengingatkan saya akan konsep *procedure of truth* dari Alain Badiou, yakni bahwa proses atau prosedur kebenaran akan ikut menentukan kelak subjek menjadi subjek yang bagaimana.

dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif, tetapi belum tentu berhubungan dengan hal kualitatif. Hal yang ingin ditegaskan adalah bahwa simbol-simbol demikian berperan dalam kehidupan kita. Tanpa tatanan simbolik, walaupun serba mengatur, mungkin hidup kita akan kacau, karena tidak ada hal yang menjadi pegangan simbolik

Harga modal simbolik akan berbeda dalam ruang yang berbeda. Seorang doktor ekonomi akan tidak terlalu berharga di sebuah komunitas religius seperti pesantren atau di komunitas masyarakat miskin. Di pesantren, yang berharga adalah gelar Kiai Haji. Sebaliknya, di kampus, gelar Kiai Haji tidak akan cukup berharga. Di komunitas masyarakat miskin yang berharga bukan doktor ekonomi, tetapi orang kaya yang suka membagi-bagikan rezeki kepada masyarakat miskin tersebut. Pernyataan-pernyataan tersebut tentu saja tidak cukup membuat nyaman.

Memang, gelar akademik dan gelar kiai itu berbeda proses mendapatkannya. Yang pertama lebih dalam jalur formal (biasanya ada sertifikat sebagai bukti), dan yang kedua adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat atas nama pengabdian yang telah diberikan orang tersebut untuk menjadi seorang kiai. Tentu, proses untuk mendapatkan gelar kiai jauh lebih berat daripada sekadar sarjana. Di beberapa tempat, saya melihat bahwa cukup banyak orang memaksa untuk segera mendapatkan gelar haji. Setelah pulang dari Mekah, maka simbol kehajian dijadikan komoditas untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun.

Seperti layaknya sebuah pasar, begitu banyak simbol-simbol yang berdimensi “kelas” dan “status”. Walaupun sejarah penggunaan kata “kelas” dan “status” itu berbeda, tetapi dalam konteks simbolik bisa bekerja sama menentukan harga. Di sinilah permainan kuasa terjadi. Kuasa dominan, baik bersifat ekonomi maupun ideologis akan menentukan mana yang berharga dan mana yang tidak, terkait mana yang menguntungkan pemilik kekuasaan. Hal itu justru sangat dirasakan di negara bekas jajahan Barat, seperti Indonesia.

Dalam praktik kelas ataupun status, kemudian diyakini ada barang yang secara simbolik mahal/berharga dan ada yang tidak berjalan beriringan dengan harga kuantitatif barang/bendanya. Itulah sebabnya, jika sebagian di antara masyarakat membeli sesuatu bukan karena fungsinya, tetapi lebih karena aspek simboliknya. Apakah kita tidak tahu bahwa barang/benda yang kita beli itu mahal, dan kita tertipu. Tidak, kita tahu kita tertipu secara simbolik, dan kita terus membelinya. Ini semacam kenikmatan yang ironis.

Di antara sebagian masyarakat melakukan itu demi peningkatan modal simbolik yang perlu dimiliki. Jika tidak mampu, sebagian membeli benda palsu (istilah populer KW1, KW2, KW3, dst.), untuk memberi citra simbolik diri berkelas atau berstatus. Itulah yang terjadi, banyak di antara kita lebih menjadi diri seperti yang diharapkan orang lain, daripada yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Perlu ada proses penyadaran-penyadaran yang lebih progresif.

GAYA HIDUP DAN NGGAYA

Kajian tentang gaya hidup sudah cukup banyak dilakukan. Secara prinsip, yang dimaksud dengan gaya hidup adalah suatu model kehidupan masyarakat ekstra-modern terkait dengan praktik kerja, menikmati hidup dan hiburan, hingga ke hal-hal teknis seperti cara berbahasa, makan, berpakaian, pemilikan benda-benda, dan sebagainya (bdk. Chaney, 1996; Walters, 2006). Hal gaya hidup di sini lebih ditempatkan sebagai perubahan pola dan cara hidup karena dimungkinkan oleh fasilitas infrastruktur teknologi modern.

Kadang, ada juga yang menyebutnya sebagai gaya hidup pascamodern. Gaya penampilan, misalnya, terjadinya percampuran antara simbol dan aksesori zaman dulu dan sekarang, motif atau kode-kode dari berbagai tempat, warna dan model yang bertentangan, dan sebagainya.

Kadang, bukan soal harga, juga bukan soal citra. Sebenarnya, di balik itu, apa yang sedang terjadi?

Konteks dan genre gaya hidup (di Indonesia, dan khususnya di Jawa) bukan hanya dapat dilihat sebagai gejala hidup modern atau pascamodern. Akan tetapi, juga dapat dilihat dalam konteks kultural-historis, kelas dan status, bahkan hingga ke ruang-ruang yang lebih khusus, misalnya ruang agama. Hal ini terkait bahwa

pengertian gaya, juga kemudian dikenal dalam bahasa Jawa yang biasa disebut dengan ungkapan *nggaya*.

Pengertian *nggaya*, bukan saja dalam pengertian gaya dalam frasa gaya hidup di atas. Pengertian *nggaya* meliputi suatu ekstra hidup non-formal, tidak saja dalam pengertian adanya transformasi dari satu bentuk kehidupan formal ke hidup gaya baru, tetapi juga ditempatkan sebagai satu kategori tidak biasanya, bahkan sebagian dipandang dengan sinis. Kesinisan itu terjadi karena perilaku *nggaya* tersebut bukan saja sebagai hal “aneh”, atau seperti *wagu*, tetapi juga sebagai sesuatu yang bersifat *lebay* (berlebihan).

Kalau dalam konteks kultural-historis, perilaku *nggaya* dapat dilihat dengan adanya perubahan, sebagai misal, dulu orang pergi ke kantor selalu berpakaian formal. Namun, sekarang, pada hari-hari tertentu, sudah banyak yang memulai pakaian tradisional atau pakaian daerah. Memang, ada semacam ajakan kultural, semacam strategi kebudayaan, untuk kembali mengemas dan menampilkan jati diri tradisinya. Akan tetapi, dalam praktiknya, terlepas ada yang memang cinta budaya asli, sangat banyak yang mempraktikkan pakaian itu sebagai ajang *nggaya*.

Ada keasyikan, mungkin sedikit kebanggaan, untuk mendapatkan pencitraan bahwa kita adalah penyokong dan penyangga budaya kita sendiri. Namun, dalam praktik keseharian yang lain, kita sama sekali bukan sebagai penyangga budaya tradisi, melainkan orang-orang modern. Pakaian tradisi tidak lebih sebagai aksesoris kehidupan yang hanya dipakai seolah

sebagai seremoni dan swafoto. Media sosial memang serba menjanjikan.

Berbeda dibanding konteks kultural-historis, dalam konteks kelas sesuatu menjadi *nggaya* ketika seseorang memaksakan penampilan hidup di luar kemampuan ekonominya. Tentu kita tidak tahu persis soal kemampuan ekonomi seseorang. Kita hanya bisa tahu sebagai orang yang mengenal seseorang itu secara baik dan cukup dekat. Namun, kejadian seperti ini cukup banyak. Hal ini pernah disindir Bourdieu (dalam Robson dan Sanders (Ed.), 2009:63–71) sebagai cara menaikkan citra kelas dengan biaya yang terjangkau. Namun, cerita bahwa untuk menaikkan kelas dengan cara hidup berhutang atau cara-cara tertentu yang lain juga cukup sering kita dengar.

Namun, terdapat kisah sebaliknya, bagaimana orang kaya berlagak (*nggaya*) dengan berperilaku hidup miskin. Hal ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, supaya si kaya tadi mendapat pujian sebagai orang yang sederhana dari mereka yang mengetahuinya. Akan tetapi, tujuan kedua adalah bisa saja ingin memberikan kejutan-kejutan terhadap situasi tertentu yang memungkinkan bahwa si kaya tadi aslinya adalah orang kaya.

Bahwa kita juga pernah mendengar ada orang kaya bosan dengan kekayaannya dan memilih hidup sederhana juga bukan informasi baru. Bagian kisah ini, jika benar merupakan gaya hidup dalam pengertian modern, bukan sekadar *nggaya*, tetapi memang gaya hidup. Namun, mungkin kisah seperti ini tidak terlalu banyak.

Sementara itu, *nggaya* dalam pengertian status adalah mereka yang memutarbalikkan atau menyiasati status sosial mereka sebagai cara-cara untuk mendapatkan pujian, atau

untuk tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi atau politik. Sebagai misal adalah mereka yang masih memakai gelar kebangsawanan atau gelar akademik yang banyak. Gelar-gelar itu dipakai tidak pada tempatnya karena ada motif-motif tertentu. Maksud *nggaya* di sini adalah suatu cara hidup di luar proporsi kepantasan sehingga terkesan menjadi janggal.

Namun, yang tidak kalah menariknya adalah *nggaya* dalam kehidupan beragama. Baik media sosial khususnya maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari, kita sering disuguhi pihak-pihak yang memberitakan atau menginformasikan kedermawanan, bersedekah, atau semacam ketakwaan. Kedermawanan, suka sedekah, atau ketakwaan bisa saja dipandang sebagai gaya hidup modern, tetapi bisa juga dalam pengertian *nggaya*. Jika kita berusaha belajar agama dengan baik, maka kita tahu bahwa kedermawanan, bersedekah, atau terutama ketakwaan, justru perilaku atau tindakan yang sebaiknya tidak perlu diketahui publik. Ketika perilaku itu diketahui publik, maka hal itu bukan lagi namanya ketakwaan atau kedermawanan, tetapi sebagai gaya hidup atau sebagai *nggaya*.

Demikianlah, banyak hal yang tidak diketahui secara pasti berbagai tindakan dalam kehidupan. Kita hanya bisa menafsirkan, mungkin sebagian dari tafsir kita cukup akurat, tapi sebagian yang lain mungkin juga tidak benar. Bagaimana pun manusia adalah makhluk yang sebenarnya dikaruniai hati dan jiwa yang halus. Kita sangat sulit untuk mengetahui apa sesungguhnya yang tersimpan dan tersembunyi dalam hati, sesuatu yang disebut Arifin C. Noor seperti *sumur tanpa dasar*.

KELAS, STATUS, DAN HARGA DIRI

Saya mencoba menganalisis masyarakat dan budaya Jawa yang selama ini saya tinggali. Di sini, saya ini meminjam konsep Marx dan Weber, tentang kelas dan status. Kedua ilmuwan tersebut berpengaruh dalam menjelaskan dinamika warga (rakyat), masyarakat, dan negara. Konsep kelas terkait dengan posisi dan ekonomi. Memang batasnya tidak cukup pasti, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat lebih mudah untuk dilihat secara empiris terkait dengan benda-benda kepemilikan atau juga penampilan.

Sementara itu, status tidak semata dalam konteks ekonomi, tetapi bisa terkait dengan posisi sosial dan “struktural” seseorang dalam masyarakat. Ada penghargaan yang lebih dibanding mereka yang tidak memiliki status tertentu. Artinya, sangat mungkin seseorang dianggap tidak memiliki status, atau yang secara ekonomi merupakan kelas bawah (*wong cilik*). Status juga bisa didapatkan secara warisan, seperti gelar-gelar tertentu yang bersifat keturunan. Status struktural biasanya terbatas waktu, tetapi status keturunan bisa selamanya. Saat ini, terdapat tumpang tindih antara kelas dan status ketika kemudian orang lebih dihargai jika terlihat lebih sukses secara ekonomi.

Dalam dilema kelas dan status tersebut, saya ingin menghadapkannya dengan bagaimana masyarakat Jawa

mengekspresikan dirinya tentang harga diri. Uraian ini hanya bersifat umum dan akan terjadi banyak reduksi yang kurang sesuai dengan kenyataan. Terdapat hal-hal yang kontradiktif bagi orang Jawa (subjek Jawa) tentang praktik-praktik bagaimana ia menempatkan dirinya baik dalam konotasi kelas maupun status, yang bertumpang tindih tersebut.

Perlu ditegaskan, secara umum orang Jawa tidak terlalu peduli dengan kelas ataupun status sosial dirinya. Biasanya yang masih mencoba mengingatkan itu adalah segelintir orang dari golongan atas dan kebetulan memiliki status khusus. Di luar itu, filosofi dan etik *nrima* dalam masyarakat Jawa membuat masyarakat kebanyakan menerima kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang menyebabkan mereka melihat itu sebagai nasib. Orang Jawa melihat jalan nasib seseorang sebagai sesuatu yang relatif tidak dipersoalkan. Nasib orang itu sendiri-sendiri, begitulah ungkapan keberterimaan yang sering kita dengar.

Namun, ketika orang Jawa mempersoalkan dan berbicara harga diri, sebenarnya ia sedang menaikkan baik kelas ataupun status sosialnya. Bagi orang Jawa (sekali lagi yang saya lihat di Yogyakarta) harga diri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hidupnya. Tidak peduli dia masuk dalam kategori *wong cilik*, apalagi dari kalangan atas, harga dirinya akan mereka jaga dengan caranya masing-masing.

Harga diri bagi orang Jawa terkait dengan bagaimana dia menghargai dirinya, agar tidak dipandang rendah, tidak dipandang seperti orang tidak punya, tidak

dipandang seperti orang pelit dan tidak punya malu. Dalam batas tertentu, pengertian harga diri bertumpang tindih dengan pengertian gengsi. Gengsi hanya terkait dengan sisi-sisi tertentu dari harga diri seperti malu kalau terlihat seperti butuh uang (dalam bahasa sehari-hari dikenal kata *matre*, kemateri-materian, kebenda-bendaan), gengsi kalau penampilannya kelihatan tidak berkelas. Akan tetapi, itu hanya dikenai kepada mereka yang sadar kelas atau status. Karena, seperti telah disinggung, secara umum orang Jawa tidak peduli kelas atau status, walau secara kontradiktif peduli terhadap harga diri.

Dengan demikian, harga diri merupakan suatu pengertian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Bersifat kuantitatif karena memang tidak jarang persoalan harga diri masuk ke ruang-ruang transaksional yang ada harga nominalnya. Bersifat kualitatif karena ada transaksi dalam penghargaan yang tidak bisa dihargai secara nominal.

Salah satu yang cukup menonjol adalah kasus *nyumbang* (memberi sumbangan secara sukarela). Orang Jawa cukup terikat dengan mekanisme dan sistem *nyumbang*. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan terdapat berbagai ritus hajat, mulai dari kelahiran hingga kematian. Terdapat perasaan tidak enak jika tidak *nyumbang*, tetapi perasaan itu lebih sebagai menjaga harga diri, khawatir apa kata orang jika tidak *nyumbang*. Dalam praktiknya, kemudian, banyak yang cukup memaksakan diri untuk *nyumbang*.

Juga sebaliknya, dalam ritus hajat tersebut, sebagian dari warga masyarakat memaksakan diri untuk menyelenggarakan hajat walau sebenarnya mereka kurang

mampu. Akhirnya, jalan yang mereka tempuh adalah meminjam uang kepada orang-orang dekat. Kelak orang ini akan terjepit dalam dua harga diri yang berbeda posisinya. Pertama malu (merasa tidak menjaga harga diri) jika tidak mampu menyelenggarakan hajatan. Kedua, merasa jengah dengan pemilikan hutang. Mekanisme ini akan selalu berulang dan secara relatif akan sering terjadi.

Memang, ada batas tertentu bahwa pemaksaan diri seolah menjaga harga diri itu terjebak juga dengan apa yang disebut gengsi. Ada orang yang sebenarnya secara ekonomi tidak cukup baik, tetapi telanjur memberi citra bahwa dia hidup serba berkecukupan, misalnya karena memaksakan diri memberi perangkat penampilan yang relatif mahal. Ternyata, kita juga tahu bahwa sebagian dari mereka sering berhutang ke sana ke mari hanya untuk menjaga penampilan. Menjaga penampilan itu bukan masalah kelas atau status.

Sementara itu, harga diri yang bersifat kualitatif adalah persoalan tolong menolong; hal *kepotangan budi*. Bentuk pertolongan itu tidak dalam bentuk nominal, tetapi misalnya dalam bentuk pertolongan *kepotangan* silaturahmi, *kepotangan* pernah ditolong dalam bentuk kualitatif lainnya. Orang Jawa kadang merasa malu, harga dirinya seolah tidak dijaga, jika pernah ditolong, tetapi tidak atau belum bisa mendapat kesempatan membalas.

Namun, tidak mustahil *kepotangan* itu sesuatu kejadian yang kurang baik. Misalnya, ada seseorang yang merasa pernah “direndahkan” dan beberapa

orang tahu peristiwa itu. Orang tersebut juga merasa harga dirinya terganggu dan selalu kepikiran untuk membalas. Membalas pun ada dua cara, pertama dengan membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, atau dengan membuktikan sebaliknya. Cara kedua, orang tersebut mencari kesempatan membalas dengan cara yang lebih kurang sama, bisa tertutup (*kasak-kusuk*), bisa juga secara terbuka.

Hal yang ingin digarisbawahi adalah bahwa persoalan harga diri bukan soal kelas atau status. Terlepas dari mereka yang seolah berkelas dan memiliki status tertentu, harga diri menjadi persoalan semua orang Jawa untuk menjaga, seolah mereka memiliki kelas dan status tertentu. Tidak ada yang salah dalam hal ini, setiap orang berhak berjuang menjaga harga dirinya: apakah hidupnya diperhitungkan terkenal atau berstatus atau tidak.

Prinsip yang perlu dikaji adalah bagaimana cara-cara dan prosedur seseorang untuk mendapatkan harga dirinya. Apakah semakin membawa kebaikan dalam hidupnya atau tidak. Mari kita kaji dan kita buktikan bersama untuk setiap kasus yang kita hadapi.

NAFSU DAN KEJAHATAN

Ada yang menyamakan pengertian nafsu lebih kurang sama dengan hasrat. Ada yang menyebutnya sebagai syahwat. Saya memakainya dalam konotasi sehari-hari, seperti dalam frasa nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah, dan sebagainya. Nafsu adalah keinginan-keinginan dalam diri (tubuh) yang perlu dan harus dipuaskan terkait dengan keinginan natural. Manusia secara natural merasakan lapar dan haus. Oleh karena itu, manusia membutuhkan makan dan minum. Dalam situasi tertentu, manusia tersebut terlihat sangat bernaafsu makan sesuatu.

Kebutuhan terhadap seks secara alami juga dialami oleh diri/tubuh sehingga manusia memiliki nafsu seks, atau birahi terhadap rasa nikmat. Terdapat kondisi meminta pemenuhan kepuasan karena ada hal yang tidak terpuaskan, atau sesuatu kejadian yang tidak seperti harapan, kemudian muncullah rasa marah, benci, muak, dan tidak jarang diikuti tindakan mengumpat atau bahkan kekerasan.

Namun, terdapat juga nafsu yang non-natural, nafsu ingin kaya, nafsu ingin sukses, nafsu ingin terkenal, dan lain-lain. Nafsu non-natural ini lebih sebagai konstruksi sosial. Hal yang dimaksud dengan non-natural itu sesuatu yang tidak langsung. Nafsu ingin kaya, ingin sukses, atau ingin terkenal itu karena kelak

kalau tercapai bisa memuaskan nafsu-nafsu natural. Nafsu tersebut kemudian membuat seseorang berusaha keras, dalam berbagai cara, untuk mendapatkannya.

Tidak ada yang salah dengan nafsu, bahkan pun jika implikasi nafsu tersebut hadir sebagai tindakan kekerasan. Sejauh pergerakan dan penyaluran nafsu tidak melanggar konvensi dan kaidah apa yang ingin saya sebut sebagai prosedur logis dan prosedur “hukum alam” (*sunatullah*) dalam hubungan-hubungan fungsionalnya. Juga, sejauh dalam proses pergerakan nafsu tersebut tidak ada pihak-pihak yang teraniaya, dirugikan, disakiti, atau dirampas hak-hak kemanusiaannya. Jika perlu masih ditambahkan, bahwa dalam penyaluran nafsu tersebut dipraktikkan dalam hubungan-hubungan yang setara dan berkeadilan.

Dari sini kita tahu, bahwa sebenarnya banyak dari pergerakan nafsu tersebut sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan hukum logis dan “hukum alam”. Itu pula sebabnya, jika kita bersandar pada kenyataan, kehidupan dunia berjalan cukup damai. Berita-berita tentang kejahatan, sebagai representasi nafsu, walaupun setiap hari kita dengan dan baca, tetapi persentasenya sangat kecil dibanding hidup damai dan tentram. Hal-hal representasi tersebut bisa kita kaji lebih jauh secara eksak.

Selain itu, sangat banyak pergerakan nafsu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, sehingga tidak muncul ke permukaan untuk diuji keberadaannya. Namun, tetap saja walau tidak diketahui dan dilakukan secara sembunyi atau diam, ada

prosedur yang harus dilewati. Se jauh hal tersebut tidak mengganggu, merugikan, atau merusak publik, maka tidak banyak yang dapat dipersoalkan.

Masalah, kapan nafsu menjadi kejahatan. Kejahatan adalah suatu peristiwa yang dalam prosedur (atau mekanisme pergerakannya) dan dalam fungsi-fungsi posisional-relasionalnya tidak sesuai dengan hukum logis dan hukum alam (*sunatullah*). Hukum logis sebenarnya meminjam hukum-hukum di matematika (rumusan tentang prosedur keteraturan) dan hukum alam pada hukum-hukum di fisika. Dengan demikian, formula itu menjadi suatu pola yang pasti dan dapat dibuktikan.

Kembali ke pertanyaan tentang kapan nafsu menjadi kejahatan. Berangkat dari definisi tentang kejahatan, maka kita perlu menjelaskan adakah bukti bahwa dalam pergerakan nafsu tersebut ada yang tidak sesuai dalam *frame* prosedurnya. Jika terdapat sejumlah bukti tidak sesuai dengan prosedurnya, maka hal tersebut di luar prosedur kebenaran, sehingga dapat dikatakan adalah kesalahan bahkan kejahatan di dalamnya.

Memang, masih terdapat sejumlah perbedaan pendapat terkait dengan prosedur kebenaran tersebut. Soal nafsu seks, misalnya. Kalau secara hukum logis-normatif dan hukum alam, pergerakan seks secara natural adalah hubungan berpasangan lain jenis. Namun, bagaimana mereka yang melakukan hubungan seks sejenis. Padahal, mereka melakukan hubungan seks sejenis dengan rasa suka, sama-sama bahagia, tidak ada

yang teraniaya atau dirugikan, pun sama-sama setara kedudukannya.

Artinya, sejauh dalam pengertian di atas, hubungan seks sejenis bisa saja bukan kejahatan, tetapi mungkin sekadar tidak normal saja. Itu pun jika batas normal dan tidak normal hanya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang bersifat pantas dan tidak pantas. Jika itu yang terjadi, hukum tidak mampu menjangkau dan menempatkan kepantasan sebagai kejahatan. Kejadian seks sejenis bisa saja bukan persoalan hukum.

Dalam peristiwa pergerakan nafsu tersebut, kita perlu menentukan keberadaan kita dalam posisi meyakini hal yang mana. Di dalam Quran, misalnya, telah di-*nas*-kan, bahwa Allah mengatakan; *Aku ciptakan makhluk dengan cara yang berbeda-beda dan berpasang-pasangan* (Arum, ayat 21). Artinya, jika mengikuti itu, berpasang-pasangan adalah sesuatu yang alami dan kodrati. Jika dalam prosedur mencari kebenaran ada yang melanggar hukum alam (kodrat), maka hal itu dianggap sebagai kejahatan.

Pertanyaan lain, apakah bercumbu (menyalurkan nafsu), atau marah-marah secara terbuka di ruang publik dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum logis atau *sunatullah*. Ternyata jawabannya bisa sangat berbeda-beda, tergantung konteks kulturalnya, konteks kejadiannya, posisi-posisi dan relasi-relasi yang bisa diuji sebagai cara untuk menjawab yang lebih akurat.

Masih banyak pertanyaan lain apakah jika suatu ketika terjadi konflik, dan ada kekerasan di dalamnya, apakah termasuk dalam kejahatan. Jika

ada kekerasan, sudah dapat dipastikan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap prosedur kebenaran. Jika termasuk sebagai kejahatan, itu masalah hukum. Namun, bukan berarti semua kekerasan adalah kejahatan. Bahkan banyak kekerasan yang dilegalkan, seperti pertandingan-pertandingan (olahraga) yang secara inheren memuat kekerasan di dalamnya. Meski demikian, tetap ada peraturan dalam olahraga tersebut. Jika melanggar peraturan itu, maka dianggap melakukan kesalahan.

Tampaknya, hal yang perlu dipahami adalah bahwa ternyata kejahatan juga berlapis-lapis, mulai dari dimensi yang paling ringan dan tipis (hingga sulit dijangkau hukum), hingga kejahatan berat. Kejahatan yang paling ringan dan tipis, karena terkait dengan batas kepantasan dan tidak pantas, tergantung tempat di mana kejadian itu tetap pantas atau tidak. Di beberapa lokal tertentu, jalan bergandengan tangan (pacaran) bisa bermasalah. Namun, di beberapa tempat lain, jalan sambil berpelukan tidak menjadi masalah.

Hal yang banyak kita lakukan (di pengadilan) adalah untuk menguji pelanggaran terhadap prosedur kebenaran adalah derajat pelanggaran itu sendiri. Bagaimana menguji tingkat pelanggaran seperti korupsi, pembunuhan, atau pengedar narkoba. Semakin banyak dan berat pelanggaran terhadap prosedur kebenaran, maka semakin berat pula hukuman terhadap pelaku kejahatan itu. Namun yang jelas, dalam praktik melakukan kejahatan, karena ada nafsu yang tidak terkendalikan dalam diri kita.

MIGRASI SOSIAL

Migrasi adalah pergerakan atau perpindahan dari satu keberadaan/kondisi ke kondisi lain. Migrasi ada dua, migrasi alamiah dan migrasi non-alamiah (sosial). Seseorang, dalam hidupnya, akan mengalami migrasi dalam berbagai cara dan keterbatasan. Migrasi alamiah, seorang mengalami bayi, untuk pindah menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Migrasi alamiah berpindah sesuai dengan tuntutan alam. Tidak ada yang bisa menghindarinya.

Migrasi non-alamiah merupakan perpindahan hidup dalam kehidupan sosial. Paling tidak ada lima migrasi (dalam payung migrasi sosial), yakni migrasi teks, migrasi ideologi, migrasi kelas, migrasi tindakan, migrasi simbolik, dan migrasi subjek (bdk. dengan Rancière dalam Chambers, 2013; Rancière, 2000).

Migrasi teks paling banyak dibicarakan dalam kajian sastra dan bahasa. Kajian ini menjelaskan kemampuan dan sebab-sebab seorang melakukan perpindahan dalam teknis dan format menulis suatu teks. Sebagian besar penulis kita tidak cukup memiliki motif yang besar dalam melakukan migrasi teks. Banyak dari kita tidak siap untuk tidak terlibat dalam arus utama. Menulis belum dianggap sebagai tindakan radikal. Tentu tetap ada beberapa di antaranya, seperti Seno Gumira Ajidarma.

Migrasi ideologi, walau relatif stabil, tetap saja ada kemungkinan seseorang bermigrasi secara ideologis. Pengalaman-pengalaman traumatik dan situasi yang di luar kendali, dapat menyebabkan migrasi ideologi pada diri seseorang. Rayuan-rayuan, dalam posisi kalah dan tertindas, dalam berbagai caranya, juga dapat menyebabkan seseorang bermigrasi. Namun, migrasi ideologi karena rayuan tidak diakui.

Yang menarik adalah membicarakan migrasi kelas. Migrasi kelas dalam pengertian awalnya adalah migrasi dalam ruang ekonomi; dari keadaan miskin menjadi kaya. Dulu, masyarakat kita bukan sesuatu yang dikondisikan oleh ekonomi. Namun, berbagai ideologi baru menyebabkan masyarakat kita tertawan dalam kondisi itu. Kemudian, cukup banyak dalam masyarakat kita bercita-cita untuk sukses, khususnya kaya. Dengan berbagai cara, kekayaan diraih dan ditempuh.

Berbagai cara yang pada mulanya merupakan kerja keras, karena suatu tindakan ekonomi, karena situasi, sistem, dan struktur ekonomi yang tidak mendukung, tindakan ekonomi menjadi tindakan politik. Artinya, di sini juga terjadi migrasi tindakan, dari sesuatu yang prosedural dalam sistem, menjadi tidak prosedural. Ketika tindakan ekonomi menjadi tindakan politik, yang terjadi adalah manipulasi tindakan itu sendiri. Tidak mengherankan kemudian muncul tindak korupsi, mencuri, maling, dan sebagainya.

Migrasi tindakan pun masih terbagi lagi menjadi tindakan spontan atau tidak spontan. Migrasi ekonomi ke migrasi politik sebagian besar merupakan migrasi

tidak spontan. Akan tetapi, migrasi dari takut menjadi tiba-tiba berani, kadang kita mengalaminya sebagai suatu spontanitas. Tindakan menolong orang, kadang juga merupakan tindakan spontan. Namun, jika kita mau jujur, sebenarnya spontanitas seperti ini semakin jarang.

Migrasi simbolik secara umum menuntut kesepakatan arbitrer masyarakat dalam lingkungan internalnya. Simbol-simbol terkait hubungan penanda dan petanda, ada yang berhubungan sebagai sesuatu yang bernilai sakral, tetapi juga banyak yang profan. Semisal, sekelompok masyarakat tertentu yang merusak makam, merusak perangkat ritual *sesajen*, dan sebagainya. Hal ini terkait bahwa terdapat sekelompok orang yang bermigrasi secara simbolik untuk pindah ke simbol-simbol lain.

Berbeda dengan migrasi yang lain, migrasi simbolik sebagai sesuatu yang bersifat kesepakatan bersama. Artinya, migrasi simbolik dilakukan bersama-sama agar hubungan penanda dan petanda diakui dan disepakati. Migrasi simbolik termasuk jarang terjadi karena hal ini terkait dengan kepercayaan dan keyakinan yang telah tertanam dalam diri masyarakat. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Ketika membangun dan merehab masjid lama, perpindahan warna dari putih ke hijau, misalnya, termasuk migrasi simbolik.

Di atas semua itu, berbagai migrasi di atas secara langsung berhubungan dengan migrasi subjek. Migrasi subjek adalah perpindahan posisi sosial seseorang, baik karena usaha sendiri atau lingkungan yang mendukung,

baik spontan maupun tidak. Pindah kerja, pindah profesi, pindah hobi termasuk varian dari migrasi subjek. Ada yang keluar dari PNS kemudian menjadi pedagang. Ada yang dulunya orang nakal, kemudian menjadi ustad.

Namun, sebenarnya banyak dari kita yang tidak memiliki keberanian untuk migrasi. Jika mungkin berani, maka kondisi atau tatanan yang tidak mendukung. Jika tatanan mendukung, maka masih ada yang Maha Menata Kehidupan. Kita tidak bisa melawan takdir kita sendiri.

MAGISME SOSIAL

Selalu saja muncul dalam berbagai pernyataan, mungkin juga tidak dinyatakan secara eksplisit, ungkapan doa, harapan, permintaan, atau apapun. Ungkapan itu misalnya: semoga sukses, semoga sehat selalu, semoga bahagia, semoga diampuni segala kesalahan, mohon maaf lahir batin, semoga panjang umur, semoga sama-sama diberkahi, semoga menjadi keluarga *sakinah mawadah*, semoga kita semua diampuni dosanya, dan sebagainya.

Mungkin ungkapan itu sebagian cuma kelatahan. Hampir sebagian besar ungkapan-pernyataan dalam ritus sosial, ungkapan tersebut telah diformulasikan, dikodekan, dan disemiotisasi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sering tak disadari lagi, jika teman ulang tahun; maka ungkapan permintaan dan doa bertaburan: semoga panjang umur. Jika ada hari-hari besar agama, maka banyak yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jika ada handai-tolan sakit: semoga cepat sembuh. Jika ada kematian maka: semoga almarhum(ah) diampuni kesalahannya dan diterima kebaikannya, *husnul khatimah*.

Ilmu sosial selalu punya keterbatasan memahami dan menganalisis apa dan siapa yang akan mengabulkan doa, permintaan, dan harapan kita itu. Kelak ilmu sosial menjelaskan bagaimana orang tersebut berusaha, bagaimana peranan orang lain dalam hidupnya, apakah

tatanan masyarakat mendukung atau tidak. Kemudian, ilmu sosial pun mendefinisikan kriteria apa yang disebut orang sukses, orang yang panjang umur, orang yang sehat, orang yang bahagia, dan sebagainya.

Kenyataannya, dalam praktik kehidupan sehari-hari selalu ada tumpang tindih antara yang magis dan realis, antara yang supranatural dan natural-empiris, antara yang tampak dan yang halus (tidak terlihat), antara harapan, doa, cita-cita dengan kejadian sesungguhnya. Walaupun hal magis tidak diakui dalam dunia modern yang rasional dan positif, tapi, saya duga, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat mengabaikan keberadaan hal-hal yang tidak tampak, tidak bisa dilihat, walaupun mungkin sebagian yang lain seperti sesuatu yang seolah dapat diketahui.

Memang, hal yang tidak diketahui itu banyak imajinasinya. Dalam berbagai kebudayaan manifestasinya beragam, ada yang disebut sebagai hantu, setan, genderuwo, kuntilanak, leak, atau bahkan jin. Setiap kebudayaan memiliki namanya sendiri-sendiri, bahkan hingga ratusan. Di Jawa, khususnya masyarakat pesisir selatan Jawa, memiliki kepercayaan yang disebut Nyi Roro Kidul. Dipercaya juga Nyi Roro Kidul itu menjadi ratu selatan yang memiliki istana agung dan kekuatan tiada tara. Cukup banyak orang yang percaya akan kekuasaan Ratu Kidul dan secara periodik pemeluknya melakukan ritual untuk bernegosiasi dengan Ratu Kidul agar menjaga dan membantu kehidupan yang lebih baik.

Kita tidak memaksudkan harapan, doa, dan permintaan kita itu dikabulkan oleh para setan, hantu,

jin, atau bahkan Ratu Kidul sekalipun. Dalam ungkapan doa dan harapan baik tersebut selalu saja kita berhadapan dengan kepasrahan bahwa akan terdapat proses dan sinergi sosial, alam, dan berbagai kekuatan gaib, sesuatu yang magis, yang tidak mudah dijelaskan secara empiris, yang seolah mengatur kehidupan menjadi serba kebetulan.

Serba kebetulan dalam arti bahwa bahkan beberapa detik ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu nanti bertemu siapa, makan apa, tidur di mana, atau bahkan kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Artinya, hal hidup ke depan adalah hal magis dan misterius yang bahkan ilmu kita yang sudah canggih pun tidak mengetahuinya.

Memang kemudian, karena hidup itu berpola—ada sistem, struktur, dan rentang waktu—maka kita yang terlibat di dalamnya pun merencanakan segala sesuatunya sehingga kita dapat memprediksi, misalnya, bahwa nanti malam kita masih tidur di rumah masing-masing, sesuai rencana kita tahu kira-kira akan makan apa, sesuai rencana kita tahu bahwa besok akan pergi ke mana. Semua seolah diharapkan sesuai rencana.

Dengan demikian, waktu atau masa ke depan adalah sesuatu yang magis yang diam-diam kita berharap berpihak sesuai dengan harapan, permintaan, dan doa kita. Namun, tetap saja itu tidak bisa menjawab siapa yang menentukan dan mengatur masa depan kita, bahkan siapa yang bisa memastikan hidup kita beberapa jam ke depan. Sosiologi kehidupan hanya bisa menjangkau berdasarkan model dan pola-pola yang sudah terjadi.

Persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana manusia atau masyarakat menempatkan fungsi-fungsi

dan relasi-relasi antara yang magis dan yang nyata. Di sinilah kemudian Faris (2004:2–25) memformulasikan lima kecenderungan fungsi dan relasi, yakni yakni *the irreducible element* (elemen tak tereduksi), elemen yang tidak bisa diuraikan atau dipahami berdasarkan logika modern, berupa peristiwa magis, aneh; *phenomenal world* (dunia fenomenal); *unsettling doubts* (keraguan yang meresahkan); *merging realms* (dunia yang dilebur); *disruptions of time, space, identity* (gangguan waktu, ruang, dan identitas).

Teori Faris itu bisa menguji bahwa kita ini sebenarnya termasuk orang modern yang realis atau orang tradisi yang magis, atau justru serba tanggung untuk hidup dalam jebakan kenyataan sosial dan sesuatu yang magis. Kalau melihat beberapa gejala yang bisa kita lihat bersama, mungkin bukan tanggung, tetapi rancu atau tumpang tindih dan kita tidak tahu jika kita hidup dalam situasi tersebut.

KUASA KEMATIAN

Ilmu sosial tidak punya pemahaman dan penjelasan yang cukup tentang realitas setelah kehidupan. Kitab, hadis, atau tulisan ahli-ahli agama memberi informasi berbagai kenyataan setelah kehidupan. Mau dipercaya belum ada buktinya, mau tidak percaya mana tahu benar. Hal yang pasti adalah setelah manusia menjalani kehidupannya, kematian akan menghadang. Tidak ada seorangpun yang bisa memilih kapan mati, di mana, dan sedang mengapa. Kematian merupakan keniscayaan, dan kita hanya bisa berbicara bagaimana menghadapi kematian.

Di antara berbagai kuasa yang telah dibicarakan secara ringkas pada tulisan kuasa struktur dan struktur kekuasaan, salah satu yang mengatur dan mengontrol hidup manusia tentulah kematian. Kontrol kematian yang utama terhadap manusia lewat agama. Agama selalu mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup itu fana. Ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan. Untuk itu, manusia perlu selalu siap untuk menghadapi kematian.

Kontrol kematian kedua adalah adanya sakit. Memang, sakit hanya salah satu alasan untuk menuju kematian, sebab kematian bukan karena sakit. Kematian disebabkan oleh keluarnya nyawa dari tubuh. Banyak orang sehat, paling tidak dianggap sehat, bisa saja

tiba-tiba mati. Kesadaran tentang sakit menyebabkan manusia menjaga kesehatan. Manusia makan dan minum, jika mungkin sesuai dengan standar kesehatan. Manusia berolahraga, manusia menjaga kebersihan dengan mandi. Semua dalam rangka menjaga kesehatan agar tidak sakit.

Dalam rangka bisa makan, minum, dan menjaga kesehatan tubuh, perlu biaya untuk segala hal kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perlu uang. Untuk mendapatkan uang perlu kerja. Dengan begitu, kerja adalah untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan agar bisa makan minum, tidak segera mati. Tentu akan banyak yang menolak kenyataan jika kerja untuk mempertahankan kehidupan agar tidak mati. Akan banyak yang berkata kerja karena hobi, karena menikmati, dan sebagainya.

Namun, jika orang tersebut tidak mendapatkan uang, maka tidak banyak yang bersedia menanggung hidupnya untuk kebutuhan hidup. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus, misalnya cacat, sehingga orang tersebut tidak bisa bekerja. *Toh*, jika mengakui dengan jujur bahwa bekerja untuk cari uang, untuk beli makan, agar tidak segera terserang kelaparan dan kematian, justru menempatkan kerja menjadi sesuatu yang “spiritual”.

Hadirnya kematian merupakan representasi dari hal Nyata yang tidak kita ketahui kelanjutannya. Hal yang bisa kita lakukan adalah menormalkan kematian. Hal yang dimaksud dengan penormalan adalah segala upaya untuk menjadi normal. Tentu bermasalah, apa yang dimaksud dengan normal, mana yang tidak normal, dan kenapa sesuatu dianggap normal atau tidak.

Belajar dari kasus Covid-19, berbagai kepanikan dan kecemasan yang kita lakukan adalah menghadapi kematian yang tidak diinginkan. Kemudian, hampir semua kegiatan kita, bukan sekedar menghadapi Covid-19 itu sendiri, tetapi secara komprehensif adalah menghadapi kematian yang kita tidak tahu kapan dan di mana.

Hal dianggap normal (jadi sebenarnya cuma anggapan) sesuatu yang dianggap demikianlah yang seharusnya dan sebenarnya terjadi. Kita tidak terlalu mempedulikan bahwa hal yang normal tersebut sebenarnya suatu konstruksi sosial, bahkan konstruksi kekuasaan. Sebagai contoh saja, terdapat perbedaan pembagian kerja secara seksual. Siapa yang lebih layak kerja di dapur dan siapa yang harus kerja di luar rumah. Praktik kehidupan sehari-hari seperti itu nyatanya seolah dianggap normal. Hari-hari ini pun sebagian dari masyarakat kita masih mempraktikannya.

Kemudian, ilmu dan pengetahuan berkembang sehingga secara akademik kita membuktikan bahwa hal tersebut tidak normal. Bahwa perbedaan gender yang alami dan kodrati itu cuma: wanita bisa melahirkan dengan perangkat kewanitaannya, dan laki-laki tidak. Jadi, sebenarnya, kita hidup dalam ketidaknormalan. Akan tetapi, karena terbiasa terus-menerus, yang tidak normal itu seolah menjadi normal.

Demikian pula yang lain. Konstruksi sosial masyarakat modern menyebabkan kita perlu menjadi manusia modern dengan segala perangkat bendawi dan simboliknya. Jika kita tidak terlihat modern, maka

kita terlihat ketinggalan zaman. Hal ketinggalan zaman itu hidup tidak sesuai zamannya, dan itu artinya tidak normal. Yang normal adalah hidup sesuai zamannya. Maka tidak heran kemudian kita pun berusaha dalam berbagai cara untuk terlihat modern.

Dengan adanya Covid-19, ancaman virus tersebut mengingatkan kita mana kehidupan yang normal asli dan mana normal palsu. Kehidupan yang normal asli itu adalah kita bisa makan secukupnya, tidur secukupnya, kerja dengan pantas, istirahat secukupnya, bisa beribadah layaknya manusia ber-Tuhan, mendapatkan hiburan secukupnya. Semua itu bisa dilakukan dari rumah (bukan soal kepemilikan rumah. Banyak orang belum memiliki rumah secara pribadi, tetapi bisa tinggal di rumah).

Artinya, hal keluar rumah, ke mall, ke bioskop, *nongkrong* di kafe, *wira-wiri* piknik, membeli barang-barang mahal, sebenarnya justru tidak normal. Namun, karena konstruksi ideologi-ideologi dengan pretensi ekonomi, semua justru kelihatan normal. Kita menjadi tidak normal kalau tidak jalan-jalan ke mall. Kita terlihat tidak normal kalau tidak piknik. Tanpa disadari, gaya dan praktik hidup kita dalam rangka menjaga yang katanya normal itu.

Konsep dan praktik tetap/bertahan di dan kerja di rumah yang telah berlangsung beberapa minggu ini membuktikan bahwa ternyata kita bisa dirumahkan. Tentu tetap dengan pengecualian tertentu terhadap mereka yang pekerjaannya hanya bisa dikerjakan di luar rumah. Terutama terkait dengan pekerjaan

mengolah material dan barang-barang tertentu di luar rumah. Bertani, berkebun, kerja di pabrik, atau yang mentransformasikan benda dan barang tertentu, atau dan kerja-kerja dengan basis material lainnya.

Namun, mereka yang bekerja dalam pengertian imaterial, bahkan sangat cocok untuk bekerja di rumah saja; rapat, belajar-mengajar, menulis, meneliti, seminar, acara-acara publik, dan semua hal terkait dengan pekerjaan yang selama ini bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja, sekarang bisa dirumahkan. Dalam arti, sebenarnya itulah yang normal.

Kondisi ini akan berakibat dua hal. Di satu sisi penghematan ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain ingin mengatakan bahwa ekonomi kapitalisme dan modernisme itu tidak relevan bagi hidup normal asli. Itulah sebabnya, selama ini kita hidup telanjur dalam normal palsu sehingga perlu diingatkan atau dinormalkan oleh Covid-19.

Kita tidak tahu, jika Covid-19 ini berlalu, apakah kita akan menjalani hidup seperti biasanya kemarin-kemarin itu. Tentu kita berdoa dan bergembira jika Covid-19 berlalu. Namun, saya usulkan, bertahan dengan tetap di dan bekerja di rumah perlu dipertahankan semaksimal mungkin. Mekanisme ini bisa diatur karena infrastruktur teknologi sudah sangat memungkinkan dan masif.

Normalisasi kehidupan di atas terkait dengan normalisasi kematian. Sebagaimana diketahui, bahwa kematian bisa terjadi oleh sebab apapun, kapan pun, dan di mana pun, sehingga kita menjadi terbiasa untuk mengatakan bahwa kematian itu normal. Kematian

karena usia tua dan sakit, termasuk kematian yang kita tidak tahu sebabnya, adalah kematian yang selama ini dianggap normal.

Memang, selalu terdapat pengecualian yang kadang kita cukup menyesalinya. Misalnya, kematian karena kecelakaan (dalam pengertian luas), yang seharusnya secara teknis bisa dihindari. Akan tetapi, tetap saja secara umum, akhirnya, kita bisa menerima bahwa kematian karena hal-hal tersebut adalah normal. Akhirnya, kematian karena sakit, yang secara medis bisa dihindari, kita menerimanya sebagai kenormalan. Namun, Covid-19 mengingatkan kita bahwa tetap saja ada kematian yang normal asli dan kematian yang normal palsu.

Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Artinya, semua hal kematian sebenarnya adalah kodrati. Yang tidak kodrati adalah bahwa kita tahu sesuatu dapat menyebabkan kematian, tetapi kita tidak berusaha menghindarinya. Kematian yang secara medis dan teknis dapat dihindari, dan kemudian dianggap normal, dengan demikian adalah normal palsu.

Berbagai usaha untuk menekan kematian karena Covid-19 sebenarnya suatu usaha untuk menghindari, atau menekan kematian tidak normal. Sekali lagi, kita memang tidak tahu kapan, di mana, dan sebab kematian. Namun, kalau bisa, bukan karena pandemi, atau kecelakaan, atau apapun yang secara medis dan teknis bisa dihindari. Kita ingin dan berdoa, kalau bisa, mati karena tua. Bahkan jika mungkin mati tua dalam keadaan sehat.

DOMINASI DAN NEGOSIASI

MENGUJI IDEOLOGI

Bagaimana suatu ideologi menjadi dominan dan hegemonik? Secara hipotetik dan tentatif, ideologi yang memiliki lebih banyak kesesuaian dengan hukum logis (formula keteraturan matematis) dan hukum alam (formula-formula dalam fisika dan kimia), suatu ideologi yang dapat diuji—meminjam istilah Badiou (2005:47)—dalam perspektif prosedur kebenaran (*procedure of truth*).

Hal yang dimaksud dengan prosedur kebenaran adalah bagaimana setiap elemen dari praktik ideologi tersebut, setiap bagian-bagian dari satuan praktik, sesuai dengan posisi-posisi dan relasinya, dapat dibuktikan sebagai bagian dari himpunan kebenaran itu sendiri. Semua dapat bekerja sesuai dengan karakter dan kriterianya masing-masing.

Di Eropa, hingga abad ke-16, masih terjadi segitiga persaingan sengit antara kekuatan gereja (agama) dengan kekuatan raja-bangsawan, dan ilmuwan dan/atau intelektual (lihat Gelder, 1961; Jordan, 2010; Allen, 2013). Kekuatan raja/bangsawan dan gereja secara bergantian telah lama menguasai Eropa. Namun, dalam sejarahnya, praktik feodalisme, borjuisme, bahkan teologisme (sementara saya memakai istilah ini untuk kekuasaan Gereja atau Agama), tidak tahan uji terhadap

prosedur kebenaran, sehingga harus menyingkir dari peradaban.

Ilmuwan, dalam ketiarapannya, terus bekerja dan menemukan banyak hal yang kelak akan mengubah konfigurasi dan struktur dunia. Banyak temuan ilmu-pengetahuan dan teknologi, yang dibangun dalam prosedur keilmiahan, sehingga dapat mengubah dunia. Dunia (khususnya Eropa) perlahan mulai memasuki masa-masa ketika ilmu dan pengetahuan menjadi standar dan pegangan hidup bersama.

Pada saat yang sama, hingga abad ke-19, di benua lain seperti Afrika dan Asia, masih tenggelam dalam kekuasaan raja yang didukung kepercayaan lokal, atau belakangan kekuatan agama (lihat Ajayi (Ed.), 1998; Kratoska (Ed.), 2001; Noor, 2016; Dean, 2019). Amerika sebagai benua yang ditemukan Eropa, segera bergeliat mengikuti apa yang terjadi di Eropa. Lebih belakangan, Australia tidak lebih hanya menjadi halaman belakang negara Inggris.

Seperti telah disinggung, pada abad ke-17 hingga ke-19, ilmuwan banyak menemukan berbagai hal terkait dengan teknologisasi kehidupan. Masa-masa ilmu-pengetahuan, teknologi dan teknokrasi kehidupan semakin deras. Kapitalisme dan modernisme berjalan beriringan mulai merambah ke sebagian besar dunia. Beberapa negara, seperti China dan Uni Soviet, dan diikuti beberapa negara lain di Asia atau Amerika Latin, dalam persaingan dan latar belakang sejarah politiknya tetap bertahan dalam sosialisme dan komunisme. Namun, praktiknya, seperti China, misalnya, negara-

negara tersebut juga mengusung kapitalisme, meski diiringi dengan kekhasannya.

Nusantara, hingga abad ke-19 masih merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan. Pernah ada kerajaan yang cukup besar seperti Sriwijaya yang beragama Budha, atau Majapahit yang didukung Hindu, dan belakangan kerajaan Mataram Islam yang eksis hingga lebih belakangan. Terlepas dari berbagai polemik, sudah ada tanda-tanda Islam masuk Nusantara abad ke-12. Penjajah Belanda, dengan semangat kapitalisme kolonial dan modernisme awal, masuk Nusantara pada abad ke-16.

Hal yang paling traumatis bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hampir di semua tempat di Indonesia, penjajahan Belanda memenangkan persaingan lunak (semacam dialog dan kerja sama) dan persaingan keras. Akhir abad ke-19, praktis sebagian besar wilayah Nusantara dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Apakah kemudian kita perlu bertanya “apa yang salah” dengan masyarakat atau bangsa Indonesia sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia kalah dengan bangsa penjajah pada waktu itu?

Pernyataan singkat di atas hanya ingin menyegarkan ingatan bahwa terbukti hari-hari ini Indonesia mengikuti dan menjadi negara modern, menjadi bagian dan rangkaian sistem ekonomi global (kapitalisme). Dengan demikian, pertanyaannya dilengkapi, mengapa modernisme (dan kapitalisme) mampu menjadi dominan dan hegemonik? Bagaimana posisi agama di Indonesia?

Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membicarakan secara ringkas lima ideologi besar di dunia yang memperlihatkan persaingan yang tidak akan pernah selesai, yakni kapitalisme dan modernisme, religiusisme, humanisme, dan sosialisme. Terdapat beberapa varian ideologi yang juga layak diuji, seperti nasionalisme, tradisionalisme, feodalisme, dan sebagainya, tetapi tidak dibicarakan.

Kelebihan kapitalisme, dan modernisme, adalah kesesuaiannya dengan hukum logis sehingga banyak ilmu pengetahuan (dalam pengertian positif) menempatkan posisi yang dapat diterima secara rasional dan empirik. Satuan atau bagian-bagian yang membangun himpunan ideologinya, terbangun dan dibangun berdasarkan unsur yang disebut sebagai ilmu dan pengetahuannya sendiri. Itulah sebabnya, hingga hari ini kelebihan tersebut masih mendominasi, bahkan hegemonik, di berbagai belahan dunia.

Di bidang ekonomi misalnya, bagian-bagian unsurnya dapat bekerja saling mendukung dan melengkapi sesuai dengan hukum matematika sehingga ideologi ini dapat memprediksi hal-hal terkait sesuai dengan keteraturan formulanya. Itulah sebabnya, dengan perhitungan tertentu *frame* ideologi ini memiliki kekuatan untuk menembus banyak bidang kehidupan, karena segala sesuatunya dapat diperhitungkan sesuai dengan hukum logisnya.

Akan tetapi, kelemahannya justru pada upaya-upaya yang terlalu bersemangat menerobos (mengeksplorasi hingga mengeksploitasi) hukum alam sehingga akan

terjadi distorsi yang berlebihan dan itu diandaikan keluar dari prosedur kebenaran. Sebagai akibatnya, untuk jangka panjang kapitalisme dan modernisme sangat mungkin akan berjalan membunuh dirinya sendiri.

Namun, tentu saja para pemikir dan pendukung kapitalisme akan terus bekerja memperbaiki kinerja ideologi tersebut. Upaya itu diperlihatkan dengan membagi keuntungan yang diperoleh oleh kapitalisme, sehingga tidak mengherankan jika muncul apa yang disebut sebagai kapitalisme yang saleh (religius), atau modernisme yang baik hati. Kita lihat ke depan bagaimana perkembangan keberadaan dua ideologi tersebut.

Sebaliknya, religiusme (dan humanisme) terlalu menekankan hukum alam dan tidak kokoh pada hukum logis. Hal ini sebagai pangaruh bahwa dunia itu fana, hidup itu sementara. Kalau dalam religiusime dan humanisme Jawa ada ungkapan *urip mung mampir ngombe* (hidup hanya mampir minum). Dengan demikian, daya eksplorasi dan penetrasi ideologi ini terhadap hal duniawi kalah dibanding kapitalisme dan modernisme.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa Arab Saudi, yang memiliki kota suci Mekah dan Madinah, merupakan negara yang terkesan memegang prinsip dan ideologi berbasis Islam, melainkan justru negara yang sangat modern dan kapitalis. Dalam praktik-praktik yang berhadapan, sangat mungkin hukum logis lebih diutamakan daripada hukum alam. Percaya pada bukti-bukti nyata kadang bisa didahulukan daripada sekadar percaya pada sesuatu yang belum terbukti. Kondisi

seperti Mekah dan Madinah, di beberapa masyarakat lain yang mengaku masyarakatnya religius ternyata adalah masyarakat modern yang kapitalis.

Sosialisme bahkan lemah pada sisi hukum logis dan hukum alam. Hal ini membuktikan kenapa ideologi ini sulit diterima masyarakat dunia. Tentu ideologi ini tetap beroperasi di beberapa negara yang mencoba menerapkannya dengan cara yang berbeda dan disesuaikan kondisi lokalnya. Hal yang ingin saya katakan adalah bahwa ideologi ini terlalu memaksakan dirinya untuk meraih apa yang disebut sebagai fantasi kesejahteraan, fantasi kemakmuran, sehingga dalam rangka mewujudkan fantasi tersebut, hukum logis dikebiri sedemikian rupa.

Saya membayangkan bahwa saya tidak akan pernah merasa bahagia dan sejahtera hidup di negara seperti itu. Dalam situasi tertentu, saya akan memilih jalur hidup sendiri. Minimal, saya sedang dan telah memikirkannya.

DOKSA APA ATAU SIAPA?

Ketika masih kecil, seorang anak mengidolakan orang tuanya atau *embah*-nya. Berangkat remaja, si anak mengidolakan temannya yang tampan/cantik dan pandai. Ketika mahasiswa dia mengidolakan Marx dan Einstein. Ketika beranjak lebih dewasa, orang itu mulai mencintai orang tuanya lagi, atau mencintai Nabi-nya. Ia juga semakin sering ke masjid.

Ketika SMA, si anak punya seorang guru yang mengajarkan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila. Guru itu baik dalam mengajar; sistematis, diksinya bagus, penjelasannya terlihat cerdas, dan terlihat sopan serta santun. Guru tersebut juga ramah dan selalu tersenyum. Tak pelak sang anak juga *kesengsem*. Banyak hal dari pernyataan dan perilaku guru diikutinya. Pendapat-pendapatnya tentang kehidupan selalu mengacu apa yang dikatakan gurunya itu.

Dalam skala kecil-kecilan, itu yang oleh Bourdieu disebut doksa (*doxa*) (lihat Bourdieu, 2018; Lane, 2000). Di sini saya tidak meminjam sepenuhnya pengertian Bourdieu, tetapi lebih meminjam pengertian umum doksa itu sendiri yang terkait dengan pengertian doktrin (doktrinisasi). Dalam proses hidup, proses doktrinisasi tidak dapat dihindari, atau mungkin dalam bahasa yang lebih familiar, yakni nasihat.

Nasihat dimaksudkan memberikan saran kepada penerima untuk bertindak, berpikir, berperilaku sesuai dengan isi nasihat, biasanya yang baik dan normatif. Biasanya yang memberi nasihat selalu yang lebih tua, atau yang dituakan, atau yang terlihat (dianggap) lebih sukses, atau yang diakui keilmuannya. Jika tidak, maka seseorang belum memiliki otoritas untuk memberi nasihat.

Biasanya juga, saran berisi anjuran atau perintah halus agar seseorang mau menjadi yang disarankan. Secara isi, saran mengandung wacana, ideologi, dan berbagai nilai-nilai moral dalam segala lapisnya. Mungkin yang diberi saran tidak secara langsung melakukannya, tetapi lambat laun nasihat-nasihat akan berpengaruh dalam dirinya. Ketika seseorang “menjadikan” nasihat-nasihat bagi dirinya, maka doksa juga menyebabkan kita menjadi sesuatu bukan karena diri sendiri, tapi menjadi sesuatu yang dikehendaki orang lain.

Dari hal itu kita bisa paham, doksa adalah terjadinya manipulasi kesadaran tentang diri dan orang di luar dirinya (terutama yang otoritatif). Kita merasa kesadaran kita adalah asli milik kita, ternyata cuma konstruksi wacana dan/atau nasihat.

Demikianlah siklus hidup berlangsung, dari waktu ke waktu, dari dulu hingga sekarang. Kita hanya mewarisi untuk menjadi dan mengalami hal tersebut. Persoalannya adalah, dulu; siapa dan untuk apa orang membuat dan menentukan hal-hal sebagai bahan atau materi untuk nasihat.

Seperti telah disinggung, orang yang memiliki otoritas memberikan nasihat adalah orang, yang dalam

proses politik, sosial, agama, ekonomi, budaya, terlihat lebih unggul. Apakah keunggulan tersebut direbut secara kasar dan halus, itu nanti membutuhkan pembicaraan tersendiri. Namun, yang pasti ketika seseorang memiliki otoritas untuk memberi nasihat, orang tersebut memiliki kuasa.

Kekuasaan bisa diwariskan dan direbut dalam upaya-upaya tertentu. Kekuasaan dapat bersifat individual, tetapi bisa dalam bentuk kolektif, kelembagaan, organisasi, partai, dan sebagainya. Ketika seseorang atau kolektif memiliki kekuasaan, maka akan dapat dirasakan bagaimana kekuasaan bekerja, sehingga kekuasaan menjadi semacam candu yang menggairahkan. Dalam situasi itu, kekuasaan akan coba selalu dipertahankan.

Maka, sang penguasa akan membuat aturan dan aturan main, kiat-kiat, undang-undang, dan tentu saja sebagian besar adalah pernyataan-pernyataan, berupa segala hal etik, segala hal kebajikan, segala hal nilai normatif (lihat Foucault, 1977). Hal itu bisa disampaikan lewat berbagai tulisan dalam agama, sastra, maupun filsafat, dan diturunkan ke dalam berbagai nasihat. Tentu yang paling menikmati nasihat adalah mereka yang memiliki legitimasi, yang dituakan, yang dianggap sukses dan hebat, yang dianggap berilmu lebih (lihat Foucault, 2002).

Posisi otoritatif dan relasinya dengan yang diberi nasihat menentukan sifat dan jenis doksa. Posisi hubungan antara seorang sastrawan senior dan junior (walau cuma berhubungan lewat teks sastra/tulisan),

akan berbeda antara seorang kiai dan santrinya. Posisi itu akan berbeda lagi antara politikus senior dan pengikutnya. Berbeda lagi antara guru sekolah dan muridnya. Tidak ada doksa yang sama.

Dengan demikian, doksa secara spesifik dapat dibedakan lagi sebagai doksa politik, doksa ekonomi, doksa agama, hingga doksa sosial-budaya. Manipulasi kesadaran untuk merasa menjadi diri sendiri, tidak lebih sebagai tipuan kekuasaan agar hidup terus berlangsung. Akan terjadi regenerasi secara konstan, tetapi tatanan tidak banyak berubah. Kadang, yang membuat sedikit sedih adalah banyak orang tidak bisa dan tidak mampu mengubah posisi sosialnya dalam tatanan tersebut.

Terlepas dari soal nasib dan takdir hidup, sangat banyak masyarakat yang posisi hidupnya tetap dari waktu ke waktu. Padahal dia telah bekerja keras. Sistem dan struktur kehidupan tidak dengan mudah untuk seseorang melakukan migrasi sosial.

Doksa juga mengurangi kesempatan berpikir dan menjadi seorang kreator yang orisinal. Banyak seniman yang gagal karena doksa dalam dirinya yang demikian kuat. Banyak politisi tidak lebih hanya menjadi pucundang-pecundang karena dia mendapatkan doksa dari guru politik yang secara historis melakukan banyak kesalahan. Banyak pejabat yang salah paham dengan jabatannya karena doksa berbakti pada nusa dan bangsa. Banyak ustaz dan ustazah yang tidak lebih menjadi hanya dai-dai komersial yang salah kaprah mengatasmakan Quran dan hadis.

Untuk dimensi yang berbeda, tetapi memiliki efek yang sama, pemahaman lain tentang doksa dapat disejajarkan dengan hegemoni. Dalam situasi itu, seseorang tidak lagi dapat membedakan mana kebenaran ideologis, mana kebenaran substantif (mungkin juga kebenaran yang lebih universal). Dalam situasi yang terdoks, terhegemoni, seseorang tidak mengetahui, bahwa yang dia ketahui adalah bukan hal dirinya. Dia dipaksa tabah dan sabar untuk menjalani kehidupan. Tabah untuk siapa, sabar untuk siapa?

INTELEKTUAL PROGRESIF

Dalam sejarah kehidupan bernegara, seperti pernah ditulis Gramsci (1992 dan 1996), terdapat subjek sejarah yang disebut sebagai intelektual. Waktu itu, Gramsci menggambarkan bahwa intelektual adalah sosok manusia aktifis, berbasis ilmu-pengetahuan, dan berkiprah dalam ranah politik, sosial, dan budaya. Cuma, waktu itu, karena kekecewaan Gramsci kepada negara dan intelektual itu sendiri, Gramsci (dalam Crehan, 2002:137–152) mendikotomikan peran intelektual sebagai intelektual tradisional dan intelektual organik.

Kalau mau disederhanakan, intelektual tradisional adalah intelektual yang menghamba kepada elit kekuasaan; mereka yang menghamba pada pemerintah yang berkuasa, sehingga implikasinya adalah menghamba pada negara. Dalam posisi itu, intelektual tradisional mendapat posisi dan kedudukan, tetapi lebih dari itu si intelektual mendapat upah dari elit kekuasaan. Intelektual tradisional ikut membantu, dalam berbagai cara, agak kekuasaan bisa bertahan lama. Kekuasaan yang bertahan lama itu juga akan menguntungkan posisi intelektual. Banyak catatan tentang itu sehingga Julien Benda menulis secara khusus dalam bukunya *The Treason of The Intellectuals* (2007).

Sebaliknya, intelektual organik adalah mereka yang melakukan aktivisme, juga berbasis ilmu-pengetahuan, untuk membangun kesadaran rakyat kebanyakan bahwa hidup mereka telah dimanipulasi, diperdaya, dan dimanfaatkan oleh kekuasaan. Gramsci (1973:53) menyebutnya sebagai kelompok *sub-altern*. Kesadaran yang dibangun oleh para intelektual organik itu dengan cara berwacana, menjaring komunitas yang bisa saling terkoneksi, dan sebagainya.

Di balik itu, semangat yang diformulasikan Gramsci adalah membongkar ideologi hegemonik yang bersembunyi dalam kesadaran rakyat kebanyakan. Ideologi hegemonik ditanamkan oleh penguasa, secara warisan dan historis, sehingga masyarakat generasi belakangan sudah tidak tahu lagi bahwa kesadaran yang mereka miliki bukan kesadaran milik mereka sendiri. Kesadaran palsu yang hegemonik tersebut yang ingin dibongkar Gramsci. Waktu itu, Gramsci menulis karena kecemasan melihat negaranya, Italia, dalam kondisi kacau-balau dan liar.

Namun, tidak semua negara seperti Italia. Indonesia, misalnya, sangat berbeda dengan Italia dalam hal proses sejarah masyarakatnya; sejarah politik, agama, suku, ras, dan sebagainya. Indonesia memang negara-bangsa, dengan pengertian lebih kurang sama dengan konsep negara pada negara Italia. Namun, pengertian bangsa secara historis di Indonesia memiliki sejarah yang meliputi, dan/atau sebagai satuan yang meliputi ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan budaya, puluhan ras, dan puluhan agama, baik yang resmi maupun kepercayaan lokal-lokal.

Indonesia juga pernah mengalami masa-masa terjajah, dari Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, sehingga pengalaman ini menyebabkan pengertian bangsa jauh lebih “sakral” daripada sekadar negara. Waktu itu, yang melawan penjajah bukan atas nama negara, tetapi lebih sebagai atas nama bangsa. Dalam posisi itu, menjadi ‘anak bangsa Indonesia’ derajatnya jauh lebih bernilai kultural, sosial, dan historis daripada sekadar ‘warga Indonesia’. Daripada Bangsa Indonesia, Negara Indonesia baru hadir pada tahun 1945. Berdasarkan kenyataan historis tersebut, manusia Indonesia berposisi terutama sebagai anak bangsa daripada sebagai warga Indonesia.

Struktur kekuasaan dan struktur sosial di Indonesia tidak cocok seperti yang dibayangkan oleh Gramsci. Memang, jejak-jejak feodalisme di Indonesia belum bisa hilang begitu saja. Namun, sebelum negara Indonesia berdiri, kesadaran berbangsa telah menjadi kesadaran bersama. Artinya, dalam posisi yang secara historis ditempatkan sebagai bangsa, pada zamannya telah muncul para intelektual yang tidak mengabdikan dalam rangka pro-kekuasaan negara, tetapi lebih sebagai pro-kebangsaan.

Dalam perjalanan menjadi negara, memang kemudian struktur sosial di Indonesia dikenal ada yang miskin (yang tidak memiliki alat-alat produksi) dan hanya bekerja sebagai buruh atau karyawan pada umumnya. Adanya banyak orang miskin mengimplikasikan adanya orang yang kaya. Berbeda dengan zaman feodal yang secara terintegrasi orang kaya adalah sekaligus para

penguasa. Sekarang, perlawanan terhadap orang kaya di Indonesia belum tentu identik dengan perlawanan terhadap penguasa.

Di samping itu, faktor agama (Islam) yang cukup dominan, secara nilai relatif mengaburkan batas kaya dan miskin. Berdasarkan agama, orang yang kaya adalah mereka yang berkecukupan, mereka yang selalu bersyukur dengan rezeki yang didapatkan. Artinya, semangat kelas di Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Resistensi dan konflik terhadap China, seperti pernah beberapa kali terjadi, bukan sekadar perlawanan kelas dan perlawanan terhadap kekuasaan negara, tetapi lebih berbau ras dan agama. Buktinya, banyak keturunan Arab yang sukses di Indonesia tidak pernah diposisikan sebagai lawan, bahkan sebagian besar dianggap masih keturunan pembawa Islam.

Dalam kondisi dan posisi-posisi tersebut, intelektual di Indonesia tidak bisa hanya ditempatkan dalam dikotomi tradisional dan organik, walaupun yang seperti ini banyak. Namun, jika melihat beberapa kenyataan, cukup banyak para intelektual yang berkenan mengabdikan dirinya tidak dalam rangka mengobarkan semangat kelas, tetapi justru mengobarkan semangat berbangsa. Membangun kecerdasan berbangsa adalah semangat para intelektual, yang saya sebut sebagai intelektual progresif. Tentu masih banyak varian intelektual progresif tersebut, tetapi tampaknya yang cukup berpengaruh di antaranya adalah mereka yang mengedepankan filsafat dan sejarah.

Saat ini, cukup banyak wacana dan tulisan yang kembali memformulasikan ulang dan menafsirkan dalam perspektif kebangsaan, apa itu demokrasi, hukum, agama, multikulturalisme, pluralisme, Pancasila, dan sebagainya. Juga strategi-strategi kebudayaan dalam mengantisipasi berbagai kekuatan besar yang tidak hanya mengkooptasi negara dan warga, tetapi menggerus energi kebangsaan Indonesia. Dalam posisi itulah, sekarang kita sedang menunggu lebih lanjut kiprah intelektual progresif tersebut.

PENGELOMPOKAN SEJARAH

Secara kesejarahan (dan sosial), seperti juga dapat kita saksikan, manusia hidup secara berkelompok. Pengelompokan ini didasarkan oleh banyak aspek, seperti tempat, ruang, jenis, sifat, dan kepentingan. Kalau berdasarkan tempat, yang paling dekat pengelompokan keluarga dan kampung (Rukun Tetangga dan Rukun Warga). Anggota bagian dari kelompok ini biasanya saling kenal. Kelompok RT dan RW ini termasuk kelompok formal sebab mereka merupakan bagian dari instrumentasi dan administrasi kenegaraan.

Subjek yang lahir di kampung tersebut akan banyak menanam kebiasaan (dan kenangan) di ruang ini. Apalagi jika subjek hidup di tempat yang sama hingga dewasa. Di ruang sosial itu, subjek—meminjam konsep Bourdieu sebelumnya—mendapatkan semacam habitus. Habitus adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang tertanam dalam diri subjek yang kelak ikut mempengaruhi cara pandang subjek menempatkan dirinya di dunia. Akan tetapi, di dalam habitus sekaligus tersimpan doksa (dan warisan modal), yang juga berpengaruh bagaimana subjek memposisikan dirinya berhadapan dengan relasi-relasi dalam sistem kehidupan (lihat Bourdieu, 1997).

Selanjutnya, hal yang ingin diperhatikan terkait dengan topik tulisan ini adalah bagaimana posisi formal

lokasi-budaya, habitus, ikut menentukan trajektori subjek. Dalam trajektori inilah, di samping subjek membawa modal warisan, subjek sedikit demi sedikit mengakumulasi modal-modal lain yang perlu dimilikinya sebagai modal lebih lanjut subjek menjalani kehidupan. Dalam trajektori tersebutlah subjek mengakumulasi modal sosial, ekonomi, budaya simbolik (Bourdieu, 1997:120).

Trajektori menggiring subjek untuk terlibat dalam ruang sosial tertentu, apakah ruang pekerjaan dan profesi (ekonomi), ruang sosial organisasi sosial atau politik, ruang sosial hobi dan komunitas, ruang sosial keagamaan, dan sebagainya. Berdasarkan sejarah, pengelompokan yang pantas diperhitungkan adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan lahir dari suatu proses sejarah yang terhubung terus menerus, membangun sistem relasi dan organisasinya, dan berkepentingan dalam ikut mengelola organisasi kemasyarakatan atau kenegaraan.

Dalam sejarahnya, munculnya kelompok kepentingan ini secara umum dapat dihubungkan oleh satu bangunan ideologis yang sama, sehingga meminjam konsep Gramsci sebelumnya—terjadilah *bloc histories*. Biasanya dalam kelompok sejarah itu terdapat subjek intelektual (bisa saja menjadi aktor sejarah), baik karena wibawanya memiliki banyak modal budaya dan ekonomi maupun karena modal sosial dan simboliknya.

Pengelompokan sejarah ini banyak memainkan peranan penting dalam perjalanan politik suatu negara. Di Indonesia, kelompok terpelajar dalam sistem yang

dibangun Soekarno dan para intelektual lainnya, dalam berbagai kendala dan kontestasi politik, juga tekanan politik kolonial, berhasil membawa bangsa Indonesia merdeka. Setelah merdeka, Indonesia menjadi negara politik. Banyak pengelompokan sejarah berbasis Pancasila, agama, sosialisme, nasionalisme, dan sebagainya.

Kondisi pengelompokan itu berjalan terus seiring dengan bermunculannya kelompok historis yang lebih baru. Sistem jaringan dan kolaborasi semakin beragam karena terdukung oleh mekanisme komunikasi yang semakin adaptif. Sosok pengelompokan historis semakin beragam. Sebagian besar adalah kelompok historis yang terus berkontestasi merebut kekuasaan, tetapi di lain pihak, kelompok historis pendukung kekuasaan.

Kelompok historis yang belum berkuasa dan sedang bersaing merebut kekuasaan pun beragam. Terdapat kelompok historis berbasis agama yang cenderung melakukan ekstremisasi atau radikalisme syariah agama, dan melakukan berbagai tindakan politik yang mengganggu kekuasaan. Akan tetapi, ada pula kelompok historis berbasis agama yang cenderung ramah terhadap kekuasaan. Varian-varian kelompok historis ini terus berkembang sesuai dengan semangat dan tuntutan zaman. Varian karakter kelompok historis yang lain bermunculan sebagai reaksi terhadap karakter (rezim) kekuasaan yang sedang berlangsung.

Politik mungkin dipengaruhi oleh subjek dalam pengertian individual, terutama gagasan-gagasan politik subjek bersangkutan. Akan tetapi, untuk

mendapatkan kekuatan, subjek harus meleburkan diri ke dalam kelompok sehingga kumpulan subjek menjadi lebih bertenaga atau *powerful*. Memang, sangat banyak kelompok historis juga gagal dalam menjalankan praktik-praktik politiknya. Banyak kelompok historis tidak mampu merebut “hati rakyat”. Logikanya, rakyat tak kalah hebatnya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Siapakah sesungguhnya rakyat? Hal tersebut juga menarik untuk dikupas lebih lanjut.

Namun, tidak semua pengelompokan berbasis sejarah ideologis. Semakin banyak proses pengelompokan yang tidak bersifat historis-ideologis. Hal itu, misalnya, dicontohkan oleh terbentuknya komunitas-komunitas berbasis hobi, ilmu-pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Kelompok yang paling menonjol di antaranya adalah kelompok-kelompok kesenian, atau apa yang biasa disebut sebagai komunitas seni, komunitas penyair, komunitas penari, dan berbagai komunitas budaya.

Meski demikian, komunitas-komunitas semacam itu juga memiliki banyak kelemahan. Pertama, tidak ada ikatan nilai yang mengikat para anggotanya, sehingga anggota bisa keluar masuk dengan seenaknya. Kedua, banyak komunitas akhirnya dihadang oleh kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan ekonomi, sehingga komunitas lebih sebagai tempat iseng, sekadar mengisi waktu, dan sekadar *sesrawungan*. Dalam batas tertentu, komunitas tersebut cukup ideal, sejauh keperluan berkomunitas adalah saling melengkapi makna kehidupan, saling melengkapi informasi, dan saling menebar rasa persaudaraan.

Akan tetapi, pada kenyataaan pula, kadar kelemahannya jauh lebih kuat daripada kadar kelebihan sebagai komunitas ideal. Terbukti, banyak komunitas tidak bertahan lama sebagai komunitas ideal. Ada yang bubar dengan sendirinya, ada yang kemudian bergabung ke kelompok historis. Akan tetapi, komunitas-komunitas baru akan terus bermunculan. Komunitas pun menjadi tempat dan ruang transit.

PENJARA IDEOLOGI (FANTASI)

Bagaimana ideologi bekerja dalam praktik kehidupan kita sehari-hari? Hal itu dapat dijelaskan melalui dua hal, yakni ideologi dan praktik kehidupan. Ideologi adalah satu kesadaran dan pemahaman yang menjadi pandangan dunia, berkaitan dengan nilai, keyakinan, pikiran, dan harapan/tujuan terhadap dunia. Secara langsung, ideologi berpengaruh terhadap praktik-praktik kehidupan. Ia memengaruhi banyak keputusan dan tindakan hidup, sehingga disadari atau tidak, hal tersebut adalah keputusan ideologis.

Dalam pemahaman tersebut, ideologi bekerja baik pada tataran individual maupun kolektif. Banyaknya perbedaan kehidupan memperlihatkan bahwa basis ideologi sangat beragam. Persoalannya adalah bagaimana ideologi menjadi berbeda dan bagaimana praktik kehidupan mengelola ideologi-ideologi yang berbeda tersebut. Di sini, mau tidak mau, perlu disinggung bahwa ideologi, pada awalnya juga lahir dari suatu proses sejarah kehidupan itu sendiri.

Hal praktik kehidupan adalah bagaimana kita mempraktikkan berbagai cara hidup sehari-hari, sebagai misal, bagaimana kita berbahasa dan berkomunikasi, bagaimana bekerja, bagaimana kita menjadikan dan menggunakan sandang, pangan, dan papan, bagaimana

kita mempraktikkan hal-hal sosial, ekonomi, hukum, politik, dan berbagai praktik simbolik lainnya.

Hal yang membedakan antara ideologi satu dengan yang lain adalah basis nilai yang menjadi acuan. Pada zaman dewa-dewa, varian ideologi digambarkan sebanyak dewa-dewa dengan karakternya masing-masing. Kalau pegangannya zaman nabi-nabi, maka nilai-nilai ketuhanan menjadi pedoman penting dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Masyarakat Islam, misalnya, akan berpegang pada semua hal yang dipraktikkan oleh Muhammad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman.

Namun, tetap saja banyak masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai lokal yang berkembang dalam sejarah masyarakatnya sendiri. Artinya, tidak ada ideologi yang berdiri sendiri, baik dalam tubuh seorang individu, apalagi tubuh masyarakat. Hal yang terjadi adalah kita tersandera dalam ruang interseksi ideologi. Untuk masyarakat di Indonesia, misalnya, banyak yang tersandera nilai-nilai lokal dan feodal, hingga agama non-lokal.

Dalam perkembangannya—karena manusia juga terus berpikir dan berkembang pengetahuannya—muncul ideologi-ideologi yang lebih kemudian. Kemunculan ideologi tersebut terutama dalam rangka mengantisipasi persaingan hidup yang lebih keras. Ada ideologi yang mencoba bertahan dalam etika keharmonisan dunia. Namun, ada ideologi yang diniatkan untuk memenangkan persaingan. Kapitalisme dan modernisme merupakan ideologi yang dimaksudkan untuk memenangkan persaingan tersebut karena dianggap sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kemudian, kedua ideologi tersebut dalam praktiknya, berhasil mengintervensi dan mendominasi praktik kehidupan masyarakat sedunia. Kapitalisme, misalnya, menjadi satu paham atau kesadaran akan pentingnya ukuran pemilikan ekonomi, modal, sehingga masyarakat hidup dalam sistem seperti itu. Bahkan kapitalisme terus mengalami modifikasi sehingga berjalan paralel dengan berbagai perubahan yang terjadi. Jika kita jujur, saat ini kita hidup dalam ruang dominasi ideologis itu yang secara koordinatif didukung oleh modernisme (lihat Cooper, 2004:23).

Dalam ruang sandera interseksi ideologis tersebut, relasi-relasi antarideologis terbagi dalam tiga kategori: ideologi relasi koordinatif-subordinatif, relasi korelasional, dan relasi kontradiktif. Ideologi-ideologi agama bertentangan dengan ideologi kapitalisme. Nasionalisme berkorelasi dengan modernisme. Kapitalisme berkoordinasi dengan modernisme. Tradisionalisme tersubordinasi dengan nasionalisme, dan seterusnya.

Seperti dalam penjara, walau ada sosok-sosok tertentu yang kuat dan dominan, tetapi tetap saja selalu ada perlawanan. Itulah gambaran bagaimana sebenarnya kita terpenjara dalam suatu ruang interseksi ideologis. Dinamika dalam kehidupan yang terpenjara tersebut secara internal selalu ada persaingan, permusuhan, dan perkelahian. Namun, tetap saja ada kekuasaan dominan. Kekuasaan itu juga menciptakan efek panoptik (lihat Brunon-Ernst (Ed.). 2012:186).

Sebagaimana halnya hidup dalam penjara, lama kelamaan kita menjadi terbiasa. Bahkan kita tidak tahu

bahwa kita hidup dalam penjara ideologi. Persaingan (kontestasi) dalam penjara membuat kita menyatu dalam faksi-faksi tertentu untuk bisa selamat. Jika tidak, secara individual kita akan menjadi orang lemah dan siap diperbudak oleh kekuatan lain. Kekuatan kelompok-kelompok ini pula yang sebenarnya menjaga keseimbangan kehidupan.

Namun, dalam proses faksionalisasi ini algoritma ideologis bekerja secara sistematis. Seperti katak dalam tempurung; ilmu, pengetahuan, dan kesadaran kita ter(/di)pasung dalam satu pemahaman untuk membenarkan dan menguatkan kelompok (faksi) kita sendiri. Memang, ini satu situasi seperti dalam menjaga keseimbangan dan kekuatan bersama. Namun, di balik itu, keseimbangan itu sekaligus seperti bara dalam sekam. Sewaktu-waktu, dia akan membakar dan meledak.

ESTETISASI IDEOLOGI

Dalam kehidupan sehari-hari, persaingan dan kerja sama tidak dapat dihindari. Persaingan dan kerja sama tersebut bisa terjadi karena alasan agama, suku, politik, ekonomi, kerabat, gender dan seks, dan berbagai kepentingan lain yang menyebabkan kita bersaing atau berkelompok/kerja sama. Namun, salah satu algoritma yang memisahkan dan mengelompokkan itu adalah ideologi.

Ideologi adalah persepsi, juga kesadaran diri, dalam melihat dan menempatkan diri di dunia kehidupan yang teraktualisasi dalam praktik-praktik kehidupan. Ideologi sudah mulai tertanam (ditanamkan) pada usia dini, terutama dalam keluarga dan lingkungan sosial terdekat, yang oleh Bourdieu disebut sebagai *habitus*. Keluarga-keluarga yang cenderung religius, sekuler (mungkin *abangan* dalam klasifikasi Geertz, 1981), kelas sosial yang berbeda, ikut menentukan praktik-praktik hidup kita setelah dewasa.

Secara teori, jika tidak ada kejadian luar biasa, posisi ideologi dalam diri seseorang relatif stabil. Hal yang ingin dipersoalkan adalah mengapa seseorang bisa menjadi lebih fanatik terhadap ideologi yang dikandungnya. Inilah proses yang disebut sebagai estetisasi ideologis. Pengertian estetisasi dimaksudkan

sebagai cara mengindahkan ideologi berupa nilai-nilai dan janji-janji kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, keluhuran, bahkan kecantikan atau ketampanan.

Kita mulai dari ideologi-ideologi yang profan. Kapitalisme, misalnya, dipandang cukup menjanjikan. Jika Anda mau kerja keras, sistem akan membantu Anda untuk sukses. Jika Anda sukses, apalagi sukses dalam pengertian ekonomi, maka Anda akan bahagia. Hal ini disebabkan dalam posisi sukses, Anda akan bisa menikmati apa saja dalam berbagai transaksi yang dimungkinkan oleh sistem. Dulu, selalu berbagai iklan kesuksesan adalah dengan memiliki rumah mewah, dan istri yang cantik untuk laki-laki, dan suami yang tampan untuk perempuan.

Bahkan tidak jarang iklan-iklan selalu menampilkan mobil mewah dengan wanita berbikini di sampingnya (yang syukurlah sekarang semakin jarang ditemukan). Itu artinya, dalam konteks ini, kesuksesan adalah dengan memiliki mobil mewah. Wanita cantik pun setara dengan mobil mewah (waktu itu iklan kita memang sangat seksis dan bias gender). Namun, untuk mendapatkan itu Anda harus memiliki uang. Dan untuk memiliki uang Anda harus bekerja. Dengan memiliki semua itu, Anda dijamin akan bahagia.

Tidak terkecuali ideologi besar lainnya. Sosialisme atau komunisme juga menjanjikan hal yang sama. Ideologi ini justru menjanjikan kebahagiaan bersama dan “kepemilikan” bersama walau sepenuhnya dikelola oleh negara. Dunia akan menjadi indah dan menyenangkan jika kita dapat menikmati sesuatu secara

bersama-sama. Kemakmuran dan kesejahteraan harus dinikmati bersama. Secara teori dimungkinkan, tetapi kenyataannya tidak ada negara sosialis atau komunis yang cukup berhasil tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan.

Sejumlah agama, misalnya, selalu menekankan bahwa hidup ini fana dan ada kehidupan lain yang lebih mulia. Agama-agama tertentu menjanjikan, jika hidup sesuai dengan kaidah keagamaan, maka surga telah menanti. Surga digambarkan sebagai air bening yang mengalir, tempat angin sepoi-sepoi yang paling menyegarkan. Dijanjikan pula akan ditemani bidadari-bidadari cantik bagi laki-laki dan bidadara-bidadara tampan bagi perempuan.

Bahkan dijanjikan bagi mereka yang mati syahid akan langsung masuk surga, tanpa proses. Mungkin kita perlu percaya, paling tidak jika janji ideologis tersebut memang benar ada, spekulasi kita sukses. Kalau pun tidak ada, kita tetap saja bersyukur karena kelak kita tidak disiksa. Setelah kita mati, selesailah kehidupan. Akan tetapi, jika benar ada, dan kita tidak percaya, maka kita telah merugi.

Setiap ideologi memiliki varian sempalan-sempalannya sendiri, dan biasanya berupa sekte-sekte. Dalam sekte-sekte ini, estetisasi ideologis jauh lebih ekstrem. Di Amerika, berakar agama Kristen, ada sekte Klu Klux Klan, yang menjanjikan surga bagi mereka yang bisa menghabiskan musuh agamanya, apalagi mereka yang berkulit hitam. Hal ini disebabkan oleh adanya ajaran dalam sekte tersebut yang menyatakan bahwa mereka yang berkulit hitam itu buruk (tidak

cantik) dan hanya mengotori dunia (lihat Bullard (Ed.), 1998).

Kejadian yang sama terjadi dalam agama Budha di Burma, agama Hindu di India, dan agama Islam di beberapa negara Timur Tengah. Sekte-sekte tersebut justru mengajarkan bahwa untuk menjadi kesatria nan tampan gagah perkasa dunia akhirat, adalah dengan membunuh. Kita selalu ingin menjadi yang tampan dan perkasa. Estetisasi ideologi berjalan beriringan dengan radikalisasi ideologi. Semakin ideologi mengalami estetisasi, maka radikalisme pun akan tetap marak.

KONFIGURASI SELERA

Bagaimana bangunan dan sosok selera terbentuk? Atau, proses-proses sosial seperti apa yang membentuk selera seseorang atau selera kolektif tertentu? Selera memang meliputi banyak hal: selera makan, berpakaian, rumah, lagu, musik, hingga ke pilihan calon suami/istri. Lebih lanjut selera berpartai, selera kerjaan, selera hobi, bahkan hingga selera dalam memilih presiden.

Tetangga saya memilih seorang presiden bukan karena alasan yang *ndhakik-ndhakik*. Dari dulu, aslinya tetangga saya itu sangat tidak berselera dengan urusan politik dan kekuasaan. Baginya, hal-hal seperti itu sangat menyebalkan. Namun, tiba-tiba ada calon presiden yang memenuhi seleranya. Calon presiden itu terlihat sederhana dan tidak berlagak seperti seorang (calon) pemimpin. Dia memutuskan untuk ikut memilih presiden.

Dalam hal ini, selera adalah suatu pola kecenderungan tertentu untuk menyukai, merasa mau, merasa bisa menikmati, merasa ada kekaguman, dan merasa nyaman terhadap sesuatu. Mungkin definisi itu, apapun alasannya, tidak cukup memadai, walaupun mungkin tidak ada juga definisi yang lengkap. Akan tetapi, ternyata masalahnya bukan soal definisi.

Bagaimana kita menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu suka rendang?

Mengapa orang suka berbaju kuning dan tidak suka berbaju hitam? Mengapa seseorang lebih senang jaz daripada dangdut? Mengapa seseorang lebih suka barang bermerek daripada barang berkualitas bagus? Mengapa saat ada pemilihan presiden, seseorang sudah dan sangat bersemangat untuk memilih Joko Widodo? Bagaimana menjelaskan mengapa orang suka kepada sesuatu, dan tidak suka kepada yang lain?

Ada tiga hal yang berbeda dalam kasus selera tersebut? Pertama, sesuatu yang dirasakan secara empirik: pedas, asin, manis, gurih, pahit, dan sebagainya. Sementara itu, rasa jengkol memang bawaan jengkol itu sendiri. Tidak ada yang bisa membuat rasa jengkol, selain yang menghidupkan. Faktor lingkungan dan alam membantu seseorang untuk pernah dan terbiasa makan jengkol. Hal ini terkait dengan sejarah kuliner masyarakat tertentu yang melahirkan rendang jengkol.

Hal kedua adalah keseleraan terkait dengan hal-hal yang dilihat dan didengar. Bentuk dan warna baju atau rumah hingga lagu atau musik tertentu yang terkait dengan penyeleraan penglihatan dan pendengaran. Ada yang suka laut daripada pegunungan. Ada yang suka desa daripada kota. Ada yang sangat berselera ke museum daripada ke mall. Namun, terdapat juga hal selera terkait dengan simbol-simbol kemewahan atau kesuksesan. Tentu, ketika seseorang menyukai sesuatu, ada proses kenal (tahu), paham, kemudian ada kecocokan antara kebiasaan, harapan, dan peluang.

Selera dalam berpolitik atau memilih presiden pun bukan sekadar keterpaksaan ikut pemilu, tetapi lebih

dari bagaimana pembentukan selera untuk suka kepada calon presiden tertentu. Dibanding selera suka jengkol atau baju, menjelaskan selera memilih calon presiden jauh lebih mudah. Secara umum, jika kita dikondisikan untuk memilih sesuatu, kita diperkenalkan apa dan siapa yang akan dipilih. Dalam kasus presiden, selera kita dibentuk oleh wacana, berupa berbagai pencitraan, atau hal-hal lain yang bersifat individual.

Masalah yang masih tersisa adalah kenapa ada orang suka jaz dan tidak suka dangdut atau mengapa ada yang suka tas bermerek dari luar negeri dan tidak suka tas buatan dalam negeri. Dalam hal ini, kita menjadi tahu bahwa selera bukan saja karena konstruksi kebiasaan, tetapi juga lingkungan. Akan tetapi, selera juga bisa dibentuk satu dorongan ideologi dominan dan hegemonik, sehingga konstruksi ideologi dominan tersebut, tanpa disadari menjadi kesadaran masyarakat pada umumnya.

Jika kita membayangkan bahwa ideologi dominan tersebut adalah kapitalisme, maka ada beberapa konstruksi selera yang, tanpa disadari lagi, menjadi selera kita bersama. Pertama, perasaan atau anggapan bahwa apa-apa yang dari Barat adalah lebih hebat dan lebih unggul, termasuk barang-barangnya. Itulah sebabnya, kita lebih bangga dan berselera memiliki barang-barang bermerek dari Paris daripada dari Yogyakarta. Padahal, mungkin kualitas barangnya sama, cuma barang dari Yogya tidak dikenal bahkan tidak bermerek.

Dengan mahalnya barang-barang dari luar negeri, maka dengan sembunyi-sembunyi kita membeli barang

KW-nya. Kita memaksakan diri membeli selera dan pencitraan dengan harga yang lebih terjangkau. Di satu sisi, hal itu memperlihatkan kreativitas, tetapi di sisi lain terlihat seperti merendahkan bangsa sendiri. Kenyataan tentang kisah seperti itu sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, segala hal produk pribumi adalah sesuatu yang tidak berselera dan bermutu rendah. Dulu, hingga tahun 1980-an, orang-orang yang suka dangdut terpaksa menyembunyikan seleranya karena dianggap tidak elit. Apalagi, mereka yang menyanyikan lagu dangdut umumnya berasal dari masyarakat miskin perkotaan atau orang desa. Lagu-lagu dangdut dinyanyikan di pinggir-pinggir gang kumuh. Kajian tentang ini cukup banyak. Baik dari segi syair dan iramanya, lagu ini dianggap sebagai resistensi terhadap norma dan kekuasaan yang mapan.

Pada waktu itu, orang-orang cenderung memilih lagu-lagu Barat. Kakak saya, ketika remaja dan menjadi gadis dewasa tahun 1960-an akhir hingga 1970-an, semua lagu di buku album lagu-lagunya adalah lagu-lagu dari Barat. Waktu itu, kakak saya itu tidak mau dan tidak pernah menyanyikan lagu-lagu dangdut. Konstruksi selera seperti itu tidak hanya mengidap ke selera musik, tetapi juga ke selera makan dan makanan. Kita mengabaikan dan menganggap rendah makan singkong daripada roti. Singkong adalah makanan masyarakat kelas bawah. Kita tahu bahan roti, yaitu gandum, hampir sepenuhnya impor.

Di balik konstruksi selera, faktor yang berbicara adalah kekuasaan uang dan kekuasaan modal yang didukung (atau saling mendukung) dengan kekuasaan

politik. Negara seperti Indonesia, bukan saja pernah mengalami penjajahan Barat, tetapi hingga hari ini pun kita belum mampu melepaskan diri untuk, bahkan menjadi seperti orang Barat di tanah sendiri. Hingga hari ini, selera kita telah dikonstruksi untuk, dan hanya, menjadi konsumen yang konsumtif.

Dengan strategi dan kebijakan budaya, belakangan terjadi kebangkitan dan kebanggaan baru terhadap karya-karya, hasil alam, dan budaya sendiri. Generasi milenial bisa menyukai lagu-lagu *campursari* Didi Kempot yang berbahasa Jawa. Begitu banyak kalangan antarkelas, antargenerasi, antarpantai, antaragama, antargender yang menyanyikan *campursari* secara mengharu-biru sehingga terlihat sangat percaya diri. Walaupun masih ada, sebagian masyarakat Indonesia tidak lagi terlalu mengidap penyakit kelas dan penyakit pemuja Barat.

Demikianlah, ganti generasi ganti selera. Selalu terjadi persaingan wacana, persaingan bisnis, politik, dan berbagai ideologi yang layak dikontestasikan. Ke depan adalah ruang besar untuk memperebutkan selera-selera. Kalau kita mau menjadi negara dan bangsa yang kuat, sudah saatnya tidak lagi terus-menerus menjadi konsumen mitos keunggulan kelas dan Barat. Percayalah, hal itu hanya tipuan ideologi dan mitos saja, dan kita adalah orang-orang yang tertipu.

NEGOSIASI DAN INTERSEKSI

Kita hidup dalam satu sistem kehidupan di mana kita (sebagai subjek) bukan saja harus berusaha untuk menjalani hidup agar bisa bertahan dan hidup berjalan “normal”, tetapi juga diperebutkan. Sebagai subjek, kita akan mengikuti prosedur kehidupan, mulai dari yang normatif hingga ke hal-hal yang sangat mungkin dipaksa oleh satu situasi yang tidak normal. Sebagai subjek, kita mengikuti tuntutan tatanan kehidupan, baik hal-hal yang bersifat ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya.

Sebagai subjek kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan, kita harus mengikuti ajaran agama tertentu, kita harus sekolah, kita harus mengikuti aturan administrasi tertentu, dan kita harus memiliki kelayakan hidup (lihat Beetz, 2016:98). Cukup banyak tuntutan hidup, dan kita melakukannya mungkin dalam keadaan tanpa perasaan, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tidak senang, atau dalam keadaan sedih. Demikianlah sistem hidup berjalan. Persoalannya, siapa subjek yang harus menjalani kehidupan seperti itu?

Seperti telah disinggung, subjek juga menjadi ajang yang diperebutkan oleh banyak hal. Dulu, yang merebut subjek itu awalnya yang membuat/menciptakan manusia, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang berdiri

sendiri di luar manusia, dan kemudian menjadi tatanan eksterioritas. Terdapat paling tidak tiga kategori hal eksterioritas. Kategori pertama, yakni masyarakat, negara, bangsa, atau dunia. Kedua, nilai-nilai dan sistem paradigma, seperti agama, ideologi, atau yang setara dengan itu. Ketiga, nilai-nilai lokal yang lebih spesifik.

Eksterioritas pertama lebih sebagai ruang kontestasi; di dalam masyarakat, di mana masyarakat ingin subjek menjadi bagian dari dirinya. Di sini yang terjadi adalah masyarakat ingin subjek menjadi bagian administrasi, bagian sosial-budaya, dan bagian politik masyarakatnya. Kita tahu masyarakat juga terdiri dari berbagai faksi dan kelompok, dan setiap faksi dan kelompok memobilisasi eksterioritas kedua dan ketiga, untuk menjadi bagian dari internal masyarakat bersangkutan.

Perebutan bisa berjalan lunak dan keras, yang disebut sebagai proses-proses negosiasi berkelanjutan. Negosiasi lunak bisa berupa nasihat, dialog, atau hal-hal yang bisa dibicarakan tanpa melibatkan unsur dan faktor kekerasan. Akan tetapi, sangat mungkin dialog berjalan keras sehingga yang terjadi adalah dominasi (lihat Miller, 2019). Hasil dari negosiasi tersebut subjek menjadi dan didominasi A, atau AB (suatu percampuran), atau didominasi C, atau bahkan hal-hal yang lain. Prinsipnya, subjek adalah hasil negosiasi itu sendiri.

Pada tataran ini, ketika masyarakat memobilisasi eksterioritas kedua dan ketiga, maka sangat mungkin (dan hampir selalu terjadi) bahwa pada akhirnya *subjek adalah ruang interseksi* itu sendiri. Sebagai contoh:

subjek tersebut menjadi orang Jawa (dengan berbagai variannya), yang Islam (dengan berbagai variannya), yang *abangan* (dengan berbagai variannya), yang modern (dalam segala variannya), yang secara keseluruhan membentuk suatu diri atau pribadi (dalam segala variannya).

Demikian pula negara, dengan mendayagunakan eksterior kedua dan ketiga, mengelola subjek sedemikian rupa untuk menjadi warga negara (dalam segala variannya), sebagai rakyat (dalam berbagai variannya), sebagai warga yang cinta tanah air dan memiliki KTP, juga sebagai (untuk kasus Indonesia), yang berasaskan Pancasila, yang memiliki bendera merah putih, yang memiliki lagu-lagu kebangsaan, dan dengan sukarela mengikuti pemilu (dalam segala levelnya).

Sistem kehidupan dunia juga merebut subjek agar subjek menjadi warga dunia. Dengan memobilisasi hal-hal yang sama, maka sistem kehidupan dunia berharap subjek dapat menjadi bagian dari warga dunia; terlibat dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia. Sebagai kekuatan global, dunia mampu mendorong dan menekan negara atau masyarakat sehingga, dalam beberapa hal, negara dan masyarakat mengikuti sistem kehidupan dunia. Artinya, banyak dari eksterior kedua dan ketiga, kekuatan-kekuatan global dirasakan lebih berpengaruh.

Alhasil, subjek terkonstitusi, misalnya, subjek lebih sebagai orang modern yang Jawa dan Islam daripada sebagai orang Jawa yang modern dan beragama Islam. Komposisi pada ruang interseksi menentukan subjek

seperti apa yang hadir dan ikut menentukan “semacam karakter” dan identitas mana yang lebih mengedepan. Memang masih sangat layak dibicarakan lebih jauh, bagaimana ruang kesadaran subjek menjadi ruang interseksi tersebut dan bagaimana proses-proses subjek menjalani kehidupannya.

Hal itu semua menentukan posisi dan hubungan-hubungan elemen-elemen eksterioritas dalam diri subjek. Sebagai dialektikanya, dalam posisi interseksi itu pula subjek mengikuti dan menjalani kehidupan. Kita menjadi bisa tahu alasan, motif, tujuan, dan ekspresi-ekspresi subjek dalam menghadapi dan menjalani kehidupan, dalam berbagai ranahnya.

Konsep dan teori yang membangun sistem dalam buku ini hanya bersifat pengantar. Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan diteliti lebih jauh terkait dengan persoalan negosiasi dan interseksi. Akan tetapi, paling tidak, gagasan di atas dapat dijadikan pertanyaan dalam kajian-kajian budaya, sosial, dan bahkan sastra. Sebagai misal, mempersoalkan tokoh dalam novel, untuk menjawab bentuk karakter dan identitas tokoh dalam novel serta bagaimana hal tersebut dimungkinkan.

SUBJEK POPULER

Di tulisan sebelumnya, kita membicarakan tentang subjek sebagai hasil negosiasi yang menghadirkan subjek interseksi. Interseksi merupakan ruang kesadaran tempat titik-titik pertemuan berbagai nilai, dogma ideologis, atau wacana, yang membentuk suatu komposisi yang setiap orangnya dimungkinkan berbeda. Persoalannya adalah titik-titik pertemuan apa yang saja yang terjadi, bagaimana relasi-relasinya, dan apa implikasinya terhadap subjek.

Seperti telah dijelaskan, subjek menjadi ajang rebutan banyak hal, karena semua hal berkepentingan dengan subjek. Saya ingin masuk ke satu lokus sosial dan kultural tertentu, yakni masyarakat Yogyakarta. Di Yogyakarta, semua hal bersaing. Orang Yogyakarta (Jawa-Yogyakarta) atas dasar tradisinya selalu mengatakan bahwa mereka secara kultural punya konsep hidup *nrima ing pandum, sak madya, tepa slira*, dan sebagainya. Konsep hidup yang membuat orang Yogyakarta bisa dengan cepat dan menerima banyak hal.

Sejak abad ke-16 akhir, Yogyakarta menobatkan diri sebagai kerajaan Mataram Islam. Artinya, agama Islam merupakan hal sangat penting dari bangunan budaya Mataram Islam. Seiring dengan masuknya Barat (Belanda), Yogyakarta mengalami banyak perubahan sampai ke hal-hal yang bersifat simbolis, misalnya

tentang simbol Keraton Yogyakarta yang disematkan di beskap. Yogyakarta mengalami suatu hal yang kemudian disebut sebagai modernisasi dalam bayang-bayang kapitalisme kolonial. Ternyata, di Barat, modernisme dan kapitalisme terus membesar dan memenangkan kontestasi peradaban.

Sekarang, Yogyakarta adalah suatu lokus masyarakat modern yang ramai. Mungkin sangat sedikit yang belum mengalami modernisasi. Akan tetapi, yang terjadi adalah mereka yang mengaku berpegang tradisi, hidup secara modern, dan mempraktikkan apa yang disebut sebagai pemeluk Islam. Dalam formasi yang lain, mereka tidak lagi Jawa *banget*, orang modern yang canggung, orang Islam yang berbau sekuler, tidak sepenuhnya mengakui bahwa sebagian besar *abangan*.

Saya merasa inilah potret umum orang Jawa-Yogyakarta sekarang. Saya bisa membayangkan kota-kota lain yang tidak memiliki syariah dan kosmologi seperti orang Jawa-Yogyakarta. Yang terjadi adalah proses *easy going* kehidupan, pragmatisasi, terjadinya perubahan dalam ukuran kesuksesan dan kebahagiaan, menghindari kerumitan (kecanggihan), hilangnya kesetiaan terhadap pengabdian, terkurasnya niat dan pikiran baik, semakin tidak peka dengan masalah kebodohan dan kemiskinan, dan semakin tidak memiliki empati sosial.

Situasi itu kini semakin diperburuk dengan keunggulan teknologi internet sehingga hampir sebagian dari kita hidup dalam candu gawai. Terbentuklah masyarakat yang riuh, tanpa kedalaman, serba mau

cepat, serba penasaran terhadap sesuatu yang baru, dan keinginan untuk mengonsumsi itu semua. Kondisi itu merupakan konstruksi bangunan dan sistem kapitalisme yang menjadi tubuh masyarakat. Masyarakat yang adalah kumpulan subjek-subjek (lihat Bracher, dkk., 1994; Boyne, 2001).

Jika menilik kejadian itu, titik pertemuan yang mendominasi ruang kesadaran orang Yogyakarta adalah dominannya kesadaran modern yang saling mendukung dengan mekanisme kapitalis, dengan rasa dan tradisi Jawa yang masih mencoba bertahan, dengan agama yang sekali-sekali dipakai sebagai pemanis dan seremoni, serta bungkus nasionalitas kewargaan yang berbau sekuler. Bagi saya inilah subjek populer yang cukup dominan dan banyak dijumpai. Bahwa jika ada beberapa kecenderungan lain artinya selalu ada pengecualian.

Kinerja dominannya subjek populer atau tepatnya kumpulan subjek populer menjadi penting karena adanya masyarakat populer yang menggerakkan dan meramalkan budaya populer. Dengan demikian, budaya populer adalah suatu gaya, pola, mekanisme, dan prosedur-prosedur kehidupan yang ditandai dalam hubungan-hubungan pragmatis, konsumtif (dalam segala hal), yang penting *gayeng*, tidak adanya standar-standar yang dijadikan pedoman kebajikan sosial, dengan media sosial sebagai bagian yang terintegrasi dalam kehidupan itu sendiri.

Dari situasi itu dapat diketahui bahwa ada dialektika antara subjek populer dengan budaya populer. Terdapat beberapa kemungkinan ke mana arah

perjalanan dialektika tersebut. Pertama, hal yang paling berpengaruh adalah perkembangan global sebagai ruang besar terjadinya dialektika subjek, masyarakat, dan kebudayaannya. Kita tahu, hingga hari ini kekuatan-kekuatan global secara sistematis melakukan penetrasi terhadap kehidupan (hingga ke hal pribadi), sehingga ada kemungkinan subjek populer sangat adaptif untuk menjadi subjek global.

Jika itu yang terjadi, maka kehadiran subjek populer akan terus membesar, tidak lagi terikat oleh masyarakat lokalnya, juga negaranya. Hal itu sebagian telah terjadi. Keberadaan subjek-subjek populer sebagai ruang interseksi dengan kekhasan lokalnya akan semakin tergerus dengan dominasi global yang membesar. Akan terjadi suatu ketidakseimbangan dalam wilayah interseksi sehingga yang muncul dominasi global terhadap lokal.

Kedua, walaupun peluangnya tidak besar tetapi perlu diperhitungkan, yakni menguatnya kesadaran lokal. Memang, karakter subjek populer selalu berbeda di setiap generasi. Dalam perkembangan tiga generasi belakangan—dalam rentang waktu sekitar 30 hingga 40 tahun—tiap generasinya memperlihatkan karakter subjek populer yang berbeda. Namun, ada kesan bahwa generasi yang lebih tua berusaha mengembalikan kekuatan budaya lokal sebagai pengimbangan terhadap budaya populer dan budaya global. Kontestasi itu akan terus berlangsung dan kita sedang menunggu bagaimana dan ke mana proses dialektik tersebut akan berlangsung.

Dalam situasi dan kondisi tersebut peranan dan kehadiran negara menjadi sangat diperlukan untuk membantu mengelola arah perkembangan kebudayaan lokal yang secara otomatis adalah para pendukung kebudayaan nasional. Strategi dan kebijakan kebudayaan nasional tampaknya memang memberikan keberpihakan terhadap keberadaan budaya-budaya lokal. Akan tetapi, kebijakan itu menjadi kontradiktif dengan berbagai kebijakan nasional lain, terutama di bidang ekonomi dan politik.

Hal yang terjadi adalah subjek populer cenderung akan mengikuti arus ke mana arah peradaban akan berjalan. Sesuai dengan karakternya, subjek populer mementingkan hidup yang nyaman, cenderung menghindari kerumitan (dalam arti kecanggihan), merasa memiliki ukuran sendiri tentang mutu kehidupan (adanya pragmatisasi kehidupan), dan, sekali lagi, kaburnya kebajikan sosial sebagai pegangan hidup bersama.

POLITIK KEHIDUPAN

POLITIK KEHIDUPAN

Hal yang dimaksud dengan politik kehidupan di sini adalah cara, strategi, atau bahkan kiat-kiat dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Politik merupakan upaya subjek/seseorang mengelola dan mengatasi tata kehidupan. Tata kehidupan memposisikan seseorang dalam kedudukan sosial, politik, hukum, dan budaya tertentu (Ranciere, 2016). Walaupun istilahnya “kehidupan sehari-hari”, tetapi dalam praktiknya kita hidup dalam lapis yang berbeda-beda; bisa saja sebagai diri sendiri, bisa sebagai anggota keluarga, sebagai warga kampung, sebagai orang Jawa, sebagai warga negara, hingga warga global.

Pada umumnya, seseorang atau masyarakat tidak dapat keluar dari tatanan tersebut. Zizek (1999:262–263) menyebutnya sebagai cengkeraman tatanan simbolik. Jika keluar dari tatanan simbolik, maka kita juga dikeluarkan dari tata aturan hidup. Akan tetapi tetap ada kemungkinan akan peristiwa-peristiwa yang bisa melubangi tatanan simbolik tersebut, antara lain adanya perubahan status atau predikat; baik secara positif maupun negatif, dan dikeluarkan secara permanen; misalnya dianggap gila.

Tata kehidupan terbentuk dalam dua hal. Pertama, hal-hal yang terdapat dalam hukum, undang-undang, dan segala hal aturan lainnya yang bersifat tertulis. Tentu

dalam praktiknya, terdapat pihak yang mengelola aturan dan pihak yang menjadi subjek yang diatur. Hal yang perlu dipahami adalah berbagai aturan tersebut bersifat mengikat. Dalam berbagai aturan tersebut yang secara abstrak disebut sebagai struktur.

Kedua, tata kehidupan juga dipengaruhi oleh berbagai wacana, seperti norma sosial, dogma dan berbagai ajaran, opini, mitos, fiksi-fiksi populer, dan hal-hal lain yang hidup dalam masyarakat. Wacana bertumpang tindih dengan kekuasaan dan ideologi. Itu artinya, ada yang memproduksi dan menguasai wacana serta ada pula yang mengonsumsi dan dikuasai. Dalam konteks tersebut, selalu terjadi kontestasi wacana yang di dalamnya sekaligus terjadi negosiasi dan resistensi.

Berkenaan dengan dua situasi tersebut, terdapat subjek atau warga mempraktikkan kehidupannya. Praktik tersebut, baik disadari maupun tidak, dapat bersifat politis. Mengadopsi konsep pemikiran Ranciere, praktik politik kehidupan melibatkan berbagai hal yang terdapat dalam diri manusia, yakni berupa perasaan dan pikiran, yang diaktualisasikan dalam berbagai tindakan. Dengan demikian, politik kehidupan dapat juga diartikan sebagai suatu aktualisasi diri dalam menghadapi tata kehidupan.

Persoalannya adalah habitus, trajektori, dan preseden-preseden apa yang melatarbelakangi atau yang menyediakan politik kehidupan sebagai perasaan, pikiran, dan tindakan yang bermotif atau bertujuan. Pertanyaan tersebut didasarkan pada satu anggapan teoretik bahwa pada dasarnya manusia dalam melakukan

politik kehidupan bukan sebagai subjek kosong. Memang, seperti dikatakan Zizek (2005:145), pada situasi tertentu subjek kosong dimungkinkan, tetapi momen kekosongan tersebut bersifat insidental.

Pada tataran tersebut, politik kehidupan mempersoalkan motif atau tujuan aktualisasi diri. Tegasnya: apa yang menjadi motif atau tujuan politik kehidupan. Untuk menjelaskan ini, secara spesifik saya ingin meminjam konsep Bourdieu tentang habitus. Habitus adalah kebiasaan-kebiasaan kultural yang tertanam dalam diri seseorang terutama pada lingkungan awal ketika seseorang dibesarkan. Kebiasaan lingkungan kultural tersebut tertanam cukup lama dan mendasar dan menentukan selera, harapan, cita-cita, bahkan keyakinan seseorang ketika kelak menjalani kehidupan.

Namun, kembali meminjam Bourdieu, di dalam habitus terdapat doksa. Doksa adalah bagaimana tata kehidupan mengatur, mendominasi, bahkan menghegemoni seseorang sehingga seseorang dikondisikan untuk menjadi sesuatu seperti yang diharapkan oleh penguasa hukum atau wacana (Bourdieu, 1998:129). Secara paralel, hal yang ingin dikatakan adalah bahwa perasaan, pikiran, dan tindakan seseorang bukan milik subjek yang bersangkutan, tetapi milik pengelola tata kehidupan.

Jika hal tersebut memang demikian, apakah dapat diartikan politik kehidupan yang dimainkan seseorang bukan sebuah perjuangan yang bebas dan independen? Pertanyaan tersebut menggeret kita untuk mempersoalkan adakah subjek yang bebas dan

independen. Sejumlah teori yang relevan mengatakan bahwa tidak ada subjek yang bebas dan independen. Namun, bukan berarti menjadi manusia bebas dan independen tidak dimungkinkan. Hal tersebut kelak akan dibuktikan dengan adanya kejadian atau peristiwa kekosongan ideologis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak ada politik kehidupan yang original. Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa motif atau tujuan politik kehidupan juga didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terkondisikan oleh praktik-praktik yang telah berjalan sebagaimana biasanya. Bahkan mekanisme, strategi, dan kiat-kiat dalam melaksanakan suatu politik kehidupan agar motif dan tujuan dapat dicapai merupakan rutinitas yang terjadi dari satu waktu ke waktu berikutnya.

Perubahan dan terobosan politik kehidupan hanya dimungkinkan jika terdapat satu situasi yang tidak normal. Situasi yang tidak normal tersebut memungkinkan seseorang, atau masyarakat, melakukan tindakan-tindakan, sebagai aktualisasi perasaan dan pikiran, yang juga tidak biasa. Jika terjadi anomali (kekosongan) kekuasaan, umumnya bersifat insidental. Hal ini seperti tampak pada Mei 1998 dan dapat dikatakan sebagai momen kekosongan. Dalam momen kekosongan, seseorang dapat melakukan politisasi ekstrem politik kehidupan.

POLITIK PERASAAN

Kita sulit mendefinisikan perasaan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang naluriah dan hadir tanpa dapat ditolak. Namun, kita dapat mengetahui gejala perasaan dari sifatnya, seperti rasa senang, gembira, marah, sedih, benci, dan sebagainya. Untuk menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, kita bisa mengadopsi riset-riset yang relevan yang terkait secara khusus dalam persoalan tersebut.

Perasaan adalah sesuatu yang kodrati dan terdapat dalam diri manusia. Sebenarnya, perasaan tidak dapat dikendalikan dan diatur. Dia hadir dalam hubungan sebab akibat antara hal-hal bawah sadar (terutama *id*), berdialektika dan bernegosiasi secara cepat dan otomatis dengan super ego, dan teraktualisasi dalam ego. Dalam egolah muncul sifat-sifat dan bentuk perasaan seperti marah, sedih, benci, dan sebagainya.

Hal yang ingin dibicarakan adalah, pertama, bagaimana rasa perasaan berimplikasi terhadap pikiran (rasionalitas) dan tindakan. Kedua, hal itu berimplikasi apa yang disebut sebagai peran-peran yang diambil oleh perasaan, atau apa yang disebut sebagai politik perasaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan politik perasaan bagaimana perasaan bermain dan berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan dan kemungkinan tindakan yang diambil.

Satu objek atau kasus sangat mungkin ditanggapi secara berbeda. Misalnya ada kasus seseorang pindah agama. Menanggapi kasus itu, akan ada orang yang marah, benci, atau suka dan gembira dengan peristiwa tersebut. Artinya, latar belakang dan posisi seseorang menentukan dalam mengapresiasi suatu peristiwa yang sama. Latar belakang memang menentukan, tetapi bentuk perasaan yang muncul tetap tidak dapat diatur untuk bersifat netral.

Perasaan kemudian bekerja sama dengan pikiran untuk menentukan tindakan apa yang diambil. Untuk kasus orang pindah agama, karena perbedaan bentuk perasaan yang muncul, akan ada tindakan menghujat, memuji, atau tindakan lain dalam dua kisaran tersebut. Dalam konteks tersebut, tidak ada yang spontan. Konsep spontan mengandaikan sesuatu yang dilakukan tanpa proses perasaanisasi dan pikiranisasi. Tidak ada tindakan tanpa tujuan atau motif.

Namun, bukan berarti spontanitas tidak dimungkinkan. Hal itu hanya terjadi jika terdapat peristiwa insidental yang bersifat kejutan, di luar dugaan, atau tidak dalam rekayasa tertentu. Peristiwa tersebut biasanya terjadi dalam kekosongan, sesuatu yang memang tidak direncanakan atau tidak bertujuan. Dalam hal tersebut, dorongan *id* jauh lebih dominan. Perasaan dan pikiran tidak memainkan peranan penting sehingga aksi bersifat spontan.

Perasaan memainkan peranan penting ketika dia melakukan pengaruh terhadap kalkulasi pikiran (rasionalitas). Perasaan benci dan sayang sangat

mungkin mengalahkan pikiran sehingga akan banyak tindakan yang tidak sesuai dengan kalkulasi pikiran. Itulah sebabnya, muncul istilah tindakan yang dianggap tidak masuk akal. Artinya, politik dan politisasi perasaan telah mengambil peran untuk dipuaskan walaupun tindakan tersebut dianggap tidak rasional.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hal itu cukup banyak ditemukan. Terkait dengan latar belakang, ideologisasi sangat berperan dalam pembentukan perasaan. Banyak orang membenci atau mencintai sesuatu tanpa alasan yang rasional. Ketika pilpres, misalnya, perasaan lebih memainkan peranan penting untuk membenci atau menyayangi calon jago presidennya, tanpa perlu mengetahui alasan rasionalnya.

Namun, selalu ada hukum keseimbangan ketika perasaan dapat bekerja sama dengan pikiran. Kasih sayang orang tua kepada anaknya kadang hampir tanpa batas. Akan tetapi, bukan berarti perasaan tersebut harus dilepaskan tanpa kontrol, karena pikiran akan mengkalkulasi akibatnya pada anak. Di sini, perasaan sayang justru mengalah dengan pertimbangan rasionalitas tertentu dalam mendidik bagaimana agar anak dapat berkembang sesuai dengan normatif tertentu.

Selain itu, terdapat perasaan yang bersifat kolektif dan memainkan peranan penting dalam kehidupan. Hal yang kemudian disebut sebagai selera. Selera, pada dasarnya memang bersifat individual. Akan tetapi, kesamaan yang banyak akan menyebabkan selera juga masuk ke tataran kolektif. Selera untuk merasakan

adanya hal ganteng, cantik, indah, enak, jijik, muak, bukan saja sesuatu yang bersifat individual, tetapi juga kolektif.

Berbagai hal tersebut menentukan bagaimana perasaan yang pada mulanya individual memainkan peranan penting dalam politik perasaan, yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk pikiran yang kemudian mempengaruhi tindakan. Triadik perasaan, pikiran, dan tindakan adalah sesuatu yang sehari-hari kita lakukan.

POLITIK PIKIRAN

Terdapat dialektika triadik dalam diri manusia, yakni antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketiga hal tersebut saling berpengaruh. Memang dalam situasi normal, pikiran cukup dominan. Akan tetapi, bukan berarti perasaan tidak memainkan peranan penting. Di samping itu, cukup banyak tindakan yang tidak berdasarkan perasaan atau pikiran, yang bisa disebut sebagai tindakan spontan.

Sebenarnya, perasaan paling akurat dalam merasakan dan melihat sesuatu. Memilih mana yang tampan dan cantik, tidak bisa dikalkulasi secara rasional. Ini masalah perasaan, dan perasaan tidak pernah meleset dalam situasi dan konteksnya. Perasaan mengandalkan sesuatu yang intuitif; tidak bernalar. Pikiranlah yang dengan cepat menganalisis untung rugi atau perlu tidak perlu mengambil suatu tindakan atau keputusan. Jika itu terkait dengan penilaian, pikiran juga yang mencoba menganalisis berapa nilai yang paling sesuai untuk kasus yang sedang dihadapi.

Pada saat itulah, sebenarnya pikiran sedang berpolitik. Politik pikiran adalah bagaimana pikiran menghitung dengan cepat keputusan dan/atau tindakan apa yang paling jitu dan pantas harus diambil. Memang, kesannya kehidupan kita berjalan sebagaimana adanya

tanpa politik pikiran; berjalan dengan normal secara keseharian, bangun, mandi, makan, kerja, istirahat, berbicara, dan mengisi waktu secara normatif.

Hal-hal yang tersebut terkesan bersifat rutin. Namun, rutinitas itu telah terjadwal dalam suatu desain pikiran jangka panjang yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, terdapat kejadian yang menuntut kita berpikir dengan cepat, seperti apa yang akan kita lakukan hari ini dan besok. Bahkan berbicara pun, walau seolah hal rutin, tetap menuntut kita untuk dengan cepat memilih kata yang pantas dan pas guna menghindari salah paham. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menjawab pertanyaan.

Aspek politik pikiran meliputi konteks, kapasitas, rentang waktu, dan bentuk tindakan. Tidak ada konteks yang persis sama sehingga selalu menuntut penanganan yang berbeda. Konteks adalah situasi dan suasana peristiwa politik pikiran terjadi, relasi-relasi yang terdapat di dalamnya; sifat konteks apakah formal atau tidak formal; bentuk konteks apakah bisnis, kerjaan, hobi, hiburan, dan sebagainya (lihat Duranti dan Goodwin, 1992:2–3; Airanti, dkk. 2017). Konteks termasuk yang menggiring ke arah mana politik pikiran dimungkinkan.

Kapasitas terkait dengan pengalaman, usia, pendidikan, termasuk gender, karena secara kultural terjadi perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan seseorang terkait politik pikiran yang akan ditindaklanjuti atau akan diputuskan. Apakah keputusan diambil dengan terburu-buru yang penting

urusan segera selesai. Hal tersebut terkait dengan kematangan dan pengalaman. Biasanya yang lebih banyak pengalaman berusaha lebih banyak melihat sisi-sisi dari berbagai kemungkinan.

Sementara itu, hal rentang waktu dari politik pikiran terkait cakupan efek dari tindakan dan keputusan yang diambil. Suatu hari, saya berpikir serius untuk masuk SMA A atau SMA B, yang kebetulan waktu itu saya diterima di dua tempat. Perasaan dan imajinasi untuk membayangkan masa depan juga saya kerahkan. Dengan kurangnya berpengalaman dan salah membaca situasi zaman, saya memilih SMA B, yang menurut saya keputusan itu tidak sesuai dengan saya. Keputusan itu cukup lama saya sesali. Baru setelah selesai menyelesaikan program doktor, dan menurut saya sangat terlambat, perasaan menyesal itu mulai hilang.

Hal dimaksud bentuk tindakan adalah, pertama, apakah tindakan bersifat verbal dan bagaimana verbalitas itu harus diekspresikan. Masalahnya, berdasarkan pertimbangan dan politik pikiran, keputusan ekspresi juga hasil pikiran. Apakah terdapat situasi-situasi tertentu di mana perlu berteriak, berbisik, berkata dalam ukuran normal, dengan intonasi yang bagaiman semua bukan sesuatu yang bersifat spontan, selalu ada latar belakang dan konteks yang mendukung.

Kedua, apakah tindakan bersifat kinetik dan bagaimana hal kinetik itu harus diekspresikan. Hal-hal gerakan tubuh (kinetik) bukan gerakan yang tidak biasanya dilakukan. Selalu ada pola-pola berulang

karena kehidupan satu orang dengan yang lain tidak jauh berbeda. Hal-hal insidental dimungkinkan, tetapi tetap saja tidak akan terjadi gerakan-gerakan spontan. Semua hal terstruktur dan bagian dari politik pikiran.

Seperti telah disinggung, ruang spontan yang tidak ada kandungan pikiran dan perasaan adalah ruang insidental yang kejadiannya kecil sekali. Terdapat beberapa kejadian atau peristiwa yang di luar kalkulasi pikiran, seperti peristiwa-peristiwa kecelakaan, kejahatan, ketakutan, kondisi-kondisi tertentu yang membuat marah, sedih, atau senang, yang sangat mungkin pada situasi ketika kita sedang di dalam peristiwa itu, perang pikiran tidak cukup dominan. Kelak yang terjadi adalah tindakan-tindakan spontan.

POLITIK TINDAKAN

Tindakan meliputi segala aktivitas yang dilakukan manusia. Ada tindakan yang secara kodrati dilakukan karena hal-hal manusiawi, seperti makan, tidur, hingga buang air kecil dan besar. Motif dasarnya relatif sama, yakni bahwa kita secara umum tidak mampu mempolitisasi tindakan manusiawi tersebut, meski kita mampu mempercanggihnya. Hal pencanggihannya tersebut terkait dengan kemampuan internal masing-masing manusia.

Akan tetapi di luar itu, sebagai tindakan non-manusiawi, tindakan meliputi berbagai tindakan sosial, politik, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Berdasarkan kejadiannya, ada tindakan spontan dan ada tindakan yang tidak spontan. Keputusan ikut berlatih dan bermain teater adalah tindakan tidak spontan. Namun, dalam sebuah panggung sandiwara, akan banyak kejadian dan tindakan spontan.

Tindakan terjadi, baik dalam proses yang cepat atau lambat, merupakan negosiasi antara pikiran dan perasaan yang teraktualisasi dalam tindakan. Dalam ruang negosiasi inilah terjadi banyak pertimbangan tindakan apa yang akan diambil seseorang dalam praktik

kehidupannya. Hal-hal yang menjadi pertimbangan negosiatif antara lain relasi-relasi kuasa di dalam konteks tempat tindakan tersebut diambil. Dengan demikian, tindakan yang kita bicarakan adalah tindakan tidak spontan. Bisa disebut sebagai politik tindakan.

Hal yang perlu dibicarakan adalah relasi-relasi kuasa seperti apa saja yang membentuk struktur ruang tindakan sehingga setiap keputusan tindakan menjadi berbeda-beda. Pembicaraan di bagian ini cukup kompleks. Dari sifatnya, terdapat relasi kuasa ekonomi, politik, agama, dan sosial-kultural. Dari praktik proseduralnya, terdapat relasi kuasa formal dan informal. Sebagai kasus, di sini hanya membicarakan satu kasus saja, yakni relasi kuasa agama yang informal. Ini terkait dengan praktik kehidupan yang paling sering kita jalani sehari-hari.

Memang, tidak ada praktik yang berjalan secara tunggal. Selalu ada tumpang tindih dalam praktik tindakan. Itulah sebabnya, setiap tindakan memberikan implikasi politik. Seperti telah disinggung, makna politik di sini adalah ketika praktik tindakan, sebagai hasil negosiasi, merupakan keputusan politik individual. Kita membicarakan pada tataran individual, bukan kolektif.

Misalnya di kampung saya, salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan di masjid. Jenis kegiatannya berbeda-beda, ada yang kegiatan rutin masjid seperti Jumatan dan hari-hari agama yang rutin. Terdapat pengajian per-kelompok (kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, dan sebagainya). Nama kelompok pengajian juga berbeda-beda, dan

jadwal kegiatan juga berbeda-beda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terdapat juga kegiatan seremoni nasional, seperti malam 17 Agustus-an.

Beberapa kelompok pengajian tersebut tentu ada yang selalu bertindak sebagai panitia, tetapi sebagian yang lain berganti-ganti. Dalam praktik kegiatan tersebut saja kita menjadi tahu bahwa untuk ikut atau tidak kegiatan masjid tersebut, terdapat praktik-praktik politik tindakan berdasarkan relasi-relasi kuasa tertentu. Relasi kuasa yang paling signifikan adalah relasi kuasa agama sehingga seseorang merasa tidak berbuat amal yang baik (soal pahala) jika tidak ikut pengajian.

Masih termasuk relasi kuasa agama, tindakan ke masjid sangat mungkin dilatarbelakangi kehendak untuk bersilaturahmi, kehendak untuk mendapat siraman rohani, atau yang tidak kalah menjadi pertimbangan adalah merasa tidak enak dengan Pak Kiai. “Apa kata Pak Kiai nanti jika beliau tahu bahwa saya tidak datang ke pengajian?” Berbagai pertimbangan tersebut menyebabkan saya memutuskan untuk ikut pengajian di masjid.

Namun, seiring perkembangan waktu dan ruang, dalam konteks relasi kuasa (agama dan informal) yang lebih khusus, ternyata terdapat perbedaan “mazhab”. Pengertian, pemahaman, hingga kemudian menjadi “ideologi” tidak dipahami secara sama, selalu terdapat perbedaan. Dalam skala nasional, ada organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan berbagai kelompok organisasi agama lain ajaran-ajaran diambil dalam keperluan yang berbeda.

Dalam ruang yang lebih spesifik, bahkan ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang ikut menentukan variabel tindakan. Belum lagi praktik-praktik yang mencampurkan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal yang tidak semua dari kita cukup terbiasa dan familiar. Yang pasti, tindakan untuk ikut pengajian ke masjid mendapat pilihan ke masjid yang mana, karena masjid di sekitar kita cukup banyak, dengan berbagai aliran organisasi dan mazhab.

Hal ini menunjukkan betapa dalam posisi-posisi tersebut, tindakan kita tersandera sehingga apa yang kita ambil merupakan politik tindakan sekaligus tindakan politik.

TINDAKAN RADIKAL

Kata radikal, radikalisasi, dan terutama radikalisme sering muncul dalam berbagai pembicaraan dan peristiwa. Salah satu pengertian radikalisme yang menonjol adalah sebagai paham yang diekstremkan (maksudnya hingga ke akar-akarnya) dari suatu ajaran, dan khususnya pandangan dunia tertentu. *Ndialalah*, kalau di Indonesia, radikalisme itu hampir selalu dikaitkan dengan radikalisasi yang dilakukan oleh sekompok penganut Islam.

Hal ini merupakan konsekuensi sebab penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Di negara-negara lain, yang melakukan radikalisasi paham juga agama mayoritas di negara tersebut. Memang, radikalisasi yang dilakukan sekelompok umat Islam terlihat lebih besar. Apalagi dikaitkan dengan predikat teroris, maka sempurnalah agama itu melahirkan banyak radikalisme.

Sebagai ideologi yang diekstremkan, pengikutnya didoktrin sehingga kelompok radikal ini memiliki sejumlah pengikut yang super fanatik. Dalam kondisi fanatik, kelompok ini siap melawan dan menyerang siapa saja yang tidak sesuai dengan paham mereka. Kelompok radikal tersebut kemudian melakukan berbagai gerakan, baik secara sporadis maupun lebih terorganisir. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh

kelompok politik yang memiliki kepentingan kekuasaan dan ekonomi, serta memiliki dana.

Pengekstremisan ideologi dimungkinkan karena ada pihak yang kecewa, gagal, dan merasa kalah dalam kehidupan duniawi. Dunia dianggap telah berjalan dengan salah karena tidak berpihak kepadanya. Untuk mengatasi persoalan itu, mereka mencari pembenaran ideologis dalam batas hitam putih tentang mana yang salah dan benar; mana yang berdosa dan yang berpahala; mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak; hingga mana yang pasti masuk surga dan mana yang pasti masuk neraka.

Pemilahan tersebut didukung oleh kitab suci dan hadis. Kita tidak bisa mempersoalkan apakah tafsirnya absah atau tidak. Kita pun tidak bisa mempersoalkan tafsirnya sesuai dengan prosedur ilmu atau tidak sebab keyakinan ada di dalam hati, bukan pikiran. Keyakinan mengalahkan pikiran. Tidak perlu menuntut mereka yang melakukan berbagai tindakan radikal untuk berpikir rasional.

Ekstremisasi ideologi tersebut paling mudah diterima oleh mereka yang memang mendapat habitus religius. Dalam perjalanan hidupnya, mereka menjadi pemeluk agama yang taat. Dalam posisi itu, mereka melihat dunia yang ternyata tidak seperti diharapkan hingga kekecewaan-kekecewaan mereka semakin menumpuk. Maka, begitu mendapat pembenaran dari suatu ajaran yang memang ada habitusnya, ajaran itu langsung merasuk ke dalam hati dan menjadi keyakinan yang sangat mendalam (*nggathok* dalam bahasa Jawa).

Secara ke-subjek-an, mereka tidak salah. Pengambilan posisi subjek radikal itu, seperti mengisi penuh sebuah botol, yang secara sekilas terlihat kosong. Artinya, subjek radikal ada dalam keberadaan ganda, bahwa hal subjek kosong itu sekaligus juga subjek penuh (lihat Homer, 2016:71). Subjek radikal memiliki peluang tinggi untuk melakukan berbagai tindakan radikal. Dalam hal ini, tindakan radikal adalah tindakan yang keluar dari tatanan simbolik yang disepakati secara umum/dominan.

Dengan demikian, tatanan simbolik pun ada tatarannya: tataran berbangsa dan bernegara, tataran masyarakat berbasis lokal-lokal tertentu, tataran kelompok-kelompok agama atau politik, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi tindakan radikal, suatu tindakan harus ditempatkan pada tataran tertentu. Seperti, misalnya, kasus pembakaran terhadap bendera merah putih. Pembakaran bendera merah putih (harus dicermati peristiwanya) adalah tindakan radikal yang keluar dari tatanan simbolik berbangsa dan bernegara.

Kasus lain, misalnya, jika seseorang menyelenggarakan ritual-ritual (kehidupan dan kematian) yang tidak sesuai dengan adat. Memang, ada berbagai kemungkinan bahwa ketidaksesuaian itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Hal ini merupakan implikasi subjek kosong/penuh yang bisa berimplikasi ganda. Jika karena kosong, maka tindakan radikal itu bukan kesengajaan.

Namun, jika setelah diidentifikasi bahwa subjek adalah subjek penuh, maka tindakan mereka dilakukan

dengan kesengajaan atau bertujuan. Ini yang disebut Zizek sebagai *to act* dan *to do* (Bowman dan Stamp (Ed.), 2007:101; Wood, 2012). Tindakan radikal yang murni adalah *to act*, yakni ketika subjek melakukan sesuatu tanpa pikir, tanpa pengetahuan, sesuatu yang instingtif, dan bersifat spontan.

Memang, berbagai keadaan tindakan radikal tersebut sering bertumpang-tindih. Tindakan yang mengarah pada tindak kriminal akan berurusan dengan negara. Akan tetapi, kadang ada saja tindakan radikal yang tidak mengarah ke kriminal. Beberapa kasus pelanggaran adat sangat sulit diidentifikasi sebagai tindak kriminal. Kita biasanya menyebut sebagai *dasar wong edan*, sebab dengan memposisikan seseorang sebagai *edan*, maka mereka diandaikan sebagai subjek kosong, atau subjek yang penuh sekalian.

MOMEN KEKOSONGAN

Apakah peristiwa seperti Pemilu Presiden memberi atau membuka peluang masyarakat Indonesia untuk mendapatkan momen kekosongan? Akan tetapi, apa itu momen kekosongan? Mengapa ia menjadi penting dan menentukan arah dan perubahan ke depan?

Momen kekosongan adalah suatu kondisi ketika seseorang (subjek) tanpa disadarinya masuk ke dalam satu momen (waktu) yang bersifat non-ideologis (Zizek, 1989: 170). Momen kekosongan adalah suatu tindakan yang bersifat spontan, lebih sebagai sesuatu naluriah. Momen kekosongan adalah suatu aksi yang tidak direncanakan, mungkin juga lebih sebagai tindakan berdasarkan tuntutan hati nurani.

Namun, tindakan dalam momen kekosongan dapat saja sebagai aksi yang berbahaya. Tindakan spontan melakukan kekerasan, dalam konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan radikal. Hal itu disebabkan, jika kita mau berpikir, maka mungkin kita akan menunda melakukan tindakan kekerasan. Tindakan yang melanggar norma agama dan keyakinan subjek masing-masing dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang terjadi dalam momen kekosongan. Jika kita berpikir dan menimbang-nimbang, maka kita mungkin tidak jadi melanggar tuntunan agama tersebut.

Seorang pemikir terkenal, Slavoj Zizek, mengemukakan pendapat tentang bagaimana tindakan radikal secara teori masih selalu dimungkinkan (Wells, 2014:6–7). Sebagai manusia yang dibesarkan dalam masyarakat yang sangat ideologis, sangat sedikit subjek mampu membebaskan dirinya dari kooptasi dan hegemoni ideologi. Manusia hidup—dan hanya dimungkinkan—karena ideologi. Bahkan di beberapa tulisan, Zizek secara eksplisit mengatakan bahwa salah satu ideologi yang kuat dan bertahan itu adalah kapitalisme (lihat McMillan, 2012; Zizek, 2014; Zizek, 2018).

Itulah sebabnya, hampir sebagian besar manusia modern telah kehilangan spontanitas. Manusia hidup dalam sebuah perencanaan yang dibingkai oleh kehendak dan dorongan ideologi yang menguasai subjek, bahkan masyarakat. Kini, kita tahu demikian banyak ideologi yang beroperasi dan ideologi tersebut bertumpang tindih dalam diri seseorang atau masyarakat. Dorongan ideologis tersebut saling merebut perhatian untuk menjadi paling benar.

Dalam dominasi ideologi tertentu, subjek merasa sah dalam dirinya. Namun, subjek tidak mengetahui bahwa kebenaran yang diyakini itu bersifat semu. Subjek tahu ia terjebak dalam keyakinan ideologis tersebut, tetapi subjek akan terus melakukannya. Subjek tahu bahwa harga kopi di sebuah resto terkenal itu sangat mahal, tetapi subjek akan membeli kopi lagi di resto tersebut. Inilah yang disebut sebagai kesadaran sinis.

Apakah secara sosial masyarakat Indonesia pernah mengalami momen kekosongan? Tidak perlu menarik jauh ke belakang, peristiwa 1965 dan 1998 dapat dikatakan sebagai peristiwa ketika masyarakat Indonesia mengalami dan masuk dalam momen kekosongan. Bukan saja secara kekuasaan Indonesia mengalami anomali, tetapi pada tataran subjek, sebagian masyarakat Indonesia terlibat dalam berbagai tindakan radikal.

Kita tahu bahwa peristiwa 1965 dan 1998 telah mengubah Indonesia setelah itu. Peristiwa 1965 menjadi momen perpindahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Peristiwa 1998 telah menggeser Indonesia dari diskursus Orde Baru ke Reformasi. Berbagai perubahan tentu saja dapat dirasakan. Akan tetapi, tidak ada janji bahwa perubahan itu akan memasuki suatu arena simbolik yang lebih baik.

Kembali ke pertanyaan semula, apakah Pemilu Presiden akan membawa dan menggeser Indonesia ke satu suasana simbolik lain yang lebih menjanjikan dan berpengharapan? Kita memang sudah mengalami Pemilu Presiden berulang kali. Pemilu 1955 dianggap salah satu tonggak demokrasi Indonesia. Akan tetapi, dari 1971 hingga 1997, Indonesia mengalami masa-masa serba diatur sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berjumpa dalam momen kekosongan.

Sebenarnya, Pemilu 1999 hingga pemilu 2014 selalu membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadikan sebagai momen kekosongan. Tentu saja momen kekosongan itu tidak harus terulang seperti berbagai tindakan pada tahun 1965 atau 1998. Walaupun

secara teori dan praktik hal itu mengubah banyak hal, tetapi efek lanjutan dari momen kekosongan tersebut terbukti tidak membuat kita tenteram dan bahagia.

Momen kekosongan akan terjadi jika kita benar-benar memanfaatkan pemilu tanpa kendali ideologis yang telah mengalgoritma pengetahuan dan wawasan kita. Momen kekosongan akan terjadi jika ketika kita melakukan pilihan, sungguh berdasarkan panggilan dasar hati nurani; berdasarkan pilihan bebas. Akan tetapi, sekali lagi, hal itu hampir mustahil bisa dilakukan.

EKSPRESI TINDAKAN

Berbagai politik, strategi, dan siasat menghadapi kehidupan akan tampak kinerjanya setelah ada tindakan. Hal ini karena pikiran dan perasaan tidak dapat dijadikan bukti (tidak terlihat secara empirik) sebelum menjadi tindakan. Seperti telah disinggung dalam beberapa tulisan lain, tindakan adalah bagaimana pikiran dan perasaan ditransformasikan ke dalam berbagai perilaku, terutama perilaku kata kerja, atau sesuatu yang bisa dikatakerjakan.

Tindakan yang dimaksud, misalnya aktivitas keseharian, makan, tidur, istirahat, berkata-kata, beribadah, mandi, berjalan, bersih-bersih, olahraga, membaca, menulis, dan berbagai aktivitas lain yang sifatnya rutin. Tindakan yang kadang juga terjadi misalnya marah, sedih, berduka, bergembira, atau sejenis itu. Mungkin ada lagi yang lebih jarang, seperti memukul orang, mencuri, atau menipu, dan sebagainya.

Dengan demikian, terdapat beberapa kategori tindakan, baik dari segi kerutinannya maupun dari sebab dan akibat tindakan. Dari segi kerutinan terkait dengan kebutuhan tindakan untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Dari segi sebab dan akibat ada tindakan yang menyebabkan kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan. Sementara itu, ada juga kondisi-konsisi

tindakan insidental terutama terjadi karena perubahan-perubahan situasi yang terjadi dengan cepat.

Sebagian besar tindakan adalah bertujuan; ada maksud dan rencana tertentu di balik tindakan tersebut. Bahkan rencana pun terdiri dari rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Meski memiliki maksud dan rencana, tidak semua tindakan dapat memenuhi maksud dan rencana. Bahkan untuk tindakan rutin pun, kita memiliki berbagai cara, gaya, yang secara teknis berbeda-beda. Inilah yang dimaksudkan bagaimana tindakan diekspresikan atau bagaimana mengekspresikan tindakan.

Mengekspresikan tindakan terikat dengan konteks, tujuan, rentang waktu rencana, dan yang juga tidak kalah pentingnya skema-skema relasi tempat tindakan itu perlu diekspresikan. Artinya, subjek sebenarnya tidak berekspresi dengan benda-benda di sekitarnya, selain pada cermin atau mungkin terhadap hewan peliharaan. Subjek yang melakukan tindakan terutama berekspresi dalam skema relasi dengan subjek lain yang mengikat konteks tempat tindakan harus diekspresikan.

Sebagai misal tujuan tindakan. Tindakan dengan maksud menyenangkan pihak lain, ekspresinya berbeda tergantung jenis dan sifat relasi. Apakah dalam hubungan formal atau informal; apakah dalam hubungan ekonomi, politik, atau hubungan organisasional lain yang ada dan berbeda relasi kuasanya. Berhadapan dengan atasan, bawahan, orang tua, mertua, anak, teman akrab, orang tak dikenal, adalah situasi yang berbeda-beda. Situasi-situasi yang berbeda itu menentukan bagaimana subjek mengekspresikan tindakannya.

Memang, kemudian, secara kultural ada semacam tuntutan agar subjek diajari dan diminta untuk ramah kepada siapapun. Itulah sebabnya, ada tindakan dalam situasi tertentu akan berbeda dengan bentuk keramahan yang seharusnya. Kadang, kita itu terkesan terlalu ramah untuk hal yang tidak seharusnya, atau sebaliknya terkesan kurang ramah untuk hal yang perlu lebih ramah. Dalam situasi inilah kemudian dikenal apa yang disebut sebagai *basa-basi*.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa tindakan apapun—apakah itu *basa-basi*, pura-pura terkejut, pura-pura gembira, pura-pura tertawa, pura-pura marah, pura-pura sedih, pura-pura merasa bahagia—semuanya adalah tindakan yang diekspresikan. Artinya, ada tindakan yang dilakukan secara apa adanya sebagai tindakan rutin dan formal dan memang perlu dilakukan. Akan tetapi, di luar itu banyak tindakan justru karena subjek dikondisikan untuk melakukan tindakan sesuai dengan tuntutan eksternal situasi yang dialami subjek.

Itulah sebabnya, timbul pertanyaan tentang adakah suatu tindakan yang ikhlas? Kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa maksud dihargai, tanpa maksud agar dianggap sebagai orang baik, bahkan tanpa bermaksud mendapat imbalan dari apapun dan siapapun. Zizek dan pemikir-pemikir pascamarxisme lainnya mungkin tidak percaya jika terdapat praktik tindakan radikal yang tidak terdukung oleh momen kekosongan. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi yang bertentangan, jangan-jangan tindakan ikhlas itu, dalam bahasa yang berbeda sebenarnya memenuhi konsep Zizek tentang tindakan radikal.

Teori-teori pascamarxisme memiliki kemampuan yang jauh dalam membongkar dan menelanjangi manusia serta kemanusiaan (lihat Sim, 2000; Goldstein, 2005; Tormey dan Townshend, 2006). Akan tetapi, hal yang ditelanjangi adalah sejauh yang bisa dipahami secara rasional dan empirik. Mereka memang membicarakan dan mengakui *The Real*, tetapi tidak bermaksud membicarakan karena memang tidak dapat dibuktikan. Ujungnya, akan menjadi masalah keyakinan atau kepercayaan. Saya termasuk dalam posisi yang meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat Ruh (yang terjemahannya bermacam-macam). Ada yang menyebutnya jiwa (bukan nyawa), ada yang menyebutnya hati-nurani, ada yang menyebutnya Nur-Ilahi.

Di dalam Quran dijelaskan bahwa pada fase tertentu dari kehadiran subjek, Tuhan menitipkan Ruhnya (Dirinya) pada calon manusia. Dengan demikian saya mengutip Quran, yang kemudian mungkin dianggap tidak ilmiah. Quran adalah juga kitab ilmu yang bisa dibuktikan salah benarnya. Jika kita boleh mengutip tulisan atau pendapat Marx, Freud, Gramsci, Bourdieu, mengapa saya tidak boleh mengutip Quran? Hal yang utama dan penting adalah bagaimana kita bersama-sama membuktikan mana yang paling mendekati (K)ebenaran atau (K)enyataan.

WARGA DAN NEGARA

KAMPUNG DAN BATAS KEWARGAAN

Dalam pembicaraan sehari-hari di kampung/desa, tidak jarang kita masih sering mendengar istilah “warga pendatang”. Di beberapa kampung di Yogyakarta, beberapa pengumuman menyebutkannya secara spesifik seperti “warga kampung asli”, “pendatang”, dan “mereka yang kos-”. Menariknya, hal ini diumumkan oleh seorang Ketua RT yang berasal dari sebuah kota di Jawa Timur. Pertanyaannya, siapa itu warga kampung asli? Saya ingin membicarakan kasus pada sebuah kampung yang saya cukup akrab dengan kampung tersebut. Kampung itu terletak di daerah Sleman, Yogyakarta.

Sebagai sebuah kampung yang telah saya teliti cukup lama, hingga tahun 1910-an kampung tersebut masih relatif sepi. Hanya ada beberapa rumah yang berjauhan dan belum terikat dalam satu teritori perkampungan, apalagi RT atau RW. Pada tahun 1930-an, rumah-rumah baru bermunculan. Baru pada tahun 1940-an akhir, muncul konsep yang kemudian dikenal RT atau RW. Hal itu pun sebagai bentukan pemerintah Jepang untuk memudahkan mencacah dan mengelola warga.

Pada masa-masa berikutnya, kampung tersebut terus bertambah ramai hingga sekarang. Penduduk kampung tersebut—di samping mereka yang ada sebelumnya dari tahun 1900-an—datang dari berbagai daerah di Indonesia; paling banyak dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, dari Bantul, Wonosari, Kulon Progo, dari beberapa kota di Sumatra Barat, Riau dan Sumatra Utara, dan ada juga yang dari Jawa Barat. Satu keluarga dari Sulawesi Selatan. Dilengkapi yang dari Pakem, Cangkringan, Minggir, yang semuanya ada di Sleman.

Hingga tahun 1980-an, kampung tersebut belum dipakai untuk kos-kosan. Pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an sudah banyak rumah yang dipakai untuk kos-kosan. Secara umum, rumah kos-kosan terlihat lebih besar dari rumah penduduk yang tidak dipakai kos-kosan. Seperti di tempat lain, terdapat juga warga yang dinamakan warga kos.

Secara administrasi, kampung tersebut meliputi tiga Rukun Tetangga (RT) dan satu RT meliputi 70 hingga 80 Kepala Keluarga (KK). Akan tetapi, pada tahun 2018, karena jumlah penduduk terus membengkak, dipisah lagi menjadi empat RT. Warga hidup cukup rukun. Rapat RT cukup aktif, tetapi selalu muncul istilah warga asli dan pendatang. Seperti pertanyaan awal, apa batas identifikasi sesuatu disebut asli atau pendatang?

Jika menilik dari pendatang paling awal, nenek moyangnya ada yang datang dari Jawa Timur (Banyuwangi), ada yang datang dari Bantul, ada yang datang dari Sleman (dari luar kampung yang

dibicarakan). Baiklah, kita menghargai pendatang paling awal karena mereka yang “membuka kampung”; karena faktor sejarah, mereka disebut “asli”.

Persoalannya, pada masa-masa berikutnya, yang menyebabkan kampung tersebut ramai bukan hanya kerabat mereka, tetapi yang lebih banyak justru yang berasal dari luar kampung. Artinya, basis asal daerah bukan identifikasi penting untuk apa yang disebut asli.

Kemungkinan kedua, basis identifikasi warga asli adalah mereka yang dilahirkan sebagai orang Jawa. Ternyata juga tidak. Beberapa warga dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang membangun rumah di kampung itu juga masih disebut warga pendatang. Atau adakah rentang waktu tertentu untuk dapat disebut warga asli atau tidak.

Seseorang yang sangat saya kenal, sejak tahun 1970-an telah tinggal di kampung itu. Bahkan lebih tua dari beberapa Bapak-Bapak muda yang merasa sebagai warga asli. Cuma kebetulan tetangga saya itu agamanya Kristen, selalu mengeluh bahwa dia merasa tidak bisa disebut sebagai warga asli kampung. Tetanggaku itu selalu diam dan ramah, walau dia tahu tidak pernah dianggap sebagai warga asli. Dengan demikian, soal rentang waktu menentukan asli atau tidak, ternyata juga tidak.

Jangan-jangan karena kurang *sesrawung*? Saya perhatikan ada seorang warga, dari Sumatra Barat yang fasih berbahasa Jawa dan tidak pernah ketinggalan mengikuti kegiatan apapun di kampung, mulai dari kerja bakti, gotong-royong, ronda, pengajian, menjadi

panitia ini panitia itu; tidak pernah ketinggalan. Mungkin dia berharap bahwa suatu ketika kelak, dia tidak melulu dianggap pendatang. Ternyata juga tidak.

Setelah mengamati lebih lama, akhirnya saya berkesimpulan bahwa dikotomi tersebut lebih sebagai hasrat untuk berkuasa dalam satu arena. Dengan klaim warga asli, mereka berhak menentukan aturan dan berbagai kegiatan di kampung. Itulah sebabnya, klaim asli itu dipertahankan karena dengan me-*liyan*-kan orang lain, maka yang *liyan* harus takhluk. Yang asli boleh *petentang petenteng*, tetapi yang tidak warga asli tidak boleh.

Ikatan hasrat untuk berkuasa tersebut agak bertumpang tindih dengan basis ikatan emosional lainnya. Namun, tampaknya ada sedikit motif berbau agama dan sedikit perasaan sesama dari Yogya. Kampung sebagai panggung agama Islam terlihat sangat dominan. Sementara yang tidak Islam dipersilakan menyingsir.

Pertanyaannya, bagaimana jika keluarga mereka di tempat lain juga diperlakukan seperti itu? Saya pernah mengamati persoalan ini di beberapa daerah lain, termasuk di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, beberapa daerah di Kalimantan, Papua, Sumatra, hingga Sulawesi dan Maluku. Ternyata ada juga batas-batas kewargaan itu yang kemudian masih disebut asli dan pendatang, dengan kadar yang berbeda-beda.

Di Riau, misalnya, orang Batak dan Minang terlihat dominan dan cukup banyak. Bahkan banyak perkampungan berbahasa Minang selain bahasa Melayu. Tampaknya selalu ada pe-*liyan*-an dan kontestasi antara berbagai suku di sana. Akan tetapi, batas eksklusif dan

inklusi kewargaan menjadi kabur karena banyaknya perkawinan antara suku di sana. Kesannya, batas kewargaan asli atau tidak basisnya adalah suku, sedikit ditambah perbedaan agama.

Di beberapa perkampungan di Papua, di luar kota besarnya, masyarakat masih sangat komunal, sehingga batas pewargaan juga masih sangat jelas. Terutama berbasis suku dan kerabat. Para pendatang dengan mudah teridentifikasi. Namun, mekanisme relasi antara pendatang dan penduduk asli berbeda-relasi. Mekanisme relasi yang paling banyak adalah relasi mutualisme.

Di atas itu, yang menarik adalah hingga hari ini Indonesia belum berhasil membangun kesadaran bahwa kita adalah sesama warga Indonesia. Siapapun kita sebagai warga, kita berhak tinggal di mana saja, tanpa harus menjadi pendatang. Tampaknya, janji Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yang diperingati tiap tahun, itu di luar urusan politik kewargaan kampung.

Dalam kasus itu, kekuasaan kampung jauh lebih besar daripada kekuasaan berbangsa. Komunitas yang dibayangkan, seperti ditulis Anderson (1983), tidak sepenuhnya berlaku di banyak kampung di Indonesia. Pertama, di banyak kampung di Indonesia, hampir dapat dipastikan tidak ada yang berbahasa Indonesia. Kedua, pengalaman-pengalaman tentang ke-Indonesia-an jauh berbeda-beda antara satu kampung dengan kampung lain di Indonesia. Ketiga, sejarah ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada tataran kampung hampir dapat dipastikan juga berbeda.

Tidak ada media literatif yang menghubungkan imajinasi itu daripada sekadar mitos-mitos yang terputus-putus. Kenyataan yang kita rasakan, rasa sebagai warga suku dan kampung, jauh lebih besar daripada menjadi warga negara. Menjadi warga Indonesia hanya sekali-sekali saja berlaku terutama di ruang publik di luar basis kampung. Kampunglah yang paling menentukan.

Pada masa Soekarno berkuasa, ada euforia kemerdekaan, ada pidato-pidato Soekarno yang menggelora tentang Indonesia. Didukung akses komunikasi dan informasi yang lebih fokus, dekonstruksi sebagai bangsa bekas terjajah relatif mempertemukan bayangan tentang senasib sepenanggungan. Tingkat keberhasilan ekonomi yang rendah menyebabkan keprihatinan sosial dan ekonomi tidak membuka peluang yang cukup untuk merasa mana yang asli sebagai warga mana yang pendatang.

Pada masa Orde Baru, ekonomi berkembang cukup melejit. Kapitalisme dan modernisasi menciptakan sedikit orang kaya dan segudang orang miskin. Pastinya, kedua ideologi tersebut memacu orang Indonesia untuk berlomba dan bersaing sukses. Hierarki dan ketidaksetaraan berjalan deras. Yang tidak kuat tersingkir menjadi orang miskin dan/atau pekerja kasar serabutan. Kecemburuan sosial merebak. Kekecewaan ini menyebabkan orang perlu mengembangkan cara bertahan.

Untunglah, rezim kekuasaan Orde Baru yang telah bercokol lebih tiga puluh tahun itu akhirnya tumbang. Rezim kekuasaan berganti, tetapi jejak-jejak

kecemburuan sosial bertransformasi untuk tetap bertahan. Politik Otonomi Daerah dimanfaatkan sebagai cara bertahan dari tekanan kekalahan-kekalahan hidup. Basis yang dipilih untuk bertahan adalah politik kedaerahan, atau lebih tepatnya politik etnis. Banyak daerah tidak membolehkan orang luar daerah untuk menjadi pemimpinnya, apakah itu Gubernur, Bupati, Camat, hingga ke Ketua RT. Yang jadi Gubernur harus orang dari provinsi tersebut. Yang jadi Bupati harus orang dari kabupaten tersebut, dan seterusnya.

Dalam perkembangannya, politik daerahisme berkembang menjadi kampungisme. Inilah lokasi bertahan yang paling mudah dikelola. Bukan saja secara teritori tidak luas, tetapi lebih dari itu orang-orang kampung lebih saling mengenal dan, kelebihan lain, lebih sering bertemu. Kasak-kusuk dengan mudah dikelola untuk kepentingan atas nama kemajuan kampung. Dalam proses ini pulalah kemudian terjadi inklusi dan eksklusi. Mana orang kita, mana tidak orang kita sangat mudah terdeteksi.

Hal itu berimplikasi bahwa kesadaran berbangsa dan bertanah air satu, bukan tidak ada, tetapi diabaikan. Jika hal itu dijadikan kesadaran bersama, maka akan melemahkan hierarki kekuasaan di kampung. Hierarki kekuasaan itu juga berbeda gunanya, tergantung karakter hierarki kekuasaan itu sendiri. Namun, satu benang merah yang hampir sama, yakni kekuasaan kampung justru mendapat kesempatan untuk melawan modernisme dan kapitalisme, di satu sisi, dan mengeluarkan warga kampung untuk tetap dijadikan pendatang.

Dengan demikian, kekuasaan kampung dengan mudah “menekan” mereka yang cukup berada dan kebetulan bukan asli, dan para pendatang lainnya dengan berbagai kategori. Panggung-panggung kampung dikuasai. Jalan-jalan dikuasai. Berbagai peraturan yang sebenarnya mengikat secara nasional, tidak berlaku. Warga asli boleh berteriak di jalanan kampung, tetapi warga pendatang sebaiknya jangan, karena akan jadi perkara

Kita dapat membayangkan bahwa tidak mustahil, dalam gejala dan fenomena yang berbeda, kecenderungan seperti itu banyak terjadi di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, kita masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersama-sama menuju dan menjadi warga Indonesia. Itupun kalau strategi dan politik nasional cukup jitu menjalankan misi pewargaan nasional Indonesia. Kalau sebaliknya keliru, maka tidak mustahil jurang porak poranda semakin membesar.

KEKUATAN RAKYAT

Rakyat memiliki kekuatan, tetapi belum tentu memiliki kekuasaan. Artinya, kita perlu membedakan apa yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan adalah akumulasi sinergis hal-hal yang terkait dengan tenaga/daya, pemilikan waktu, pikiran, perasaan, dan tindakan. Kekuatan rakyat bisa bersifat individual, tetapi menjadi penting jika bersifat kolektif (lihat Stiglitz, 2019).

Ketika seseorang beraksi melakukan tindakan *amuk*, misalnya, hal itu dapat ditempatkan ketika seorang rakyat sedang memperlihatkan kekuatannya, tetapi bukan kekuasaannya. Demikian pula ketika sejumlah orang, atau kelompok masyarakat tertentu sedang bekerja bergotong royong, masyarakat tersebut sedang memperlihatkan kekuatannya untuk mengatasi masalah tertentu. Kegiatan tersebut bukan bagian dalam struktur kekuasaan.

Tentu di dalam kegiatan gotong royong, terdapat apa yang disebut dengan kuasa atau kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya adalah kekuatan yang bersifat nilai, ideologis, atau kesepakatan ketika seseorang diberi mandat dalam posisi struktural tertentu. Ketua RT sebagai individual memiliki kekuatan, tetapi pada sisi yang lain memiliki kekuasaan untuk mengatur

warganya untuk bergotong-royong. Demikian pula, bahwa kekuasaan tersebut dapat terjadi di mana-mana, dalam setiap levelnya, hingga kekuasaan yang tinggi di tingkat negara, di tingkat global.

Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan bagaimana kekuatan rakyat menjadi kekuasaan rakyat. Pertama, yakni ketika kekuatan rakyat ditempatkan atau diposisikan dalam relasi-relasi struktur dan formasi kekuasaan. Ormas, parpol, orsospol, dan berbagai organisasi atau perkumpulan rakyat yang resmi masuk dalam arena kekuasaan, adalah satu-kesatuan kekuasaan rakyat.

Namun, bisa saja kekuatan rakyat memperlihatkan kekuatannya dengan melakukan intervensi, terutama dalam bentuk kekerasan sehingga sedikit banyak menyusup ke tataran struktur dan formasi kekuasaan. Berbagai unjuk demonstrasi, terutama yang bersifat insidental—bisa sekadar rakyat memperlihatkan kekuatannya, tetapi itu tidak akan berpengaruh terhadap struktur dan formasi kekuasaan (lihat Chai (Ed.), 2014). Akan tetapi, ketika demonstrasi mencoba menembus apa yang dipegang oleh satu sistem kekuasaan, maka pada tataran itu demonstrasi mengintervensi sistem kekuasaan.

Masalahnya, pada dasarnya rakyat bukanlah penguasa. Dulu, konsep kekuasaan dan penguasa dikenakan kepada mereka yang memiliki kendali terhadap modal dan alat-alat produksi. Pada waktu itu, belum ada istilah kedaulatan rakyat, karena yang berdaulat adalah para pemilik modal (dalam pengertian luas). Hal itu berhubungan dengan sejarah dan tingkat

literasi masyarakatnya. Sejarah terus bergerak secara internal dan eksternal. Ilmu-pengetahuan berkembang, penduduk bertambah, kebutuhan terhadap hal-hal primer bertambah.

Hasil akhir, yang masih kita nikmati hingga sekarang, dari upaya mengintegrasikan kekuatan dan kekuasaan rakyat adalah demokrasi. Namun, dalam pelaksanaan demokrasi, kekuatan dan kekuasaan rakyat kembali direpresentasikan ke dalam sistem perwakilan. Sistem representasi dan perwakilan itu kembali memisahkan kekuatan dan kekuasaan rakyat.

Hal tersebut semakin diperburuk dengan manipulasi-manipulasi dalam sistem demokrasi itu sendiri, yakni ketika berbagai hukum dan aturan dibuat oleh mereka yang diberi kekuasaan, tetapi tidak dalam posisi sebagai rakyat. Mereka mengambil posisi sebagai penguasa, sehingga banyak hukum dan peraturan justru menguntungkan penguasa. Di sinilah paradoks terjadi, ketika hukum dibuat oleh mereka yang berposisi dalam hukum, tetapi sekaligus di luar hukum.

Hal tersebut berproses untuk menghancurkan demokrasi ketika rakyat harus sepakat dalam konsensus. Kita tahu, tidak ada konsensus, karena dalam sebuah konsensus akan terjadi inklusi dan eksklusi. Yang diinklusi adalah kekuatan-kekuatan yang dihimpun menjadi kekuasaan. Sementara itu, banyak kekuasaan rakyat dieksklusi untuk sekedar menjadi kekuatan. Kekuatan yang tidak berdaya dalam sistem kekuasaan.

Dengan demikian, ketika rakyat menyepakati konsensus, itu artinya rakyat menyepakati untuk

kehilangan kekuasaannya. Di sinilah cacat epistemologi demokrasi modern. Memang, kemudian, demokrasi mengandaikan bahwa rakyat memiliki HAM dalam posisi kesetaraan di depan hukum. Namun, dalam praktiknya selalu ada hierarki kekuasaan, baik atas nama partai, lembaga yang secara inheren terdapat dalam sistem kekuasaan, sehingga demokrasi tidak jalan sebagai mana mestinya.

Jargon kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan tipuan yang menghibur. Dalam situasi hiburan demokratis tersebut, demokrasi menjadi ruang liar yang setiap warga bisa memperlihatkan kekuatannya, tetapi bukan kekuasannya. Tidak mengherankan dalam ruang liar tersebut, warga yang memperlihatkan kekuatannya, bisa masuk dalam dua jalur. Jalur untuk menjadi kriminal atau jalur menjadi pahlawan.

MENGUMPAT, MEMAKI

Kenapa kata-kata bisa menjadi umpatan atau makian? Apakah memang ada kata-kata yang fungsinya khusus untuk makian atau umpatan? Apa masalah bangsa ini ketika belakangan demikian banyak kata makian atau umpatan bermunculan? Yang mengherankan, kata-kata makian itu justru banyak keluar dari mereka yang katanya orang berilmu dan terpelajar. Lebih mengejutkan, beberapa orang yang dianggap ulama, pemimpin, kaum intelektual, justru mengeluarkan kata-kata memaki, mengumpat, dan cenderung menyebar kebencian.

Saya tegaskan: tidak ada kata-kata kotor. Kata *tai* atau *tinja*, misalnya, untuk menyebut limbah pencernaan yang harus dibuang. Kalau tidak dibuang, justru akan menyebabkan penyakit. Kita mengasosiasikan *tai* atau *tinja* sebagai kotor karena dianggap tidak berguna dan berbau busuk. Akan tetapi, bukan berarti tinja tidak dapat digunakan. Dengan teknologi yang semakin baik, tinja bisa dijadikan biogas.

Tidak ada kata-kata yang fungsinya khusus untuk memaki atau mengumpat. Kata adalah suatu simbol, yang terdiri dari satu huruf atau lebih, dan huruf juga simbol. Kenapa disebut simbol, karena simbol adalah kesepakatan arbitrer dalam suatu masyarakat tentang yang menghubungkan antara yang menandai dan yang ditandai (lihat Cuellar, 2018). Hubungan-hubungan

tersebut sangat mungkin bersifat langsung, tetapi ada hubungan yang tidak langsung atau sebagai hubungan konsep dan mental yang juga disepakati bersama.

Tidak ada yang salah dengan kata-kata, seperti *anjing*, *banci*, *laki-laki*, *perempuan*, *embah*, dan sebagainya. Sebenarnya, tidak ada yang berasosiasi dengan umpatan atau makian dengan semua kata-kata tersebut. *Anjing* adalah kata (simbol) untuk menyebutkan sejenis hewan berkaki empat. Apa yang salah dengan anjing yang berkaki empat tersebut. Banci adalah untuk menyebutkan satu kategori tersendiri yang tidak laki-laki tidak perempuan. Laki-laki atau perempuan adalah kata untuk menyebutkan sejenis manusia untuk perbedaan gender. *Embah* adalah kata untuk menyebutkan orang tuanya orang tua, atau orang yang sudah tua secara umum. Kata-kata itu bukan kata-kata makian.

Namun, ketika kata-kata tersebut diungkapkan dengan nada tertentu, dengan emosi tertentu, dan konteks tertentu, kata-kata tersebut berubah maknanya. Ungkapan “Dasar anjing!”, “Kamu banci!”, “Dasar Laki-laki!”, atau bahkan cukup dengan kata *dasar!* saja, tahulah kita bahwa orang tersebut sedang mengumpat. Itupun harus didukung suasana tertentu. Itu pun hanya bisa dirasakan. Jika ada kata-kata yang dianggap kasar dipakai sebagai contoh, itu bukan makian.

Secara umum, kita memaki dengan meminjam nama hewan, atau bagian dari tubuh manusia. Untuk nama-nama hewan, selain anjing, ada ular, beruk (atau *ketek* dan *munyuk* dalam bahasa Jawa), babi, *celeng*, singa, buaya, kancil, binatang, dan sebagainya. Peminjaman

itu biasanya dikaitkan dengan karakter atau bentuk fisik binatang. Ular, misalnya, karena melata dan berbisa, didukung sejumlah mitos tentang binatang tersebut.

Bagian tubuh manusia tak pelak juga bisa dipakai, seperti kepala, mata, dengkul, kemaluan, dan beberapa yang lain. Kata-kata yang berkonotasi negatif, tak pelak sangat banyak dipakai seperti serakah, pelit, *pekoke*, bodoh, maling, perampok, koruptor, dan sebagainya. Akan tetapi, sekali lagi, jika kata-kata tersebut dipakai tidak dalam konteks kemarahan atau kebencian, kata-kata tersebut bukan makian.

Artinya, yang bermasalah adalah kenapa manusia marah atau benci. Konteks penggunaan kata ketika marah dan benci pun bisa berbeda. Ada orang yang marah, tetapi tidak dalam kondisi membenci. Situasi itu disebabkan oleh adanya kekecewaan yang memuncak terhadap sesuatu keadaan, terutama terjadi secara insidental. Seorang ibu marah kepada anaknya, tetapi tidak dengan kebencian. Kata-kata yang dipakai untuk umpatan akan dirasakan berbeda.

Hal itu berbeda jika marah yang diikuti dengan kebencian. Secara umum kita selalu marah dan benci kepada koruptor. Banyak umpatan selalu dilontarkan kepada koruptor karena korupsi bukan sesuatu yang insidental. Marah karena koruptor itu merugikan uang rakyat. Benci karena penyakit itu tidak bisa sembuh dan lambat laun menjadi kronis dalam tubuh masyarakat.

Akan tetapi, ada yang sifatnya melulu benci. Kebencian sangat mungkin bersifat ideologis. Kalau kita tidak senang dengan seseorang, maka tidak ada

yang benar tentang orang itu di mata kita. Setiap ada kesempatan, walaupun dalam keadaan tidak marah, kita akan memakinya. Kita tidak peduli apakah yang kita katakan itu benar atau salah.

MENCANDUI KRITIK

Beberapa dekade lalu, penguasa Orde Baru cukup alergi dengan pemikiran kritis, yang biasa disebut sikap melawan pemerintah. Waktu itu negara fokus dengan pembangunan ekonomi sehingga segala hal kritis yang dianggap sebagai kritik tentang resiko dan ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi diredam dan dikesampingkan (lihat Marijan, 2010:241). Di satu sisi, negara seolah berhasil melakukan pembangunan ekonomi, tetapi di sisi lain banyak ketidakadilan terjadi.

Pada waktu itu pula, pemerintah tidak toleran dengan berbagai teori dan ilmu pengetahuan kritis sehingga, sebagai resikonya, sejumlah teori yang bisa mengajarkan mahasiswa bersikap kritis tidak diperkenalkan di perguruan tinggi. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka niat membungkam masyarakat itu semakin tidak relevan. Masyarakat dan akademisi, dengan caranya sendiri, selalu mendiskusikan berbagai ilmu dan teori yang berkembang di dunia.

Sekarang, setelah Orde Baru runtuh, semuanya berubah. Demokrasi mulai jalan walau tentu masih banyak politisasi atas nama demokrasi, karena masyarakat masih sedang belajar bahkan masih berada pada tahap euforia. Praktik-praktik lama tidak dengan mudah hilang begitu saja. Namun yang jelas, didukung teknologi

komunikasi internet, semua perilaku pemerintah dan politisi dapat diketahui dengan cepat. Sebagian besar masyarakat semakin terliterasikan secara lebih terbuka.

Namun, konsekuensi dari politisasi demokrasi adalah pecahnya masyarakat ke dalam berbagai faksi dan aliran politik. Faksi dan aliran politik yang dulu tiarap mengalami konsolidasi dan bermunculanlah berbagai partai, ormas, orsospol, dan komunitas, baik atas nama politik itu sendiri maupun agama, profesi, suku, daerah, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya.

Semua memasang mata dan telinga siap melawan apa saja yang berbeda dengan kelompok atau golongannya. Yang berbeda dianggap musuh. Seperti kita tahu kemudian, hal yang terjadi adalah semua melawan semua. Memang, dalam prosesnya terjadi pengelompokan dan mergerisasi faksi-faksi atau aliran-aliran. Namun, tetap saja yang paling menonjol adalah untuk melakukan sikap kritik terhadap bukan kelompok atau golongannya.

Didukung “budaya hoaks” yang dimungkinkan oleh teknologi, maka yang terjadi adalah menjamurnya kritik. Semua dikritik karena semuanya menjadi tidak benar. Karena begitu banyak kritik yang bermunculan, maka antara sesama kritik ingin mencuri perhatian untuk menjadi kritik yang paling tajam dan paling berani. Di sinilah muncul masalah. Ketika memperlihatkan kritik yang paling tajam dan paling berani yang muncul adalah kritik di luar kode-kode atau rambu-rambu kepantasan.

Yang terjadi adalah kritik yang *saru*, mesum, dengan kalimat-kalimat yang dalam konteks itu menjadi

kotor. Kritik pun tidak perlu didukung oleh argumen dan data yang benar. Hanya berbasis kabar-kabar burung dan hal itu telah menjadi kelayakan untuk menghantam lawan dengan kata-kata yang kasar dan bahkan kotor. Oleh karena justru kritik yang paling tajam dan berani inilah yang banyak disukai dan berpeluang menjadi viral.

Kenyataannya, yang terjadi, sampailah kita pada tahap bahwa kritik tidak lagi berfungsi sebagai satu cara atau sikap kritis terhadap teori, kebijakan, atau berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat. Kritik menjadi kritik itu sendiri. Kritik menjadi komoditas. Kritik menjadi cara untuk populer. Kritik menjadi obat dahaga terhadap kontradiksi antara ketidakberdayaan dan keberanian.

Yang mencemaskan adalah ketika kritik menjadi mekanisme yang berulang untuk menghadapi stres; kekecewaan terhadap hidup, atau berbagai kegelisahan lain terhadap ketidakadilan, ekonomi yang memburuk, pejabat-pejabat yang korupsi, dan sebagainya. Ketika kemudian kita melakukan kritik, bahkan dengan diimbui sumpah serapah, maka untuk sesaat stres tersebut seolah-oleh bisa hilang.

Jika hal tersebut yang terjadi, maka dalam posisi ini kritik menjadi candu. Teks-teks atau pernyataan-pernyataan yang paling tajam dan berani itu menjadi obat manjur menghilangkan stres, duka nestapa ekonomi, sosial, dan politik. Tidak mengherankan jika banyak yang coba-coba menjadi penjual candu kritik karena memang laris.

Hal yang juga terjadi adalah banyak yang sembrono dalam meramu candu kritik tersebut. Yang paling sering

adalah mengambil bahan-bahan dari berita-berita hoaks, dibumbui agama, wacana-wacana kritis, dengan adonan kemarahan dan kebencian. Tidak mengherankan kemudian, kita seolah ikut-ikutan dipaksa untuk mengunyah candu kritik seperti itu. Kemudian, namanya juga mengonsumsi candu, kita bisa menjadi ketagihan. Kalau tidak mengonsumsinya, kita akan sakau.

ORANG ANEH

Terdapat ungkapan sehari-hari untuk menyebut seseorang, mungkin tingkah lakunya, mungkin pendapat seseorang yang dapat didengar dari pernyataan-pernyataannya, sebagai *orang aneh*. Pertanyaannya, bagaimana keanehan dimungkinkan? Apa saja yang termasuk dalam kategori aneh? Bagaimana selama ini masyarakat dan negara menyikapi orang aneh?

Hal aneh dapat diketahui dari apa yang dianggap tidak aneh. Tentu pengertian aneh dan tidak aneh untuk setiap kebudayaan bisa berbeda-beda. Hal tidak aneh merupakan sesuatu yang dianggap seperti biasanya, sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak di luar norma dan kepantasan. Setiap pengertian memang selalu bermasalah; seperti biasanya yang mana, sesuatu yang normal menurut siapa, yang pantas dan normatif itu dalam kerangka yang mana, dan berbagai pertanyaan lain.

Pemahaman tentang “seperti biasanya”, “hal normal”, “hal normatif” dan sesuai kepantasan, paling tidak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan umum masyarakat bersangkutan. Artinya, keberadaan orang aneh, pertama-tama yang dikenainya adalah masyarakat di mana orang aneh tersebut hadir. Dalam situasi dan konteksnya, untuk mendapatkan orang aneh paling tidak berdasarkan dua hal: perilakunya atau ucapannya.

Sementara kalau dilihat dari perilakunya, yakni perilaku yang tidak biasa dilakukan orang lain. Di kampung saya, ada orang tiba-tiba azan di masjid, kira-kira jam 9.30 pagi. Perbuatan itu dianggap tidak biasanya, bahkan hampir tidak pernah ada. Azannya tertib dan benar, tetapi perilakunya aneh. Selidik punya selidik, orang tersebut ternyata mengalami stres.

Orang stres yang berperilaku aneh itu, berbeda untuk penyebutan orang gila (*wong edan*). Orang gila, sebelum diketahui gila, mungkin disebut aneh. Akan tetapi, ketika keanehannya sudah permanen dan sudah melewati batas stres, maka dia disebut orang gila. Singkatnya, orang gila dan aneh itu berbeda. Walaupun kadang kata gila dipakai dalam frasa “gila kerja”, “tergila-gila”, “pura-pura gila”, dalam pengertian yang berbeda-beda.

Kembali ke persoalan orang aneh, keanehan perilaku dan perkataan tidak bisa dipukul rata dalam satu kategori keanehan. Seperti kasus di atas, orang tersebut berbuat aneh karena stres. Mungkin kita perlu mempelajari juga mengapa orang stres. Akan tetapi, di sini belum memungkinkan dilakukan. Yang bisa kita bicarakan adalah implikasi stres bisa membuat orang berbuat tidak seperti biasanya, berbuat sesuatu yang tidak normal.

Misalnya bagaimana memahami teman saya yang akan saya kisahkan berikut. Namanya, maaf, kebetulan sama dengan salah satu nama mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Alamatnya di Pogung, Yogyakarta. Sebelum bertemu, dia beberapa kali *inbox* via *Facebook*,

yang intinya ingin bertemu dengan saya. Dalam rentang beberapa minggu saya mengabaikan pesan itu, karena saya khawatir itu semacam modus. Beberapa pesan berikutnya ia mengirim beberapa tulisan ringkas tentang struktur dan simbol-simbol yang ada di alam semesta. Saya mulai tertarik.

Akhirnya, dia saya bolehkan datang ke kantor saya, Pusat Studi Kebudayaan UGM. Soeharto datang jam 9, berbaju putih dan bercelana abu-abu, terlihat cukup bersih. Dia mengaku lulusan Fakultas Ekonomi UGM, dan memang dia bisa memperlihatkan bukti-bukti itu semua. Mulailah dia berbicara tentang struktur alam semesta beserta simbol-simbolnya. Dia juga menjelaskan mengapa ada partai berlambang pohon dan mengapa ada yang berlambang hewan.

Dia berbicara secara tertib dan sintaksisnya benar, walaupun sebagian dari penjelasannya saya tidak mengerti. Beberapa hal saya catat terkait penjelasan dan ramalannya tentang kaitan lambang partai bergambar tumbuhan atau hewan, karena menurutnya ada yang menyalahi hukum alam sehingga partai berlambang tertentu usianya tidak akan lama, atau minimal tidak akan pernah menang. Saya takjub dengan cara dia menjelaskan semesta.

Setelah satu setengah jam dia bercerita, akhirnya dia berkata bahwa dia hanya ingin menyampaikan kegelisahannya saja. Kemudian, dia menyambung ceritanya dengan, “sudah hampir tiga bulan saya sering tidak bisa tidur malam. Baru bisa tidur menjelang subuh.” Saya bertanya, “kenapa?” Dia menjawab bahwa

“hampir tiap malam saya diajak diskusi oleh malaikat. Dia memberi saya ilmu seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak tiap malam, sih, tapi sering sekali. Banyak hal yang kami diskusikan.” Saya terdiam.

Tidak lama kemudian dia pamit. Sebenarnya saya ingin memberinya sekedar pengganti transport, tetapi ternyata dia terlihat buru-buru. Apa yang saya pikirkan sebagai modus ternyata juga tidak benar. Hingga hari ini, saya belum ketemu dia lagi, walaupun sekali-sekali dia masih *inbox* berbagai informasi tentang tata surya.

Saya tidak tahu harus berkata apa tentang fenomena Soeharto tersebut. Kalau kita sepakat, dia termasuk sedang dalam situasi aneh karena sangat jarang orang berpikiran atau berkata-kata tentang sesuatu yang “absurd”. Artinya, keanehan dimungkinkan ketika ada orang yang berbicara dan kita tidak paham maksud dan logika penjelasannya. Penalarannya tidak lumrah dan tidak biasa dipahami dalam komunikasi *mainstream*. Orang aneh seperti itu tidak berbahaya sama sekali dan sangat mungkin perlu disantuni.

Kategori orang aneh lain adalah yang terkait dengan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan rasa keadilan publik. Sekali lagi, perilaku aneh adalah perilaku yang dianggap tidak biasanya. Misalnya, bagaimana kita menempatkan orang yang *kebut-kebutan* di jalan sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Apakah secara sosial itu disebut aneh atau tidak? Bagaimana menempatkan orang yang tidak mau antrè? Apakah hal itu dianggap sebagai keanehan atau tidak.

Banyak hal dalam perangkat kebudayaan kita yang tidak memiliki klasifikasi dan kategori-kategori yang cukup jelas. Bahkan kadang batas denotasi dan konotasi juga menjadi rancu. Ada ketidaknyamanan ketika segala hal seperti diatur. Padahal, ketika hidup dalam kekaburan peraturan, maka kehadiran anarki selalu siap mengancam. Kehidupan sosial menjadi ruang terbuka untuk bergesekan, apakah dengan sesuatu yang kemudian dianggap aneh atau sesuatu yang dianggap sebagai kejahatan sosial.

Negara memiliki berbagai cara dan klasifikasi dalam menangani orang aneh. Banyak kejadian, orang aneh hanya sekedar menjadi urusan masyarakat. Negara baru menangani dan mengantisipasi “orang aneh” jika mengganggu keamanan lingkungan atau keamanan negara. Sejauh ini, jika itu hanya sebagai keanehan, keanehan tidak cukup berbahaya baik pada ranah masyarakat ataupun negara. Karena keanehan sulit masuk dalam sistem kehidupan sehingga posisinya selalu di luar sistem.

Bagaimana pun, kadang kita tidak tahu, banyak orang waras pura-pura berkata atau berperilaku aneh. Atau banyak orang aneh yang tidak tahu bahwa dia tidak waras. Pesan utamanya adalah bahwa kewarasan (akal sehat) memang harus tetap dijaga dan dievaluasi terus agar tetap dapat membedakan mana yang aneh dan mana yang normal.

MASYARAKAT DISTOPIA

Masyarakat distopia adalah masyarakat yang hidup dalam ketegangan, nilai-nilai normatif tidak berjalan, ada kontrol yang kuat dari penguasa, terdapat banyak manipulasi, banyak ketimpangan dan ketidaksetaraan, penuh persaingan, terdapat penindasan (kolonisasi) di berbagai tempat (lihat Slaughter, 2004). Karakter lain dari masyarakat distopia adalah banyaknya aturan yang saling bertabrakan sehingga masyarakat hidup dalam kebingungan dan ketakberdayaan.

Gejala distopia bukan hal baru. Perbedaan yang menonjol antara distopia model lama dan baru terdapat dalam kompleksitasnya. Dalam masyarakat lama, unsur-unsur distopia belum begitu kompleks karena, pertama, orang dan pengelompokannya belum banyak, sarana dan prasarana (terutama terkait perkembangan ilmu dan teknologi) yang membuat hadirnya distopia tidak secanggih masyarakat baru. Akan tetapi, kompleksitas distopian tersebut secara kualitatif tidak jauh berbeda.

Perbedaan baru dan lama juga bisa dibedakan dengan konsep modern dan pascamodern (lihat Lyman, 2001:215). Hal ini kelak membedakan bagaimana utopia dan distopia mendapatkan porsi yang lebih besar dan menjadi dominan. Dalam dunia modern, utopia masih menjadi pegangan utama mengendalikan kehidupan

dunia. Akan tetapi, dalam dunia modern tersebut kenyataannya selalu ada distopia. Karena, dalam praktiknya, tidak pernah ada masyarakat utopia.

Masyarakat utopia tidak lebih menjadi mimpi yang mengontrol praktik-praktik kehidupan dengan harapan bahwa berbagai praktik tersebut dapat mengantarkan kita ke dalam hidup masyarakat yang diangankan. Hal yang diangankan utopia juga sudah kita ketahui bersama, seperti masyarakat yang berkeadilan dan masyarakat yang berkemakmuran. Di atas semua itu adalah masyarakat yang bahagia, nyaman, dan tenteram.

Berbeda dengan dunia modern, dalam dunia pascamodern yang dominan adalah pengakuan terhadap distopia. Masyarakat hidup dalam ketidakteraturan. Masyarakat hidup dalam kerancuan antara masa lalu dan masa depan. Masyarakat hidup dalam rasa beragama di satu sisi dan sekularitas di sisi lain. Masyarakat hidup dalam pengakuan terhadap hukum dan sekaligus keinginan untuk melanggarnya. Masyarakat hidup dalam sandera kepentingan individu dan masyarakat.

Masyarakat juga hidup dalam kekacauan referensial dan nilai, baik pada tataran penandaan ikonik, indeksial, maupun simbolik. Mana yang buruk dan baik menjadi tidak jelas batasnya. Mana yang benar dan salah mengalami politisasi kepentingan sesuai dengan selera dan kekuasaan dalam segala levelnya. Yang paling parah adalah bahwa kita tidak lagi merasakan hal tersebut sebagai kekacauan. Jangan-jangan jika tidak distopia kita tidak dapat merasakan kehidupan sebagai ruang yang perlu ditaklukkan terus menerus.

Menilik dari berbagai kemungkinan tersebut, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa masyarakat kita bukan masyarakat distopia. Suatu masyarakat dalam percampuran dan silang sengkabut yang mengancam harmoni (utopia). Itulah sebabnya, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat distopia. Pertama, kekacauan dalam arti yang sesungguhnya, yakni masyarakat terjebak ke dalam pertentangan yang bisa jadi bersifat fisik. Dalam skala kecil dan sporadis hal ini telah terjadi di mana-mana.

Belakangan, hal yang paling menonjol dari jebakan distopia adalah politisasi/politik identitas. Kekacauan referensi ikonik, indeksial dan simbolik dimanipulasi sedemikian rupa, terutama atas nama agama (juga etnis dan ras), sehingga kekacauan tidak hanya berdimensi fisik, tetapi yang lebih berbahaya adalah kekacauan pengetahuan. Dalam kondisi ini yang terjadi adalah proses-proses pembodohan.

Masyarakat yang semakin bodoh semakin tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Di satu sisi ilmu dan teknologi berkembang, tetapi masyarakat bodoh semakin tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola kedistiopiannya. Kesedihan, kekecewaan, kemarahan, akan menjadi menu sehari-hari. Tanpa diketahuinya, masyarakat seperti ini akan terus bergulir dalam proses kehancuran.

Belajar dari sejarah, kita tahu bahwa banyak negara/kerajaan yang hancur dan berganti rezim dari waktu ke waktu. Sebuah negara, atau kerajaan,

bahkan hingga masa-masa puncaknya, tidak berjalan dalam utopia, tetapi secara distopian dalam berbagai bentuknya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Majapahit atau Sriwijaya adalah sebuah negara yang ideal yang kita, sekarang, perlu meniru kejayaan tersebut. Namun, kejayaan negara kerajaan besar tersebut berjalan secara inheren dengan kedistopiaannya. Kenyataannya, negara-negara tersebut tidak dapat bertahan dan hancur.

Kemungkinan kedua yang lebih positif adalah kekacauan dilihat sebagai ketegangan yang menantang untuk ditaklukan. Berbagai upaya kreatif yang kita kerjakan adalah upaya-upaya penaklukan terhadap kekacauan dan ancaman ketegangan tersebut. Sebenarnya, saya berharap mungkin ini yang sedang terjadi. Kita dalam posisi sedang berlomba-lomba untuk mengalahkan ketakutan. Jika itu yang terjadi, masyarakat distopia yang sedang kita jalani memiliki harapan optimis ke depan.

MAYARAKAT POSGENDER

Di luar kodrat, terdapat sisi-sisi antara laki-laki dan perempuan yang harus ditempatkan secara sama, yakni sama-sama memiliki ambisi, syahwat, cinta, benci, marah, sayang, waktu, tenaga, kemampuan intelektual, kemampuan teknis, dan sebagainya. Artinya, jalan hidup seseorang tidak lagi ditentukan oleh apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi hal utamanya adalah sesama manusia.

Contoh terbaik dari masyarakat posgender telah dicontohkan oleh cerita-cerita silat, yang dikenal sebagai kalangan *kang-ouw*, kisah persilatan dari China. Mungkin setiap negara juga punya kisah-kisah silatnya sendiri-sendiri. Kalau di Amerika kita mengenal kisah-kisah koboi. Ada beberapa film yang mengisahkan wanita tampil sebagai koboi dan bertarung sebagai “koboi”, tetapi kisah seperti itu masih sedikit. Kisah “koboi” wanita itu masih sangat jauh tertinggal sebagai model masyarakat posgender, dan berbeda dengan kisah silat dari China.

Di Indonesia, kisah persilatan cukup populer. Sebagai misal, ada kisah silat dengan judul *Brama Kumbara*, sebagian besar tokoh pendekar memang laki-laki, tetapi ada tokoh silat wanita bernama Mantili. Mantili mendapat latihan yang tidak berbeda dengan

laki-laki. Ketika ia telah menjadi pendekar, dia bertarung dan dikeroyok oleh para pendekar laki-laki. Dalam pertarungan, Mantili tidak diperlakukan sebagai wanita, tetapi sebagai pendekar. Mantili memenangkan banyak pertarungan, walaupun di atas langit masih ada langit.

Mengapa bisa menjadi Mantili yang hebat? Karena dia berlatih keras, dia punya benci dan cinta, dia punya marah, dia punya tubuh, dia punya waktu dan kesempatan. Akan tetapi, lebih dari itu adalah bahwa masyarakat persilatan memiliki kode dan etik tersendiri. Seseorang ketika masuk dunia persilatan, ia harus memenuhi etik tersebut, sehingga tidak bisa seenaknya keluar masuk. Jika seorang sukses masuk dunia persilatan, sangat mungkin dia kelak akan mati tua. Namun, seperti sering dikisahkan dalam cerita persilatan China tersebut, mati dalam pertarungan adalah kenormalan.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat persilatan adalah masyarakat akademik. Dalam dunia akademik, seseorang tidak dilihat apakah dia perempuan atau laki-laki, tetapi pencapaian akademiknya, sesuai dengan bidang keahliannya. Berbeda dengan dunia *kang-omw* yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya, dunia akademik masih bercampur dan terintegrasi dengan hal-hal yang bersifat sosial dan kultural. Namun, preseden-preseden bahwa dunia akademik dapat dijadikan model masyarakat posgender sangat dimungkinkan.

Peluang lain bagaimana posgender dimungkinkan adalah dunia permainan tradisional. Jika kita bermain

gobak sodor, pathil lele, congklak, tengkek, panahan, dan berbagai permainan tradisional lainnya, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Semua boleh terlibat tanpa harus menempatkan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Beberapa permainan seperti berbagai permainan kartu, catur, dan beberapa yang lain, sebenarnya tidak mempersoalkan laki-laki dan perempuan.

Sayang kemudian permainan tersebut dimasukkan ke jenis olahraga dan kemudian terjadi pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Olahraga silat, yang awalnya tidak membedakan laki-laki dan perempuan juga dibedakan. Dulu permainan adalah permainan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Mungkin permainan dijadikan arena untuk merasa sama-sama manusia. Akan tetapi, sekarang sebagian besar permainan menjadi olahraga.

Peluang posgender dimungkinkan ketika tidak ada pemisahan jenis pekerjaan (lihat Braidotti, 1993). Tidak ada pekerjaan yang menuntut harus dikerjakan oleh perempuan atau laki-laki. Berkat kesombongan laki-laki, terjadi proses domestifikasi pekerjaan. Maka, muncul kesan bahwa kerja-kerja fisik yang berat harus dikerjakan laki-laki, sementara yang halus dan butuh ketelatenan dikerjakan oleh perempuan. Pemilahan itu bahkan hingga pekerjaan-pekerjaan di rumah. Wanita semakin tidak terlatih tubuh dan keterampilannya.

Jadi, sebenarnya masyarakat modern secara kontradiktif membangun masyarakat posgender. Di satu sisi, modernitas mengedepankan kesetaraan,

kesederajatan, dan kesamaan semua manusia, tetapi olahraga dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali itu sebagai konsekuensi dari epistemologi posfeminis (atau feminisme pascamodern), yakni upaya membangun epistemologi dengan tidak lagi berangkat dari struktur oposisi biner. Perempuan membangun eksistensinya sendiri tanpa harus membandingkan atau mensejajarkan dirinya dengan laki-laki.

Terlepas dari hal di atas, selalu ada hal-hal yang tersembunyi dari posgender. Dalam hal syahwat, libido, benci, cinta, dan sayang, kita tidak bisa membedakan mana cinta dan benci perempuan dan laki-laki. Atau adakah ilmu pengetahuan sudah bisa membedakan jenis cinta dan benci perempuan dan laki-laki? Masalah itu membutuhkan suatu penjelasan yang panjang karena masuk ke konsep diri terdalam manusia.

Tampaknya, syahwat, cinta, benci, sayang, dan marah itu tidak berjenis kelamin; sesuatu yang di atas gender. Namun, untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak berjenis kelamin, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita tidak perlu membayangkan bahwa Tuhan itu—berdasarkan sifat keberadaannya—seperti manusia. Kita tidak pernah paham terhadap sesuatu yang memang tidak bisa kita ketahui.

MASYARAKAT POSHEGEMONI

Terdapat beberapa pemahaman tentang hegemoni. Di satu sisi, pemahaman bahwa ideologi hegemonik merupakan sesuatu yang tidak disadari lagi dan kita hidup di dalamnya. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan telah diatur oleh ideologi dominan tersebut (lihat Eagleton, 1994). Para pemikir lainnya mengatakan bahwa bukan kita tidak tahu bahwa kita hidup dalam hegemoni ideologi tertentu, kita tahu. Akan tetapi, kita tetap melakukannya. Hal kedua ini disebut sebagai kesadaran sinis (lihat Brewes, 1997:41–49).

Konsekuensi dari pemikiran ideologi di atas adalah adanya semacam pelajaran untuk melakukan negosiasi dan terutama resistensi terhadap ideologi dominan. Sebagai contoh, walau negara kita tidak terlalu nyaman untuk disebut sebagai negara kapitalisme, tetapi kenyataannya memang begitu. Efek nyata dari negara seperti itu adalah kepastian terjadinya penyerapan modal ke modal yang kuat/besar, dan yang miskin tetap miskin. Konsekuensi lain adalah menguatnya ketimpangan struktur kelas, agama, gender, dan lain-lain.

Kemudian kita diajarkan untuk melakukan negosiasi dan resistensi agar efek negara kapitalisme seperti itu dapat diminimalkan, terutama dengan

melakukan berbagai kritik dan mengajukan konsep-konsep baru. Teori, aksi, dan berbagai tindakan dengan basis paradigma yang berbeda, selalu dalam posisi resistensi tersebut. Sayangnya, kapitalisme telanjur kuat dan selalu memodifikasi dirinya untuk tetap canggih. Hal yang terjadi adalah kelompok dominan berhadapan dengan para pelawannya. Pada titik ini, berbagai konflik yang memunculkan kekerasan tidak dapat dihindari.

Pada titik tersebutlah muncul penyegaran pemikiran yang kemudian disebut poshegemoni (lihat Beasley-Murray, 2010; Marramao, 2020). Poshegemoni tidak melakukan resistensi terhadap ideologi dominan. Poshegemoni tidak memposisikan dirinya berhadapan dengan berbagai kelompok sosial, politik yang berbeda ideologinya. Poshegemoni tidak dalam posisi-posisi saling bersaing antarkelompok. Singkat kata, poshegemoni justru asyik dengan dirinya; tidak mengurus dan memusuhi kelompok lain.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat poshegemoni adalah masyarakat yang di dalamnya setiap kelompok ataupun komunitas mengabdikan dirinya untuk berbuat hal-hal kreatif dan luar biasa sesuai dengan tuntutan ideologinya. Mereka melakukan hal kreatif dan luar biasa tersebut tidak dalam rangka memusuhi yang lain, tetapi dalam rangka untuk membuat prestasi terus menerus.

Artinya, pikiran, perasaan, dan tindakan kita tidak dalam rangka sebagai pesaing untuk menjatuhkan kelompok lain yang berbeda, tetapi semata-mata dalam rangka membuat hal-hal kreatif dan hebat

untuk dicatatkan dalam sejarah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dalam konteks inilah sebenarnya kita dapat belajar dari komunitas-komunitas kreatif, para kreator di bidang seni, para ilmuwan yang melakukan riset-riset ilmiah, yang tidak memposisikan dirinya berhadapan, dan dalam kepentingan, politik kekuasaan.

Jadi, masyarakat poshegemoni adalah masyarakat yang berlomba-lomba berbuat kebaikan dan prestasi yang hebat sesuai dengan dorongan ideologinya. Mereka yang ingin kaya perlu bekerja dengan keras. Setelah kaya, mereka kemudian dapat melakukan banyak sedekah. Mereka yang ingin menjadi pekerja profesional, akan melatih dirinya hingga ke tataran ahli. Mereka yang ingin menjadi ustad, selalu memperdalam ilmu agamanya dan menulis atau mengeluarkan pemikiran agama yang canggih, dan tidak perlu nyinyir terhadap keyakinan orang lain yang berbeda.

Mereka yang ingin menjadi aktor atau sutradara perlu menjadi ahli dengan membuat film yang bagus. Mereka yang ingin menjadi hakim juga perlu menjadi ahli yang hebat. Mereka yang ingin menjadi politisi perlu berjuang dalam partainya tanpa harus menjatuhkan atau menjelek-jelekkan partai lain. Singkat kata, berkarya dan bekerjalah semaksimal mungkin membuat prestasi-prestasi luar biasa tanpa harus mengurus yang bukan urusannya.

Apakah terdapat preseden yang kita miliki untuk menjadi masyarakat poshegemoni? Tentu peluangnya, sekecil apapun, tetap saja perlu diperjuangkan. Namun,

akan sangat berat di tengah algoritma ideologis berbasis dominasi dan hegemoni itu sendiri. Paradigma prestasi berbasis ideologi, bukan paradigma hegemonisasi berbasis ideologi, selayaknya menjadi pegangan bersama.

Sebenarnya, modal-modal sosial yang kita miliki adalah salah satu prestasi besar bangsa Indonesia pada tataran kolektif. Modal sosial itulah yang menyangga kebersamaan dan kesatuan NKRI. Persoalannya, modal sosial pada tataran bangsa tersebut perlu dikonversi secara maksimal ke tataran individual, agar subjek-subjek manusia Indonesia melakukan prestasi-prestasi luar biasa dalam ideologinya masing-masing.

KERJA SAMA

Kita membutuhkan kerja sama. Kerja sama berbeda dengan gotong-royong, apalagi kerja bakti. Hal ini dapat terlihat dalam kasus berikut. Suatu kampung yang ingin membuat polisi tidur bersama-sama, maka yang terjadi adalah gotong royong, dalam pengertian kerja bersama-sama. Ada pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama untuk fokus menghasilkan sesuatu yang disebut polisi tidur.

Namun, untuk mengatasi masalah kemiskinan, kriminalitas, dan pandemik misalnya, yang dibutuhkan adalah kerja sama. Mungkin di satu sisi masih diperlukan gotong royong membangun portal di pintu masuk gang kampung. Akan tetapi, semangat melakukan suatu tindakan dalam berbagai profesi, fungsi, dan teknis, hal itu disebut sebagai kerja sama.

Tulisan ini mencoba menjelaskan jebakan gotong royong, yang sempat menjadi wacana besar dalam praktik ekonomi dan sosial di Indonesia. Ideologi koperasi, misalnya, masih dalam semangat gotong royong. Hal ini kemudian terkait dengan lemahnya dimensi atau semangat kerja sama dalam masyarakat kita.

Dulu, di banyak daerah di Indonesia, karena sistem ekonomi (upah) belum berjalan secara rasional

dan teknokratis maka banyak hal dikerjakan secara gotong royong. Dengan bayaran sangat kecil dan kekuasaan yang kuat, masyarakat dikondisikan untuk membantu membangun candi, masjid, rumah, kapal, atau jembatan, dan sebagainya. Pekerjaan itu dilakukan secara bergotong-royong. Siapapun bisa dan dapat menyumbangkan tenaganya, dengan jenis pekerjaan yang berbeda untuk memproduksi sesuatu.

Gotong royong lebih dalam semangat kerja fisik, dikerjakan bersama-sama, dengan basis komunalitas, untuk menghasilkan sesuatu. Jejak semangat gotong royong itu masih dihidupkan hingga sekarang, terutama di kampung-kampung. Jebakannya adalah, jika tidak ikut bergotong-royong secara fisik, dianggap tidak mau *sesrawungan*. Gotong-royong menjadi mekanisme eksklusif dan inklusif. Gotong royong dianggap sebagai parameter peranan sosial.

Kini, kehidupan berkembang kompleks dengan pembagian kerja yang lebih spesifik. Penduduk yang terus bertambah semakin membutuhkan kerja sama. Membangun jembatan, gedung besar, dan infrastruktur lainnya tidak bisa dikerjakan sekadar bergotong royong. Harus diatur agar terjadi satu kerja yang sinergis, dengan manajemen yang sistematis agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan target dan diharapkan.

Pekerjaan yang kompleks tersebut tidak bisa disebut sebagai gotong royong dalam pengertian awalnya. Kompleksitas pekerjaan tersebut membutuhkan kerja sama antarfungsi dan antareleman sehingga orang dapat terlibat dalam profesi keahliannya untuk proses-proses

pembangunan. Sekarang, persoalan pembangunan seperti itu bukan persoalan besar.

Persoalan besar yang kita hadapi sekarang bukan lagi soal pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi pembangunan sosial, pembangunan kesehatan, politik, ketahanan pangan, energi, mental, dan budaya. Pembangunan yang telah kita sebutkan tersebut sudah pasti tidak bisa dijawab dengan bergotong royong.

Yang juga tidak bisa diatasi dengan gotong-royong adalah permasalahan seperti kemiskinan atau kriminalitas. Mungkin bergotong royong dalam pengertian teknis, misalnya iuran duit atau beras kemudian dibagi-bagikan ke yang miskin, dapat menjadi jawaban sementara. Akan tetapi, cara itu jelas jauh dari cara mengatasi kemiskinan. Atau mengatasi kriminal dengan bergotong-royong membuat pos perondaan atau bersama-sama mengejar maling. Hal ini jauh dari cara-cara mengatasi kriminalitas.

Untuk mengatasi masalah itu dibutuhkan kerja sama. Kerja sama di sini adalah semua elemen sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya bekerja dalam caranya masing-masing untuk menjawab persoalan bangsa. Dengan demikian, tidak ada yang dianggap tidak berpartisipasi dalam mengatasi persoalan tersebut. Semuanya berfungsi sesuai dengan profesi, bakat, dan keahliannya masing-masing.

Sayangnya, ideologi gotong-royong, sesuatu yang menginklusi dan mengeksklusi dalam semangat sektoral, masih menjadi sandaran dalam mengerjakan sesuatu. Itulah sebabnya, pekerja imateriel dianggap

tidak berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan. Yang berperan penting dalam kesehatan kesehatan adalah para perawat dan dokter. Masalah kriminalitas adalah urusan polisi. Urusan politik adalah urusan politisi. Masalah agama adalah urusan tukang dakwah.

Sudah waktunya mengubah dasar ideologi gotong royong dengan ideologi kerja sama. Dalam kerja sama, tidak ada orang atau masyarakat yang tidak berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Semua ambil perannya masing-masing, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Masyarakat di kampung-kampung, juga perlu mengubah ideologinya untuk tidak sekedar gotong-royong membuat polisi tidur, tetapi lebih dari itu adalah bekerja-sama membuat kehidupan yang lebih produktif.

KEPEKAAN DAN AKAL SEHAT

Ada dua peristiwa untuk mengidentifikasi apa itu kepekaan dan/atau apa itu akal sehat. Pemahaman terhadap kata yang mengandung konsep tertentu menjadi penting untuk ikut membantu agar pemahaman kita lebih berdaya guna dalam melihat dan menganalisis persoalan-persoalan yang muncul dalam praktik kehidupan. Hal berdaya guna itu pun bergantung situasi dan kondisi masyarakat bersangkutan, apakah hal-hal kepekaan dan akal sehat masih perlu dibicarakan atau tidak, karena jangan-jangan justru akan mengganggu hal-hal yang dianggap telah berjalan dengan normal.

Peristiwa pertama misalnya begini. Suatu hari seorang mahasiswa mengeluh kepada dosennya. Kebetulan mereka bertemu di lobi fakultas dan bisa *ngobrol* sambil santai-santai. Si mahasiswa mengatakan, dengan raut muka malu dan cemas, bahwa sekarang apa-apa semakin dirasakan mahal. Kadang-kadang ia harus banyak berhemat hanya untuk dapat membeli buku atau membeli kebutuhan sekolah lainnya. Ia bercerita kadang merasa kasihan dengan orang tuanya karena terlalu sering minta uang untuk beli ini dan beli itu.

Si dosen, juga dengan santai menjawab, bahwa memang kenyataannya tidak ada yang gratis. Semua hal

yang ada di kampus ini juga harus dibeli. Universitas untuk mempercanggih penampilan dan kinerja akademiknya memerlukan biaya yang mahal. Semua yang bekerja, termasuk dosen, harus dibayar karena tidak ada yang mau kerja secara gratis.

Narasi di atas adalah kisah tentang tidak adanya kepekaan dalam diri sang dosen. Keluhan mahasiswa tidak salah, dan tidak ada dari jawaban dosen yang bisa dianggap salah. Jawaban yang benar juga bukan berarti memenuhi syarat kepekaan. Artinya, kita masih perlu belajar banyak untuk menjawab persoalan agar memenuhi syarat kepekaan.

Berikutnya cerita kedua. Masih kejadian yang terkait dengan dunia kampus, sebab inilah kehidupan yang sehari-hari saya akrabi. Di akhir semester, seorang dosen jatuh waktu untuk segera mengeluarkan nilai terhadap mata kuliah tertentu yang ia tangani. Tibalah saatnya ia harus mengeksekusi nilai seorang mahasiswa. Pekerjaan mahasiswa cukup baik, tetapi setelah diperiksa ternyata presensi mahasiswa kurang. Presensi yang terdadar kurang dari 60% kehadiran sesuai dengan peraturan universitas.

Dosen tersebut masih berniat baik dengan mencoba menanyakan kepada mahasiswa yang bersangkutan, juga menanyakan kesaksian teman-temannya, apa yang terjadi. Setelah ada pelacakan, mahasiswa bisa memberikan bukti bahwa pada semester itu dia sakit, sehingga sempat tidak masuk hampir dua bulan. Teman-teman mahasiswa juga membenarkan pengakuan mahasiswa.

Dosen mengalami dilema antara rasa kasihan dan penegakan peraturan akademik. Setelah berkonsultasi kesana-kemari, dia mendapat dorongan untuk tidak mengeluarkan nilai, karena begitulah peraturan. Peraturannya adalah mahasiswa yang presensinya kurang dari 75% maka tidak berhak meneruskan atau mendapatkan nilai mata kuliah bersangkutan.

Kejadian tersebut menunjukkan bukan saja hilangnya kepekaan, tetapi juga hilangnya atau tidak adanya akal sehat. Paling tidak, peraturan tersebut, jika tidak memberikan kriteria pengecualian, maka peraturan tersebut telah dibuat oleh mereka yang telah kehilangan akal sehat. Dengan demikian, apa itu kepekaan dan apa itu akal sehat?

Ketidakepekaan adalah satu situasi tumpulnya perasaan terhadap kesulitan, penderitaan, dan kesusahan orang lain, sehingga respon kita kemudian menjadi tidak sesuai dengan harapan. Ketidakepekaan adalah tumpulnya perasaan—bahkan pikiran—ketika kita tidak memiliki kemampuan bahwa kehidupan seseorang telah berjalan secara berbeda-beda, sehingga terjadi hierarki ekonomi, hierarki terhadap akses sumber-sumber daya, kenyataan akan adanya keberuntungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kepekaan adalah sebaliknya.

Sementara itu, hilangnya akal sehat adalah ketika kita mencoba memikirkan dan menjawab sesuatu, termasuk di dalamnya melibatkan perasaan, kita tidak berpikir bahwa apa yang kita pikirkan dan kita berikan jawaban tidak sepenuhnya memenuhi prosedur hukum logis dan hukum alam yang tercermin dalam peraturan

akademik universitas. Ketika si dosen memutuskan tidak mengeluarkan nilai, karena peraturannya begitu, dosen telah memperlihatkan akal nya tidak sehat. Hal itu terjadi karena dikondisikan oleh peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang yang juga kehilangan akal sehat.

Akal sehat perlu memenuhi kriteria hukum logis dan hukum alam. Peraturan akademik tersebut hanya memenuhi kriteria hukum logis. Berdasarkan perhitungan logis tertentu, maka untuk mendapatkan nilai mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan dengan persentase di atas 75%. Akan tetapi, hukum alamnya adalah bahwa yang menjadi subjek yang dikenai peraturan adalah manusia, yang bisa saja sakit, bisa saja mendapat halangan lain yang manusiawi. Sakit dan berbagai halangan lain yang manusiawi tidak bertentangan dengan hukum alam. Peraturanlah yang tidak mengakomodasi hukum alam tersebut.

Kenapa kita perlu meningkatkan kinerja kepekaan dan akal sehat dalam diri kita. Kita tahu bahwa demikian banyak kejadian ketidakpekaan dan hilangnya akal sehat dalam kenyataan sosial yang kita hadapi. Banyak kehidupan seolah telah berjalan normal dan kita tidak memiliki keberanian untuk mempersoalkan bahwa ada banyak hal tidak normal. Kita tidak berani mempersoalkan keberadaan polisi tidur, misalnya, karena begitulah kehidupan telah berlangsung.

Kasus polisi tidur menarik untuk dikembangkan. Misalnya, keberadaan polisi tidur itu apakah memenuhi syarat kepekaan dan akal sehat atau tidak. Pengguna jalan yang melewati polisi tidur akan melambatkan

jalannya karena kalau tidak maka jalan pengendara akan sangat tergoncang. Jika pengendara berjalan lambat, yang dinyamankan adalah orang-orang yang membuat polisi tidur. Bukankah justru sebaiknya kita berpikir untuk memperlancar urusan pengendara?

Alasan lain adalah kalau pengendara *ngebut*, jalan menjadi tidak aman karena banyak anak-anak. Pertanyaannya, siapa yang memperbolehkan anak-anak bermain di jalan? Apakah jalan tempat bermain atau milik orang yang dekat/membuat polisi tidur? Atau coba periksa semua jalan yang ada polisi tidurnya, adakah anak-anak suka bermain di jalan itu? Apakah dengan keberadaan polisi tidur, kecelakaan menjadi berkurang?

Cukup banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari justru memperlihatkan bahwa sebagai masyarakat, kepekaan dan akal sehat kita tampaknya semakin *ketelingsut*.

WARGA DAN NEGARA

POLITIK KEDAULATAN

Selalu muncul polemik siapa yang paling berdaulat (berkuasa) dalam kehidupan bernegara. Teori yang selama ini cukup dipercaya bahwa yang paling berdaulat itu rakyat (warga). Rakyatlah penguasa tertinggi dalam kehidupan bernegara. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Teori ini banyak diyakini sehingga sering menimbulkan salah paham seolah kemudian kedudukan presiden lebih rendah daripada rakyat. Rakyatlah Tuan itu, dan presiden tidak lebih dari Jongos yang dikontrak perlima-tahunan.

Konteks dan keyakinan teoretik tersebut sebenarnya hanya berlaku secara simbolik. Hal yang sesuai kenyataan adalah kedaulatan rakyat hanya bersifat insidental secara hukum. Kekuasaan rakyat hanya berlaku secara simbolik bahwa rakyatlah yang menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang dipilihnya. Kuasa rakyat yang empirik ada di bilik, yakni ketika rakyat (warga) melakukan pilihan kepada siapa kekuasaannya akan diberikan/dimandatkan. Ketika secara hukum rakyat telah menyerahkan hak kuasanya kepada pemimpin yang dipilihnya, maka kekuasaan tidak lagi di tangan rakyat.

Kekuasaan rakyat yang simbolik itu pun diatur dalam kehidupan bernegara. Hal itu terjadi dalam setiap level kekuasaan. Dalam berbagai pelaksanaan suksesi

kepemimpinan, dari Ketua RT hingga Presiden. Artinya, terjadi birokratisasi dan distribusi kekuasaan (kedaulatan) yang diatur dalam hukum-hukum yang berlaku (baik tertulis maupun tidak) sehingga praktik kehidupan bukan lagi dalam pengertian simbolik, tetapi lebih-lebih secara hukum. Hal-hal hukum bukan sesuatu yang simbolik. Akan tetapi, ada sangat banyak hukum mengatur hal simbolik.

Dikatakan bahwa kedaulatan rakyat hanya bersifat insidental ketika segala sesuatunya telah diatur oleh negara. Di sinilah kemudian, order (*the police*) berlaku sehingga terdapat hierarki kekuasaan atau posisi-posisi hukum dan politik yang berbeda (Chambers, 2013:71). Memang, dalam beberapa praktik demokrasi radikal, terdapat upaya-upaya penyetaraan. Penyetaraan dalam pengertian intelektual dan hak-hak yang sama dalam praktik hukum yang bebas dari kelas sosial, hierarki ras/suku, agama, pendidikan, gender, dan sebagainya.

Namun, praktik penyetaraan dan kesetaraan tersebut sering dipahami sebagai kebebasan simbolik-radikal untuk meminta persamaan kekuasaan, justru ketika kekuasaan tersebut sudah diserahkan kepada para pemimpin. Dalam situasi inilah sering terjadi benturan, karena akhirnya pengakuan terhadap keberadaan negara tidak lagi dijunjung sebagai asas kesepakatan fundamental bahwa pada dasarnya kita hidup dalam sebuah negara.

Dengan demikian, dalam kehidupan bernegara yang berdaulat itu adalah negara, bukan rakyat ataupun pemimpin. Pengertian-pengertian simbolik hanya berlaku pada situasi insidental, dan itu pun sesuai dengan

hukum dan aturan yang berlaku. Ketika rakyat sudah menyerahkan kedaulatannya pada pemimpinnya (yang biasa disebut aparat pemerintah), maka pemerintah memiliki kekuatan hukum dalam mengelola negara.

Itu artinya, pemerintah juga berhak dan wajib menjaga keberlangsungan negara. Memang, pada masa kepemimpinan pemerintahan (di Indonesia, misalnya) muncul kenyataan apa yang disebut rezim. Rezim adalah suatu periode gaya dan cara pemerintahan tertentu, bukan saja dalam mempertahankan negara, tetapi sekaligus dalam mempertahankan kekuasaannya. Setiap kekuasaan yang berjalan dengan mantap justru terlihat dari keberhasilannya menjadi rezim atau tidak.

Jadi, pengertian rezim itu sebenarnya tidak negatif. Rezim merupakan satuan diskursus tentang bagaimana gaya dan format suatu pemerintahan memobilisasi sekaligus mempertahankan kekuasaannya. Bahwa di Indonesia pengertian rezim bernuansa negatif, karena sejarah awal berdirinya NKRI kekuasaan dijalannya dengan otoriter dan sewenang-wenang.

Hal yang perlu dipahami dalam konteks kehidupan bernegara tersebut adalah terjadinya birokrasi kekuasaan (kedaulatan), sehingga posisi rakyat dan penguasa pemerintahan tidak sama. Rakyat bukan lagi Tuan, tetapi warga. Presiden itu bukan Jongos, tetapi memang secara hukum memiliki kekuasaan tertinggi. Ia bisa menjadi simbol representasi rakyat, tetapi sekaligus memiliki kekuatan hukum kenegaraan.

Posisi kedaulatan negara menjadi istimewa bukan disebabkan karena negara adalah hukum itu sendiri,

tetapi karena negara dapat berposisi sebagai sesuatu di luar hukum. Ketika negara membuat hukum, ia berposisi di luar hukum, tetapi ketika hukum telah diundangkan (diberlakukan), negara berada di dalam hukum. Posisi negara di luar dan di dalam hukum itu menyebabkan negara memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengatur kewargaan, menegakkan hukum, dan sekaligus wewenang mempertahankan dirinya.

Berdasarkan posisi negara tersebut, terjadilah apa yang disebut sebagai politik kedaulatan. Politik kedaulatan adalah kemampuan dan kapasitas negara dalam menunda hukum itu sendiri. Artinya, terlepas hal itu menjadi rezim (kadang dalam pengertian negatif), pemerintah—atasi nama negara—memiliki kemampuan untuk menanggukkan hukum-hukum yang berlaku (lihat Agamben, 2008). Bukan saja demi mempertahankan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga atas nama keberlangsungan negara.

Hal-hal tersebutlah yang kadang kurang disetujui, karena ketidaksepakatan bahwa sebenarnya negaralah yang berdaulat. Memang, sejauh kekuasaan pemerintahan yang dijalankan tidak berkhianat kepada negara (NKRI), maka banyak hal dari penundaan hukum perlu dipahami sebagai cara negara mempertahankan dirinya. Sebaliknya, para penentang kekuasaan pemerintahan, juga harus lebih dahulu menempatkan negara sebagai kekuasaan dan hukum tertinggi.

DEMOKRASI DAN DISENSUS

Atas nama hak asasi manusia, keadilan, dan kedaulatan, kita berjuang terus menerus untuk menegakkan demokrasi. Belajar pada proses dan sejarah demokrasi di Indonesia, saya mencoba memformulasikan apa yang disebut sebagai demokrasi atau demokratisasi. Demokratisasi (untuk mendapatkan demokrasi) adalah upaya menegakkan perikehidupan berdasarkan suatu model dan gaya hidup yang membolehkan kebebasan berekspresi, dalam hubungan-hubungan yang setara dan sederajat, berdasarkan prinsip berkeadilan, dan saling menghargai kemanusiaan (lihat Haerpfer, dkk., 2019; Vanhanen, 2013).

Namun, tetap saja penegakan demokrasi itu disimpul (bahkan “dikunci”) dengan filosofi, etika, dan nilai sosial yang bertanggung jawab. Di sinilah kemudian, demokrasi tersebut menjadi ruang yang berbahaya. Demokrasi menjadi ruang panoptik yang selalu diincar untuk ditunggu-tunggu siapa yang berbuat kesalahan dan melanggar demokrasi.

Terdapat beberapa kesulitan mengapa kemudian demokrasi menjadi ruang liar. Pertama, demokrasi menjadi ajang konstestasi tidak imbang antara berbagai unsur yang terlibat dalam ruang tersebut. Walaupun demokrasi dibayangkan sebagai ruang kebebasan berekspresi, tetap ada batas-batas konvensi (atas nama hukum) sehingga sebenarnya ruang demokrasi adalah ruang konsensus.

Sebagai ruang konsensus, kesepakatan menjadi kesepakatan jika tidak membahayakan kekuatan dominan. Dengan demikian, ekspresi yang dimaksud adalah ekspresi sesuai konsensus.

Konsensus hanya menjadi konsensus ketika mendapat legitimasi oleh kekuasaan dalam satu sistem kekuasaan tertentu. Kalau tidak, konsensus itu tidak akan menjadi konsensus karena jika merugikan kekuasaan tidak akan ada konsensus. Dalam praktiknya, terlepas dari kita setuju atau tidak, secara historis, sosial, dan kultural, kita menerima demokrasi sebagai sesuatu yang memang demikian adanya.

Kedua, pengertian kebebasan berekspresi, apalagi dikunci dengan jargon bertanggung jawab, menyebabkan kebebasan berekspresi lebih sebagai manipulasi konsep yang seketika siapapun dapat dimintai pertanggungjawabannya. Inilah yang saya sebut mengapa demokrasi menjadi ruang yang berbahaya karena belajar dari pengalaman kekuasaan Orde Baru. Banyak orang tiba-tiba hilang tidak diketahui kabarnya.

Ketiga, pengertian berkeadilan, menghargai kemanusiaan, atau dalam kasus lain seperti kemakmuran, kebahagiaan, kemerdekaan, adalah konsep-konsep abstrak yang selalu berpotensi ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan kekuasaan. Secara teori, sebenarnya kata-kata itu lebih sebagai fantasi ideologis, bahwa kenyataannya, semakin kita mengejar keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, kebahagiaan, kemakmuran, semakin kita tidak menemukannya. Kalau *toh* suatu ketika seolah menemukannya, tidak lain kita hanya menemukan “kehampaan”.

Yang masih mungkin diperjuangkan adalah kesetaraan dan kesederajatan karena konsep ini memandang manusia, tanpa partisi apapun, sebagai subjek dengan diri (sesuatu yang imanen), yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Hakikat tertinggi dari keberadaan manusia adalah *Diri*, semua sama, tidak dibedakan berdasarkan gender, warna kulit, suku, agama, ras, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Kedudukan manusia, baik di depan hukum maupun di hadapan Tuhan, sama.

Jika kesetaraan dan kesederajatan itu dapat dipahami, apalagi dipraktikkan, secara bersama-sama, baru kita berbicara, berdiskusi, dan bekerja. Artinya, kesetaraan atau kesederajatan bukan tujuan, tetapi cara. Ini yang kadang sulit dipahami, bagaimana membedakan pengertian tujuan dan cara. Sebagai cara, kesetaraan atau kesederajatan telah menjadi praktik hidup bersama. Jika sebaliknya yang terjadi, kesetaraan dan kesederajatan menjadi tujuan, tetapi untuk menuju kesetaraan dan kesederajatan itu terdapat pihak-pihak yang sewenang-wenang terhadap pihak lain. Situasi itu tidak akan pernah menghadirkan kesetaraan atau kesederajatan.

Di dalam praktik kesetaraan dan kesederajatan itu, kita bisa dan boleh menyuarakan dan menyampaikan berbagai aspirasi tanpa ada pihak yang menekan. Di dalam konteks ini, kebebasan berekspresi selayaknya ditempatkan. Hukum logis yang menyertainya adalah subjek dibebaskan untuk tidak terikat konsensus, karena namanya juga kebebasan berekspresi. Itulah sebabnya, terdapat konsep yang disebut sebagai disensus

(Ranciere, 2010:28). Berdemokrasi adalah suatu kondisi kesetaraan dan kesederajatan untuk sepakat dalam ketidaksepakatan.

Substansi demokrasi adalah mengembalikan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum keseimbangan posisi-posisi dan relasi antarsubjek (dalam kesetaraan dan kesederajatan). Perbedaan-perbedaan yang dimungkinkan sebagai konsekuensi kebebasan berekspresi perlu dikembalikan sebagai substansi *diri kemanusiaan* yang ditakdirkan sama. Asumsinya adalah tidak mungkin semuanya berbeda, selalu ada titik-titik kesamaan yang mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga sebenarnya kita hidup dalam ruang interseksi titik-titik kesamaan dari yang berbeda tersebut.

Namun, tentu saja demokrasi disensus yang digambarkan di atas adalah satu konsep ideal yang kita sangat sulit menerapkannya. Kita, sebagai subjek, juga terlanjur dikonstruksi oleh banyak nilai, wacana, dan ideologi, sehingga subjek bebas konsensus tersebut juga sangat sulit ditemukan. Kalau terdapat beberapa kasus akan hadirnya subjek bebas konsensus, maka belum apa-apa subjek tersebut mungkin mendapat tekanan bukan saja oleh masyarakat lingkungannya, tetapi juga oleh negara. Tergantung subjek bebas seperti apa yang hadir.

Dalam beberapa tulisan lain dalam buku ini, subjek bebas tersebut dapat saja dianggap sebagai subjek radikal, subjek autentik. Perlakuan terhadap subjek bebas tersebut sangat mungkin masyarakat yang menghakiminya atas standar moral, tetapi bisa

juga negara, jika hal kehadiran subjek bebas dianggap membahayakan negara. Hal ini pula yang dalam perspektif Giorgio Agamben (1998) dijelaskan dalam konsep *homo sacer*.

Kendala lain adalah nilai-nilai lokal atau norma-norma tradisi-budaya yang secara bersama dipegang oleh masyarakat, walaupun nilai dan norma tersebut tidak masuk dalam ranah hukum. Di ruang demokrasi terkecil sekalipun, misalnya rapat keluarga, rapat RT, demokrasi tidak jalan sebagai mana yang kita harapkan. Terdapat sejumlah nilai dalam keluar untuk menghormati keputusan orang tua, walaupun keputusan orang tua tersebut belum tentu benar. Dalam rapat RT, sangat banyak dari kita tidak berani, atau sungkan, untuk mengemukakan pendapat kita yang berbeda dengan pendapat para sesepuh.

Itulah yang terjadi. Biarlah demokrasi, kesetaraan, kesederajatan tetap sebagai nilai dan kondisi yang kita perjuangkan terus-menerus. Saya merasa mungkin di situlah nilai kemanusiaan kita, yakni berjuang terus menuju kondisi ideal, bersama-sama berjuang mencari kebenaran. Dalam kondisi bersama-sama berjuang tersebut, hal yang bisa dimulai adalah penghargaan terhadap ekspresi. Kita tidak pernah tahu kapan kondisi itu dapat dicapai.

TUGAS DAN KERJA

Sejumlah teman dan kenalan, jika kebetulan akan bepergian, entah ditanya atau tidak, dengan sedikit bangga mengatakan: “saya sedang melaksanakan tugas negara”. Sengaja atau tidak teman kita tadi memposisikan dirinya sebagai abdi negara. Kalau teman itu sedang mendapat dan menyelesaikan tugas pemerintahan, mungkin bisa dipahami. Namun, sebenarnya, tugas pemerintahan itu adalah tugas-tugas administrasi kenegaraan.

Kalau kita seorang guru, maka tugas yang kita kerjakan adalah melaksanakan tugas kebangsaan. Mengajar dan mendidik itu bukan tugas (atau pekerjaan) dalam rangka mengabdikan pada negara. Akan tetapi, ketika kita menyelesaikan administrasi laporan kerja, maka kita sedang mengerjakan tugas kenegaraan.

Kalau kita ke ibukota untuk merepresentasikan rencana kerja, atau melaporkan hasil kerja, atau mengevaluasi sesuatu, itu tugas administrasi negara. Kalau seorang dosen menjadi asesor dan memeriksa kredibilitas suatu perguruan tinggi, itu tugas administrasi kenegaraan.

Kalau Anda menulis novel atau puisi, itu Anda sedang mengerjakan tugas kebangsaan. Kalau Anda diundang menari, membaca cerpen, pameran lukisan

di mana pun, maka Anda sedang menunaikan tugas kebangsaan. Kalau Anda melakukan riset ke tempat yang jauh, maka Anda melakukan tugas kebangsaan. Namun, melaporkan hasil riset dan harus dipertanggungjawabkan pembiayaannya, maka itu soal administrasi kenegaraan.

Negara adalah satuan dan organisasi administrasi yang meliputi dan mengelola sumber-sumber keberadaan, potensi warga, dan sumber daya alam untuk tujuan keberadaan negara, seperti kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang diberi kekuasaan dan/atau kedaulatan hukum. Penyelenggara satuan dan organisasi administrasi itu dibebankan kepada pemerintah.

Masalahnya, kadang pemerintah yang berkuasa sering mengaburkan batas kekuasaan administrasi ke pemerintahan atas nama negara dan hukum kedaulatan negara itu sendiri. Pengaburan batas itu terjadi pada negara yang masih menganut sistem kerajaan, tetapi tidak pada negara republik yang berbasis demokrasi.

Memang dalam praktiknya, pemerintah yang memiliki mandat hukum tersebut bekerja atas nama negara. Namun, pekerjaan pemerintah yang utama adalah kerja-kerja administrasi kenegaraan. Dengan demikian, perlu dibedakan dalam lembaga-lembaga tinggi negara, mana tugas pemerintahan (kenegaraan) dan mana tugas kebangsaan. Jika seorang menteri memimpin rapat, itu tugas administrasi.

Administrasi pun perlu dibedakan, ada administrasi kenegaraan ada administrasi publik, bahkan ada administrasi kelembagaan. Jika suatu ketika sang menteri

berkunjung ke daerah untuk kampanye partai, maka ada dua hal yang dilakukannya. Jika dia memposisikan sebagai menteri (kadang rancu dan dengan sengaja dikaburkan), maka ada administrasi negara yang harus diselesaikan (ini akan bisa jadi temuan). Namun, yang lebih sesuai adalah tokoh tersebut sedang melaksanakan tugas-tugas publik (belum tentu tugas kebangsaan). Namun, jika menteri tersebut ceramah akademik di kampus, maka itu tugas kebangsaan.

Partai politik, organisasi sosial dan kemasyarakatan, bukan bagian dari unsur kenegaraan, kecuali mereka yang duduk dalam posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga tinggi negara. Artinya, kita perlu mengklarifikasi ulang, mana tugas negara, sekedar tugas publik, dan tugas kebangsaan.

Dalam hal ini bangsa atau kebangsaan adalah satuan kesukuan, satuan kemasyarakatan, satuan politik, satuan sosial, satuan budaya, satuan nilai-nilai dan norma-norma, yang diorganisasikan dan dikelola negara. Dalam hal ini tugas tersebut dimandatkan kepada pemerintah. Dengan demikian, bangsa dan negara itu lebih tinggi bangsa kedudukannya.

Tapi, bagaimana halnya dengan seseorang yang memasak di dapur? Bagaimana dengan saudara kita yang mencangkul di sawah? Bagaimana saudara kita yang bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh?

Mengikuti alur sebelumnya, perlu juga diklarifikasi, mana tugas yang mendapat bayaran dan mana yang tidak? Kerja memasak di rumah tidak mendapat bayaran. Akan tetapi, tugas memasak untuk dijual, kita

mendapatkan uang dari selisih harga ketika membeli bahan masakan dan menjualnya. Kerja memasak di rumah jelas lebih mulia dan berharga.

Kerja bertani tidak mendapatkan uang. Tapi hasil pertanian dapat dijual dan dengan itu petani mendapat bayaran. Ini juga pekerjaan yang sangat berharga, karena sesungguhnya para petanilah yang menyangga kehidupan kita. Memang, sekarang banyak pertanian dikelola secara perusahaan termasuk BUMN. Posisi pekerjaannya bukan lagi sebagai petani, tetapi lebih sebagai buruh atau karyawan.

Kedua, juga perlu diklarifikasi jika mendapat bayaran, uangnya dari mana? Di Indonesia, kita mengenal tiga klasifikasi uang, yakni uang negara (bukan pemerintah), uang publik (termasuk perusahaan yang bukan milik pribadi), dan uang pribadi. Mereka yang mendapatkan uang negara (termasuk PNS atau ASN), termasuk para buruh, mereka yang memang mendapatkan upah dari kerjanya.

Bangsa atau kebangsaan tidak memiliki uang. Menjadi guru, mengerjakan tugas keadministrasian akan mendapatkan uang/gaji. Namun, ketika guru tadi mengajar anak didik, dia tidak mendapat bayaran. Hampir banyak seniman secara mandiri menunaikan tugas-tugas kebangsaan. Bayarannya bersifat administratif dari sedikit keuntungan yang didapat dari penyelenggara atau penerbit. Bangsa hanya bisa berterimakasih kepada para pekerja bangsa, karena sebenarnya merekalah pekerja sejati dan mahal harganya.

TINDAKAN POLITIK

Jika memperhatikan berita-berita politik, juga kiriman di grup media sosial seperti *Whatsapp*, *Line*, *Twitter*, atau *Facebook*, maka ada yang perlu digarisbawahi. Terdapat berita-berita konflik dalam bentuk berhadapan seperti demonstrasi dan perkelahian antara dua kelompok atau lebih. Bisa juga hal-hal yang bersifat kritik, caci-maki, sumpah serapah di satu sisi, sementara puji-pujian di sisi lain. Dari sekian banyak aktivitas dan/atau tindakan, sangat sedikit yang bisa disebut sebagai tindakan politik.

Terdapat beberapa kejadian, katakanlah demonstrasi. Ada tiga bentuk demonstrasi yang diperbincangkan. Pertama, demonstrasi yang kemudian disebut sebagai Demonstrasi 212. Kedua adalah demonstrasi yang membela Palestina, dan ketiga adalah demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok warga dari Papua. Ada momen-momen yang disebut sebagai tindakan politik dan ada momen yang disebut sebagai tindakan sosial, kultural, bahkan moral.

Tindakan politik adalah tindakan yang mampu menerobos struktur sosial (tatanan sosial), yang telah dimapankan (bdk. Ranciere, 2017:127). Struktur sosial itu terjadi sebagai proses kontestasi dan dianggap telah melewati prosedur demokrasi; hasil proses

demokrasi yang disebut sebagai konsensus. Struktur sosial itu sendiri meliputi kesepakatan tatanan hukum dalam bentuk undang-undang negara yang meliputi tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai hal simbolik lainnya. Secara teknis dan lebih spesifik, segala hal tersebut (dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaannya), terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Namun, struktur dan tatanan sosial lebih banyak tidak tertulis, seperti norma-norma, adat-istiadat, dan kebiasaan. Semua itu tersimpan dan terstruktur dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakatnya, yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Tindakan, dalam praktiknya, terdapat tindakan individual dan tindakan kolektif. Demonstrasi adalah tindakan kolektif sebagai gabungan dari berbagai tindakan individual. Tentu, motif setiap individu bergabung ke dalam demonstrasi bisa berbeda-beda: ada yang sekadar ikut-ikutan agar masih dianggap sebagai bagian, ada juga yang bermotif ekonomi, politik-kekuasaan, dan seterusnya. Akan tetapi, kelak pertanggungjawaban tindakan politik ada pada individu (persubjek), bukan demonstrasi.

Berbagai tindakan individu itu dipayungi oleh tujuan demonstrasi. Demonstrasi atau peristiwa keramaian bukan pelanggaran hukum. Akan tetapi, karena demokrasi adalah sebuah konsensus, maka demonstrasi pun perlu mengikuti konsensus. Ada konsensus formal administratif dan ada pula konsensus

informal. Negara bisa mempersoalkan mereka yang tidak mengikuti konsensus formal administratif. Namun, konsensus informal pun berpeluang untuk menjadi masalah hukum.

Konsensus yang dilembagakan itu dimasukkan ke dalam ruang yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi menjadi ruang liar, karena terjadi pertarungan dalam mempraktikkan konsensus. Pertarungan tersebut bisa sekadar kontestasi wacana, tetapi bisa juga berupa pamer kekuatan. Dalam situasi tersebut kemudian terdapat seseorang (subjek) berpotensi untuk melakukan tindakan politik atau tidak. Tindakan politik di sini adalah bagaimana subjek mengelola, bersiasat, berstrategi berhadapan dengan konsensus hukum struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Kasus Demonstrasi 212 adalah peristiwa politik karena memenuhi unsur penerobosan terhadap konsensus formal dan informal. Penerobosan konsensus formalnya adalah pelanggaran terhadap ketertiban publik. Penerobosan konsensus informalnya adalah penggunaan wacana-wacana dan permainan simbol-simbol di luar kesepakatan konsensus bernegara dan berbangsa. Bukti lain bahwa demonstrasi tersebut sebagai peristiwa politik, banyak implikasi dan efek yang mengikuti setelah peristiwa tersebut.

Namun, kita tahu bahwa subjek-subjek tokoh yang memotori dan menjadi arsitek Demonstrasi 212 diproses secara hukum oleh negara. Negara mempersoalkan bahwa subjek telah melakukan tindakan politik dan dianggap merongrong keamanan negara. Di sisi lain,

tentu negara berhak, bahkan memiliki keharusan, untuk mengamankan negara.

Berbeda dengan demonstrasi dukungan terhadap Palestina. Tidak ada dalam kegiatan dan tindakan demonstrasi tersebut yang dapat disebut sebagai tindakan atau peristiwa politik. Baik dari kaidah konsensus formal dan informal maupun dari kaidah praktik tindakan, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai terobosan terhadap struktur konsensus demokrasi. Subjek-subjek yang terlihat di dalamnya, juga tidak melakukan penajaman wacana atau permainan simbol sehingga mampu menembus konsensus. Dengan demikian, demonstrasi itu hanya peristiwa sosial, bahkan peristiwa moral. Subjek yang terlibat di dalamnya juga dianggap melakukan tindakan sosial atau tindakan moral.

Sementara itu, kasus demonstrasi Papua penting untuk diperhatikan. Pada awalnya, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan politik. Para peserta demonstrasi meneriakkan yel-yel sebagai kontestasi atau perlawanan terhadap wacana dominan atau resmi. Ada peneriakan “Papua Merdeka”, “Indonesia adalah penjajah kolonial”, hingga munculnya ungkapan saling memonyetkan, dalam ruang demokrasi masih dianggap tidak menerobos konsensus formal dan informal.

Namun, ketika di dalam demonstrasi itu terjadi pembakaran atau pengibaran bendera lain yang dianggap setara dengan bendera merah putih milik NKRI, maka subjek-subjek di dalam demonstrasi

tersebut telah melakukan tindakan politik. Tindakan politik telah menerobos konsensus informal demokrasi bernegara, yakni pelanggaran terhadap kesepakatan sejarah, kesepakatan yang bersifat “sakral”, tentang simbol bernegara. Pelanggaran dalam koridor tindakan politik itu bisa masuk ke ranah hukum.

Demikianlah gambaran ringkas tentang apa yang dimaksud sebagai tindakan politik atau tidak. Dalam beberapa penjelasan lain, konsep atau pengertian tindakan politik ini bisa jadi dapat disamakan dengan tindakan radikal dalam penjelasan Zizek (dalam Bowman dan Stamp, 2007:101). Kesamaannya adalah bahwa subjek sama-sama melakukan tindakan yang memberikan efek tertentu. Sementara itu, bedanya terletak pada ranah kejadian peristiwa dan sebab terjadinya tindakan.

KELUAR MASUK IDENTITAS

Masalah identitas termasuk kajian penting dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Salah satu isu yang menarik adalah isu politik identitas, bagaimana identitas dimanfaatkan dan dipolitisasi untuk tujuan-tujuan ekonomi, politik, dan terutama kekuasaan. Salah satu hal yang menarik dari kasus politik identitas adalah adanya pemanfaatan simbol-simbol agama dan kesalehan, tetapi untuk tujuan-tujuan kekuasaan yang duniawi. Dengan demikian, terjadi hal-hal yang kontradiktif dan bahkan bertentangan dengan akal sehat.

Memang demikianlah halnya yang terjadi dalam kontestasi politik kekuasaan. Seseorang atau kelompok-kelompok kepentingan (terutama kelompok politik) akan memberdayakan apa saja untuk merebut dan meraih kekuasaan. Namun, bukan pihak perebut kekuasaan saja yang memanfaatkan identitas, pihak penguasa pun memanfaatkan identitas dalam berbagai cara. Sebelum konflik dalam arti sesungguhnya, telah terjadi perang identitas, perang pencitraan.

Banyak orang dengan susah payah, dalam berbagai cara pula, untuk mendapatkan identitas tertentu. Namun, ada juga identitas yang dengan mudah didapatkan. Predikat untuk mendapatkan identitas kiai, misalnya, butuh perjuangan bertahun-tahun. Namun,

untuk mendapatkan identitas sebagai muslim yang saleh, kita cukup memakai kopiah (yang modelnya tersedia banyak), dan terlihat ke masjid. Bahkan akan lebih afdol kalau ada hal-hal simbolik lain yang mendukung, seperti jenis pakaian atau kening yang terlihat menghitam.

Hal yang ingin digarisbawahi adalah identitas itu berbeda pada bentuk, sifat, dan jenisnya. Ada identitas yang bersifat terbuka, tetapi ada yang bersifat tertutup. Menjadi dan untuk mendapatkan identitas Slemania (penggemar Sepak Bola Sleman Yogyakarta), kita cukup berbaur, memakai kostum Slemania, dan jika perlu sambil mengibarkan bendera PSS Yogyakarta. Kita dengan mudah keluar masuk identitas tersebut, untuk silih berganti dengan identitas yang lain.

Akan tetapi, terdapat predikat yang keluar masuknya sulit dan untuk mendapatkannya membutuhkan waktu dan perjuangan. Itu pun ada identitas yang melekat ada yang tidak. Contohnya, untuk mendapatkan identitas penyair atau sastrawan. Tidak mudah mendapatkan itu, tetapi dalam proses yang panjang berdasarkan karya-karya yang teruji, bisa saja seseorang mendapatkan identitas penyair atau sastrawan. Identitas itu bisa saja melekat, tetapi sangat mungkin jika ada kasus tertentu, predikat keidentitasannya lepas.

Setiap prediksi identitas ada aturan mainnya sendiri, dalam arenanya yang juga relatif tersendiri. Identitas yang longgar seperti mendapatkan predikat Slemania, tentu tidak seketat mendapatkan predikat untuk menjadi sastrawan, kiyai, penyair, politisi, olahragawan, muslim, pendekar, dukun, dan sebagainya, yang selalu

menuntut kelengkapan-kelengkapan untuk memenuhi kriteria intrinsik, baik berupa hal-hal simbolik maupun berbagai penanda lain yang memenuhi suatu identitas.

Dengan demikian, identitas adalah suatu prediksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi kriteria tertentu, baik bersifat simbolik meliputi hal-hal verbal, visual, dan kinetik, yang terhimpun dalam satuan identifikasi sehingga orang atau sekelompok orang tersebut dinamai dalam ciri-ciri dan kriteria intrinsiknya tersebut.

Identitas juga memiliki skala keluasan, dalam arti ada yang disebut sebagai identitas lokal, identitas nasional, dan internasional. Kadang identitas terutama dikenali atau direpresentasikan oleh hal-hal simbolik. Kalau kita melihat seperti tanda salip atau seperti tanda *penambahan*, kita akan segera mengenali itu sebagai Palang Merah. Semua orang yang memakai simbol itu perlu dan bisa dikaitkan sebagai petugas atau bagian dari organisasi Palang Merah. Bendera-bendera negara pada mulanya adalah identitas nasional, tetapi karena dikenali dunia, maka bendera negara bisa dianggap sebagai identitas dengan skala internasional.

Agama bisa menjadi identifikasi identitas internasional, tetapi bisa juga lokal. Banyak agama berskala internasional, tetapi sangat mungkin beberapa agama hanya dikenal di negaranya sendiri. Di India, demikian banyak kepercayaan yang diakui sebagai agama, dan masyarakat India cukup mengenalnya, tetapi tidak cukup dikenal di dunia internasional. Sekarang, mungkin kita mengenalnya karena dukungan sistem informasi

global dan media sosial. Akan tetapi, skala keluasan fungsi-fungsi relasinya hanya terbatas di negara India.

Sementara itu, ada identitas-identitas yang lokal, yang umumnya berbasis suku-budaya tertentu. Panggilan-panggilan khusus, model dan warna pakaian, aksesoris-aksesoris yang dikenakan untuk dan oleh orang-orang tertentu dalam suatu lokal tertentu hanya dikenali dalam budaya bersangkutan. Secara teori hal tersebut disebut sebagai identitas karena memenuhi syarat kesatuan intrinsik untuk disebut identitas.

Dari sifatnya, ada identitas yang bersifat ideologis dan ada yang non-ideologis. Memang batas-batasnya sangat tipis. Slemania sebenarnya adalah identitas non-ideologis, tetapi jangan mempermainkan atau merusak bendaranya karena Anda akan berhadapan secara keras dengan para Slemania. Pada kasus itu, batas ideologis dan non-ideologis terletak pada bendera simboliknya. Akan tetapi, itu pun hanya mengikat kepada mereka yang benar-benar merasa memiliki Slemania.

Namun, tetap saja terdapat identitas yang ideologis dan tidak terbatas pada simbol-simbol dan aksesoris pelengkap. Kadar identitas yang paling kuat kandungan ideologisnya terutama identitas yang secara langsung berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan, sehingga kadar rasionalitas pemilik identitas menjadi rendah. Hal tersebut bisa berbasis agama, bisa berbasis kebangsaan, atau apapun yang secara langsung telah menjadi “darah daging” pemilik identitas.

Kitab suci, tanda salib, dan bendera nasional adalah sebagian contoh identitas yang bisa menjadi

sangat ideologis bagi pemeluknya atau warganya. Hal itu dalam skala nasional. Dalam skala sangat lokal, misalnya, ada totem-totem khusus yang hanya dikenali oleh warganya. Totem biasanya dianggap suci dengan sekaligus berfungsi sebagai identitas. Tidak ada warga dalam jangkauan kode-kode totem tersebut yang berani mempermainkan totem tersebut, kecuali mereka harus siap berkelahi.

Benda-benda yang dianggap keramat, seperti keris, tombak, cincin, atau berbagai benda lain (tidak sekedar totem), termasuk tempat-tempat keramat, seperti makam, *petilasan*, dapat menjadi representasi ideologis identitas pemiliknya, atau sekelompok masyarakat yang merasa memilikinya. Artinya, hal-hal tersebut, sebagai basis identitas individual (seseorang), atau sekelompok masyarakat pemiliknya, Anda jangan bermain-main dengan hal-hal itu. Bahkan sekedar *guyon* pun perlu hati-hati.

POLITIK KOMUNITAS

Belakangan ini, salah satu fenomena sosial yang pantas untuk diperhatikan adalah berjangkitnya komunitas dalam segala bentuknya. Hal ini dimungkinkan berkat kemudahan teknologi komunikasi, tersedianya kelonggaran waktu, dan terjadinya perbaikan ekonomi dalam segala levelnya. Kondisi itu membuka peluang untuk pengisian waktu secara lebih. Pengisian waktu semakin tersedia ketika cukup banyak tempat dan peristiwa yang mendukung untuk itu.

Cukup banyak komunitas hadir dan beroperasi dalam berbagai karakternya. Ada komunitas berdasarkan profesi dan/atau jenis pekerjaan. Hal ini pun masih terbagi ke dalam berbagai karakter, apakah pekerjaan itu bagian dari instrumen pemerintah atau tidak/swasta, atau pekerjaan-pekerjaan yang memediasi di antaranya. Ada komunitas berdasarkan alumni dan/atau pensiunan. Ada komunitas yang terbentuk karena hobi, nostalgia tertentu, dan sebagainya.

Secara ideologis, terdapat komunitas berbasis agama, suku dan/atau asal, partai politik, dan organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan. Bukan berarti bentuk komunitas yang disebut sebelumnya tidak bersifat ideologis, tetapi tekanan pada basis memang membedakan tentang mau dibawa ke mana komunitas

tersebut. Komunitas dengan basis ideologis secara sepihak akan mengalami algoritma ideologis sehingga segala informasi yang masuk secara umum dalam kepentingan politik ideologi tertentu.

Namun, saya ingin menjelaskan posisi dan relasi komunitas dalam kehidupan bernegara. Terdapat dua pola yang bertentangan dalam politik komunitas, yakni yang pro-negara atau yang tidak. Komunitas pro-negara secara signifikan mengelaborasi dirinya dalam kepentingan negara. Komunitas-komunitas pencinta tanah air, pencinta tradisi, kearifan lokal, dan segala hal dalam kaitan kenusantaraan dan kebudayaan, biasanya berafiliasi dalam komunitas ini.

Jauh hari sebelumnya, komunitas seperti ini merupakan orang tua, dan untuk generasi berikutnya sebagai anak, dari cikal bakal apa yang disebut sebagai unsur-unsur yang membentuk bangsa. Artinya, dalam kesepakatan komunitas antarbangsa inilah kemudian menjadi alasan kenapa negara kemudian dibentuk. Komunitas seperti ini selalu eksis dan bersaing dengan berbagai komunitas lain, terutama komunitas yang menghadapi dirinya dengan negara.

Tentu menjadi menarik mengapa di kemudian hari muncul komunitas yang tidak sejalan dengan kepentingan negara. Dalam situasi inilah yang saya sebut sebagai tindakan radikal politik komunitas. Kita tahu bahwa negara akan memapankan order atau tatanan simbolik yang di dalamnya didukung etik kenegaraan. Dalam hal itu, terdapat struktur penguasa dan yang dikuasai. Dalam struktur tersebut terdapat ketidakadilan

dan ketidaksetaraan karena penguasa akan terus menerus memapankan kekuasaannya.

Itu artinya, selalu terjadi ketidakadilan dalam hal apapun terutama dalam hal akses terhadap kesempatan hidup. Dengan demikian, komunitas pro-negara secara tidak langsung juga memapankan struktur yang hierarkis tersebut karena sangat mungkin komunitas tersebut menikmati posisi menjadi anak-anak negara. Hal itu dapat dilihat dari berbagai ungkapan yang dinyatakan dengan bangga; sedang melaksanakan tugas negara.

Politik komunitas pro-negara beroperasi dalam konsensus yang dibangun negara. Secara teori, hal tersebut merupakan sikap-sikap demokratis, sebab komunitas mengoperasikan dirinya dalam konsensus sepihak. Akan tetapi, dalam konsensus terdapat hegemoni mayoritas sehingga segala hal yang minoritas relatif tidak mendapatkan posisi kesetaraan yang memadai. Artinya, konsensus tersebut melegitimasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Demokrasi konsensus adalah demokrasi yang cacat pada tataran konsep.

Dalam situasi struktur yang hierarkis tersebut, politik komunitas yang tidak pro-negara justru menyepakati *dissensus*. Hidup bersama dalam perbedaan, keragaman, dan ketidaksepakatan. Tidak ada tujuan khusus dari politik komunitas yang tidak pro-negara selain saling berbagi informasi, saling berbagi makna, dan saling berbagi rasa persaudaraan itu sendiri.

Jikapun terdapat tujuan dalam politik komunitas yang tidak pro-negara, yakni penyediaan ruang bagi bertumbuhannya singularitas. Dalam hal ini yang

dimaksud singularitas (singularisasi) adalah upaya penghadiran dan penguatan pribadi-pribadi yang tidak mudah terkooptasi oleh politik kepentingan, terutama politik identitas (bdk. Nancy, 1991:27). Dari singularitaslah akan muncul pribadi-pribadi yang tangguh, yang mandiri, yang tidak mudah terombang-ambing oleh permainan politik kekuasaan.

Hal itu juga akan berjalan dan sejalan dengan penguatan karakter. Jika negara ingin memperkuat karakter dalam kepentingan negara, maka politik komunitas yang tidak pro-negara justru akan memperkuat karakter manusianya; memperkuat subjek agar tidak mudah tersubjeksi.

PASUKAN CADANGAN

Masyarakat miskin perlu dilihat sebagai kekuatan, bukan beban. Negara Indonesia memiliki banyak pelajar dan mahasiswa, serta saudara kita yang belum bekerja secara stabil, para pengangguran, atau yang secara ekonomi masih hidup minimal, atau disebut masyarakat miskin. Sebagian besar dari saudara kita itu dianggap menjadi beban negara dan perlu dientaskan. Padahal sebaliknya, mereka memiliki kekuatan. Itu pula sebabnya, dalam konteks ini, saudara kita itu saya sebut sebagai pasukan cadangan.

Tulisan ini menjelaskan seberapa kuat posisi mereka ikut menentukan struktur ekonomi global dan nasional. Bagaimana mereka, pada akhirnya, justru menjadi singularitas yang berpeluang menjadi *multitude* (lihat Negri dan Hardt, 2005).

Sebelum memasuki masyarakat kontrol, kita hidup dalam tatanan masyarakat disiplin. Warga didisiplinkan sebagai dan menjadi bagian dari instrumen produksi. Negara memilah-milah secara struktural mana warga yang produktif dalam berbagai kontribusinya, dan mereka yang tidak produktif. Yang produktif secara maksimal didisiplinkan. Sayangnya, sebagian mereka yang tidak produktif tidak sepenuhnya bisa didisiplinkan, karena negara secara relatif tidak mampu menjangkau mereka.

Itulah sebabnya, dalam struktur ekonomi, mereka menjadi beban negara masing-masing, bahkan menjadi beban global. Segala upaya seolah diarahkan untuk mendisiplinkan banyak hal terutama birokrasi, sistem ekonomi, dan berbagai hal yang terkait dengan finansial. Masyarakat miskin menjadi objek dan sasaran kegiatan global agar tidak menjadi beban internasional.

Dalam masyarakat disiplin tersebut, masyarakat dikalkulasi dan ditempatkan secara kuantitatif. Tidak mengherankan, hal yang perkasa dan penting adalah jumlah atau persentase angka-angka kemiskinan, pengangguran, produktif dan tidak produktif, dan angka-angka persentase ekonomi lainnya. Kemanusiaan manusia secara tidak disadari telah hilang. Manusia hanya dan tinggal angka-angka.

Akan tetapi, sekarang semua bergeser. Harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat tidak lagi bisa didisiplinkan. Keberadaan teknologi dan perubahan cara pandang dunia menyebabkan negara dan masyarakat hanya memiliki kekuasaan yang bersifat kontrol. Jadilah masyarakat kontrol. Dinamika masyarakat global secara kualitatif mendesak keberadaannya agar semua orang dimanusiakan kembali. Semua manusia sedunia adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi sekedar kontestasi antarnegara. Karena jika hal itu dibiarkan, kehancuran dunia harus ditanggung bersama. Bukan hanya ditanggung oleh negara yang banyak warga miskinnya.

Di samping itu, terjadi desakan besar dari pasukan cadangan global untuk siap bekerja apa, di mana pun, dan kapan saja. Kekuatan itu justru mengontrol negara

maju agar negara maju tidak lagi sewenang-wenang membuang alat-alat, mesin-mesin, dan tempat-tempat produksi ke negara berkembang dengan alasan lebih murah. Karena hal itu juga akan menyebabkan warga produktif di negara maju akan kehilangan pekerjaannya. Tidak mengherankan jika banyak warga negara maju tidak berkenan negaranya membuang pabrik-pabrik ke negara miskin/berkembang.

Pada setiap negara berkembang juga begitu. Kekuatan pasukan cadangan mengontrol para pekerja produktif untuk bekerja maksimal. Karena jika kinerja mereka tidak baik, dan berkemungkinan dapat diberhentikan, maka demikian banyak pasukan cadangan yang siap menggantikan. Artinya, dalam posisi ini, pasukan cadangan berposisi sebagai kekuatan kontrol untuk menertibkan para pekerja produktif. Semakin besar kekuatan pasukan cadangan, memperbesar kecemasan warga produktif.

Dengan begitu, dalam masyarakat kontrol, pasukan cadangan tidak perlu ditempatkan sebagai beban negara. Akan tetapi, pasukan cadangan harus ditempatkan secara terintegrasi sebagai mereka yang ikut mengatur struktur dan perekonomian global. Karena kuatnya pasukan cadangan, keberadaan mereka membuat kita terus bekerja. Secara terintegrasi keberadaan mereka menjadi penting, walaupun mereka tidak mendapat bayaran.

Hal yang juga penting bagaimana kekuatan pasukan cadangan justru menjadi komunitas dengan nuansa singular. Kita tahu, akhir-akhir ini komunitas

berjangkit di mana-mana. Sebagai komunitas, mereka tidak berbasis identitas, tetapi berbasis senasib, seperasaan, dan merasa sesama saudara. Kekuatan ini, sebagai anak haram teknologi kapitalisme, memberikan posisi tawar yang tinggi. Posisi tawar itu adalah kemungkinan komunitas itu menjadi *multitude*.

Dalam hal ini *multitude* adalah mereka yang mengambil posisi sebagai komunitas yang letak kekuatan mereka karena mereka tidak memiliki kerjaan, tidak punya target, tidak punya rencana, selain melakukan kegiatan persaudaraan dan rasa kasih sayang sesama. Basis pekerjaan mereka juga bergeser bukan pada hal-hal yang material, tetapi justru imaterial.

SETELAH MERDEKA

Sebenarnya, tidak ada negara yang berkenan warganya merdeka. Hal ini disebabkan apabila warga negara banyak yang merdeka, maka negara akan lemah. Situasi itu tidak akan dikehendaki negara. Negara itu ingin warga negara yang patuh, hidup sesuai dengan hukum, dan produktif demi negara itu sendiri. Di manapun negara selalu ingin lebih kuat posisinya daripada warga. Itulah sebabnya, negara selalu punya kewenangan untuk berdiri “di luar hukum” jika ada warga atau masyarakat yang ingin merdeka dalam berbagai bentuknya.

Kehendak merdeka warga itu, sama halnya pada masa Orde Baru, dan sebagian masih diikuti hingga kini, negara mendorong dalam GBHN membangun manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya dalam perspektif ini sebenarnya membangun manusia merdeka. Maksud dari dorongan itu bukan manusia utuh/merdeka sebagai tujuan, tetapi sebagai cara untuk mendapatkan tujuan yang lain setelah merdeka. Misalnya, merdeka terhadap berbagai pilihan warga untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kemakmuran.

Artinya, merdeka adalah cara, bukan tujuan. Bahwa nanti tujuan setelah merdeka itu tercapai atau tidak itu persoalan lain. Karena kita pun tahu bahwa tujuan untuk mendapatkan keadilan atau kemakmuran sama muskilnya

dengan posisi kemerdekaan itu sendiri. Kondisi itu hanya dimungkinkan dalam suatu situasi demokrasi bebas hierarki. Hal itu pun juga relatif muskil.

Belakangan, konsep merdeka kembali aktual; merdeka belajar. Di berbagai kampus kemudian didorong untuk menjadi mahasiswa merdeka dalam kampus merdeka. Artinya, sesuai dengan alur pengertian di atas, bukan belajar untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena kalau itu yang terjadi, kita tidak tahu kapan kondisi merdeka didapatkan. Pertanyaan ironis tentang itu adalah kapan merdekanya kalau masih baru belajar terus?

Pertanyaan yang banyak muncul adalah adakah orang, manusia, atau subjek merdeka? Perlu ditelusuri lagi merdeka dari apa dan merdeka yang bagaimana. Secara teori hal subjek merdeka tersebut sebenarnya hampir tidak dimungkinkan. Apalagi jika pengertian merdeka tersebut setara, atau bahkan di atas kebebasan; subjek bebas. Suatu kondisi ketika seseorang/subjek terlepas dari berbagai tatanan, tuntutan, dan hasrat-hasrat terutama terhadap hal-hal yang bersifat duniawi.

Itu artinya, dalam perspektif teori-teori sosial, subjek seperti itu dianggap sebagai subjek radikal. Subjek yang mampu melepaskan dirinya dari tarikan tatanan dan aturan main kehidupannya. Jika itu yang terjadi, subjek merdeka justru dalam kondisi paling murni dari kemanusiaannya. Dia menjadi subjek autentik. Subjek autentik (atau merdeka) tersebut tidak perlu belajar lagi untuk menjadi apapun. Dia telah menemukan dirinya.

Namun, subjek autentik hanya relevan dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, secara relatif tidak

bermanfaat bagi masyarakat. Di sinilah dilema keberadaan subjek merdeka. Bukan saja subjek merdeka tidak dikehendaki negara, tetapi pun tidak cukup berdaya keberadaannya di tengah masyarakat. Kita pernah dengar, banyak orang “menarik diri” dari kehidupan dan tatanan duniawi, tetapi itu lebih sebagai subjek ideal bagi dirinya. Subjek tersebut memang tidak mengganggu siapa pun.

Kondisi merdeka itu tidak terlibat atau dapat menolak arus massa. Massa di sini dalam pengertian massa konsumtif, massa ideologis, juga massa mengambang. Subjek merdeka adalah mereka yang bebas berpikir, bebas bekerja/beraktivitas, dan bebas melakukan pilihan-pilihan. Persoalannya, dalam rangka apa kebebasan berpikir, beraktivitas, dan memilih tersebut, serta untuk apa?

Lantas bagaimana solusi yang dimungkinkan jika kita dihadapkan dalam dilema tersebut. Kalau dalam khazanah dan budaya Islam, contoh subjek yang paling pantas diteladani tidak lain adalah Rasul Muhammad. Manusia Agung yang tidak bisa baca tulis, memiliki keluarga dan anak, ikut berperang, dan menjadi imam di masjid dan masyarakatnya. Muhammad tidak menarik diri dari kehidupan duniawi.

Autentisitas Muhammad terletak pada kemerdekaannya dalam naungan Tuhan. Artinya, posisi merdeka yang belakangan kita dengungkan ini merdeka yang mana? Dalam khasanah Jawa terdapat adagium bahwa manusia sejati/merdeka adalah manusia yang berpegang pada hati nuraninya/*rasa*. *Rasa* di sini bahkan

sebagian besar menyebutnya sebagai Nurmuhammad, sesuatu yang Illahiah (lihat Magnis-Suseno, 1983). Dengan demikian, konsep atau pilihan makna merdeka yang kembali kita kukuhkan tidak dalam pengertian kebebasan humanis, atau bahkan sekuler, yakni membebaskan diri manusia dari Dirinya sendiri.

MEMBELOKKAN SEJARAH

Kehidupan berjalan seiring dengan sejarah. Persoalannya, apa dan siapa yang mendorong sejarah? Kekuatan apa yang mengontrol perjalanan sejarah? Ke mana sejarah sedang melangkah? Tentu banyak tafsir terkait dengan persoalan tersebut. Secara ringkas, tulisan ini mencoba melihatnya dalam perspektif spritualitas pascamarxisme. Suatu teori yang sudah jauh berbeda dari teori awalnya.

Dalam perspektif teori tersebut, terdapat kekuatan besar yang disebut sebagai *biopower*. *Biopower* adalah energi hidup yang menggerakkan kebudayaan, sejarah, dan dunia. *Biopower* adalah otak manusia yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk ilmu, teknologi, berbagai aturan, ambisi-ambisi, bahkan, dan terutama, hal-hal simbolik yang mengatur kehidupan berlangsung (lihat Foucault, 1990; 2019).

Dari sisi yang lain, tetap dalam koridor teori tersebut, turunan utama *biopower* yang dominan beroperasi adalah kapitalisme dan modernisme. Terdapat “otak besar” yang menguasainya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang dan masih berkuasa di dunia ini adalah hal-hal yang secara keseluruhan di bawah kendali kapitalisme dan modernime. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejarah dunia, sejarah

kita, dikendalikan dan diatur oleh kedua kekuatan tatanan tersebut.

Ke mana arah sejarah yang dibawa oleh kedua kekuatan tersebut? Kedua kekuatan tersebut menjanjikan masa depan yang sejahtera, makmur, dan bahagia. Persoalannya, kapan itu sesuatu menjadi masa depan. Apa itu sejahtera, makmur, dan bahagia?

Apalagi, perspektif ini meyakini bahwa kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, atau apapun hal “abstrak” tersebut, adalah fantasi ideologis. Kita boleh berusaha, tapi kita tidak akan pernah menemukannya. Karena yang nyata (*the Real*), adalah Tuhan, sementara yang lain semu. Kapitalisme dan modernisme tidak membawa kita ke yang Nyata (*the Real*) (lihat Lacan, 2013:81; Zizek, 1992:39). Kedua dorongan tersebut hanya membawa kita pada harapan-harapan palsu.

Memang, hingga hari ini, kehidupan tetap berjalan. Kemakmuran, pastilah terjadi, tetapi kemiskinan lebih banyak. Kesejahteraan pasti telah berlangsung, tetapi penderitaan lebih dominan. Kebahagiaan mungkin telah dirasakan, tetapi kesedihan juga merajalela. Lantas, kapan masa depan yang dijanjikan itu terjadi?

Hal lain yang juga terjadi adalah tatanan simbolik kapitalisme dan modernisme semakin menguat. Negara-negara terus-menerus mengupayakan dan memajukan dirinya dalam koridor kedua tatanan simbolik tersebut. Ruang-ruang publik modern dan kapitalistik semakin membesar, dan praktik-praktik tradisi, aktualisasi lokal justru menumpang atau ditumpangkan ke dalam kedua ruang tersebut.

Pertanyaannya, apakah sejarah dapat dibelokkan dari dua *frame* kekuatan tersebut? Yakni, bukan lagi kalkulasi ekonomi modern dan kapitalistik yang mendominasi perjalanan sejarah, tetapi justru kekuatan-kekuatan sendiri berbasis tradisi dan spiritualitas lokal. Basis kekuatan lokal itu diharapkan memainkan peran dalam perjalanan sejarah kita ke depan.

Bagaimana peluang Indonesia? Karena kedua kekuatan tersebut akan terus berjalan dalam berbagai cara dan strateginya. Apakah bangsa dan negara Indonesia memiliki potensi untuk menahan dan membelokkan sejarah?

Indonesia adalah negara *super-power* dalam bidang kebudayaan. Namun, dalam praktiknya, praktik-praktik kebudayaan berbasis tradisi, nilai-nilai, dan spiritualitas lokal, dalam kontestasinya, telah tergadaikan dan kalah. Hal yang terjadi, kita telah menjadi bangsa modern dan kapitalistik. Praktik modern itu dibungkus dengan simbol-simbol tradisional. Hal itu tampak dari praktik-praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara penampakan kita berusaha tampak berpihak pada budaya lokal, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa secara ideologis kita adalah orang-orang modern yang kapitalistik.

Negara, khususnya terlihat pada kebijakan dan politik kebudayaan yang diusung pemerintah, juga tampak memperlihatkan kebijakan pada budaya-budaya lokal. Namun, kebijakan, politik, dan praktik kebudayaan tersebut justru dimanfaatkan *biopower* sebagai komoditas. Dalam jangka panjang, banyak hal

dari politik dan kebijakan kebudayaan pemerintah harus dievaluasi ulang.

Dalam situasi itu, sebenarnya kita dapat mengandalkan komunitas-komunitas yang dapat dan telah membebaskan dirinya dari identitas. Komunitas-komunitas yang mencoba mengarahkan dirinya berbasis nilai dan spritualitas lokal. Komunitas yang di dalamnya subjek-subjek merasa mendapatkan dirinya secara lebih pribadi dan autentik.

Komunitas-komunitas seperti inilah yang kelak dapat membebaskan sejarah bangsa dan negara kita dari arus sejarah global. Komunitas seperti inilah, jika diniati serius, yang dapat membelokkan sejarah bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan kesejatan diri dan budayanya. Sejarah perjalanan bangsa yang merdeka dan mandiri menuju yang Nyata (*the Real*).

MENEMUKAN SUBJEK

DIRI DAN PRIBADI

Ada pernyataan yang cukup dikenal, yakni “jadilah diri sendiri”. Pernyataan itu kita dengar dalam situasi yang berbeda-beda. Kalau ada remaja yang suka ikut-ikutan teman yang diidolakannya, maka kita akan berkata: “jadilah diri sendiri”. Kalau ada kenalan kita menulis sesuatu dan *ngekor* penulis terkenal, maka kita akan berkata: “jadilah diri sendiri”. Kalau ada yang ingin menjadi artis populer, maka kita berkata: “jadilah diri sendiri”.

Akan tetapi, sangat mungkin suatu hari kita akan berkata: “engkau harus meneladani Muhammad”. Tidak ada yang bisa seperti Beliau, tetapi paling tidak ada upaya untuk berusaha mengikuti ajaran dan kepribadiannya. Dalam situasi lain, ada pernyataan seperti: “aku ingin anakku menjadi pribadi yang kukuh, tekun, bisa mengabdikan pada orang tua, nusa dan bangsa, seperti dicontohkan para pahlawan”.

Diri dan pribadi adalah dua hal yang berbeda, walaupun kadang dipahami secara sama. Diri dipahami sebagai suatu keberadaan yang imanen dan secara inheren selalu terdapat dalam diri manusia sebagaimana ayat Quran yang berbunyi “*Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya ruh-Ku*” (Surat Shaad, ayat 72). Terlepas dari percaya atau tidak, kemudian kita menyamakan “Ruhku” itu dengan semacam nyawa. Sulit untuk kita mengetahui dari mana nyawa itu berada selain

pengetahuan bahwa manusia hidup karena memiliki nyawa.

Ilmu sosial apapun tidak cukup mampu menjelaskan apa itu nyawa. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah percaya karena efek dari keberadaan nyawa merupakan sesuatu yang empirik. Bahwa karena ada nyawa dalam tubuh, maka manusia hidup.

Dengan demikian, secara inheren manusia adalah dirinya sendiri-sendiri. Tidak usah diminta pun manusia adalah representasi dirinya. Ungkapan jadilah dirinya sendiri, dengan demikian, secara sosial dan kultural sebenarnya tidak terlalu sesuai. Manusia (subjek), perlu dibantu justru untuk menjadi pribadi-pribadi. Apa itu pribadi?

Pribadi adalah suatu konsep tentang keberadaan diri, tetapi melalui suatu proses hidup sosial, mulai dari kecil (*habitus*) dalam lintasan hidupnya (*trajektori*), terjadilah berbagai hal yang membentuk subjek, terkait dengan kuasa struktur sosial yang dialaminya, berbagai peristiwa, berbagai wacana, yang kemudian membentuk diri seseorang (subjek) selalu berbeda dengan yang lain. Dengan demikian, pernyataannya adalah “jadilah sesuai dengan kepribadianmu”.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pribadi itu, dan kenapa harus pribadi, bukan diri. Jika diri adalah suatu yang imanen, maka justru pribadilah yang berpeluang untuk transenden. Diri merupakan sesuatu yang ada dalam diri manusia dan menenggelamkan dirinya dalam kesamaan nilai dengan diri subjek yang lain. Kalau di dalam terminologi sufisme, diri itu *abad*.

Semua/keragaman adalah satu. Berbeda dengan pribadi, pribadi itu *wahid*. Satu adalah semua/keragaman.

Cara yang lebih mudah untuk membedakannya adalah dengan memasukkan subjek ke dalam suatu lembaga, organisasi, kelompok, atau komunitas-komunitas. Jika subjek terserap menjadi bagian dari lembaga atau kelompok, maka dirinya terserap ke dalam identitas kelompok. Kedirian yang inheren ada dalam dirinya hilang dan tergantikan identitas kelompok. Ini banyak terjadi ketika subjek merasa ada justru dengan mengedepankan identitas kelompok.

Identitas pun beragam. Ada identitas berbasis agama, suku, ras, profesi, aliran politik, dan berbagai ideologi lainnya yang dapat dijadikan wajah identitas kelompok. Secara umum, sangat mungkin satuan kelompok beridentitas ini memiliki simbol-simbol tertentu yang mengikat secara arbitrer anggota atau warganya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa subjek diri menjadi hilang, walaupun biasanya, ada juga muncul dalam kelompok tersebut pribadi-pribadi tertentu. Namun, sebagai pribadi subjek tersebut akan keluar masuk baik sebagai diri beridentitas, atau sebagai pribadi bebas di luar kelompok beridentitas.

Tentu bukan berarti satuan kelompok dengan mengedepankan identitas tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan. Hal tersebut bergantung posisi sosial dan politik dalam struktur masyarakat atau negara yang lebih besar. Kelompok beridentitas tersebut akan memiliki kekuatan karena jumlah massa yang mampu melakukan tindakan sosial atau politik tertentu. Kelompok

beridentitas tersebut akan memiliki kuasa jika di dalam ada dan mendapat dukungan pribadi-pribadi tertentu.

Contohnya posisi Megawati dalam PDIP. PDIP akan memiliki kekuatan dengan jumlah besar. Namun, posisi-posisi subjek seperti Megawati dan beberapa pribadi lain yang layak diperhitungkan akan memberi kekuasaan tertentu terhadap PDIP. Ini berbeda dengan kelompok identitas tertentu lainnya yang tidak mendapatkan pribadi-pribadi yang memiliki kuasa, maka kelompok tersebut hanya mampu memperlihatkan kekuatannya saja.

Berbeda jika subjek merupakan bagian dari komunitas-komunitas tertentu yang tidak berbasis identitas seperti agama, suku, ras, atau aliran politik dan ideologis lainnya. Subjek hadir dalam dan sebagai pribadi-pribadi yang mandiri. Kesubjekannya tidak hilang, komunitas tidak dalam posisi mewakili pribadinya, selain komunitas tersebut hanya menjadi suatu sistem dan mekanisme jaringan antarpribadi. Dalam konteks inilah komunitas-komunitas tersebut, apalagi jika berkolaborasi antarkomunitas, akan menjadi *multitude*. Dalam jaringan antarpribadi tersebut, pribadi-pribadi ini yang disebut sebagai singular dengan singularitas mereka.

Komunitas sebagai satuan antarpribadi menjadi penting karena hal ini terkait dengan bagaimana mengisi hidup untuk saling melengkapi. Kita hidup bersama karena merasa selalu berkekuarangan, terutama kekurangan informasi, ketidaklengkapan dalam memberikan makna kehidupan, dan kekurangan pribadi yang tidak pernah lengkap. Dalam posisi itu, komunitas berfungsi untuk saling melengkapi. Kelengkapan dan melengkapi pun

adalah sebuah proses itu sendiri. Komunitas yang berdaya-kuasa adalah komunitas yang tidak pernah merasa lengkap dan tidak pernah merasa selesai, selalu merasa berkekurangan, dan oleh karena itu butuh pribadi-pribadi lain untuk berproses saling melengkapi.

Sayangnya, tidak semua komunitas juga mampu bertahan dalam makna-makna yang tidak berkecukupan. Banyak anggotanya tidak memiliki semangat dan pengetahuan yang sama tentang kekurangan informasi, pengetahuan, dan kelengkapan makna. Bisa juga yang terjadi ketika terdapat subjek-subjek tertentu tidak sabar mengelola hasrat kekuasaan. Di dalam komunitas, hasrat kuasa dinetralisir menjadi hasrat saling menyayangi, bahkan jika mungkin saling bersaudara sesama pribadi manusia.

Terdapat beberapa komunitas yang cukup mendekati apa yang kita bayangkan sebagai komunitas ideal, yakni komunitas berbasis kasih sayang dan persaudaraan. Akan tetapi, secara umum komunitas tersebut hanya bersifat sporadis dengan jumlah subjek yang sangat sedikit. Persoalan mendasar kesulitan untuk berdirinya komunitas ideal dikarenakan tarikan dan desakan kebutuhan ekonomi dan hasrat kuasa, jauh lebih besar daripada hasrat kasih sayang dan persaudaraan itu sendiri.

Dalam sejarah perjalanan kontestasi antarkelompok beridentitas dan komunitas di Indonesia, perjalanan kontestasi antara kekuatan diri beridentitas dan pribadi tak beridentitas hampir selalu dimenangkan oleh kekuatan diri beridentitas. Itulah sebabnya, konflik

dan kekerasan akan terus menjadi ajang sebagai solusi kontestasi. Komunitas-komunitas hanya mampu berdiri di pinggir arena, sambil menunggu hasil kontestasi yang tidak mampu diikuti dan dimenangkannya.

Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bahwa setiap kasus selalu berbeda-beda terkait dengan siasat antara diri dan pribadi dalam mengelola kesubjekkannya; apakah akan menjadi bagian dari identitas atau hanya bagian dari komunitas. Di sinilah kajian tentang ekspresi-ekspresi pikiran, perasaan, dan tindakan yang diperlihatkan akan membuka peluang-peluang temuan yang lebih bermakna sekaligus penting bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan kita.

CINTA DAN BENCI

Terdapat potongan adegan dalam sebuah film silat. Kurang lebih menggambarkan seorang pendekar wanita yang dipaksa membunuh seorang pendekar laki-laki yang sakti. Pendekar sakti itu telah tertodong pedang, karena memang sang pendekar tidak memberi perlawanan. Guru pendekar wanita berteriak, “Bunuh laki-laki itu, bunuh. Apa kau ingin melawan gurumu?”

Si wanita bingung dan kalap. Ia tahu dia mencintai pendekar sakti itu dan sebaliknya. Ia pun tahu gurunya membenci dan dendam yang demikian mendalam kepada sang pendekar sakti. Ia terjebak dalam cintanya kepada sang pendekar dan kepada gurunya (tentu dua jenis cinta yang berbeda), dan atas kebencian gurunya kepada kekasih hatinya.

Teriakan gurunya begitu tinggi menusuk perasaannya karena dia takut dianggap sebagai murid yang khianat. Akan tetapi, tangannya tak mungkin menusukkan pedangnya ke sang kekasih. Karena demikian panik dan limbung, sambil menutup mata dan berteriak histeris, pendekar wanita itu melentingkan badan dan tangannya. Si pendekar sakti tetap diam dan menerima, maka tertusuklah dadanya bagian kiri. Beberapa detik setelah si wanita tahu bahwa ia telah menusukkan pedang ke dada kekasihnya, ia pingsan.

Sebuah adegan mampu dengan baik bercerita, tetapi tidak mampu dan tidak bermaksud menjelaskan. Seharusnya, ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang menjelaskan hal tersebut. Namun, ilmu sosial dan humaniora memiliki banyak keterbatasan untuk menjelaskan gejala-gejala yang tidak tampak, termasuk dalam hal ini persoalan cinta dan benci. Biasanya ilmu sosial dan humaniora hanya berusaha menjelaskan gejala-gejala empiriknya, yang kemudian dirasionalisasi lewat berbagai penafsiran dan pendekatan.

Pertanyaannya, apa itu cinta dan benci? Bagaimana kedua hal tersebut menjadi ada? Bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Apa implikasi cinta dan benci dalam kehidupan?

Biasanya kita menyebut kedua hal tersebut hadir sebagai “representasi” perasaan. Akan tetapi, hal itu belum menjelaskan apa itu cinta dan benci yang muncul dalam perasaan. Saya ingin mengikuti taksonomi Freud bahwa dalam diri manusia itu ada yang disebut *id*, *ego*, dan *superego*. Namun, karena Freud yang mengikuti positivisme tidak masuk ke wilayah Ruh, saya akan meminjam terminologi kepercayaan (keyakinan)¹ saya bahwa dalam diri manusia ada Ruh, bukan sekedar jiwa.

Id adalah segala hal gejala tubuh yang ingin dipuaskan, seperti lapar, haus, libido (syahwat), dan kepuasan empirik lainnya. Implikasinya, jika *id* tidak terpenuhi, maka akan muncul rasa tidak suka (benci)

¹Kepercayaan atau keyakinan tidak membutuhkan bukti empirik. Kepercayaan sesuatu di atas pengetahuan. Keberadaan Tuhan, misalnya, tidak membutuhkan pengakuan empirik. Akan tetapi, Tuhan merupakan hal nyata. Ada, walaupun juga tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Percaya kepada Tuhan merupakan sesuatu di atas ilmu dan pengetahuan.

marah, kecewa, bahkan dendam (lihat Freud, 1991). Tubuh, lewat perasaan, akan melampiaskan rasa kecewa ini dengan mungkin mengumpat, memaki, atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk memenuhi rasa puas tersebut.

Sementara itu, *superego* bukan gejala tubuh. *Superego* terkait dengan beberapa pengertian terutama pengertian hati (nurani), suatu Nur dalam diri, suatu Ruh yang terintegrasi secara menyeluruh dalam eksistensi kemanusiaan. *Superego* tidak menuntut kepuasan, karena *superego* merupakan nilai dan substansi hakiki yang jika kemunculannya atas perasaan adalah perasaan cinta (lihat Fodor, 2013). Cinta bukan gejala tubuh, melainkan gejala Ruh. Implikasi keberadannya ada pada perasaan kasih-sayang dan ketulusan.

Ego adalah kesadaran dan ruang yang mengelola negosiasi *id* dan *superego*. Dalam beberapa hal, sangat mungkin *ego* dapat disejajarkan dengan pikiran (dalam berbagai terminologi lain disebut rasio, akal, dll). Akan tetapi, yang ingin saya tekankan di sini bahwa kesadaran (pikiran) ikut memainkan peran dalam negosiasi tersebut, walaupun pada akhirnya akal bisa larut dalam *id* atau *superego* (lihat Freud, 2018). Jika akal larut dalam *id*, maka yang muncul dalam tindakan adalah segala hal gejala tubuh. Namun, tidak tertutup kemungkinan pikiran bisa larut (tercelup) dalam nilai *superego*. Yang terjadi adalah cinta itu sendiri.

Karena tidak menuntut kepuasan, tidak ada masalah dalam cinta. Cinta menyelesaikan semua masalah atas nama cinta itu sendiri. Memang, kata cinta

sering dipakai secara historis, politik, dan sosial: cinta orang tua kepada anak yang biasanya tanpa pamrih, cinta sesama jenis kelamin, cinta guru kepada muridnya, dan lain sebagainya. Sementara cinta kepada bangsa dan cinta pada kebenaran, itu lebih dekat dengan perasaan sayang. Sayang merupakan implikasi dan representasi dari cinta yang murni.

Di sinilah, keyakinan yang saya pegang adalah bahwa cinta autentik terjadi ketika hanya mencintai Diri-Nya. Pernyataan ini juga didukung oleh Quran yang berbunyi “*adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah*” (Surat Al-Baqarah, ayat 165).

Kembali ke kasus adegan silat di atas, maka yang terjadi adalah pertarungan antara rasa sayang dan benci. Terjadi pertarungan representasi tak langsung antara *id* dan *superego*. Dengan demikian, gejala sayang merupakan bentuk negosiasi antara *id* dan *superego* yang mencul dalam kesadaran (perasaan). Pingsan atau ketidaksadaran yang dialami si wanita adalah gejala tubuh. Adegan lebih lanjut dalam film tersebut menampakkan bahwa pendekar sakti laki-laki lebih dapat menyatukan dirinya dengan kehendak cinta murni ketika ia memberikan nyawa (jiwa) karena dia yakin bahwa cintanya kepada Sang Pencipta, melebihi kesukaannya pada dunia, termasuk pada wanita.

Kebalikan dengan cinta, seperti telah disinggung, benci adalah gejala tubuh. Benci terjadi karena ada hal yang sangat tidak disukai terjadi. Implikasi empiriknya pada ego dengan gejala marah, *ngamuk*, kecewa, sakit hati, atau dendam. Benci sebagai gejala tubuh berposisi

untuk menguji keberadaan cinta dalam diri manusia. Manusia bukan Tuhan, walaupun beberapa ajaran meyakini bahwa secara kualitatif manusia mampu bersatu. Dalam kebatinan Jawa disebut “*manunggaling kawulo gusti*” (Zoetmoelder, 1991). Dalam tasawuf disebut sebagai *tajalli*² (Izutsu, 1984:152).

Pertanyaannya, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan atau kesan, bahwa Tuhan itu bisa marah atau cemburu kepada hambaNya, dengan memberi hukuman kepada hamba yang melanggar syariah yang ditentukan oleh Tuhan? Saya berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin marah dan cemburu. Pengertian ini terlalu memanusiaikan Tuhan. Terlalu besar buat Tuhan jika memiliki perasaan marah dan cemburu.

Yang terjadi adalah Tuhan membersihkan kotoran dan kesalahan dalam diri manusia untuk kembali bersatu bersama-Nya. Bahasa hukuman dari Tuhan terlalu keras buat saya. Saya yakin Tuhan tidak seperti itu, walaupun saya mengatakan itu dalam ketidaktahuan saya tentang Tuhan (Yang Nyata).

Cinta tidak bisa diwariskan, karena secara inheren cinta selalu ada dalam diri manusia. Namun, benci bisa diwariskan, bahkan bisa diwariskan atau bisa ditularkan secara kolektif. Narasi atau wacana-wacana tertentu yang bersifat ideologis, sebagai *output* gejala tubuh yang tersimpan dalam *id* dapat memunculkan ideologi seperti rasisme, sukuisme, atau beberapa gejala yang

²*Tajalli* merupakan istilah tasawuf yang berarti penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas. Istilah ini berasal dari kata *tajalla* atau *yatajalla*, yang artinya “menyatakan diri”.

diperlihatkan seperti hadirnya kelompok-kelompok ekstrem.

Kebencian menjadi bahan bakar permusuhan dan konflik. Itulah sebabnya, negara sangat mungkin merupakan representasi tubuh kolektif warganya. Itulah sebabnya sebagai representasi tubuh warga, negara juga bernafsu untuk menguasai banyak hal. Negara menjadi berhadapan dengan negara lain, yang juga sebagai representasi warganya sendiri, baik sebagai kawan atau sebagai lawan. Ini juga terjadi dalam kehidupan antarmanusia. Negara bukan representasi cinta.

RUANG TOLERANSI

Toleransi itu sejatinya tidak mengenal batas. Artinya, yang namanya toleransi atau sikap toleran, ia akan menerima dan memahami situasi dan kondisi perbedaaan atau pertentangan apapun. Hal itu dimungkinkan karena pada dasarnya basis keberadaan dan sifat toleransi adalah kasih sayang dan cinta. Dengan demikian, penggunaan kata intoleran dan intoleransi sebenarnya tidak benar dan tidak sesuai dengan makna substantif toleransi.

Sebagai kasih sayang dan cinta, seorang yang toleran tidak akan pernah mengatakan perbuatan di luar dirinya yang tidak disukainya, perbuatan yang merugikan atau merusak, sebagai tindakan atau perbuatan intoleran. Semua hal perbedaan dan pertentangan akan diterima; ditoleransi. Sebab itulah makna tertinggi toleransi. Jika seorang toleran mengatakan ada sesuatu yang tidak toleran, maka dia sendiri terjebak untuk juga menjadi intoleran.

Kalau begitu, bagaimana memahami apa yang dengan salah-kaprah disebut sebagai intoleran? Hal awal yang menyulitkan adalah bahwa pada awalnya kata tersebut diambil dari bahasa lain, dalam hal ini Inggris. Kata yang pada awalnya bermakna pikiran yang sempit. Sebenarnya, tidak ada kata yang seratus persen

sesuai jika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Hal ini disebabkan oleh semiotika kultural setiap kata dalam bahasa tertentu yang berbeda dengan bahasa yang lain.

Kemudian pemaknaan kata tersebut disesuaikan dengan makna dan semiotika kultural dalam bahasa Indonesia. Walaupun kemudian agak sulit menerjemahkannya, toleransi adalah suatu sikap penerimaan (seharusnya dengan sabar dan iklas) terhadap berbagai perbedaan, apakah itu bersifat pendapat, cerita, pikiran-pikiran, bahkan hingga berbagai perbuatan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Persoalannya, seperti disampaikan di atas, toleransi itu merupakan ruang tanpa batas, karena basisnya kasih sayang dan cinta. Pertanyaannya, adakah pikiran, pendapat, cerita, dan perbuatan yang (bisa) dianggap melanggar toleransi, atau sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan intoleran? Misalnya di sebuah kampung ada yang berbuat keramaian dengan suara pelantang yang memekakkan telinga, apakah perbuatan tersebut dianggap intoleran (tidak toleran), dan dianggap melanggar toleransi?

Berangkat dari pemahaman bahwa toleransi itu tak terbatas, maka sebenarnya tidak ada perbuatan yang melanggar toleransi. Jika kita menerimanya, kita menjadi tidak toleran karenanya. Akan tetapi, yang dilanggar adalah kaidah etika, atau sangat mungkin kaidah hukum. Di sini muncul masalah, mana perbuatan yang melanggar kaidah etik dan mana yang melanggar kaidah hukum.

Kembali ke soal panggung dangdut atau pelantang yang menulikan telinga bagi orang-orang di lingkungan itu. Bagi mereka yang suka dangdut tidak akan bermasalah dan malah menikmatinya. Lalu bagaimana untuk mereka yang tidak suka dangdut? Bagaimana jika suaranya sangat keras sehingga mengganggu? Saya sengaja mengambil contoh soal panggung dangdut yang batas-batas etis dan moral dan hukumnya lumayan abu-abu. Jika ada orang merusak tempat ibadah, itu bukan perbuatan intoleran, itu perbuatan kriminal (melanggar hukum), bukan melanggar toleransi.

Pertama, yang dilanggar tentulah batas kepantasan, batas moralitas, dan batas etis. Kalau ini persoalannya, maka dalam ruang toleransi soal pantas dan tidak pantas, soal bermoral dan tidak bermoral, soal etik tidak etik, tidak ada masalah. Apalagi, jika kemudian tidak toleran ada tuduhannya juga entah siapa yang harus dikatakan, sebagai sikap intoleran. Moral tidak bisa dihakimi sebagai kesalahan hukum.

Namun, bisa terjadi batas moral dan etik itu melanggar ruang publik. Bahwa ruang publik itu ruang bersama, tidak ada yang boleh memonopoli, tidak ada yang boleh sewenang-wenang. Artinya, kasus ini bisa masuk ke ranah hukum dengan tuduhan mengganggu, mengintervensi, merugikan ruang publik. Jika ada bukti-bukti itu, mereka yang merasa terganggu bisa saja membawanya ke ranah hukum.

Namun, persoalannya adalah orang Indonesia itu ruang toleransinya sangat luas. Walaupun ia terganggu dalam batas-batas etik (dan mungkin bisa saja hukum),

mereka terima dengan sikap mengalah, lebih memilih diam. Jika mereka protes, justru mereka yang dianggap tidak toleran.

Mereka yang terlibat panggung dangdut akan mengatakan, “halah... kan, sekali-sekali. Masa bersenang-senang sedikit saja tidak boleh”. Demikianlah jebakan toleransi: secara kultural, kita akhirnya disandera oleh pengertian-pengertian toleransi yang tidak pas, bahkan memenjarakan kita.

MEMUNAHNYA SPONTANITAS

Mengapa kita perlu mengetahui apakah kita masih memiliki spontanitas? Karena dalam spontanitas itu kita dapat mengetahui watak asli kita. Spontanitas adalah suatu tindakan atau sikap yang dilakukan tanpa pikir. Spontanitas adalah satu keputusan refleks dan/atau mendadak yang dilakukan secara tiba-tiba, kadang tanpa disadari (lihat Sgarbi, 2012:19–21). Jika ada orang terjatuh dekat kita dan begitu saja kita menolongnya, itulah spontanitas. Kalau kita dipukul orang, maka tanpa pikir kita membalasnya, itu hal spontan.

Namun, apakah kita masih secara refleks membuang sampah ke tong sampah jika kita temukan di dekat rumah? Masihkah kita menolong orang kecelakaan? Masihkah kita membantu tetangga yang rumahnya kemalingan? Masihkah kita membantu orang yang mengangkat koper tanpa banyak pertimbangan? Masih mungkinkah kita memberi orang lapar makan tanpa berpretensi ingin mendapatkan pahala? Masihkah kita meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan pinjaman?

Dikisahkan pada suatu waktu terdapat seseorang yang telah bekerja sebagai tukang kebun lebih dari 10 tahun pada seorang pemilik perusahaan. Hubungan mereka sangat baik dan saling menyayangi. Si Tuan

sangat memperhatikan kebutuhan Tukang Kebun, dan Tukang Kebun merasa dia bekerja kepada orang yang baik. Si Tukang Kebun sangat patuh pada Tuannya. Si Tuan juga demikian percaya pada Tukang Kebun.

Akan tetapi, pada suatu ketika mereka terjebak dalam suatu prasangka yang tidak jelas sumbernya. Padahal, awalnya, Si Tuan cuma menanyakan apakah ada orang masuk ke rumah selama dia tidak di rumah karena ada barang berharga miliknya tidak di tempat/hilang. Tukang kebun merasa tertuduh sehingga mereka bertengkar. Tanpa diduga Tukang Kebun menyerang Tuan, Si Tuan kena tusuk gunting tanaman dan berdarah, dan tak lama kemudian Si Tuan mati.

Terdapat dua spontanitas yang berbeda. Untuk kasus tindakan dalam momen kekosongan tersebut, penjelasan dan pencarian yang dilakukan Zizek (1997:31) tidak dalam rangka membedakan spontanitas “baik” dan spontanitas “buruk”. Dalam kasus tersebut, Zizek cuma ingin mencari dan menjelaskan bahwa tindakan radikal dimungkinkan sebagai identifikasi bahwa pada saat itulah subjek berada dan menjadi subjek radikal atau subjek autentik. Subjek yang dianggap paling asli dari kodrat kemanusiaan. Subjek yang bertindak sesuai dengan nalurinya.

Namun, sangat mungkin pencarian Zizek, juga pencarian yang dilakukan beberapa pemikir pascamarxisme lainnya tentang subjek autentik, hanya berguna dalam rangka menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu sama, setara, sederajat, dalam posisinya sebagai subjek autentik. Namun, seperti

dijelaskan kemudian, karena tatanan simbolik yang demikian kuat mencengkeram kehidupan manusia, maka seolah manusia tidak setara dan tidak sederajat. Manusia kemudian dibedakan berdasarkan kelas sosial-ekonominya.

Dalam sisi lain, manusia berbeda berdasarkan ras, suku, agama, dan sebagainya. Sebagian besar manusia saling membunuh lebih karena alasan-alasan tersebut. Tentu sebagian besar konflik, perang, dan berbagai kekerasan lainnya, merupakan perbuatan atau tindakan yang direncanakan. Kita tidak membicarakan hal kekerasan yang berimplikasi pembunuhan yang terencana/direncanakan.

Spontanitas melakukan kejahatan dan spontanitas menolong adalah dua hal yang sangat berbeda bahkan bertentangan. Pasti banyak yang telah kita lakukan untuk menekan berbagai tindak kejahatan. Namun, di tengah masyarakat yang ketimpangan kaya miskin demikian menganga, di tengah masyarakat distopia, masyarakat dipertontonkan kesombongan dan arogansi kekuasaan, maka berbagai bentuk kejahatan bisa jadi merupakan bentuk resistensi, baik sesuatu yang terencana atau sesuatu yang spontan.

Spontanitas menjahat sebenarnya masih bisa “dilawan” dengan memperbesar spontanitas menolong (tindakan baik). Akan tetapi, karena tatanan hidup kita justru mengajarkan kita untuk rasional, spontanitas baik kita justru memunah. Jika ada orang kecelakaan, kita menjadi kurang berani menolong karena nanti jadi saksi berkepanjangan. Banyak refleks kebaikan yang

seharusnya masih bisa kita lakukan, tetapi karena banyak pertimbangan dan pikiran, kita kehilangan kesempatan.

Kalau dalam bahasa agama, sebenarnya refleks spontan itulah yang disebut sebagai akhlak. Hal yang dimaksud akhlak di sini adalah naluri dasar moral. Apakah ada naluri dasar moral kita dalam praktik bebas ideologi (dalam momen kekosongan) yang cenderung pada insting kebaikan? Mungkin masih ada. Memang, masih banyak orang yang baik dan religius, yang kita sebut sebagai mereka yang berakhlak. Akan tetapi, dorongan bertujuan itu karena tekanan ideologis tertentu, tidak asli.

SUBJEK YAKIN

Dalam sebuah tulisannya, Alain Badiou mempersoalkan bahwa proses kehidupan yang dilalui seseorang akan menentukan semacam kategori subjek. Badiou (2019) membedakan tiga subjek, yakni subjek yakin, subjek reaktif, dan subjek kabur. Walaupun Badiou tidak memberikan keberpihakan, tetapi dari identifikasi subjek tersebut Badiou memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang apa yang dimaksud dengan subjek yakin. Dalam kesempatan ini, saya tertarik untuk menjelaskan apa itu subjek yakin secara bebas, mungkin tidak sepenuhnya mengikuti penjelasan Badiou.

Pembedaan kategori subjek lebih sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi karakter. Tidak ada karakter yang tiba-tiba jadi dan berdiri sendiri, melainkan selalu hadir dalam satu rangkaian peristiwa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan subjek yakin adalah karakter atau indikasi subjek yang mengarah pada suatu prosedur yang benar, subjek mengalami berbagai peristiwa dalam himpunan prosedur yang menjadikannya sebagai subjek yang memiliki integrasi dengan kebenaran, subjek yang berani melawan hal yang dianggap di luar koridor kebenaran.

Subjek reaktif adalah subjek yang berdiri “keluar masuk” dari himpunan prosedur kebenaran. Namun, bisa jadi ketika subjek berposisi keluar masuk dari himpunan prosedur kebenaran, subjek reaktif tidak secara konsisten berdiri dalam satuan prosedur tersebut. Ketika

subjek tersebut tidak berposisi dalam satuan himpunan kebenaran tersebut, subjek reaktif memposisikan posisinya berhadapan dengan subjek yakin, bahkan dengan subjek kabur.

Sementara itu, dapat dipahami kemudian bahwa subjek kabur adalah subjek yang “serba tidak jelas”. Bukan hanya dalam banyak hal subjek kabur telah melalui rangkaian prosedur kebenaran secara serampangan, tetapi dalam berbagai hal bahkan subjek kabur banyak melalui rangkai peristiwa di luar prosedur kebenaran (lihat Badiou, 2005:45–47).

Persoalannya, apa itu yang dimaksud dengan kebenaran dan prosedur kebenaran? Kebenaran adalah satu himpunan yang utuh di dalam dirinya; keberadaan satu mengadakan yang lain sesuai dengan substansi dan nilai keberadaannya. Keberadaan dan posisi-posisi unsur pembentuk kebenaran berposisi sesuai dengan keberadaannya. Namun, tentu saja kesesuaian tersebut sejauh dalam logika.

Ilustrasinya adalah dalam himpunan berikut. Baju ada dalam bagian lemari, lemari bagian dari kamar, kamar bagian dari kamar-kamar yang lain, kamar-kamar bagian dari rumah, rumah bagian dari rumah lain, rumah-rumah bagian dari suatu perumahan/perkampungan, begitu seterusnya. Jika baju ditarik ke unsur pembentuknya adalah baju bagian dari kain, kain bagian dari benang, benang bagian dari kapas, kapas bagian dari buah pohon kapuk, pohon kapuk bagian dari pohon-pohon yang lain, himpunan pohon merupakan bagian dari hutan, hutan merupakan bagian dari lingkungan yang lebih luas.

Demikianlah satuan himpunan tersebut menempatkan posisi keberadaannya, bisa dalam hubungan kausal, bahkan nyaris seperti “hukum alam”.

Kain dapat dijadikan kain pel, hal itu tidak melanggar keberadaan kain yang secara nilai dan substansi keberadaan dapat saja dijadikan alat untuk *ngepel*. Baju juga dapat dijadikan kain pel, tetapi menjadi tidak sesuai dengan fungsi keberadaannya. Baju, selain seharusnya disimpan di lemari, tetapi juga dapat disimpan di lemari es, tetapi tidak sesuai dengan prosedur keberadaan dari fungsi-fungsi unsur pembentuk himpunan. Karena rangkaian pembentuk lemari es ada prosedur logisnya sendiri.

Sama halnya dengan kertas putih bersih yang seharusnya (jadi sesuatu yang normatif) proses keberadaannya dapat dipakai untuk menulis atau mencatat sesuatu. Namun, jika kertas tersebut sengaja atau tidak tergeletak di lantai yang bersih, maka kertas bersih tadi menjadi seperti sampah atau benda yang membuat rumah terkesan tidak bersih atau belum dibersihkan. Kertas tersebut adalah bagian dari suatu himpunan tulis menulis, alat-alat yang terintegrasi di satuan himpunannya. Termasuk misalnya bolpoin. Bolpoin yang ujungnya runcing selayaknya dipakai untuk menulis, tetapi bisa juga dipakai untuk menusuk orang.

Misal lain keberadaan alat-alat kerja seperti pisau. Keberadaan pisau adalah rangkaian dari suatu prosedur yang terintegrasi dengan kebutuhan kehidupan manusia. Semua proses, prosedur, dan keberadaan pisau saling terkait dan mendukung keberadaannya. Jika dalam proses menjadikan pisau ada hal yang sesuai, artinya tidak

benar, maka jadinya bukan pisau. Penggunaan pisau pun terintegrasi dengan fungsi keberadaannya yang dalam logika dipakai untuk kerja agar menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Berbeda dengan bolpoin yang runcing, pembuatan pisau dapat diniatkan (direncanakan/dipikirkan) sebagai senjata. Tidak ada kejadian yang keluar dari himpunan prosedur untuk menjadikan pisau, semuanya sesuai dengan kesemestaan hadirnya pisau sebagai himpunan keberadaan yang lain sesuai dengan keberadaan dan fungsi-fungsinya, seperti logam, kayu, tempat dan alat pembuatan, pemanas (api) sebagai pemanas logam, dan sebagainya.

Jika misalkan suatu ketika pisau tersebut dipakai untuk menusuk seseorang, fungsi keberadaan pisau sesuai dengan prosedurnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana peristiwa pisau tersebut digunakan, apakah peristiwa itu terjadi secara spontan atau direncanakan, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, bagaimana kausalitas sehingga peristiwa itu terjadi, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana proses penusukannya, apakah subjek-subjek yang terlibat dalam kondisi memiliki adalah atau tidak, dan begitu banyak pertanyaan yang harus dijawab.

Berbagai pertanyaan tersebut sebenarnya lebih dalam rangka menguji adakah di dalam prosedur terjadinya peristiwa tersebut terdapat bagian-bagian yang melanggar hukum logika satuan bagian-bagian himpunan sebagai prosedur kebenaran. Sebagai konsekuensinya, jika telah diuji, ada beberapa kemungkinan. Peristiwa penusukan itu sebagai tindakan kriminalitas atau kejahatan (karena ada unsur perencanaan) (sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh subjek kabur).

Kemungkinan lain, sebagai orang yang membela diri dan secara tidak sengaja menusuk orang lain (walaupun masih diuji alasan orang tersebut mengapa membawa pisau), bisa berasal dari subjek yakin dan/atau subjek reaktif. Bisa pula peristiwa itu sebagai peristiwa dalam kondisi kekacauan atau darurat sehingga hukum-hukum ditunda penggunaannya.

Pembentukan subjek, hingga menjadi subjek yakin, terjadi dengan melewati rangkaian peristiwa dan prosedur kebenaran itu. Jika semua prosedur hidup yang dialami subjek dapat diuji sebagai rangkaian peristiwa yang tidak keluar dari rangkaian yang membentuk himpunan kehidupan maka secara logika yang muncul adalah subjek yakin. Untuk kasus penggunaan pisau, misalnya rangkaian alasan dan peristiwa apa yang menyebabkan seseorang membawa pisau.

Apakah ada logika sosial, agama, logika etik, logika keamanan, nilai-nilai lingkungan yang membenarkan atau tidak membenarkan seseorang membawa pisau? Walaupun kadang sedikit membedakan dengan logika kultural di beberapa tempat yang membolehkan seseorang (terutama laki-laki) membawa pisau. Hal tersebut akan membuktikan apakah si pembawa pisau subjek yakin atau subjek reaktif, atau bahkan subjek kabur.

Tentu, sangat banyak variabel yang perlu diperhitungkan secara akurat bagaimana prosedur kebenaran berperan membentuk subjek. Satuan-satuan atau bagian-bagian yang membentuk himpunan kehidupan yang utuh, dari skala kecil ke skala yang besar, atau sebaliknya, yang terintegrasi secara keseluruhan membentuk satuan himpunan dan prosedur kebenaran.

Sebagai misal, subjek dalam prosesnya menjadi subjek tertentu, banyak mengalami proses, peristiwa, posisi-posisi dan relasi sebagai menjadi bagian dari suatu struktur kehidupan.

Himpunan adalah pula suatu struktur ketika bagian dan keseluruhan saling bergantung. Ada hal-hal di dalam kehidupan yang tidak semata membentuk ilmu dan pengetahuan seperti dalam asumsi-asumsi ilmu modern, jika itu dimaksudkan sebagai hal-hal yang bersifat empirik dan rasional. Terdapat kesatuan yang membentuk kelengkapan himpunan sebagai hal yang tidak empirik, atau sesuatu keberadaan yang tidak sepenuhnya diketahui, atau secara eksplisit adalah keberadaan non-empirik, suatu keberadaan yang terindra.

Hal tersebut, dengan demikian, bentuk ilmu dan pengetahuan bukan saja segala hal yang bisa dibuktikan, sebagai rumusan atau formula pembentuk prosedur kebenaran. Akan tetapi, terdapat banyak hal yang hanya bisa dipercaya/diyakini atau tidak dipercaya/diyakini, termasuk di dalamnya tentang keberadaan hati nurani dalam diri manusia. Bagaimana menjelaskan bahwa ada satuan dalam diri manusia yang memberi implikasi rasa sayang dan cinta, misalnya. Atau bagaimana menjelaskan hal yang tidak tampak tersebut, secara keseluruhan justru menambah kelengkapan prosedur kebenaran yang secara inheren beroperasi sendiri di dalam dirinya. Mari kita cermati bersama.

SUBJEK ETIK

Dalam berbagai masyarakat dan kebudayaan, tampaknya subjek etik masih merupakan pilihan utama. Bagi masyarakat Jawa, subjek etik digambarkan sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur, selalu *eling lan waspada*, *andhap asor*, *tepa selira*, *sabar lan narima*, *urip prasaja*, *ngerti empan papan*, dan sebagainya. Tentu, kriteria subjek etik seperti dalam masyarakat Jawa tersebut, dalam pengertian yang lebih dan kurang, juga terdapat dalam berbagai budaya lain.

Subjek etik seperti itu mengaburkan, atau di atas, batas agama, suku, dan ras. Subjek etik tidak mempersoalkan apa dan siapa seseorang, dari mana asalnya, agamanya apa, dan sebagainya. Subjek etik mengedepankan apakah, sebagai mana seharusnya manusia, ia dapat berperilaku untuk menegakkan moral baik dalam pengertiannya yang paling umum sekalipun. Kebaikan hidup menjadi sesuatu yang utama.

Jika jumlah subjek etik seperti itu memadai, maka dapat dibayangkan kehidupan masyarakat tersebut akan berjalan dengan aman, nyaman, tenteram, dan damai. Kehidupan akan berjalan stabil, tanpa goncangan yang berarti. Namun, di balik itu, subjek etik juga akan menjadi penyangga struktur sosial yang berjalan mapan. Masyarakat berjalan dengan demokrasi yang minimal, berbagai ketimpangan tidak dipersoalkan karena yang dituntut adalah menjadi manusia baik.

Kemudian, disosialisasikan wacana-wacana berikut. Tidak apa-apa miskin yang penting tetap menjadi orang baik daripada jadi orang kaya, tapi jahat. Tidak apa-apa bodoh, yang penting orang baik daripada jadi orang pintar, tapi jahat. Tidak apa-apa tidak menjadi pejabat daripada menjadi pejabat yang jahat. Dan kita tahu, yang selalu mengatakan itu adalah orang kaya yang pandai dan kebetulan pejabat, dan semua orang tahu dia orang jahat.

Sebagai masyarakat yang didukung warga etik, maka biasanya tetap ada protes, tetap ada proses hukum, tetapi stabilitas dan kompromi, jauh lebih penting daripada melakukan perubahan untuk membangun dan membantu mengondisikan masyarakat; tidak miskin, tidak bodoh, terpelajar, etik, sekaligus religius. Dalam situasi ketika ada ketidakadilan dan ketimpangan dalam struktur sosial, subjek etik secara relatif tidak mengambil peranan penting.

Kondisi subjek etik yang dianggap tidak mengambil peranan penting tersebut terutama jika subjek etik dihadapkan pada negara. Negara manapun akan sangat bergembira jika warganya adalah himpunan subjek etik. Negara, yang dimandatkan ke pemerintah, tinggal menjalankan roda kekuasaannya. Akan tetapi, kita tahu bahwa walaupun kita sangat menginginkan menjadi subjek etik, subjek etik di negara kita sangatlah sedikit. Berbagai kekisruhan, konflik, perkelahian, kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan berbagai kriminalitas lainnya, masih banyak dan sering terjadi. Hal itu memperlihatkan secara langsung bahwa subjek etik itu hanya segelintir.

Bahkan sangat mungkin hidup sebagai subjek etik juga karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Orang terpaksa menjadi guru di sebuah desa terpencil, menemani dan mengajari murid-murid dengan kesetiaan, hidup sederhana dan pas-pasan, karena memang tidak ada kesempatan lain yang bisa dipilih. Mungkin guru itu bahagia, mungkin tidak.

Kasus seperti guru itu banyak. Saya mengenal cukup banyak orang yang berbudi pekerti luhur, suka berdiskusi dan berbicara tentang seni dan budaya, suka silaturahmi, suka memancing, suka meditasi, dan nyaris tidak melakukan tindak amoral atau kejahatan apapun. Secara individual subjek etik adalah subjek yang sukses karena dalam batas tertentu dia seolah *enjoy* dalam posisi itu.

Dalam kondisi itu, perjuangan untuk menjadi subjek etik tentulah tetap sangat didukung. Bukan saja subjek etik harus diposisikan dan direlasikan dengan struktur kekuasaan internal (negara), tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana subjek etik menjadi *subjek pembatas* atau subjek yang sedikit menahan berhadapan kekuatan eksternal yang progresif.

Kita tahu, perkembangan dunia semakin global, modern, dan kompleks. Selalu terjadi persaingan dalam merebut subjek agar menjadi pengikut-pengikut. Secara kebangsaan kita menghadapi banyak disrupsi. Tidak mengherankan kemudian bermunculan subjek modern, subjek milenial, subjek kapitalis, subjek aktivis, subjek revolusioner, dan sebagainya.

Kita tidak mendukung negara dan bangsa yang tidak berkeadilan dan tidak berdaulat atas hukum. Akan

tetapi, dalam kepungan demikian banyak subjek yang berlomba-lomba merebut negara dan budaya bangsa Indonesia, maka subjek etik paling tidak dapat dalam posisi menengahi, dalam posisi pembatas. Dengan demikian, paling tidak subjek etik bisa menjadi juri dalam kontestasi tersebut.

KE ARAH SUBJEK PROFETIK

Penjelajahan dan/atau pencarian terhadap subjek yang relevan dan kontekstual dengan masalah zaman dan peradaban harus terus menerus dilakukan. Posisi subjek etik, misalnya, hanya mampu menjaga kemapanan, tetapi tidak mampu melakukan perubahan terhadap struktur sosial yang tidak adil. Dalam banyak kasus, subjek etik, dalam situasi yang berbeda-beda, bukan subjek progresif.

Subjek radikal atau autentik secara insidental mungkin bisa melakukan kejutan. Paling tidak, akan ada pihak-pihak yang memberikan perhatian, baik itu bersifat insidental, maupun proses-proses tertentu untuk kembali diredakan. Sistem yang mapan dan hegemonik tidak suka dengan kejutan-kejutan yang mengganggu dirinya. Kejutan-kejutan tersebut akan segera dinetralisir dan dinormalkan. Bisa saja dalam konteks kenegaraan subjek radikal tersebut di-*homosacer*-kan.

Negara memiliki versi tersendiri tentang subjek yang diidolakan. Dengan kriteria tertentu, berdasarkan sejarah resmi versi negara, maka ada sosok yang dipahlawankan dan ada yang sekadar dicatat sejarah. Dapat diduga gambaran tentang subjek unggul dengan kriteria keberanian, setia mengabdikan, keprihatinan, dan bukti-bukti lain terkait prestasi historis yang telah dilakukan sebagai konsekrasi kepahlawanan.

Dalam konteks pahlawan negara, faktor agama, suku, dan ras, dikeluarkan untuk tidak menjadi bahan pertimbangan. Namun, catatan tentang keluarga dan silsilah sangat mungkin termasuk materi yang perlu dicatat. Artinya, banyak hal yang dieksklusi dan diinklusi sesuai dengan kebutuhan politik negara.

Kita sulit membuktikan apakah dalam perjalanan hidupnya sang tokoh adalah tokoh yang jujur dan bersih dalam hidupnya. Kadang-kadang, kita juga merasa tidak perlu memasukkan sisi-sisi gelap yang pernah dialami sang tokoh. Amerika, negara yang cukup terbuka dan demokratis, pernah beberapa kali menelanjangi pahlawan sekelas Abraham Lincoln, dengan membuka sisi-sisi gelap kehidupannya. Kita tidak pernah sedetail itu. Peter Carey, misalnya, menggambarkan Pangeran Diponogoro hingga berjilid-jilid (2011; 2017) dengan sangat berhati-hati untuk mengungkapkan kehidupan seksual pangeran flamboyan tersebut.

Bagi pemeluk agama, faktor agama akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan subjek unggul. Terlepas di luar pahlawan nasional, orang Kristen dan Katolik di Indonesia akan mengais-ngais tokoh dalam anutan agama yang sama. Dari segi periode, banyak eksplorasi yang dilakukan umat Katolik atau Kristen ditujukan pada masa-masa kejayaan peradaban Budha atau Hindu, atau menggali ulang kisah-kisah pewayangan. Akademisi orientalis memang tidak pandang bulu, tetapi catatan-catatan tentang tokoh Islam, misalnya, dianggap sebagai tokoh yang berani melawan penjajah.

Hal yang perlu dipahami bahwa internalisasi ideologis menentukan bagaimana seseorang atau masyarakat dikonstruksi sudut pandangnya. Konstruksi sudut pandang itu menentukan subjek seperti apa yang dianggap memenuhi syarat religius, syarat historis, syarat psikologis, syarat politik, syarat kultural, bahkan syarat spiritual. Syarat tersebut pun tidak bersifat universal karena dalam praktiknya kontekstualisasi lokal-lah yang paling menentukan. Banyak syarat yang telah disebutkan mengalami lokalisasi, atau dilokalkan.

Di antara begitu banyak syarat untuk mendapatkan subjek ideal, ada titik temu yang layak dipertimbangkan, yakni apa yang disebut sebagai subjek profetik. Setiap agama memiliki subjek profetiknya sendiri-sendiri. Hal yang dimaksud dengan subjek profetik adalah subjek yang di dalam pribadinya secara integral memiliki dan menjadikan nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi sebagai landasan berpijak dalam praktik hidup (bdk. Kuntowijoyo, 2019).

Beberapa ideologi yang berpengaruh biasanya memberikan tekanan pada sisi-sisi humanisme atau liberalisme, sebagai upaya pemartabatan manusia. Humanisme memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan sudut pandang manusia sebagai sentral kehidupan. Dalam posisi tersebut, berkembang berbagai pemahaman lain yang mendukung kesemestaan manusia, terhadap lingkungan (ekologisme) atau terhadap binatang. Bahkan berkembang pula ke hal-hal yang lebih spesifik seperti benda-benda, makanan, minuman, dan sebagainya. Humanisme yang berpegang teguh pada

batas-batas etik tersebut mencoba mengintegrasikan segala hal yang mendukung kemanusiaan.

Hal di atas terkoneksi oleh sudut pandang liberalisme, yakni memberikan kebebasan kepada manusia untuk berproses terus-menerus menuju pembebasan terhadap berbagai kungkungan yang membelenggu kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niat awal liberalisasi adalah upaya membebaskan manusia dari kungkungan ketidakadilan, ketidaksetaraan, kebodohan, dan berbagai kungkungan lainnya.

Perjalanan dua ideologi besar ini, karena kekuatan lain yang disebut kapitalisme, modernisme, dan sekularisme; liberalisme berkembang ke dua arah. Di satu sisi tetap mempertahankan humanisme etik, tetapi di sisi lain berkembang ke arah pembebasan sekuler. Liberalisasi sekuler berkembang ke dalam berbagai varian, yang bahkan bertentangan dengan humanisme etik. Karena *saking bebasnya*, hadirilah berbagai praktik hidup yang dalam batas-batas humanisme etik dianggap melanggar, melanggar batas-batas kemanusiaan.

Di samping itu, hampir semua ideologi besar yang berpengaruh, tidak menjawab dan tidak mempersoalkan di luar kehidupan. Banyak ideologi berpengaruh yang nyatanya tidak terintergrasi dengan hal-hal religius (sebagai substansi agama). Dalam kontestasinya, ideologi yang dikembangkan agama berjalan sendiri, atau dikeluarkan dari ranah modernisasi ilmu pengetahuan, sehingga bahkan dianggap tidak ilmiah. Persaingan ini telah berjalan bertahun-tahun, tetapi kita tahu bahwa

hampir semua negara besar di dunia mengembangkan studi-studi berbasis sekularitas³.

Situasi keilmuan tersebut perlahan kembali mendapat perlawanan dari religiusme dengan asumsi yang sama spekulatifnya dibanding modernisme, dan terutama sekelularisme itu sendiri. Spekulasinya adalah, jika memang kehidupan lain setelah kematian memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya ada? Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap subjek apa yang akan dibangun, dan terus menerus diperjuangkan, oleh apa yang disebut sebagai subjek dan peradaban profetik.

Untuk menutupi kelemahan subjek etik dan subjek autentik/radikal, maka subjek tersebut perlu disenyawakan dengan subjek religius, atau lebih tepatnya subjek spiritual. Diharapkan subjek tersebut tidak hanya mampu melakukan proses humanisasi, liberasi, tetapi yang tidak kalah utamanya keberadaan untuk melakukan transendensi. Memang, ilmu dan pengetahuan kita terhadap hidup di dunia sudah terakumulasi terus-menerus karena riset kita diorientasikan untuk kehidupan itu.

Riset kita tentang dunia spiritual sangat minim, karena riset tersebut perlu melibatkan kepercayaan atau keyakinan, suatu hal yang selama ini dianggap tidak ilmiah. Padahal, pengetahuan berbasis kepercayaan dan keyakinan tentang dunia yang Nyata tersebut lebih eksak daripada pengetahuan-pengetahuan berbasis empirik dan rasionalitas. Perjalanan sejarah kehidupan

³Untuk perdebatan ini, bisa lihat Alatas (1977) dan Al-Faruqi (2018).

dan peradaban manusia telah memanipulasi hal-hal yang dianggap empirik dan rasional, sehingga sangat mungkin ilmu pengetahuan kita telah menyimpang dari keharusan atau kodrat ilmu itu sendiri.

Istilah profetik (*prophet*) secara harafiah berarti kenabian. Artinya, sangat mungkin setiap agama memiliki nabinya sendiri-sendiri, dengan model profetik yang berbeda. Dalam agama Islam, nabi yang dibayangkan tentu saja Nabi Muhammad. Muhammad bukan sekadar subjek etik humanis dan subjek liberatif, tetapi juga subjek transendental. Muhammad berkeluarga, menjadi imam, ikut perang, ikut berdagang dan bepergian, suka menyelenggarakan majelis diskusi dan bersilaturahmi.

Muhammad telah lama menjadi model subjek bagi umat Islam sehingga sebenarnya sudah cukup banyak tokoh-tokoh, atau subjek-subjek yang dapat diidentifikasi sebagai subjek profetik. Mungkin sebagian dari mereka adalah tokoh atau pahlawan nasional, mungkin di antara mereka adalah tokoh-tokoh di pedesaan yang tidak tercatat dalam sejarah, mungkin pula sebagian mereka adalah orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidupnya dengan baik di muka bumi ini.

SUBJEK TULUS

Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan: “saya tulus, kok”, atau: “dia orang yang tulus”. Akan tetapi, apa itu yang disebut sebagai tulus dan/atau ketulusan? Mungkin setiap orang akan memberikan makna dan pengertian yang berbeda. Namun, secara umum ‘tulus’ itu dapat diartikan sebagai posisi atau keadaan hati, perasaan, dan pikiran yang menerima apa adanya, tidak menuntut atau meminta apa-apa, tetapi juga tidak bermaksud memberi.

Ketulusan hanya dimungkinkan jika semua hal berproses, berjalan, dan dipraktikkan secara sunyi dan diam. Sesuatu menjadi tulus jika hanya kasih sayang dan cinta yang bekerja. Soal sunyi dan diam mungkin cukup mudah untuk dipahami. Akan tetapi, kasih sayang dan cinta perlu klarifikasi. Kasih sayang dan cinta merupakan keberadaan yang secara inheren ada dalam diri setiap manusia.

Keberadaan tersebut bersatu dalam Ruh kita. Ruh tidak sekedar jiwa, yang kadang diartikan sebagai nyawa. Nyawa boleh melayang, tetapi Ruh tidak. Ruh adalah sesuatu yang Nyata (*The Real*). Kita hanya dapat merasakan, baik dengan ilmu, akal, dan rasa, tetapi pengetahuan kita tentang yang Nyata sangatlah terbatas. Kita hanya terus menerus bergerak ke Sesuatu yang Tak Terbatas itu tanpa

henti. Itulah tugas kekhalifahan dan kemanusiaan kita sebagai manusia.

Kenyataannya, untuk mendapatkan legitimasi ketulusan kita sering cerita kalau pernyataan, sikap, dan tindakan kita semata-mata karena tulus. Dalam sebuah grup *whatsapp*, ada tarikan sedekah untuk keperluan menolong yang susah. Kita menjadi malu kalau kita tidak ikut sedekah karena setiap yang sedekah selalu di-*posting* sehingga banyak yang tahu siapa saja yang telah memberikan sedekah berikut jumlah sedekahnya. Kita menjadi malu kalau sedekah kita tidak cukup besar.

Kita merasa dan menjadi tidak bangga kalau kebaikan yang kita lakukan tidak diketahui orang lain. Silakan melakukan kebaikan sebanyaknya, tetapi tidak perlu mengaku perbuatan itu dilakukan dengan ketulusan. Hal yang terjadi adalah ketulusan dipolitisasi sedemikian rupa untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita menolong karena niat bersih, tidak berharap apapun. Di sinilah letak omong kosong kita.

Ada juga para tokoh berjuang atas nama rakyat: “saya bersama Anda, saya juga rakyat yang menderita, jadi kita senasib. Saya berceramah ke sana ke mari tidak bermaksud mencari imbalan, saya tulus bekerja di jalan Allah”. Begitu tokoh tadi mengatakan ketulusannya, sehingga batal ketulusan itu. Silakan berceramah dengan dan menyarankan kebaikan, tetapi ketulusan sangat tidak pantas untuk diungkapkan. Ketika ketulusan diungkapkan, yang terjadi adalah politik ketulusan, bukan ketulusan itu sendiri.

Saya ingat tokoh Harry Potter dalam novel dan film *Harry Potter*. Tokoh itu, secara keilmuan bukan yang terlalu tinggi. Banyak tokoh lain yang lebih tinggi ilmunya dari tokoh itu. Jika terpaksa berhadapan dengan tokoh lain, biasanya tokoh jahat, dia tidak pernah kalah. Bahkan ilmu andalan yang selalu dipakainya cuma itu-itu saja, yakni *expelliarmus*, yang tidak bermaksud menjahati lawan, apalagi bisa membunuh lawan. Ilmu itu dimaksudkan agar lawannya tidak memanfaatkan ilmu yang dapat membuahkan kejahatan.

Namun, kita tahu, kesannya Harry merupakan tokoh yang tidak terkalahkan, tokoh yang ilmunya sangat tinggi. Apa rahasianya? Rahasiannya adalah bahwa Harry adalah seorang yang sangat tulus dalam setiap kesempatan dan di mana pun. Kondisi apapun yang dihadapinya, dia selalu berniat baik, bahkan terhadap musuhnya. Dia seorang yang polos. Namun, dia tidak tahu bahwa dia polos.

Dalam posisi ketulusan tersebut, Tuhan dan alam semesta ada dalam dirinya; berposisi bersamanya. Suatu kekuatan yang tidak tertandingi. Ilmu ketulusan inilah ilmu tinggi. Kita hampir sangat susah untuk mendapatkannya. Perlu berlatih sangat serius untuk memiliki ilmu ketulusan itu, hingga sampai pada titik kita tidak tahu lagi apakah kita telah memiliki ketulusan atau tidak. Kita telah menjadi subjek tulus, tetapi kita tidak mengetahuinya.

Ketulusan itu bukan ilmu sosial, bukan praktik sosial. Ketulusan adalah kasih sayang dan cinta itu sendiri. Mungkin tidak banyak yang bisa hidup dalam

posisi ketulusan itu. Seorang Ibu tidak perlu pamer ketulusan dan cintanya kepada anaknya. Mungkin ketulusan seorang ibu yang bisa mendekati ketulusan sejati. Tentu ada ibu yang tidak seperti itu.

Tidak ada yang boleh tahu ibadah dan amal kita. Karena jika diketahui, dia menjadi tidak tulus, tetapi sekedar perbuatan baik yang mungkin akan mendapat pahala dan imbalan. Ketulusan di atas itu semua.

PEKERJA ROHANI

Pekerja rohani adalah mereka yang bekerja bukan dalam orientasi duniawi; bukan dalam orientasi kebendaan. Pekerja rohani adalah mereka yang bekerja secara konsisten dan terus menerus mengolah pikiran dan hal-hal yang batiniah, tepatnya rohaniah. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi secara inheren dan abadi terdapat dalam diri manusia; diri kita semua.

Akan tetapi, siapakah mereka pekerja rohani itu? Kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa sehari-hari, mereka adalah para ulama. Kita tahu ulama yang tulen adalah mereka yang bekerja mengolah, mempraktikkan, dan menyampaikan hal-hal rohaniah, hal-hal yang tak tampak dan spiritual; hal keabadian. Para ulama sejati seharusnya tidak perlu cemas urusan duniawinya. Tidak perlu cemas dengan kepemilikan, penampilan, dan kemewahan. Mungkin sangat sedikit ulama sejati seperti ini.

Dalam terminologi sosial, pekerja rohani itu adalah para intelektual, seniman, dan cendekiawan. Mereka yang selayaknya bekerja dengan berpikir, mengolah, dan menganalisis hal-hal yang tak tampak di balik dan di dalam praktik kehidupan, berpendapat agar kehidupan sosial berjalan dalam praktik-praktik berkeadilan. Jika mungkin, mereka juga menulis dalam berbagai genre tulisan. Seperti ulama, mereka berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan rohani tersebut.

Sayangnya, banyak pekerja rohani justru menjadi legitimator kekuasaan. Mereka tergiur dengan kehidupan duniawi dan kebendaan. Dalam batas-batas kepantasan dan keadilan hal ini tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah fasilitasi kekuasaan telah menggiring para pekerja rohani, dengan pengetahuan dan kepintarannya, melakukan banyak tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang berlebihan.

Rohaniah menjadi komoditas politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka inilah para pekerja rohani yang berbahaya. Sebenarnya, mereka tidak lagi cukup pantas disebut sebagai pekerja rohani. Mereka tidak lebih hanya menjadi pekerja atau budak nafsu yang bekerja atas nama kerohanian, tetapi justru untuk mendapatkan keuntungan duniawi.

Apakah mereka yang bekerja secara fisik dan kebendaan seperti petani, tukang-tukang, buruh pabrik, karyawan toko, dsb., tidak memiliki peluang untuk menjadi pekerja rohani? Hebatnya, justru posisi merekalah yang lebih strategis. Hidup keduniawian harus disangga oleh mereka yang bekerja dalam orientasi kebendaan. Mereka yang bekerja dalam rangka memproduksi benda-benda material untuk kebutuhan hidup manusia. Mereka membanting tulang, baik untuk hidup diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat.

Kemudian, di sela-sela waktunya, mereka menjadi pekerja rohani dengan membaca, berdiskusi, dan menulis. Inilah yang disebut, mereka yang hidup dalam “dunia antara”. Mereka yang hidup dalam dunia antara, baik sebagai pekerja duniawi/fisik, maupun sebagai

pekerja rohani. Merekalah yang berhak dan memiliki otoritas tinggi untuk disebut sebagai manusia atau subjek yang melakukan migrasi dengan berbagai tindakan politiknya.

Dalam kehidupan agama, Islam misalnya. Muhammad, selain sebagai pekerja rohani tulen dengan hidup sangat sederhana, tetapi juga bekerja keras sebagai pedagang. Bahkan ketika situasi berubah, ia ikut perang. Setiap saat Muhammad mendapatkan kesempatan menjadi Imam Agung, pedagang, suami, dan tentara di medan perang. Tentu kita sekarang menjadi sulit untuk meniru figur Muhamad tersebut.

Dalam sastra, kita mengenal seseorang yang bernama Wiji Tukul. Ia seorang pekerja pada pabrik dengan gaji yang kecil. Sehari-hari ia hanya memakai sandal jepit. Dalam posisi itu, Tukul hanya seorang pekerja fisik kasar, yang membantu sebuah perusahaan memproduksi benda-benda yang dibutuhkan oleh kehidupan. Namun, Tukul memiliki kemampuan memigrasikan dirinya. Tidak banyak dari mereka yang pekerja fisik, tetapi juga pekerja rohani.

Di sela-sela waktunya, Tukul berdiskusi dengan teman-temannya. Dalam kelelahannya, ia membuat puisi dan menulis apa yang dia pikirkan. Data-data yang dia ambil sebagai bahan untuk menulis langsung dari pengalaman hidupnya sendiri. Ini yang membedakan pekerja rohani dari golongan ulama dan intelektual. Mereka yang membicarakan kemiskinan atau kesengaraan hidup, tetapi tidak mengalami apa yang dibicarakan.

Tentu, jika kita membahas kemiskinan dan kesengsaraan, sebagai pengalaman rohaniah, tidak ada kewajiban kita harus dan perlu mengalaminya lebih dahulu. Akan tetapi, pekerja rohani sejati adalah mereka yang mampu membuktikan hidupnya secara konsisten tidak tergiur dengan dunia dan benda-benda duniawi. Mereka yang selalu hidup dan berkeyakinan bahwa dunia dan benda-benda adalah fana.

Daftar Pustaka

- Adamson, Walter L. 1983. *Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. California: University of California Press.
- Agamben, Giorgio. 2008. *State of Exception*. Chicago: The University of Chicago Press.
- . 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. California: Stanford University Press.
- Airanti, Gabriella, dkk. 2017. *Context in Communication: A Cognitive View*. Lausanne: Frontiers Media SA.
- Ajayi, J. F. Ade. (Ed.). 1998. *Africa in The Nineteenth Century Until The 1880s*. Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
- Al-Faruqi, Ismail. 2018. *Ismail Al-Faruqi: Selected Essays*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Alatas, Syed Hussein. 1977. *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass.
- Al-Quran dan Terjemahannya*. 1982/1983. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Allen, J. W. 2010. *A History of Political Thought in the 16th Century*. New York: Routledge.
- Althusser, Louis. 2014. *On The Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*. London: Verso.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Badiou, Alain. 2005. *Infinite Thought: Truth and The Return to Philosophy*. London: Continuum.
- . 2009. *Theory of The Subject*. London: Continuum.

- . 2019. *Happiness*. London: Bloomsbury Publishing.
- Balakian, Anna. 2008. *The Symbolist Movement in The Literature of European Languages*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Beasley-Murray, Jon. 2010. *Posthegemony: Political Theory and Latin America*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Beetz, Johannes. 2016. *Materiality and Subject in Marxism, (Post-)Structuralism, and Material Semiotics*. London: Palgrave Macmillan.
- Benda, Julien. 2007. *The Treason of The Intellectuals*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Bennett, Tony dan Patrick Joyce. 2013. *Material Powers: Cultural Studies, History and the Material Turn*. New York: Routledge.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of Theory Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 1997. *Pascalian Meditations*. California: Stanford University Press.
- . 1998. *Practical Reason: On the Theory of Action*. California: Stanford University Press.
- . 2018. *On The State: Lectures at the Collège de France, 1989–1992*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Bowman, Paul dan Richard Stamp. (Ed.). 2007. *The Truth of Zizek*. London: Continuum.
- Braidotti, Rosi. 1993. *Gender and Post-Gender: The Future of an Illusion*. Wollongong: Feminist Research Network.
- Bracher, Mark, dkk. (Ed.). 1994. *Lacanian Theory of Discourse: Subject, Structure, and Society*. New York: New York University Press.

- Breckman, Warren. 2016. *Adventures of The Symbolic: Postmarxism and Radical Democracy*. New York: Columbia University Press.
- Brewes, Timothy. 1997. *Cynicism and Postmodernity*. London: Verso.
- Brunon-Ernst, Anne. (Ed.). 2012. *Beyond Foucault: New Perspectives on Bentham's Panopticon*. New York: Routledge.
- Boyne, Roy. 2001. *Subject, Society and Culture*. London: SAGE.
- Bullard, Sara. (Ed.). 1998. *The Ku Klux Klan: A History of Racism and Violence*. Alabama: Southern Poverty Law Center.
- Burke, Kenneth. 1966. *Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature, and Method*. California: University of California Press.
- Carey, Peter. 2011. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatatan Lama di Jawa, 1775–1855*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chai, Teresa. (Ed.). 2014. *A Theology of the Spirit in Doctrine and Demonstration: Essays in Honor of Wonsuk and Julie Ma*. Eugene: Wipf and Stock Publisher.
- Chambers, Samuel A. 2013. *The Lessons of Rancière*. New York: Oxford University Press.
- Chaney, David. 1996. *Lifestyles*. London: Routledge.
- Cooper, John Xiros. 2004. *Modernism and The Culture of Market Society*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Crehan, Kate. 2002. *Gramsci, Culture and Anthropology*. California: University of California Press.
- Cuellar, David Pavon. 2018. *From the Conscious Interior to An Exterior Unconscious: Lacan, Discourse Analysis and Social Psychology*. New York: Routledge.
- Dean, Riaz. 2019. *Mapping the Great Game: Explorers, Spies and Maps in 19th Century Asia*. Oxford: Casemate Publisher.
- Deleuze, Gilles dan Felix Guattari. 2004. *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*. London: Continuum.
- Donham, Donald L. 1999. *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Anthropology*. California: University of California Press.
- Duranti, Alessandro dan Charles Goodwin. 1992. *Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eagleton, Terry. 1994. *Ideology*. New Jersey: Pearson Education Limited.
- Faris, Wendy B. 2004. *Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative*. Tennessee: Vanderbilt University Press.
- Fodor, Nandor. 2013. *Freud: Dictionary of Psychoanalysis*. Worcestershire: Read Books Limited.
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Pantheon Books.
- , 1990. *The History of Sexuality*. New York: Vintage Books.
- , 2002. *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge.
- , 2019. *Ethics: Subjectivity and Truth*:

- Essential Works of Michel Foucault 1954–1984*. London: Penguin.
- Freud, Sigmund. 1991. *On Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis: 'Beyond Pleasure Principle', 'The Ego and The Id' and Other Works*. London: Penguin.
- , 2015. *Beyond Pleasure Principle*. New York: Dover Publication.
- , 2018. *Group Psychology and the Analysis of the Ego*. Australia: Logos Books.
- Geertz, C. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gelder, H. A. Enno. 1961. *The Two Reformations in The 16th Century: A Study of Religious Aspects and Consequences of Renaissance and Humanism*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Goldstein, Philip. 2005. *Post-Marxist Theory: An Introduction*. Albany: State University of New York Press.
- Gramsci, Antonio. 1973. *Letters from Prison*. New York: Harper & Row.
- , 1992. *Prison Notebooks Volume I*. New York: Columbia University Press.
- , 1996. *Prison Notebooks Volume II*. New York: Columbia University Press.
- Haepfer, Christian W. dkk. (Ed.). 2019. *Democratization*. Oxford: Oxford University Press.
- Hemingway, Ernest. 1952. *The Old Man and the Sea*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Homer, Sean. 2016. *Slavoj Zizek and Radical Politics*. New York: Routledge.

- Howarth, David. 2015. *"Gramsci, Hegemony and Post-Marxism"*. Dalam Mark McNally (Ed.). 2015. *Antonio Gramsci*. Hlm. 195–213. New York: Palgrave Macmillan.
- Izutsu, Toshihiko. 1984. *Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts*. California: The University of California Press.
- Junadi, Yudi. 2012. *Relasi Agama & Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur: IMR Press.
- Jordan, Susanne. 2010. *The Church and The Monarchy in The 16th Century: England Become Protestant*. Munich: GRIN Verlag.
- Kant, Immanuel. 1987. *Critique of Judgment*. Indiana: Hackett Publishing.
- Kratoska, Paul H. (Ed.). 2001. *South East Asia, Colonial History Vol II: Empire-Building During the Nineteenth Century*. London: Routledge.
- Kuntowijoyo. 2019. *Maklumat Sastra Profetik*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Lacan, Jacques. 2013. *On the Names-of-the-Father*. Cambridge: Polity Press.
- . 2013. *The Triumph of Religion*. Cambridge: Polity Press.
- Lane, Jeremy F. 2000. *Pierre Bourdieu: A Critical Introduction*. London: Pluto Press.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lyman, Stanford M. 2001. *Roads to Dystopia, Sociological Essay on the Post Modern Condition*. Arkansas: University of Arkansas Press.

- Magnis-Suseno, Frans. 1983. *Etika Jawa dalam Tantangan: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Marramao, Giacomo. 2020. *Interregnum: Between Biopolitics and Posthegemony*. Milan: Mimesis Edizioni.
- McMillan, Chris. 2012. *Zizek and Communist Strategy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Miller, Peter. 2019. *Domination and Power*. London: Routledge.
- Nancy, Jean-Luc. 1991. *The Inoperative Community*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Negri, Antonio dan Michael Hardt. 2005. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. London: Penguin.
- Noor, Farish Ahmad. 2016. *The Discursive Construction of Southeast Asia in 19th Century Colonial-Capitalist Discourse*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Ranciere, Jacques. 1999. *Disagreement: Politics and Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- , 2000. "Dissenting World: A Conversation with Jacques Ranciere". Dalam *Diacritics*. Vol. 30, No. 2. Hlm. 113–126.
- , 2010. *Dissensus: On Politics and Aesthetics*. London: Bloomsbury.
- , 2016. *The Method of Equality: Interviews with Laurent Jeanpierre and Dork Zabunyan*. New Jersey: John Wiley & Sons.

- . 2017. *Dissenting Words: Interviews with Jacques Ranciere*. London: Bloomsbury.
- Robson, Karen dan Chris Sanders (Ed.). 2009. *Quantifying Theory: Pierre Bourdieu*. Berlin: Springer Science Business Media.
- Rasmussen, David M. 2012. *Symbol and Interpretation*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Sgarbi, Marco. 2012. *Kant on Spontaneity*. London: Continuum.
- Sharpe, Matthew. 2017. *Slavoj Zizek: A Little Piece of The Real*. London: Routledge.
- Sim, Stuart. 2000. *Post-Marxism: An Intellectual History*. London: Routledge.
- Slaughter, Richard. 2004. *Futures Beyond Dystopia: Creating Social Foresight*. London: RoutledgeFalmer.
- Stiglitz, Joseph. 2019. *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. London: Penguin.
- Tormey, Simon dan Jules Townshend. 2006. *Key Thinkers from Critical Theory to Post-Marxism*. London: SAGE.
- Vanhanen, Tatu. 2013. *Strategies of Democratization*. Washington: Taylor & Francis.
- Walters, Glenn D. 2006. *Lifestyle Theory: Past, Present, and Future*. New York: Nova Science Publisher.
- Wells, Charles. 2014. *The Subject of Liberation: Zizek, Politics, Psychoanalysis*. London: Bloomsbury Academic.
- Wood, Kelsey. 2012. *Zizek: A Reader's Guide*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Zizek, Slavoj. 1989. *The Sublime Object of Ideology*. London: Verso.

- , 1992. *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture*. Cambridge: MIT Press.
- , 1997. *The Plague of Fantasies*. London: Verso.
- , 1999. *The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology*. London: Verso.
- , 2001. *Enjoy Your Symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and Out*. New York: Routledge.
- , 2005. *Interrogating the Real*. London: Continuum.
- , 2014. *Trouble in Paradise: From the End of History to the End of Capitalism*. London: Penguin.
- , 2018. *Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-Human Capitalism*. New York: Seven Stories Press.
- Zoetmulder, Petrus Josephus. 1991. *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa: Suatu Studi Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Biodata Penulis

Aprinus Salam merupakan penyair yang sangat tidak produktif. Hijrah ke Yogyakarta, Desember 1977, setelah lulus Sekolah Dasar di Riau, hingga kini ia telah dan tetap bermukim di Yogya. Pada tahun 1992, ia menyelesaikan skripsi tentang puisi, tahun 2002 menyelesaikan tesis juga tentang puisi, dan tahun 2010 menyelesaikan disertasi tentang prosa/novel Indonesia di UGM. Kini ia menjadi dosen Pascasarjana FIB UGM, dan mendapat tugas sebagai Kepala Pusat Studi Kebudayaan hingga 2021. Pernah jadi Konsultan Ahli di Dinas Kebudayaan Yogya (2014 dan 2015) dan anggota Senat Akademik UGM (2012-2017). Beberapa buku telah ditulisnya, antara lain *Oposisi Sastra Sufi* (2003), *Biarkan Dia Mati* (2003), *Politik dan Budaya Kejabatan* (2015), dan *Kebudayaan Sebagai Tersangka* (2016), *Sastra, Negara, dan Politik* (2019), dan *Biokultural: Dari Fantasi Kerakyatan hingga Menolak Identitas* (2020). Untuk buku puisi, *Mantra Bumi* (2016), dan *Suluk Bagimu Negeri* (2017). (AZ).